

MASYARAKAT CINA

KETAHANAN NASIONAL
DAN INTEGRASI BANGSA
DI INDONESIA

Dr. H. Tarmizi Taher



PPIM - JAKARTA

Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

Dr. H. Tarmizi Taher

Masyarakat Cina,
Ketahanan Nasional
dan Integrasi Bangsa
di Indonesia



Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
1997

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Taher, Tarmizi, Haji

Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi
Bangsa di Indonesia/ H. Tarmizi Taher.—Jakarta: CENSIS,
1997,

ix, 255 hlm.; 23 cm

Bibliografi : hlm. 235

ISBN 979-95248-1-4

1. Cina—Politik Luar Negeri—Indonesia.

I. Judul

327.560 598

© Copy Rights Reserved

Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM), Jakarta

Jalan Kertamukti no. 5, Pisangan Barat, Ciputat 15419
Indonesia, tlp. 7423543, 7499272, fax. 7423543
E-mail, ppim@cbn.net.id

Cover: Zulkifli

Lay out: Heni Nuroni

Daftar Isi

Daftar Isi, *v*

Pengantar, *vii*

Bab I

- Masyarakat Cina,
Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa:
Sebuah Pengantar Masalah, 1
- Hakekat Pembangunan, 4
 - Warga Keturunan dan Ketahanan Nasional, 17

Bab II

- Masyarakat Cina dalam Sejarah Nusantara, 29
- Migrasi Cina ke Nusantara, 31
 - Cina dan Sriwijaya, 35
 - Cina dan Majapahit, 40
 - Cina dan Penjajahan Barat, 47
 - Cina dan Kemerdekaan Indonesia, 64

Bab III

- RRC sebagai Adidaya Baru dan Cina Perantauan:
ke Arah Pembentukan "Cina Raya"?, 81
- RRC: Dari Mao hingga Deng, 82
 - Reformasi Ekonomi:
Sosialisme Plus Pasar Bebas, 90
 - Pertumbuhan Militer dan Kebijakan
Luar Negeri RRC, 98
 - RRC dan Cina Perantauan:
Ke Arah Penciptaan "Cina Raya"?, 103

Bab IV

Pembauran Pri-Nonpri:

Masalah yang belum Tuntas, 111

- Keturunan Cina di Indonesia Dewasa ini, 112
- Upaya-upaya ke Arah Pembauran, 124
- "Masalah Cina:"
Belum Tuntasnya Pembauran, 129
- Sebab-sebab Belum Tuntasnya
Pembauran, 149

Bab V

Mentalitet Cina dan Pribumi:

Sebuah Perbandingan, 157

- Mentalitet Komunitas Cina, 159
- Mentalitet Pribumi, 171
- Pergeseran dan Perbaikan, 183

Bab VI

Masyarakat Cina dalam Konteks Ketahanan
Nasional: Catatan Penutup, 195

- Sekilas tentang Ketahanan Nasional, 197
 - *Aspek Ideologi*, 200
 - *Aspek Politik*, 200
 - *Aspek Ekonomi*, 202
 - *Aspek Sosial-Budaya*, 203
 - *Aspek Hankam*, 204
- Masyarakat Cina dan Ketahanan Nasional, 205

Apendiks

- Peringkat 105 orang terkaya ASEAN 1996, 211
- 200 Cina Terkaya Indonesia, 217

Bibliografi, 235

Indeks, 245

Riwayat Hidup Penulis, 253

Kata Pengantar

Buku yang kini ada di tangan pembaca merupakan hasil dari rangkaian kajian yang telah berjalan cukup lama. Naskah awal buku ini ditulis sekitar 1976 ketika penulis sedang mengikuti Sekolah Komando (SESKO) ABRI Bagian Laut III. Dalam bentuk Taskap, naskah tersebut berjudul "Masalah Cina dalam Ketahanan Nasional Indonesia." Penulis memang sengaja memilih kajian Cina sebagai tugas akhir. Pengalaman penulis sendiri selama bertugas di Daerah Angkatan Laut 2 Kepulauan Riau banyak memberi inspirasi. Penulis menemukan bahwa seakan-akan keturunan Cina di Indonesia merupakan komunitas *outsiders*, *outlaw* dan *lawless*. Keadaan ini telah berlangsung lama dan memiliki akar historis yang sangat panjang mulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara.

Hal lain yang juga mendorong penulis mengkaji masalah ini adalah kenyataan tentang program pembangunan yang saat itu sedang giat dilaksanakan. Di satu sisi pemerintah Orde Baru berusaha mengatasi persoalan mendasar yang dialami rakyat melalui peningkatan kehidupan ekonomi; namun di sisi lain, disparitas pendapatan antara pri-non-pri sangat mencolok. Penulis sampai pada kesimpulan, jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka masalah Ketahanan Nasional Indonesia akan terganggu.

Seperti halnya perbincangan lain yang menyangkut suku, ras, agama dan golongan, masalah Cina —khusus-

nya saat itu— tergolong sangat sensitif untuk dibicarakan di depan umum. Oleh karenanya, naskah Taskap yang telah disusun tidak dipublikasikan. Penulis hanya bisa memberikan informasi dan melakukan diskusi dengan kelompok yang lingkupnya terbatas. Namun demikian, sepanjang periode sesudahnya, penulis berkesempatan untuk bertukar informasi melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara periodik. Misalnya, sudah lama penulis dipercaya untuk memberikan ceramah tentang masalah Cina dalam Kursus Ketahanan Nasional maupun Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

Melalui diskusi-diskusi tersebut penulis mendapat kesan kuat bahwa sudah saatnya masalah Cina dibicarakan secara terbuka. Seiring dengan kemajuan informasi dan pendidikan, masyarakat tidak lagi mudah untuk menerima atau menolak informasi. Mereka semakin terbiasa untuk membandingkan dan menyeleksi informasi yang didapat. Sementara pada saat yang sama, persoalan Cina sendiri juga membutuhkan suatu pemecahan yang bersifat terbuka, jujur dan adil. Harus diakui bahwa Orde Baru sedikit banyak telah berhasil membuka eksklusivitas kultural komunitas keturunan Cina; tetapi juga harus diakui bahwa jarak ekonomi dan politik pri-nonpri masih tetap terasa hingga kini.

Atas dasar pertimbangan ini, penulis berusaha mengembangkan naskah Taskap untuk dipublikasikan dalam bentuk buku. Masukan-masukan yang penulis peroleh dari berbagai kesempatan diskusi cukup membantu memperluas cakupan pembahasan. Selain itu, penulis juga banyak memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya dalam pengumpulan data-data baru. Oleh karenanya, penulis merasa bersyukur bahwa di sela-sela kesibukan tugas sebagai Menteri Agama buku ini dapat terbit.

Tentu saja, dalam bahasa kedokteran, buku ini tidak dimaksudkan sebagai "obat" atau "resep" untuk menyem-

buhkan “penyakit” yang menyerang hubungan pri-non-pri. Buku ini lebih dimaksudkan sebagai *urun-rembug* seorang warga negara Indonesia terhadap keberlangsungan proses pembangunan kehidupan bangsa. Harapan utama dari penerbitan buku ini adalah terbukanya ruang diskusi dan tukar-pandangan bagi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan pri-nonpri. Oleh karenanya, penulis merasa senang jika pembaca dapat mengambil manfaat dari isi buku ini. Sebaliknya, penulis juga akan berterimakasih jika ada di antara pembaca yang ingin menyampaikan masukan lain dan kritik.

Jakarta, 8 Oktober 1997

Dr. H. Tarmizi Taher

.....

.

.

.....

BAB I

Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa: Sebuah Pengantar Masalah

.... There may be times when it is wisest to let sleeping dogs lie, lest one arouse passionate arguments, or animosities that might otherwise remain dormant; but to treat problems of this kind as if they were best ignored is a very dubious strategy in the long run, for they are not likely to disappear unless deliberate efforts are made to resolve them and all friends of Indonesia and of the Overseas Chinese must hope they will be resolved.

J.A.C. Mackie

Kajian ini sama sekali tidak berpretensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunitas Cina perantauan atau warga keturunan Cina di Indonesia. Hal ini, terutama, dalam hubungannya dengan masalah pembauran di satu pihak, dan posisi mereka dalam konteks integrasi serta ketahanan nasional di pihak lain. Selain jalinan persoalannya rumit, dimensi yang terkait di dalamnya sangat beragam. Masalahnya sendiri telah muncul jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dan terus bergulir hingga sekarang. Rentang waktu yang panjang telah membuat persoalan-persoalan yang bersifat historis, kultural, politis dan ekonomis menjadi tumpang tindih. Karenanya, tidak ada satu dimensi pun yang benar-benar dapat dipilah atau dipisahkan dari yang lain. Misalnya, adanya perasaan tertentu atau ketidaksenangan sebagian kalangan pribumi terhadap war-

ga keturunan Cina bukan semata-mata muncul karena persoalan-persoalan yang bersifat ekonomis. Akan tetapi, adanya rasa curiga dan terbentangnya jarak sosial antara pri-nonpri yang cukup lebar dapat pula diakibatkan oleh berkembangnya persepsi tentang perbedaan identitas atau juga karena posisi politik.

Disadari atau tidak, posisi warga keturunan Cina dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara masih menyimpan sejumlah persoalan. Di sana-sini masih sering terlontar rasa ketidaksukaan yang diarahkan kepada warga keturunan —meskipun tidak dalam jumlah yang bersifat menyeluruh (*in toto*). Demikian pula halnya dengan predikat-predikat pejoratif yang menandai adanya karakter dan sifat anggota komunitas keturunan ini. Tidak jarang mereka dipandang sebagai *homo economicus* yang tidak peduli terhadap lingkungan di mana mereka berada. Karenanya, loyalitas dan rasa kebangsaan mereka terhadap negara masih sering digunjingkan. Walau kebanyakan tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan negeri leluhur (Cina daratan), mereka masih sering dianggap sebagai “orang asing” dan bukan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Kesamaan tempat lahir, praktik budaya, bahasa, atau status kependudukan belum mampu menghapus kesan bahwa mereka adalah komunitas pendatang. Berbeda halnya dengan —misalnya— komunitas Arab. Meskipun sama-sama merupakan warga keturunan asing, mereka relatif lebih dapat diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia, paling tidak, jika diletakkan dalam konteks integrasi atau pembauran politik dan sosial-budaya.

Pandangan seperti ini, atau situasi yang sangat sensitif dan tidak sehat itu, sama sekali tidak menguntungkan. Hal ini berlaku bagi warga keturunan maupun masyarakat Indonesia yang lain. Dalam situasi-situasi tertentu, perbedaan yang dimiliki oleh dua komunitas tersebut terasa lebih tajam, dan sering dijadikan alasan untuk mengembangkan rasa kecurigaan dan tuduhan. Ketika masyarakat pribumi tidak puas

terhadap situasi yang ada, komunitas keturunan dapat dengan mudah menjadi sasaran kecurigaan dan sebagainya. Sebaliknya, tuntutan keadilan ekonomi yang datang dari rakyat kecil sering ditanggapi secara dingin oleh sebagian warga keturunan yang dari segi materi memang sangat berlimpah.

Sudah barang tentu, tidak semua kecurigaan-kecurigaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Cukup banyak warga keturunan yang miskin atau tidak seberuntung kolega-koleganya yang lain, khususnya jika dilihat dari sudut ekonomi maupun dalam konteks status sosial-politik yang lebih luas. Sama seperti komunitas miskin lain, mereka hidup susah dengan profesi dan keahlian yang kurang begitu menjanjikan. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai petani, buruh kasar, nelayan maupun pedagang kaki lima. Sebaliknya, tidak sedikit pribumi yang kaya, menjadi profesional, atau bahkan yang tidak peduli dengan nilai-nilai keadilan serta rasa kebangsaan. Patut disayangkan, kenyataan yang lebih empirik ini tetap belum mampu mencairkan persoalan warga keturunan *vis-a-vis* pribumi. Ganjalan serta jarak sosial tetap saja mengemuka; bahkan ungkapan ketidakserasian tersebut sering muncul dalam bentuk konflik fisik atau kekerasan massa. Oleh karena itu, baik pribumi maupun warga keturunan perlu menyimak kembali posisi masing-masing. Mereka perlu saling belajar dan memahami kelemahan serta kelebihan yang dimiliki. Lebih dari itu, dibutuhkan sebuah intervensi yang tegas dari negara untuk memperlancar proses tersebut.

Bagaimanapun, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pri-non pri ini secara lebih bermakna, transparan, dan tuntas. Perjalanan setengah abad dari bangsa sebenarnya merupakan modal yang cukup untuk menciptakan struktur sosial-budaya, ekonomi maupun politik yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan nasional. Program pembangunan yang telah berjalan lebih dari 25 tahun juga telah menciptakan situasi yang kondusif bagi peman-

tapan rasa kebangsaan. Jika tidak ada upaya serius dari semua pihak yang terlibat, masalah yang seringkali terpendam ini akan dapat merusak kondisi kesatuan dan persatuan yang telah dibangun dengan susah payah sejak awal kemerdekaan.

Dalam perspektif demikian, hal ini berarti bahwa persoalan pri-nonpri tidak lagi sekedar masalah ekonomi. Lebih dari itu, hal tersebut telah menjadi salah satu agenda penting dari pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, evaluasi terhadap masalah tersebut hendaknya merujuk kembali pada hakekat serta prinsip-prinsip pembangunan.

Hakekat Pembangunan

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil-spirituil, yang merata berdasarkan Pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹

Pencapaiannya harus dilandaskan pada Wawasan Nusantara yang mempunyai makna bahwa seluruh wilayah tanah air merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, ketahanan dan keamanan.² Kesatuan bidang-bidang ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Semuanya saling berkait dan membentuk suatu rangkaian yang akhirnya berwujud pada kesadaran dalam berbangsa.

Keragaman bangsa Indonesia bukanlah alasan untuk memisah-misahkan bidang kehidupan masyarakat. Justru, dalam konteks Indonesia, bahkan mungkin juga negara manapun, kemajemukan itu merupakan modal, kekuatan dan dasar pijak bagi keinginan untuk tetap bersatu dan mewujudkan kebersamaan. Kesatuan politik mengandaikan bahwa Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah

1. Lihat, *Tap-Tap MPR 1993, P4, UUD '45* (Jakarta: Bina Mulia, tt.), Bab II Pembangunan Nasional, halaman 17.

2. *Tap-Tap MPR 1993, P4, UUD '45*, halaman 20-21.

yang utuh, meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Dalam kehidupan bersama sebagai bangsa maupun dalam pergaulan internasional, rakyat Indonesia adalah satu. Hak dan kewajiban mereka di depan hukum adalah sama, dan tidak satu pun anggota masyarakat yang berhak mendapatkan pengecualian.

Fenomena kemajemukan sosial dan budaya juga bukan ungkapan untuk meniadakan kebersatuan. Sejarah telah banyak mengajarkan bahwa kesamaan nasib serta cita-cita telah mengubah kemajemukan menjadi kekuatan menuju kebersamaan. Kenyataan ini sama sekali tidak berarti bahwa kemajemukan tersebut harus ditanggalkan dan diganti dengan keseragaman. Bagaimanapun, kemajemukan adalah kekayaan, potensi, dan keunikan yang harus tetap dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan. Masalahnya lebih terletak pada cara mengatur keragaman tersebut agar tetap berwujud sebagai kekayaan. Oleh karenanya kebutuhan akan bingkai kesatuan menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam hal ini, Pancasila telah memerankan fungsinya secara efektif dan teruji.

Sama seperti keberadaan negara Indonesia, kondisi kesatuan dan persatuan bukanlah sesuatu yang *given* —yang terciptakan dengan sendirinya. Sebaliknya, ia muncul dari kesadaran dan usaha yang disengaja dari seluruh bangsa melalui perjuangan panjang. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kondisi yang dapat mendorong terwujudnya kesatuan. Di antaranya adalah suasana politik, sosial dan budaya yang dapat memberi peluang sama bagi masyarakat untuk merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sesama warga. Negara harus mampu menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial maupun budaya. Negara juga harus mampu menyediakan aturan yang adil bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa tidak hanya pembangunan politik dan budaya yang membutuhkan persatuan. Pada waktu yang sama, implementasi persatuan juga memerlukan prasyarat politik maupun budaya.

Sebagai bagian dari Wawasan Nusantara, sektor ekonomi merupakan satuan yang membutuhkan aspek-aspek lain. Kesatuan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa kesatuan politik, budaya maupun ketahanan nasional. Sebaliknya, semua bidang kesatuan juga tidak mungkin tercapai tanpa dukungan ekonomi. Semuanya terkait, dan atas dasar pemikiran tersebut, penegakan dan pengisian Wawasan Nusantara merupakan perjuangan tanpa ujung dan berlanjut dalam suatu strategi pembangunan nasional. Ia merupakan implementasi cita-cita bangsa yang berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Dapat dikatakan bahwa kondisi stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bangsa Indonesia sebelum masa Orde Baru masih rentan. Sebagai bangsa yang baru lahir, Indonesia belum memiliki format kehidupan yang jelas; hampir semuanya masih bersifat eksperimental. Fenomena ini tampak, misalnya, dalam bidang politik maupun ekonomi.³ Sejak kemerdekaan hingga munculnya pemerintah Orde Baru beberapa model negara dan sistem pemerintahan pernah diterapkan. Di antaranya adalah Negara Kesatuan, Negara Serikat, Pemerintahan Parlemen dan Presidential. Kecenderungan yang sama juga terjadi dalam bidang ekonomi, di mana bangsa Indonesia pernah menerapkan sistem kapitalis, sosialis maupun koperasi. Meskipun, dalam hal ini, kesemuanya itu berjalan secara tidak tegas.

Fenomena ini tampak sebagai sesuatu yang sulit dilakukan. Saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk membangun dan menjalankan kehidupan sosial-politik berdasarkan model negara-bangsa. Sebab, konsep negara-bangsa sendiri baru merebak di kalangan masya-

3. Sistem politik yang diterapkan pada 1950-1957, misalnya, disebut oleh M. C. Ricklefs sebagai eksperimen demokrasi (*democratic experiment*). Lihat *A History of Modern Indonesia* (London: The Macmillan Press Ltd., 1981) halaman 225.

rakat Asia pada awal abad kedua puluh. Sebelumnya konsep tersebut baru dikenal secara terbatas oleh masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara. Pengalaman politik yang lebih banyak diketahui masyarakat Indonesia adalah politik kolonialisme dan, bagi beberapa kalangan, pemerintahan yang bertumpu pada sistem kerajaan. Sementara itu, sebagian besar dari mereka yang kemudian menempati posisi penting dalam pemerintahan, tidak memiliki pengalaman banyak sebagai elite politik nasional.

Ketika bangsa Indonesia memasuki gerbang kemerdekaan, segalanya tidak lagi dimulai dari awal. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak berada dalam situasi vakum, melainkan telah mewarisi situasi sosial yang telah tercipta sebelumnya. Polarisasi antara pribumi dan warga asing —khususnya keturunan Cina—, misalnya, telah tercipta ratusan tahun sebelumnya. Perbedaan orientasi ideologis, agama, politis, sosial dan budaya juga telah terbentuk jauh sebelum masyarakat Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, selain disebabkan oleh kekurangan pengalaman, bangsa Indonesia menghadapi berbagai kesulitan dalam menyatukan visi serta mencari kerangka berfikir yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut.

Kendatipun demikian, dalam situasi yang serba sulit itu, bangsa Indonesia ternyata mampu mengatasi beberapa agenda kebangsaan yang paling mendasar. Setelah melalui liku-liku panjang serta perdebatan sengit, mereka sepakat untuk bersama-sama berada dalam satu negara dan identitas bangsa. Mereka berhasil merumuskan Pancasila dan UUD 1945 yang dipandang dapat menjadi acuan kehidupan bersama. Sayangnya, semangat dan ketulusan tersebut tidak serta-merta menjamin kelancaran proses implementasi cita-cita kemerdekaan.

Sistem kehidupan politik yang kemudian muncul, misalnya, belum sanggup mengakomodasikan keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan berbagai kelompok dan golongan.

Setiap golongan menawarkan konsep ideal dan berusaha memenuhi kepentingannya masing-masing. Akibatnya, situasi sosial-politik di masa Orde Lama lebih banyak diwarnai oleh proses negosiasi, tawar-menawar, friksi dan konflik antarberbagai kelompok. Ada kalanya perbedaan tersebut dapat diatasi dengan baik sebagaimana yang tercermin dalam perumusan ideologi dan landasan negara, tetapi tak jarang perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang kemudian menyebabkan munculnya friksi dan perpecahan. Kecenderungan terakhir memuncak ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan kudeta-gagal pada 1965 yang sekaligus mengakhiri periode pemerintahan Orde Lama.

Ketika kekuatan Orde Baru tampil di panggung kepemimpinan nasional, situasi politik bangsa Indonesia terancam ambruk. Konflik ideologis dan politik sudah demikian akut, sehingga kecurigaan antargolongan tidak lagi menjadi peristiwa aneh. Gambaran tersebut dapat dilihat jelas dalam peristiwa G 30 S/PKI, di mana banyak jiwa menjadi korban dari ambisi dan kecurigaan yang melanda sebagian rakyat Indonesia. Sebagian mati karena terlibat dalam konflik, tetapi—sebagaimana yang terbukti di kemudian hari—sebagian lagi adalah korban dari alasan yang kurang jelas.⁴

Dalam hal ini jelas, pihak yang paling banyak menderita dari situasi yang serba gamang itu adalah rakyat biasa. Mereka tidak dapat ikut berpartisipasi dalam proses negosiasi yang melibatkan energi dan kemampuan yang demikian besar. Akan tetapi mereka segera dapat merasakan kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai konflik di tingkat atas. Kebangkrutan ekonomi, misalnya, yang timbul akibat berlanjutnya gontok-gontokan politik (*political bickering*) sebagian elite nasional ke-

4. Lihat, Rex Mortimer, "The Place of Communism" dalam *Studies in Indonesian History* (Carlton: Pitman Publishing Pty Ltd., 1976) halaman 180-201.

tika itu, lebih banyak diderita oleh rakyat biasa daripada mereka yang duduk di posisi tinggi. Sebagaimana yang terungkap dalam Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), situasi ekonomi saat itu benar-benar telah membuat rakyat hidup dalam kesulitan besar. Harga pangan membubung tinggi dan inflasi mencapai 650 %.⁵ Banyak komoditi pangan yang tidak tersedia di pasar, karena pembangunan ekonomi macet dan boikot beberapa negara yang biasanya memasok kebutuhan pangan bangsa Indonesia.

Jika pangan, yang merupakan kebutuhan paling dasar, mengalami kekurangan, maka dapat dipastikan kebutuhan lain seperti sandang, papan, pendidikan dan kesehatan juga mengalami kelangkaan. Sebagai contoh, pada 1969 —masa di mana pemerintah Orde Baru mulai membangun— hanya tersedia 63.000 Sekolah Dasar, 5.600 Sekolah Menengah Pertama dan 2.100 Sekolah Menengah Atas.⁶ Pada tahun yang sama hanya terdapat 1.058 Puskesmas, 7.590 Puskesmas Pembantu, dan belum ada Puskesmas Keliling.⁷ Jumlah tersebut harus melayani jumlah penduduk Indonesia yang saat itu mencapai kurang lebih 100 juta jiwa. Dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 20.000 per tahun, sebagian besar bangsa Indonesia saat itu praktis dapat dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan.

Melihat persoalan yang begitu kompleks, tidak berlebihan jika keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru merupakan prestasi tersendiri, yang begitu mencolok dalam perjalanan sejarah Indonesia moderen. Mereka telah mem-

5. Data statistik mengenai hasil pembangunan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS). Lihat, *Orde Baru Dalam Angka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1992) halaman 12.

6. *Orde Baru Dalam Angka*, halaman 144-145.

7. *Orde Baru Dalam Angka*, halaman 154.

buktikan diri sebagai elit politik yang mampu keluar dari kemelut dan menciptakan berbagai perbaikan. Di antara prestasi yang perlu dicatat adalah kemampuannya dalam menciptakan stabilitas politik, keamanan, ekonomi serta menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan. Bidang-bidang ini telah mengalami perubahan secara signifikan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Lebih dari itu, pemerintah Orde Baru telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki era teknologi dan mentransformasikan bangsa —sampai tingkat-tingkat tertentu— dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Dalam rangka membenahi kehidupan politik, pemerintah Orde Baru, antara lain, merumuskan kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik serta mengajak masyarakat untuk berorientasi pada pembangunan nyata. Langkah ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah partai yang begitu banyak di zaman Orde Lama serta kegiatan partai sampai ke tingkat paling bawah (desa), telah memaksa rakyat untuk mengarahkan sebagian besar perhatian dan enersi mereka pada kehidupan “politik praktis.” Padahal, sebagai masyarakat yang baru bangkit dari situasi terjajah, kebutuhan dasar mereka harus terpenuhi terlebih dulu. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi politik tertentu, mengajak partai-partai politik yang ada untuk bergabung (fusi) dalam wadah yang lebih sederhana. Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul sebagai tempat bagi partai-partai Islam (e.g. Parmusi, NU, Perti, dan PSII) untuk bergabung. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan *amalgam* dari PNI, partai Katolik dan Kristen. Organisasi sosial politik lainnya, yang secara resmi diakui pemerintah adalah Golongan Karya (Golkar). Pemerintah Orde Baru juga membuat kebijakan bahwa partai politik hanya boleh mendirikan cabang sampai Daerah Tingkat II dan Kotamadya. Kebijakan

ini dikenal sebagai konsep massa mengambang (*floating mass*).⁸

Kebijakan ini cukup strategis, dalam konteks menstransformasikan kehidupan politik yang dulu terasa sangat hingar bingar. Dengan itu, konflik sosial, dan sampai batas-batas tertentu politik-ideologis, yang dipicu oleh kepentingan afiliasi politik menjadi berkurang. Antara lain karena strategi kebijakan seperti ini, stabilitas politik dapat dibangun. Stabilitas tersebut semakin diperkokoh dengan adanya kebijakan tentang perlunya semua organisasi politik dan —kemudian— sosial-kemasyarakatan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Langkah-langkah ini telah mengurangi adanya konflik-konflik politik. Demikian pula, hal itu telah menghilangkan perbedaan-perbedaan ideologis dalam konteks pengalaman lama. Dengan itu, pemerintahan Orde Baru mampu mengendalikan situasi politik dan sekaligus keamanan. Selama pemerintahan Orde Baru berkuasa jarang sekali terdengar isu regionalisme atau pemberontakan daerah yang di zaman Orde Lama cukup keras gaungnya.

Keberhasilan di bidang politik dan keamanan tersebut tidak mungkin bertahan lama jika pemerintah Orde Baru tidak membangun bidang-bidang lain yang mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk menciptakan stabilitas. Oleh karenanya sejak awal pemerintah Orde Baru telah merencanakan program pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jika kebijakan politik luar negeri pemerintah Orde Lama sering dipandang agresif, maka pemerintah Orde Baru lebih menerapkan kebijakan yang bersifat pragmatis. Mereka membangun kembali hubungan diplomatik dan keanggotaan Indonesia di Persatuan Bangsa-

8. Lihat, R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1994) halaman 39-40.

Bangsa (PPB) yang sempat terputus pada zaman Orde Lama. Pemerintah Orde Baru juga tidak ragu-ragu untuk masuk menjadi anggota lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) atau Asian Development Bank (ADB). Langkah-langkah ini telah ikut mengakhiri boikot ekonomi beberapa negara maju terhadap Indonesia serta melancarkan arus masuk bantuan luar negeri serta investasi asing ke negeri ini. Langkah tersebut terus berlanjut dan ternyata mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak 1969 tercatat sebesar 6,8 %, melebihi target yang dicanangkan setiap Pelita sebesar 5 %.⁹

Hasil pembangunan ekonomi telah meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia dari Rp 20.000 menjadi Rp 1.038.000 pada 1991. Itu berarti kenaikan 51 kali lipat.¹⁰ Pada kurun waktu yang sama inflasi turun menjadi 9,5% dari 650% pada 1966. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto dari Rp. 27 trilyun pada 1969 menjadi Rp 226,5 trilyun pada 1991. Maka, meskipun jumlah penduduk meningkat, jumlah rakyat miskin terus berkurang. Dalam hal ini, jika pada 1976 jumlah penduduk miskin adalah 54,2 juta, maka pada 1990 angka tersebut turun menjadi 27,2 juta jiwa. Sementara itu, penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga terus bertambah. Pelita I mencatat penerimaan sebesar Rp. 3.283,2 milyar. Selama empat tahun Pelita V angka tersebut naik menjadi Rp. 195.722,6 milyar. Sedangkan pengeluaran pembangunan selama Pelita I tercatat sebesar Rp. 1.278 milyar. Angka itu naik menjadi Rp. 77.969 milyar selama empat tahun Pelita V.

Kenaikan dalam sektor ekonomi memberi imbas yang besar pada peningkatan sektor lain seperti pendidikan dan

9. *Orde Baru Dalam Angka*, halaman 7.

10. Lihat indikator ekonomi dalam *Orde Baru Dalam Angka*, halaman 22-37.

kesehatan.¹¹ Jumlah Sekolah dasar naik lebih dua kali lipat dalam kurun waktu 1969-1991. Jumlah Sekolah Menengah Pertama naik hampir empat kali lipat dalam kurun yang sama. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas naik 5,5 kali lipat. Jumlah lembaga Pendidikan Tinggi naik 3,5 kali lipat. Sementara itu, kelompok usia sekolah laki-laki yang masuk SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 1971-1990 masing-masing naik dari 61,7 % menjadi 91,4%; 49,4 % menjadi 66,8 %; dan 27,9 % menjadi 44,5 %.

Pelayanan kesehatan juga berkembang dengan baik, di mana dalam kurun waktu 1969-1991 jumlah Puskesmas naik dari 1.058 menjadi 6.103; Puskesmas Pembantu naik dari 7.590 menjadi 16.340; dan Puskesmas Keliling dari tidak ada menjadi 4.254. Pos Pelayanan Terpadu yang mulai dibangun pada 1986 telah bertambah menjadi 267.994 pada 1991. Sementara jumlah dokter naik dari 5.000 pada 1968 menjadi 26.798 pada 1991. Dalam kurun waktu yang sama tenaga perawat juga naik dari 7.630 menjadi 99.778. Jika pada 1972 jumlah apotek di Indonesia adalah 1.105, maka pada 1991 jumlah tersebut naik menjadi 3.118. Sedangkan jumlah industri farmasi naik dari 144 menjadi 257 dalam kurun waktu yang sama.

Angka-angka tersebut dapat dijadikan ilustrasi bahwa pemerintah Orde Baru telah menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Perlu pula dicatat bahwa kecenderungan kenaikan yang tertuang dalam angka di atas tidak hanya berlaku pada sektor moneter, pendidikan dan kesehatan. Bidang-bidang lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, tenaga kerja, fasilitas agama, perumahan dan penerangan juga mencatat kenaikan yang cukup besar. Maka dibandingkan negara-negara Dunia Ketiga lainnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mencatat prestasi tinggi.

11. Untuk indikator pendidikan dan kesehatan, lihat *Orde Baru Dalam Angka*, halaman 144-160.

Dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai Taiwan, Korea Selatan atau Singapura, Indonesia masih terbelang rendah. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan, Tengah maupun Amerika Latin dan sebagian besar negara-negara Afrika, pertumbuhan Indonesia terbilang tinggi.

Sejak awal telah disadari bahwa program pembangunan bukanlah persoalan mudah dan sederhana. Sama seperti ketika memasuki kemerdekaan, pada saat program pembangunan dicanangkan, pemerintah Orde Baru juga mewarisi masalah-masalah lama. Pada saat yang sama, pemerintah Orde Baru juga menghadapi persoalan-persoalan baru. Tantangan yang muncul semakin berat manakala sejak awal dipahami bahwa pembangunan hendaknya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan dan sebagainya.

Sebagaimana yang termaktub dalam Strategi Pembangunan Nasional, hakekat sasaran program pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, proses pembangunan tidak boleh terfokus semata-mata pada perbaikan sektor-sektor tertentu dan mengabaikan aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, program pembangunan hendaknya berjalan pada proses keseimbangan yang mencakup (1) keseimbangan pembangunan materiil dan spirituil; (2) keseimbangan pembangunan antar-kelompok masyarakat; dan (3) keseimbangan pembangunan antar-daerah.¹²

Hilangnya salah satu keseimbangan di atas akan menyebabkan ketimpangan di segala sektor. Jika pembangunan hanya memfokuskan pada peningkatan bidang ma-

12. Untuk keterangan lengkap mengenai Prinsip dan Asas Pembangunan Nasional, lihat, *Tap-Tap MPR 1993*, halaman 17-18.

teriil, misalnya, keseimbangan antarkelompok akan terganggu. Rakyat tidak akan memiliki pegangan ideologi serta nilai-nilai kebersamaan yang dapat menjaga keseimbangan antarkelompok maupun antardaerah. Begitu pula, jika pembangunan tidak memperhatikan keseimbangan antarkelompok, maka peningkatan kehidupan materiil dan spirituil juga akan terganggu. Akibat lebih lanjut adalah munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Masalah keseimbangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan, tampak menjadi agenda persoalan bagi setiap negara. Meskipun pemerintah Orde Baru telah berhasil melakukan koreksi atas kegagalan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, masalah keadilan tetap saja masih mengemuka. Pada zaman pemerintahan Orde Lama persoalan ketidakadilan ini banyak dimunculkan melalui simbol-simbol yang berkaitan erat dengan semangat revolusi kemerdekaan. Misalnya, persoalan ketidakadilan ekonomi ketika itu diangkat dengan menggunakan simbol "anti-imperialisme," "anti-kolonialisme" atau "anti-Barat." Kelihatan bahwa warna politis kehidupan masyarakat pada waktu itu sangatlah kuat. Sesuai dengan semangat dan agenda zamannya, jargon-jargon politik menjadi wahana yang efektif untuk mengungkap berbagai bentuk persoalan ketidakadilan.

Pada masa Orde Baru, jargon-jargon seperti itu relatif tidak begitu bergaung. Simbolisme seperti itu cenderung melemah atau mulai kehilangan daya tarik. Sebagai gantinya, ungkapan ketidakadilan muncul dalam bentuk yang lebih nyata dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari. Di antara yang paling sering terdengar adalah jargon tentang "pemerataan," "kemitraan," "adanya jurang antara kelompok kaya dan miskin," "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," dan sebagainya. Dalam konteks internasional, juga muncul kecenderungan yang kurang lebih sebanding atau sama. Hal ini ditandai antara lain oleh berkembangnya istilah "Dunia Pertama *vis-a-vis* Dunia Ketiga," "negara-

negara Utara dan Selatan," "negara berkembang versus negara maju," "kelompok negara G-7," dan sebagainya.

Mempertimbangkan itu semua, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat dewasa ini adalah masalah keadilan ekonomi. Oleh karenanya, simbol kebebasan yang dulu pernah populer —*liberte, egalite, fraternite*— tampak harus diterjemahkan ulang dengan memasukkan dimensi ekonomi sebagai salah satu unsur utamanya.

Pada masa perjuangan, proklamasi kemerdekaan merupakan modal utama untuk mewujudkan cita-cita hidup sebuah bangsa. Tanpa kemerdekaan suatu bangsa tidak mungkin dapat memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan itu berfungsi sebagai modal utama suatu bangsa, khususnya mereka yang terjajah. Akan tetapi, jika diletakkan dalam konteks persoalan dewasa ini, proklamasi kemerdekaan semata tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai modal utama. Melengkapi proklamasi kemerdekaan, yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah modal dalam pengertian tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya dana yang dapat digunakan untuk membangun. Saat ini negara dan bangsa mana pun di dunia saling berebut mencari modal ekonomi; masing-masing berusaha menawarkan sejumlah insentif dan keleluasaan kepada kelompok-kelompok yang dipandang memiliki modal. Sesuai dengan strategi pemerintah Orde Baru, Indonesia tampak menjadi salah satu negara yang berhasil mendatangkan modal tersebut. Tercatat, misalnya, penerimaan bantuan luar negeri Indonesia secara absolut naik dari Rp. 708,6 milyar pada Pelita I menjadi Rp. 39.343,2 milyar dalam Pelita V.

Sekalipun demikian, Indonesia tetap belum dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan global di atas. Bagaimanapun, efektivitas pembangunan nasional hendaknya mampu menjamin tercapainya pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, "kue pembangunan" secara relatif dapat

dinikmati seluas-luasnya oleh keluarga bangsa Indonesia. Hendaknya dihindari munculnya kelompok masyarakat yang hanya dapat melihat bahwa program pembangunan nasional telah menghasilkan sesuatu, tetapi mereka tidak ikut menikmatinya. Tentu hal ini bukan berarti bahwa hasil pembangunan yang selama ini telah diperoleh harus dibagi rata di antara anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hasil pembangunan itu sedapat mungkin menyentuh kebutuhan rakyat banyak. Pembangunan sama sekali tidak ditujukan bagi segelintir orang atau kelompok, yang pada akhirnya hanya akan melahirkan kesenjangan dan kerawanan sosial-ekonomi. Karenanya, pelaksanaan pembangunan nasional hendaknya tetap berlandaskan pada asas yang telah dirumuskan bersama. Termasuk di dalamnya adalah asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta perikehidupan dalam keseimbangan.

Kelima asas tersebut mengandaikan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat dan perkembangan pribadi warga. Hal itu harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui usaha bersama dan cara-cara kekeluargaan. Segala bentuk keputusan harus pula mengacu pada asas Demokrasi Pancasila yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hasil yang diperoleh bersama, baik yang materiil maupun spirituil, harus dapat dinikmati secara merata oleh segenap warga sesuai dengan dharma bhakti masing-masing. Lebih dari itu, hasil dan mekanisme pembagiannya hendaknya mampu menjamin keseimbangan hidup bangsa, baik yang berupa kepentingan materiil-spirituil, jiwa-raga, individu-masyarakat maupun nasional-internasional.

Warga Keturunan dan Ketahanan Nasional

Sulit untuk dipungkiri bahwa pembangunan yang dijalankan selama ini telah berhasil meningkatkan produktivitas nasional. Angka-angka di atas merupakan bukti yang tidak

dapat dibantah bahwa agenda pembangunan nasional telah membawa manfaat bagi kehidupan bangsa. Persoalannya adalah sejauhmana capaian-capaian tersebut telah memenuhi asas dan tujuan yang telah digariskan bersama.

Sementara itu, perlu untuk dicatat bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pembangunan nasional juga mengemban misi-misi lain yang diamanatkan dalam perumusan awalnya —khususnya sebagaimana dijabarkan dalam wawasan nusantara, prinsip-prinsip pembangunan serta asas pembangunan. Jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berhasil direalisasikan, maka apa yang disebut sebagai bangunan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia akan semakin kokoh. Sebaliknya, mudah dimengerti, bangunan Ketahanan Nasional itu akan rapuh jika ternyata proses pembangunan tidak dapat mewujudkan nilai-nilai yang telah digariskan dalam konstruk —antara lain— wawasan nusantara.

Menarik untuk diungkapkan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa yang berisi keuletan, kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam pengertian seperti itu, tersimpul jawaban atas keberhasilan bangsa dalam mengatasi berbagai persoalan — baik yang datang dari dalam maupun dari luar, sejak perjuangan kemerdekaan sampai masa pembangunan. Bersamaan dengan itu, tersimpul pula pengertian bahwa kondisi Ketahanan Nasional selalu mengalami gradasi naik dan turun. Kenyataan ini sesuai dengan kadar kemampuan bangsa dalam menghadapi gangguan serta keberhasilan mereka dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Ketahanan Nasional merupakan patokan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan bangsa dalam mewujudkan

keinginan bersama. Pada saat yang sama ia menjadi prasyarat penting bagi pencapaian keinginan tersebut. Oleh karenanya, sehubungan dengan masalah warga keturunan, Ketahanan Nasional dapat dipakai untuk mengukur derajat persoalan, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi upaya-upaya pemecahan masalah tersebut. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan yang relevan diajukan mencakup (1) bagaimana kondisi Ketahanan Nasional warga keturunan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam? (2) apakah mereka telah berada dalam kerangka yang sama dengan kelompok masyarakat Indonesia yang lain? (3) adakah perubahan-perubahan tertentu yang telah dialami komunitas keturunan sejak merdeka hingga kini? Demikian seterusnya.

Secara umum ideologi merupakan sebuah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam dan berfungsi sebagai prinsip yang mengatur (*guiding principles*) kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Ideologi dimiliki oleh suatu bangsa dan memberikan arah tentang moral yang baik dan benar serta menjadi pedoman bagi kehidupan bersama.¹³ Realisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah ideologi muncul dalam bentuk tingkah laku, proses mental dan tata cara berpikir pengikutnya. Di antara kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi ideologi adalah tradisi, lingkungan, pengalaman masa lalu, dan sistem kepercayaan.

Bagi masyarakat Cina sumber nilai yang paling pokok adalah ajaran Konfusianisme, Taoisme dan Budhisme. Ketiganya memberikan fondasi yang kokoh bagi pembentukan perilaku kehidupan sehari-hari. Namun dalam kasus Cina perantaraan sumber-sumber nilai tersebut mengalami pergeseran sejalan dengan persentuhan mereka dengan sistem nilai

13. Lihat, Alfian, "Ideologi, Idealisme dan Integrasi Nasional," *Prisma* V (8: Agustus 1976), halaman 14.

yang lain. Banyak kalangan keturunan yang telah terserap ke dalam budaya lokal; tidak sedikit pula mereka yang menjadi penganut Kristen, Islam atau menjadi sekuler. Satu-satunya sumber nilai yang masih mengikat hubungan internal mereka adalah tradisi; itu pun memiliki tingkat penetrasi yang beragam. Kasus Cina *totok* menunjukkan bahwa pengaruh tradisi Cina masih sangat kental. Sedangkan komunitas Cina *keturunan* menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki keterkaitan yang kuat —walaupun bukan berarti tidak ada sama sekali— dengan negeri leluhur.¹⁴

Masalah ideologis memang merupakan salah satu persoalan penting warga keturunan. Sejak masa perjuangan hingga zaman pembangunan, mereka sering dipersepsi sebagai kurang menghayati ideologi nasional—Pancasila. Ketika rasa kebangsaan mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, komunitas Cina lebih banyak mengembangkan rasa kebangsaan sendiri. Mereka terkesan lebih loyal kepada negeri leluhur daripada Indonesia yang jelas-jelas menjadi tempat hidup mereka. Ketika Indonesia merdeka, kecenderungan tersebut tetap berlangsung; bahkan sebagai komunitas, warga keturunan lebih memihak Belanda dan kurang bersimpati terhadap perjuangan rakyat.¹⁵

Loyalitas terhadap negeri leluhur mulai surut ketika kekuatan di Cina daratan terbelah ke dalam dua kutub ideologi: nasionalis dan komunis. Di satu sisi warga keturunan enggan menerima komunisme, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan pola hidup mereka di Indonesia. Di sisi lain mereka

14. Orientasi nilai-budaya komunitas Cina yang mengacu pada ajaran Konfusius masih bertahan hingga zaman modern. Lihat, Clyde B. Sargent, "The Chinese Mind: A Probing and Exploration," *Naval War College Review* (January, 1972), halaman 43-44.

15. Charles A. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia" dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (ed.) J. A. C. Mackie (Hongkong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976) halaman 32-33.

juga tidak dapat menolong kekalahan kaum nasionalis (Kuo-mintang). Kendati demikian, warga keturunan pada waktu itu tetap terkesan belum menerima Pancasila sepenuh hati. Bahkan di kemudian hari sebagian dari mereka terbukti menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁶

Setelah kudeta 1965 gagal, masalah ideologi warga keturunan menjadi tidak begitu jelas. Mereka tidak lagi banyak terlibat dalam persoalan politik, dan lebih berkonsentrasi pada urusan ekonomi. Pemerintah Orde Baru sendiri juga tidak banyak memberi peluang bagi warga keturunan Cina untuk berperan aktif dalam bidang di luar ekonomi —khususnya di bidang politik. Akibatnya, masalah ideologi-politik komunitas keturunan Cina seringkali menjadi masalah yang banyak dipendam, dan jarang diungkapkan secara terbuka. Kendati demikian, beberapa kalangan tetap tidak puas terhadap masalah ini. Ini dalam pengertian bahwa masih banyak pihak yang curiga tentang loyalitas warga keturunan terhadap negeri dan bangsa Indonesia. Atas pertimbangan inilah pemerintah Orde Baru mengambil prakarsa untuk, antara lain, mengadakan penataran P4 bagi pengusaha-pengusaha keturunan Cina. Karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah ideologi tetap menjadi salah satu agenda dalam memahami persoalan warga keturunan.

Hampir sama dengan masalah ideologi, warga keturunan juga sempat mengalami persoalan yang cukup pelik di bidang politik. Sesuai dengan posisi mereka sebagai orang Timur Asing, warga keturunan pada awalnya merupakan komunitas terpisah. Posisi ini mendorong sebagian dari mereka untuk tetap loyal pada Belanda, atau kepada negeri leluhur. Pada saat Indonesia merdeka mereka belum juga bersedia untuk menyatu. Sebaliknya, mereka cenderung untuk memperta-

16. Lihat, Charles A. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 55-62.

hankan integrasi internal warga keturunan. Baru di kemudian hari, sebagian warga keturunan mencanangkan politik asimilasi yang bertujuan untuk lebur bersama warga Indonesia yang lain. Di masa pemerintahan Orde Baru keinginan ini lebih terakselerasikan. Sementara itu, model orientasi politik lain tidak didorong untuk berkembang.¹⁷ Kendati demikian, gambaran yang jelas tentang orientasi politik warga keturunan masih tetap tidak jelas. Penting untuk dicatat, bahwa mereka tidak lagi membentuk satuan politik komunal.¹⁸ Sementara itu, pemerintah Orde Baru tidak banyak memberi kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam bidang politik secara aktif.

Terlepas dari itu semua, masalah yang paling mencolok pada warga keturunan menyangkut aspek ekonomi. Sejak awal mereka memunculkan dilema tersendiri. Sementara itu, kecenderungan terakhir menunjukkan bahwa masalah ekonomi belum dapat diselesaikan dengan baik. Masalahnya sendiri telah muncul sejak kedatangan Belanda di negeri ini ratusan tahun yang lampau. Oleh Belanda warga keturunan dipisahkan dari pribumi, dan dijadikan alat ekonomi yang sangat efektif. Mereka terutama dijadikan penghubung untuk memungut pajak dan menjalankan aktivitas ekonomi di luar komoditi yang dijadikan monopoli Belanda. Dalam perkembangannya kemudian, mereka juga menjadi tuan tanah yang menguasai kegiatan pertanian pribumi.¹⁹ Maka ketika Indonesia memasuki periode kemerdekaan, posisi

17. Charles A. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 21-26.

18. Salah satu sebab berakhirnya politik komunal warga keturunan adalah keterlibatan tokoh-tokoh Baperki, organisasi keturunan Cina yang sangat berpengaruh, dalam gerakan komunis di Indonesia. Lihat, Leo Suryadinata, "Indonesia Policies Towards the Chinese Minority under the New Regime," *Asian Survey* XII (8: Agustus 1976).

19. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1959) halaman 9.

ekonomi warga keturunan berbeda secara kontras dengan kekuatan ekonomi pribumi.

Pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan kebijakan untuk membendung penguasaan mereka atas ekonomi bangsa Indonesia. Berbagai pembatasan diberlakukan kepada masyarakat non-pribumi. Sementara itu, banyak kemudahan yang diberikan kepada pribumi. Akan tetapi, karena pengalaman pribumi belum memadai, kebijakan tersebut gagal. Yang muncul adalah koalisi pribumi dengan warga keturunan, atau yang populer disebut pengusaha Ali-Baba. Dalam hal ini, pihak pribumi berperan sebagai pihak yang memegang lisensi, sementara pedagang Cina adalah mereka yang menjalankan kegiatan dunia usaha hasil koalisi.

Sampai pada waktu kekuatan Orde Baru naik di panggung kepemimpinan nasional, persoalan ini tidak berubah. Meskipun secara ideologis dan politis komunitas keturunan relatif dapat dikendalikan, pemerintah Orde Baru masih belum dapat melakukan transformasi ekonomi yang lebih distributif. Secara empiris, warga keturunan merupakan pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi sangat besar. Ketika program pembangunan dicanangkan, pilihan utama terhadap pemodal domestik tetap berada di tangan warga keturunan. Bagaimanapun, harus diakui bahwa mereka lebih memiliki pengalaman di bidang dunia usaha. Adalah mereka pula yang memiliki modal untuk membiayai proyek-proyek yang dirancang oleh pemerintah. Pada saat yang sama mereka juga diuntungkan oleh investor asing yang datang untuk menanamkan modal. Mereka membangun kemitraan dengan warga keturunan dalam berbagai bidang usaha, mulai dari pengadaan pangan, kebutuhan rumah tangga hingga teknologi canggih.²⁰

20. Lie Tek Tjeng, "Unsur-unsur Kebudayaan dan Ras dalam Perasaan Anti-Jepang di Asia Tenggara," *Berita Antropologi* VII (20: Maret 1975) halaman 4.

Antara lain karena faktor historis yang semacam itu, jurang pemisah ekonomi antara pri-nonpri menjadi cukup lebar. Pemerintah tidak bisa mengatasi persoalan ini dalam waktu singkat. Atas dasar pertimbangan naluri bisnis, mereka dapat dengan mudah memindahkan kegiatan usaha ke luar negeri jika terdapat tanda-tanda bahwa kesempatan usaha mereka dihalangi. Sementara itu, pemerintah tetap membutuhkan peran mereka untuk mensukseskan program-program yang membutuhkan pembiayaan besar. Dilema ini dapat dimengerti, karena pengusaha keturunan merupakan pihak yang menguasai kurang lebih 70 % ekonomi nasional.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi terhadap politik dan masa depan Indonesia. Sebagaimana diketahui, istilah *cukong* bukan lagi merupakan ungkapan asing. Istilah ini menggambarkan pengaruh sejumlah pelaku dunia usaha warga keturunan yang begitu besar dalam menentukan kebijakan politik. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya, di mana kalangan bisnis —seperti pernah diungkapkan oleh Charless Lindblom— menempati posisi istimewa karena pengaruh ekonomi yang mereka miliki.²¹

Orientasi sosial-budaya dan masalah pertahanan-keamanan mungkin tidak begitu mendasar dibandingkan persoalan ekonomi. Menjamurnya budaya populer dan derasnya informasi telah membuat mereka masuk dalam budaya global. Kecenderungan ini juga terjadi di kalangan rakyat Indonesia lain, di mana aspek kultural yang murni dan *distinctive* tidak lagi menonjol. Hanya saja orientasi sebagian besar warga keturunan tetap mencolok. Mereka masih belum bisa menjalin benang pergaulan yang bersifat lebih leluasa

21. Charless Lindblom, *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems* (New York: Basic Books, Inc, 1977).

dengan komunitas pribumi. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya sejumlah warga keturunan yang membangun pemukiman-pemukiman eksklusif dan tidak begitu peduli dengan masalah pembauran kebudayaan.

Meskipun demikian, patut untuk dicatat bahwa dibandingkan masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan pemerintah Orde Baru eksklusivitas mereka relatif lebih mencair. Salah satu indikator tentang hal ini adalah semakin jarang ditampilkan praktik budaya Cina secara publik, semakin jarang digunakannya bahasa Cina, dan semakin jarang ditampilkan kesenian Cina.

Atas dasar apa yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya dikemukakan suatu deskripsi dan penjelasan yang memberikan gambaran tentang persoalan warga keturunan secara lebih jelas. Lebih dari itu, kalangan akademisi, pribumi, dan warga keturunan hendaknya terus melakukan dialog terbuka mengenai masalah-masalah yang selama ini lebih banyak terpendam. Selain untuk menciptakan atmosfer yang lebih kondusif, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah hubungan pri-nonpri. Masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir, karena konflik ideologis dan politis yang dulu menjadi ganjalan telah berhasil diselesaikan. Dengan berpijak pada kerangka kebersamaan, dialog tersebut jelas akan lebih memberikan sumbangan bagi kehidupan bangsa di masa mendatang.

Kajian ini tidak lain adalah upaya untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dialog tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, isi buku ini sama sekali tidak berpretensi untuk memecahkan persoalan yang sedemikian rumit itu. Namun, karena persoalan warga keturunan sudah semakin mendesak, tidak ada jalan lain kecuali mulai membicarakannya secara terbuka. Betapa pun kecil upaya ke arah pemecahan tetap akan lebih baik dibandingkan membiarkannya berlarut-larut. Memendam masalah untuk kepentingan jangka pendek mungkin terasa bijak. Akan tetapi, keberanian untuk memecahkan masalah jauh lebih diperlukan guna

mencapai penyelesaian yang mempunyai nilai strategis di masa kini dan mendatang.

Melanjutkan pembicaraan yang dikembangkan dalam pendahuluan buku ini (bab I), bab II mendeskripsikan seluk beluk masyarakat Cina dalam sejarah Nusantara. Di dalamnya dijelaskan soal pasang-surut hubungan antara bangsa Cina —termasuk warga keturunan— dengan masyarakat pribumi. Bab ini dimaksudkan sebagai analisis terhadap perubahan pola-pola hubungan dari satu periode ke periode lain. Secara garis besar dapat ditemukan ragam persoalan yang menjadi ganjalan bagi hubungan antara dua komunitas—pribumi *vis-a-vis* keturunan. Babakan sejarah yang dipakai mengikuti pola konvensional, yaitu masa kerajaan, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun rentang waktu yang dibahas sangat panjang, bab II ini hanya memfokuskan pada sedikit masalah. Di antaranya adalah kepentingan-kepentingan yang melatari kontak budaya, perbandingan pelapisan ekonomis-sosial, dan akulturasi budaya antara komunitas keturunan dan pribumi.

Bab ini disusul dengan pembahasan mengenai hubungan antara Cina daratan (RRC), Cina perantauan dan Indonesia. Persoalan-persoalan itulah yang akan dikemukakan dalam bab III dari buku ini. Analisis terhadap isu-isu tersebut lebih bersifat politis-ekonomis, dan mencakup periodisasi yang lebih dini, yaitu abad kedupuluh. Informasi yang diberikan dalam bab ini akan melengkapi pemetaan masalah yang muncul lebih kemudian. Seperti yang terekam dalam sejarah, abad kedupuluh merupakan periode di mana kesadaran untuk berbangsa mulai merebak. Pertanyaan di sekitar identitas politik dan budaya semakin menguat, termasuk di kalangan warga keturunan. Pada saat yang sama, setelah kekaisaran Cina runtuh, gerakan komunis yang mengalahkan kaum nasionalis muncul sebagai salah satu kekuatan dunia. Sifat ekspansionis rezim komunis Cina pada gilirannya berimplikasi terhadap hubungan politik antara Cina dan

negara-negara tetangga, termasuk antara komunitas pribumi dan warga keturunan. Perkembangan yang terjadi kemudian juga menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya menyangkut aspek politik, melainkan juga ekonomi. Keberhasilan Cina perantauan yang begitu mengagumkan semakin melengkapi persoalan hubungan mereka dengan komunitas pribumi di Asia Tenggara. Isu jaringan bisnis Cina Perantauan, atau ancaman Cina Raya mulai menonjol, dan menjadi perhatian banyak kalangan.

Untuk mengetahui persoalannya secara lebih jelas, bab IV secara khusus mendiskripsikan kekuatan ekonomi pengusaha keturunan Cina di Indonesia. Hal ini mencakup dimensi sektor apa yang mereka geluti dan kendalikan; bagaimana mekanisme kerja yang mereka terapkan; bagaimana gambaran jaringan bisnis yang mereka miliki; bagaimana pola keterkaitan mereka dengan komunitas pribumi dan pejabat pemerintah; dan seberapa besar aset yang mereka miliki. Deskripsi tentang persoalan-persoalan ini diharapkan dapat semakin memperjelas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam hal warga keturunan.

Selain analisis historis, ekonomis dan politis, buku ini juga memasukkan pendekatan lain, yaitu analisis kultural (bab V). Hal ini penting karena bagaimanapun sistem nilai merupakan dasar pijak bagi perilaku seseorang atau kelompok. Bab ini mencoba menguak sistem nilai yang ada di balik keberhasilan Cina Perantauan, dan sekaligus sistem nilai yang menjadi latar belakang kemunduran masyarakat pribumi. Perbandingan antara kedua sistem ini diharapkan dapat membuka cakrawala kedua komunitas untuk saling belajar.

Kajian ini akhirnya ditutup dengan tulisan tentang keterkaitan dan posisi masyarakat Cina dalam pembangunan Ketahanan Nasional (bab VI). Di dalam bab ini akan dijelaskan kaitan atau arti penting komunitas Cina keturunan dalam konteks pembangunan Ketahanan Nasional. Ini berarti menyangkut masalah keharusan untuk menyelesaikan proses pembauran, agar integrasi seluruh unsur etnis dalam konfi-

gurasi demografi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan soal hubungan antara warga keturunan dan masyarakat pribumi, terciptakan secara tuntas. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan pembauran hanya akan menjadi kendala bagi terciptanya Ketahanan Nasional yang utuh dan dinamis. Jika kendala tersebut dapat diatasi, maka akan tercapai cita-cita untuk mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia yang besar, majemuk dan dinamis sebagai bangsa pejuang menuju Indonesia Raya nan jaya.

BAB II

Masyarakat Cina dalam Sejarah Nusantara

•••• Pendekatan historis kiranya merupakan pendekatan terbaik untuk membicarakan serta menyoroti "masalah Cina" karena dapat menempatkannya pada tempat serta proporsi yang sebenarnya dengan melihat masa lampau, di mana masalah ini timbul dan berkembang serta kepada masa yang akan datang, di mana masalah ini sudah harus diselesaikan sesuai dengan cita-cita kita tentang kebangsaan, yaitu: kesatuan dan persatuan bangsa yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

Lie Tek Tjeng

Tembok Besar merupakan salah satu saksi sejarah bahwa bangsa Cina senantiasa dihadapkan pada berbagai ancaman yang datang dari bangsa-bangsa lain di sekelilingnya. Di antara bangsa-bangsa yang pernah menguasai Cina dalam jangka waktu lama adalah Mongol dan Manchu. Yang pertama sanggup menjajah bangsa Cina, yang saat itu tergolong kuat dan berkebudayaan cukup tinggi, selama hampir satu abad (1279-1368). Sedangkan yang kedua berhasil mendudukinya selama berabad-abad. Penguasaan Manchu atas Cina baru berakhir ketika Jepang mengambil alih wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaannya pada paruh pertama abad dua puluh. Segera setelah penjajahan Jepang berakhir, kedaulatan Cina kembali berada di bawah tangan bangsa aslinya. Namun, pergolakan politik internal

Cina tetap saja berlanjut, terutama yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara kaum nasionalis (*Kuomintang*) dan kaum komunis. Sejarah menunjukkan bahwa kaum komunis akhirnya menjadi pemenang dan berkuasa hingga saat ini.

Konflik politik yang terus berkelanjutan tersebut, secara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap migrasi penduduk Cina ke tempat lain. Konflik Cina-Mongol, misalnya, telah mengakibatkan kerugian ekonomis yang cukup besar, sehingga banyak penduduk yang kemudian meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Namun ketika bangsa Manchu berkuasa, akibat yang dirasakan oleh rakyat Cina tidak hanya bersifat ekonomis; banyak di antara mereka, khususnya yang bermukim di wilayah selatan —Fukien, Kwangtung dan Kwangsi— harus bermigrasi karena kuatnya tekanan dari penguasa. Dua contoh ini menunjukkan bahwa motif migrasi bangsa Cina ke wilayah lain, khususnya Asia Tenggara, cukup beragam dan berbeda dari waktu ke waktu.

Sebagian besar migrasi bangsa Cina ke wilayah lain ditempuh melalui jalan damai. Biasanya proses migrasi didahului dengan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, antara mereka dan penduduk setempat. Pada saat kegiatan tersebut semakin intensif, mereka mulai mendirikan komunitas-komunitas kecil di tempat-tempat mereka berdagang. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan terbentuknya komunitas Cina yang lebih besar dengan segala aturan sosial dan normanya tersendiri. Namun demikian, meskipun kemudian gagal, bangsa Cina juga pernah menggunakan kekerasan sebagai salah satu upaya menduduki wilayah lain. Hal itu tercatat ketika pemerintahan Mao Ze Dong berupaya menguasai semenanjung Korea. Bagaimanapun, cara yang pertama tampaknya jauh lebih efektif dibandingkan cara yang kedua, khususnya dalam hal penyebaran pengaruh kebudayaan Cina di wilayah lain.

Migrasi Cina ke Nusantara

Catatan sejarah tidak dapat memastikan kapan persisnya orang Cina datang ke wilayah Nusantara. Bukti-bukti arkeologis dan antropologis, seperti benda-benda tertentu yang berhubungan dengan kebudayaan Cina, memang dapat menunjukkan bahwa mereka telah hadir di Nusantara sejak sebelum Masehi. Namun data tersebut belum dapat menggambarkan bagaimana pola hubungan yang dibangun bersama masyarakat setempat. Baru pada abad kelima, melalui catatan yang ditulis Fa Hien, dan ketujuh, melalui catatan perjalanan yang ditulis I Ching, seorang pendeta asal Cina, gambaran tentang hubungan Cina-Nusantara menjadi lebih jelas.¹ Kemungkinan besar, selama periode sebelum Fa Hien dan I Ching, wilayah Nusantara belum begitu menarik bagi Cina. Di Cina sendiri abad keempat, kelima dan keenam dikenal sebagai zaman kegelapan (*dark ages*). Hubungan mereka dengan bangsa lain, khususnya India dan Arab, masih ditempuh melalui jalur darat. Dengan kata lain, teknologi pelayaran Cina saat itu belum semaju bangsa India atau Timur Tengah, sehingga mereka tidak dapat menjalin hubungan intensif dengan bangsa-bangsa di seberang laut seperti Asia Tenggara.

Oleh karena alasan keamanan, pada abad keenam orang Cina terpaksa melintasi laut dalam berdagang ke India. Akan tetapi mereka hanya menyusuri pantai dari Kwangtung menuju Vietnam melalui Annam dan Indocina, kemudian menuju utara ke Teluk Siam. Sesampainya di tempat tersebut, mereka meneruskannya melalui perjalanan darat menuju negeri Mon. Dari sini mereka menyusuri delta dan lembah sungai Mekong menuju India.²

-
1. D.G.E. Hall, *A History of South East Asia* (London: Mcmillan & Co. Ltd., 1958), halaman 20.
 2. R. Moh. Ali, *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara* (Jakarta: Barata 1963), halaman 21.

Walaupun pada abad ketujuh hingga kesembilan perdagangan negeri Cina sangat meningkat, kapal-kapal mereka belum berani melintasi samudera. Sampai abad kesepuluh, pelaut Cina baru berani berlayar hingga pelabuhan Vietnam, Chia Chi. Peningkatan dagang dengan Nusantara tampaknya lebih banyak merupakan inisiatif pedagang dan pelaut Nusantara. Baru setelah terjadi kontak perdagangan langsung dengan bangsa Arab, yang telah lebih maju dalam teknologi navigasi, bangsa Cina mulai mampu melintasi samudera. Abad kesebelas, pada masa dinasti Sung, kapal-kapal Cina mulai mendominasi jalur-jalur perdagangan di wilayah Asia Tenggara.

Meningkatnya perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Cina melahirkan kelompok pedagang *possu*, yang bertugas menampung barang dagang asal negeri lain untuk diteruskan ke pedalaman Cina. Dalam perkembangannya, kelompok ini lebih banyak bergerak langsung ke wilayah Nusantara untuk membeli hasil bumi seperti minyak wangi, kayu cendana, dan damar. Selain berdagang, mereka juga mengajak para musafir dan pelajar Cina untuk mempelajari masyarakat setempat. Pada zaman Sriwijaya, misalnya, tercatat nama I Ching yang kemudian menyusun informasi tentang kerajaan tersebut.³ Ia, antara lain, memberikan rekomendasi bagi pelajar-pelajar di Cina untuk belajar agama di Sriwijaya sebelum meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi di India. Saat itu Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga pusat kebudayaan dan agama Budha di Asia Tenggara.

Pada masa itu bangsa Cina sama sekali belum menguasai perekonomian masyarakat Sriwijaya. Meskipun Cina telah menjadi kekuatan yang besar, mereka tidak memiliki

3. G. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1968), halaman 81-2.

kecenderungan untuk menjadikan masyarakat setempat sebagai daerah jajahannya. Namun demikian, Sriwijaya sendiri cukup tangguh dalam bidang pelayaran maupun perdagangan, sehingga mereka mampu untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di wilayah tersebut. Atas alasan inilah perkampungan Cina baru berdiri di tepi sungai Musi pada akhir abad 13 di saat Sriwijaya berada di ambang kehancuran.⁴ Sebelumnya tidak tercatat adanya perkampungan Cina di wilayah Nusantara.

Victor Purcell membagi migrasi bangsa Cina ke wilayah Nusantara menjadi tiga tahap: masa kerajaan, kedatangan bangsa Eropa, dan penjajahan Belanda.⁵ Tahap pertama, di mana masyarakat Nusantara masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan setempat, migrasi bangsa Cina semata-mata didorong oleh hubungan perdagangan. Jumlah mereka masih sangat sedikit, dan belum membentuk satuan-satuan komunitas yang mapan. Mereka datang ke wilayah ini sesuai dengan musim angin yang merupakan sarana utama pelayaran di masa itu. Mereka hanya bermukim di sekitar pelabuhan untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Karena jumlahnya kecil, walaupun ada yang menetap akan segera terserap ke dalam kehidupan penduduk setempat. Meskipun berlangsung selama berabad-abad, tahap pertama ini berjalan lambat dan tidak menunjukkan interaksi yang berarti. Biasanya, tahap ini disebut sebagai *Chinese follow the trade* atau kedatangan bangsa Cina untuk berdagang.

Tahap kedua terjadi setelah bangsa Eropa muncul di wilayah Asia Tenggara pada abad enam belas. Walaupun masih didorong oleh perdagangan, jumlah migrasi bangsa

4. O. Abdul Rachman, *Beberapa Perkembangan di Asia Selatan: Analisa Masalah-masalah Internasional* (Jakarta : CSIS, 1974), halaman 41.

5. Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1980), halaman i-iii.

Cina semakin meningkat, sesuai dengan pesatnya tingkat perdagangan. Kehadiran orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda membuat wilayah Asia Tenggara semakin ramai. Mereka mulai menjadikan beberapa pelabuhan di kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi mereka di wilayah ini. Misalnya, bangsa Portugis menjadikan Malaka sebagai pangkalan dagang utama, atau bangsa Spanyol membangun Manila dengan maksud yang sama. Situasi ini membuka peluang bagi orang Cina untuk turut berpartisipasi lebih aktif, dan memungkinkan mereka untuk tinggal di wilayah Nusantara dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, proses asimilasi dengan masyarakat setempat tetap berjalan, karena kebanyakan pendatang Cina adalah laki-laki.

Situasi ini disusul oleh tahap ketiga pada saat kekuasaan Nusantara berada di bawah pemerintahan Belanda. Pada masa ini telah banyak ditemukan pemukiman Cina di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, pantai timur Sumatera dan sepanjang pesisir utara pulau Jawa. Tahap ini menandai migrasi bangsa Cina dalam jumlah yang besar. Mereka tidak lagi hanya didorong oleh kepentingan dagang, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi secara umum. Bahkan mereka secara sengaja didatangkan ke Nusantara oleh Belanda untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bagi proyek pertambangan dan perkebunan. Pada periode ini orang Cina yang datang tidak lagi terbatas laki-laki; oleh Belanda juga didatangkan wanita-wanita Cina. Akibatnya, proses asimilasi yang tadinya berjalan cukup lancar menjadi terhambat. Mereka mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk membentuk komunitas sendiri yang relatif terpisah dari masyarakat setempat. Kecenderungan ini terus berjalan dan menjadi semakin intensif oleh kebijakan politik Belanda yang rasialis.

Guna memahami keberadaan bangsa Cina di Nusantara (Indonesia), berikut akan dibahas keberadaan mereka serta pola-pola hubungan antara kedua bangsa dalam se-

jarah. Sebagai gambaran umum akan dianalisis empat contoh kasus yang nantinya berpengaruh bagi keberadaan orang Cina di negeri ini; yaitu orang Cina pada masa Sriwijaya, Majapahit, Penjajahan Barat, dan Pergerakan serta Kemerdekaan.

Cina dan Sriwijaya

Sejak abad pertama sampai kelima Masehi, wilayah laut Asia Tenggara dikuasai oleh imperium Funan atau Pnom Penh dari daratan Indocina dengan ibukota Oc-Eo yang berlokasi di dekat Ho Chi Min City dewasa ini.⁶ Angkatan Laut kerajaan ini sepenuhnya menguasai alur perdagangan yang terbentang sampai Selat Malaka. Mereka memungut pajak dan cukai serta mengontrol setiap kapal dagang yang melewati wilayah tersebut. Kekuasaan Funan berakhir ketika mereka dikalahkan oleh kekuatan Kamboja, yaitu Chenla, pada abad keenam. Berakhirnya dominasi Funan menandai kekosongan kekuasaan di jalur perdagangan laut Asia Tenggara, karena kerajaan Kamboja bukanlah kekuatan maritim.

Kekosongan tersebut baru terisi setelah kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Palembang, berdiri pada abad ketujuh. Awalnya kerajaan ini hanya menjadi kekuatan lokal yang berbasis sungai (*river power*). Ia menguasai jalur perdagangan sepanjang sungai Musi dari hulu sampai hilir. Namun pada perkembangannya, Sriwijaya muncul sebagai kekuatan laut (*sea power*) yang mampu mengontrol seluruh pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Asia Tenggara. Selama kurang lebih lima abad, yaitu dari abad ketujuh hingga akhir abad sebelas, Sriwijaya merupakan kekuatan yang tidak tertandingi oleh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara yang lain, termasuk beberapa kerajaan yang cukup berpengaruh

6. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 57-62.

di pulau Jawa.⁷

Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya bukanlah sebuah kekuasaan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang jelas. Ia lebih merupakan federasi dari pusat-pusat pelabuhan perdagangan yang ada di wilayah sekitarnya. Hubungan raja dengan para penguasa pelabuhan ditandai oleh suatu bentuk pengakuan yang dimanifestasikan dalam sistem upeti (*tributary system*).⁸ Para penguasa lokal memiliki otonomi yang besar dalam menentukan dan memungut pajak terhadap para pedagang yang menggunakan fasilitas pelabuhan mereka. Pada gilirannya mereka menyerahkan sebagian hasil pungutan tersebut kepada raja sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka terima.

Pola yang sama juga berlaku bagi hubungan raja dengan para penguasa di daerah pedalaman. Bahkan, pada tingkat tertentu, raja juga berperan sebagai perantara yang menjembatani antara masyarakat pedalaman dan pedagang dari luar. Seperti yang dicatat dalam sejarah, produk-produk yang diperdagangkan di wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup bermacam-macam barang. Pedagang India dan Arab, misalnya, datang ke tempat ini dengan membawa karpet dan wol; sementara pedagang Cina membawa keramik atau kain sutera. Mereka kembali ke negara masing-masing dengan membawa berbagai macam produk yang dihasilkan daerah Sriwijaya seperti damar, kayu cendana, minyak wangi atau produk hutan lainnya.

Penguasa Sriwijaya sering memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat pedalaman untuk melakukan transaksi langsung dengan pedagang mancanegara. Dalam

7. John F. Cady, *South East Asia: Its Historical Development* (New York : McGraw Hill, 1964), halaman 73.

8. Kenneth R. Hal, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu : University of hawaii Press, 1985), halaman 79.

konteks ini, para penguasa pedalaman hanya berkewajiban memberikan imbalan berupa upeti. Namun kadangkala transaksi tersebut dilakukan sendiri oleh Sriwijaya dengan cara mempertukarkan produk-produk pedalaman dengan produk dari mancanegara. Sama dengan para penguasa pelabuhan, para pemimpin pedalaman juga mendasarkan hubungan mereka dengan raja atas dasar patronase dan loyalitas.⁹ Dengan itu mereka dapat terus bertahan dalam kekuasaan yang relatif otonom tanpa harus merasa terancam oleh penguasa lokal lain sepanjang mereka mendapatkan perlindungan dari Sriwijaya. Oleh karenanya, kedudukan para penguasa lokal lebih mirip dengan vazal dalam sistem feodal yang memiliki kekuasaan besar tetapi bergantung pada raja.

Gambaran situasi kerajaan Sriwijaya awal dapat dilihat dari catatan perjalanan yang ditulis I Ching.¹⁰ Ia datang ke Palembang pada 671 M setelah berlayar selama 20 hari bersama pedagang *possu* dari Canton. Ia tinggal di Sriwijaya selama enam bulan untuk mempelajari bahasa Sansekerta sebelum bertolak ke India. Di India ia tinggal selama sepuluh tahun untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Nalanda, dan kembali lagi ke Sriwijaya untuk menetap selama empat tahun. Kali ini ia berhasil menyalin teks Budha berbahasa Sansekerta ke dalam bahasa Cina. Kemudian ia pulang sebentar ke Canton, dan kembali lagi ke Sriwijaya bersama beberapa temannya untuk kembali menulis buku.

Menurut penuturan I Ching, Sriwijaya saat itu merupakan pusat agama Budha. Mungkin karena alasan ini, sebagai seorang bhiku, I Ching tertarik untuk tinggal lebih lama. Dalam pandangannya, Sriwijaya adalah tempat yang ideal untuk melakukan persiapan belajar sebelum memasuki Per-

9. Hal, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, halaman 86.

10. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 82.

guruan Tinggi Nalanda di India. Oleh karenanya ia menyarankan pelajar-pelajar Cina untuk menetap di Sriwijaya beberapa lama sebelum menempuh pelajaran agama yang lebih tinggi di India. Mereka bisa mempelajari bahasa Sansekerta atau menemui guru-guru spiritual di tempat ini.

Periode yang digambarkan I Ching merupakan masa di saat mana imperium Cina mulai menguat; tidak lama kemudian, akibat perpecahan internal, kerajaan-kerajaan di wilayah Indocina dan sekitarnya mulai melemah. Pada saat yang sama di Asia Tenggara muncul kekuatan baru, yaitu Wangsa Sanjaya dan Sailendra, yang berkedudukan di Jawa. Sriwijaya sendiri, mulai paruh kedua abad ketujuh sampai paruh pertama abad kedelapan, sangat dekat hubungannya dengan Cina. Secara teratur Sriwijaya mengirim utusan ke negeri Cina untuk menyatakan pengakuan atas kekuasaan imperium Cina.¹¹ Kedekatan tersebut dapat dipahami, karena pada masa ini Sriwijaya masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga.

Meskipun demikian, sejak 742 M Sriwijaya tidak lagi menjalin hubungan dengan Cina. Sumber-sumber sejarah Cina tidak lagi menyebutkan bahwa Sriwijaya mengirim utusan sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Yang terdengar saat itu justru Sriwijaya telah menguasai wilayah perdagangan Asia Tenggara dan mendirikan pusat kota di Semenanjung Melayu yang dilengkapi dengan berbagai macam sarana, termasuk pusat ibadah. Kemungkinan besar, para penguasa Sriwijaya semakin memiliki kepercayaan tinggi dalam mempertahankan diri sejalan dengan keberhasilan mereka menguasai wilayah tersebut.

Hubungan diplomatik dengan Cina mulai pulih kembali pada abad ke 10, dan terus berlangsung hingga kehancuran

11. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 83.

Sriwijaya pada abad ke 12. Guna menyatakan bakti, pihak Sriwijaya secara teratur mengirim utusan ke Cina. Meskipun demikian, kedua bangsa tampak saling berkepentingan. Pihak Cina, yang saat itu sudah mulai memiliki armada kapal laut kuat, merasa harus melindungi Sriwijaya. Mereka sangat membutuhkan berbagai jenis barang yang dihasilkan oleh Sriwijaya. Bahkan pada masa itu, barang-barang yang diperoleh dari Sriwijaya memiliki nilai yang tinggi di negeri Cina. Di pihak lain, Sriwijaya juga bersedia dipandang Cina hanya sebagai salah satu vazalnya. Dengan cara ini Sriwijaya dapat menghindari ancaman penguasa lokal; pada saat yang sama mereka juga dapat memperoleh keuntungan yang besar dari tingginya jumlah barang yang diperdagangkan dengan Cina.¹²

Hubungan yang saling menguntungkan ini membawa keduanya dalam persekutuan politik yang cukup mendalam. Tentu saja posisi Sriwijaya di Asia Tenggara semakin kuat; apalagi mereka juga menjalin hubungan baik dengan India. Mereka dengan mudah, misalnya, menangkal serangan yang dilancarkan oleh Raja Dharmawangsa dari Jawa pada abad kesepuluh. Meskipun serangan tersebut terbilang besar, berkat bantuan Cina dan India, Sriwijaya tidak merasa kesulitan dalam mempertahankan diri. Di sisi lain, eratnya hubungan dengan Cina juga turut memperlebar kesempatan orang-orang Cina untuk menetap di Sriwijaya. Maka tidak heran kalau perkampungan Cina pertama terbentuk di wilayah ini. Bahkan, ketika Sriwijaya berada di ambang kehancuran, komunitas Cina inilah yang kemudian mengambil alih kekuasaan perdagangan. Sebagian dari mereka adalah pedagang, dan sebagian lainnya adalah perompak.¹³

12. O.W. Wolters, *The Fall of Srivijaya in Malay History* (London: Lund Humphries, 1970), halaman 37.

13. Purcell, *The Chinese in Souteast Asia*, halaman 16.

Secara keseluruhan kehadiran bangsa Cina di Sriwijaya tidak menimbulkan persoalan internal. Selain tidak banyak, kehadiran mereka di tempat ini lebih didorong oleh kepentingan dagang dan —khususnya pada tahap awal— belajar. Sama seperti hubungan raja Sriwijaya dengan penguasa lokal, pola hubungan politik antarkedua bangsa ini juga lebih banyak didasarkan pada sistem upeti. Oleh karenanya, meskipun Sriwijaya secara formal berada di bawah naungan Cina, mereka tetap menikmati otonomi yang sangat luas. Masa ini merupakan awal hubungan intensif antara masyarakat Nusantara dan bangsa Cina.

Cina dan Majapahit

Abad tiga belas merupakan masa yang penuh pergolakan bagi bangsa Cina dan juga Asia Tenggara. Keduanya sedang mengalami pergeseran kekuasaan yang nantinya berakibat langsung terhadap pola hubungan yang mereka bangun selama ini. Pergeseran di Cina ditandai oleh kekalahan penguasa setempat dari bangsa Mongol; sementara di Asia Tenggara dimulai dengan melemahnya Sriwijaya dan menguatnya kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kediri, Singosari dan Majapahit.

Kemenangan bangsa Mongol atas Cina merupakan keberhasilan lanjutan dari rencana ekspansi mereka atas wilayah-wilayah lain. Bangsa yang berasal dari Gurun Gobi ini sebelumnya telah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di belahan barat. Tercatat, misalnya, kemenangan mereka atas wilayah Timur Tengah sampai Eropa Timur. Kalau saja pemimpin agung mereka, Jenghis Khan, tidak jatuh sakit, maka wilayah Eropa Barat juga sudah masuk genggamannya Mongol. Hanya saja, pada saat pasukan Mongol hendak melanjutkan ekspansi ke Eropa Barat, Jenghis Khan sakit. Semua panglima yang bertugas lapangan harus berkumpul untuk membahas penggantinya. Peristiwa inilah yang menyelamatkan Eropa Barat dari serangan Mongol.

Di bawah kepemimpinan Jenghis Khan bangsa Mongol

muncul menguasai dunia. Kekuasannya terbentang antara Asia dan Eropa. Negara-negara yang dulunya terkenal kuat, seperti kerajaan-kerajaan Islam, tunduk oleh serangan Mongol. Cina, yang juga merupakan masyarakat berbudaya tinggi, bukanlah merupakan kekecualian. Setelah beberapa lama mencoba mempertahankan diri, mereka terpaksa menyerah oleh kekuatan Mongol yang terbukti lebih kuat, walaupun dari segi budaya Mongol waktu itu lebih rendah dibandingkan Cina.

Sejak 1214 wilayah Cina sepenuhnya telah berada di bawah kontrol Mongol. Hanya saja, setelah kematian Jenghis Khan, kekuasaan Mongol tidak lagi utuh. Masing-masing penerus memegang wilayah yang berbeda dan cenderung untuk saling berebut. Kubilai Khan, penguasa Mongol di Cina, misalnya, harus berhadapan dengan saudaranya sendiri, Arik Buka, dalam suatu pertempuran yang menelan korban banyak. Kedua cucu Jenghis Khan ini memiliki orientasi politik yang sangat berbeda satu sama lain. Arik Buka sangat meyakini pentingnya supremasi Mongol, sementara Kubilai Khan sangat menghargai kebudayaan Cina.

Dalam memerintah, Kubilai Khan berusaha menghargai dan menghayati pola hidup masyarakat Cina. Bahkan, menurut Michael Prawdin ia telah terpengaruh oleh dan terserap ke dalam kebudayaan Cina berkat pengaruh guru Cinanya, Yao Shi, yang begitu kuat.¹⁴ Maka ketika ia harus berhadapan dengan Arik Buka, bangsa Cina berdiri di belakangnya untuk memberi bantuan. Pertempuran besar yang mengambil tempat di Dolon Nor tersebut akhirnya dimenangkan pasukan Kubilai Khan yang terdiri dari gabungan Mongol-Cina. Sedangkan Arik Buka beserta tentaranya terpaksa mundur karena kekurangan makanan dan banyak

14. Michael Prawdin, *The Mongol Empire: Its Rise and Legacy* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1953), halaman 303.

yang jatuh sakit. Dalam sejarah, Kubilai Khan dikenal sebagai kaisar Mongol-Cina terbesar yang berhasil meningkatkan kebudayaan dan pengetahuan di Cina.

Pertempuran yang dikobarkan Jenghis Khan dan anak cucunya terhadap Cina telah menelan korban yang sangat besar. Tercatat sebanyak 40 juta orang harus menjadi korban dalam rangkaian peperangan yang berjalan lebih kurang 50 tahun.¹⁵ Sebelum peperangan jumlah orang Cina mencapai 100 juta jiwa, dan setelah perang angka tersebut berkurang sampai 60 juta. Rakyat Cina tidak hanya dipe-rangi, tetapi juga dipaksa untuk berperang atas nama Mongol. Mungkin atas alasan inilah Kubilai Khan tidak pernah sepenuhnya diterima sebagai orang Cina. Di lain pihak, Kubilai Khan juga tidak pernah mempercayai orang Cina untuk memegang posisi-posisi penting. Misalnya, ia tidak pernah mengangkat orang Cina menjadi menteri, atau selalu memindah-mindahkan pasukan Cina dari satu wilayah tugas ke tempat yang lain. Pergantian tugas resimen Cina dan pemutasian mereka ke wilayah lain dapat terjadi setiap dua tahun.

Cina muncul sebagai kekuatan ekspansif ketika dipimpin oleh orang-orang Mongol. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, khususnya yang berada di Asia Tenggara, tidak lagi hanya didasarkan pada sistem upeti. Lebih dari itu, mereka ingin secara langsung menundukkan dan menguasai bangsa-bangsa tersebut. Maka, meskipun kemudian gagal, pada 1285 mereka mencoba menyerang kerajaan Tongkin dan Champa.¹⁶ Mereka juga menuntut ketundukan dari raja-raja lain termasuk yang ada di pulau Jawa. Meskipun demikian, tidak semua raja mematuhi keinginan para kaisar Mongol-Cina tersebut. Bahkan di tangan Ker-

15. Prawdin, *The Mongol Empire: Its Rise and Legacy*, halaman 303.

16. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 70.

tanegara, raja Singosari, ambisi tersebut dibalik menjadi hinaan. Pasukan Kubilai Khan pimpinan Meng Ki yang datang ke Jawa tidak diperlakukan dengan baik oleh penguasa Singosari ini. Sebaliknya, mereka dipermalukan —versi lain dipotong hidungnya— dan disuruh pulang kembali ke negeri Cina¹⁷.

Figur Kertanegara memang cukup kontroversial; sebagian menyatakan bahwa ia seorang pemikir ulung, tetapi yang lain menggambarkan sebagai pemabok. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, menurut G. Coedes, Kertanegara adalah seorang raja besar.¹⁸ Ia adalah pewaris dua kerajaan yang semula terpisah: Jenggala dan Panjalu (Kediri). Sebagai raja Singasari terakhir, Kertanegara mampu memperluas kekuasaannya ke arah barat maupun timur. Ia menundukkan daerah Sunda, Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu (Pahang). Ia melengkapi keberhasilan ini dengan menundukkan Bali pada 1284.

Guna memantapkan posisinya, Kertanegara tidak hanya menundukkan daerah-daerah ini secara militer. Ia lebih lanjut mengadakan perjanjian yang berisi kesepakatan-kesepakatan untuk tetap mempertahankan kepentingan bersama yang dituangkan dalam Mitreka Satata (Persahabatan Abadi).¹⁹ Ia sadar benar bahwa wilayah Asia Tenggara tetap berada dalam posisi terancam, dan ia melihat bahwa ancaman terbesar datang dari Cina-Mongol. Maka, selain membuat aliansi dengan daerah-daerah tersebut, Kertanegara juga menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Martaban, Siam, Annam, Champa, Kamboja, Dharmamayan dan lain sebagainya.

Sikap Kertanegara yang secara terang-terangan menolak

17. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 70.

18. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 199.

19. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 70.

kedaulatan Cina di wilayah Asia Tenggara membuat hubungan kedua bangsa semakin tegang. Oleh karenanya ia terus memantau gerak pasukan Mongol dengan cara memanfaatkan jalinan hubungan yang telah tertuang dalam Mitreka Satata. Kendati demikian, pasukan Mongol terbukti tetap dapat menyusup masuk wilayah kedaulatan Kertanegara tanpa mendapat halangan yang berarti. Sebelum masuk ke Jawa, pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara ternyata telah mendarat lebih dahulu di Kalimantan. Kedatangan mereka di tempat ini sama sekali tidak mendapatkan perlawanan dari penguasa setempat. Maka pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Jikomusu tersebut dapat dengan mudah berlabuh di Tuban, Jawa Timur.

Meskipun kekuasaannya mencakup wilayah luas, dan terbilang berhasil dalam berekspansi ke luar Jawa, Kertanegara terus-menerus menghadapi pemberontakan dari dalam negeri. Tercatat, misalnya, pada 1270 ia harus menghadapi pemberontakan yang dipimpin Bhayaraja, dan pada 1280 ia berhadapan dengan pemberontak yang dikomandoi Mahesa Rangkah. Adapun pemberontakan terakhir atas kekuasaannya dilancarkan oleh Jayakatwang, bawahannya dari Kediri, pada 1292.²⁰ Kejadian ini mengakhiri kekuasaan Kertanegara dan sekaligus menyudahi perjalanan sejarah kerajaan Singosari. Setelah membunuh Kertanegara, Jayakatwang segera mengalihkan pusat kekuasaan ke Kediri. Namun kerajaan ini tidak berumur lama; ia segera dapat dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dibantu oleh pasukan Raden Wijaya, anak tiri Kertanegara.

Pada saat pasukan Jikomusu mendarat pada 1293, Kertanegara sudah terbunuh dan Singasari telah pindah ke Kediri. Raden Wijaya, sebagai bagian dari kekuasaan Kertanegara, terusir ke Madura. Namun tidak lama kemudian ia diberi

20. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 198.

wilayah kekuasaan di pinggir Sungai Brantas karena bersedia mengakui kekuasaan Jayakatwang di Jawa. Lokasi wilayah ini memungkinkan Raden Wijaya untuk bertemu dengan pasukan Jikomusu ketika mereka berlabuh. Kesempatan ini digunakan Raden Wijaya untuk melancarkan sebuah strategi yang nantinya terbukti sangat cemerlang.

Raden Wijaya tidak menyampaikan kejadian yang telah menimpa Kertanegara maupun kerajaan Singosari; sebaliknya, sambil merahasiakan informasi tersebut, ia menyatakan dukungan terhadap upaya Jikomusu yang hendak menyerang Kertanegara dan Singosari atas sikap mereka terhadap kekuasaan Cina-Mongol. Keduanya kemudian pergi menyerang Jayakatwang sampai berhasil menaklukkannya. Setelah berhasil, Raden Wijaya beserta pasukannya segera melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang tidak dalam kondisi siaga dan terpecah-pecah. Pasukan Mongol tercerai-berai dan Jikomusu dipaksa oleh Raden Wijaya untuk kembali ke Cina.

Kekalahan Cina dan kemenangan Raden Wijaya merupakan awal perkembangan kerajaan Majapahit. Kegagalan Cina menaklukkan penguasa Jawa tak sempat terbalaskan, karena setelah periode ini kekaisaran Cina-Mongol melemah. Sementara itu, kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya terus berkembang. Kerajaan ini, khususnya ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patih Gajah Mada pada pertengahan abad 14, berkembang menjadi kerajaan besar. Dalam catatan sejarah, Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Jawa yang luas kekuasaannya bahkan melebihi Sriwijaya. Selain wilayah Nusantara, Majapahit juga menguasai daerah Vietnam dan Thailand.

Marco Polo, yang bekerja dengan Kubilai Khan selama 30 tahun, mengakui kebesaran Majapahit. Menurut catatannya, kekuasaan kerajaan Jawa ini berada di luar jangkauan kekuasaan Khan Agung (Kubilai Khan). Dengan kekuatan yang dimiliki, Majapahit sanggup mempertahankan diri dan tidak perlu membayar upeti kepada penguasa lain. Marco

Polo juga mencatat bahwa pada masa ini Jawa merupakan tempat perdagangan yang ramai.²¹ Sementara itu, kerajaan besar lain, Sriwijaya, telah punah dan wilayah Palembang lebih banyak dikuasai oleh perompak-perompak Cina. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun hubungan antara raja Jawa dan kaisar Cina-Mongol tidak serasi, orang-orang Cina sudah semakin banyak yang menetap di wilayah Indonesia. Penyebaran orang-orang Cina ini semakin meningkat ketika Majapahit melemah dan kekaisaran Cina menguat.

Ternyata, kematian Hayam Wuruk telah mengakibatkan pengaruh Majapahit menurun; beberapa lama kemudian, naiknya dinasti Ming ke tampuk kekaisaran Cina telah membawa kemajuan-kemajuan besar, khususnya dalam angkatan laut. Tahun-tahun awal abad 15, misalnya, Cina telah mengirimkan beberapa ekspedisi laut ke berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara.²² Akan tetapi, berbeda dari kecenderungan kaisar Mongol-Cina, dinasti Ming sama sekali tidak bersikap ekspansif, meskipun dengan kekuatan angkatan laut yang ada, mereka mampu menaklukkan wilayah Asia Tenggara sebagaimana yang pernah diinginkan oleh kaisar Mongol-Cina. Namun mereka justru melindungi pelabuhan perdagangan di wilayah ini seperti yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap Sriwijaya. Sikap mereka ini terus bertahan hingga zaman Malaka, meski saat itu mereka tidak lagi aktif berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Cina.

Salah satu tokoh angkatan laut Cina yang terkenal adalah Laksamana Cheng Ho yang sempat mendarat di bebera-

21. Cady, *South East Asia*, halaman 139; dalam rangka memantapkan kekuasaannya, Raden Wijaya telah mengawini empat putri yang masing-masing berasal dari Bali, Melayu, Tanjungpura dan Madura. Sebagian sumber menyebutkan bahwa keempatnya adalah anak Kertanegara. Lihat, CC Berg, *De Geschiedenis van Pril Majapahit*, I *Het Mysterie van de Vier Dochters van Kertanegara*, Indonesie, IV (1950), Amsterdam, halaman 481-520.

22. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 16-17.

pa palabuhan di Jawa. Digambarkan, armada Cheng Ho terdiri dari 70.000 orang yang mengendarai kapal-kapal besar.²³ Mereka melakukan pelayaran yang mencakup wilayah sangat luas yang tidak pernah dilakukan oleh orang Cina sebelumnya. Armada ini mampu mencapai Teluk Persia, Laut Merah dan bahkan Afrika Timur. Cheng Ho, yang beragama Islam dan dikebiri, dilukiskan sebagai pelaut tangguh dan diplomat ulung. Tanpa melalui tindakan militer, ia berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Dengan cara ini kekaisaran Cina dapat menanamkan pengaruhnya dalam berbagai bidang, termasuk urusan-urusan politik.

Meskipun demikian, supremasi Cina tersebut tidak bertahan lama, hanya berlangsung dari 1430 sampai 1450. Dengan kematian Cheng Ho serta berakhirnya rezim pimpinan Yung Lo, Cina mulai menerapkan politik isolasi yang praktis mengakhiri supremasinya di Asia Tenggara.²⁴ Kendatipun demikian, pengaruh Cina yang menyurut sama sekali tidak menurunkan jumlah orang-orang Cina di wilayah ini. Beberapa daerah di Semenanjung Melayu seperti Tumasik (Singapura), misalnya, mulai dihuni oleh orang-orang Cina. Bekas jejak Cheng Ho, baik yang berupa komunitas Cina maupun bangunan, juga mulai terlihat di sepanjang pantai utara pulau Jawa.

Cina dan Penjajahan Barat

Pada saat pengaruh Cina menurun tidak ada lagi kerajaan besar di wilayah Nusantara. Yang tersisa dari Majapahit adalah keturunan-keturunannya yang masing-masing memegang kekuasaan sendiri-sendiri. Daerah-daerah di

23. C.P. Fitzgerald, *China: A Short Cultural History* (New York, Washington: Frederick A. Praeger Publishers, 1961), halaman 473-475.

24. Fitzgerald, *China: A Short Cultural History*, halaman 473-475.

Sumatera seperti Jambi, Palembang, Kampar dan Siak memang masih menjadi bagian dari Majapahit. Begitu juga beberapa wilayah lain di Semenanjung Melayu seperti Trengganu Selatan, Tumasik, Pahang dan Kelantan. Namun sebagian wilayah Semenanjung seperti Johor dan Malaka telah menjadi bagian dari kerajaan Siam.²⁵ Pihak yang paling diuntungkan oleh situasi ini adalah para pedagang Arab yang berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah karena hubungan dekat mereka dengan penguasa-penguasa lokal Melayu yang sedikit demi sedikit mulai masuk Islam. Peran pedagang Cina sendiri menyusut bersamaan dengan mundurnya pengaruh politik mereka saat itu.

Pada abad 15 kerajaan yang berdiri di wilayah perairan Selat Malaka dan nantinya tumbuh besar adalah Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh raja Parameswara yang berasal dari Palembang dan beristrikan seorang putri dari Majapahit.²⁶ Ia memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri setelah melihat Majapahit melemah. Awalnya, ia memusatkan kekuasaannya di Tumasik, sebuah daerah Semenanjung yang paling jauh jaraknya dari kerajaan Ayutthaya. Sebagian besar wilayah lain yang lebih ke utara telah dikuasai oleh Ayutthaya atau secara formal berada di bawah perlindungannya. Maka tidak lama kemudian Parameswara didesak oleh Ayutthaya dan berpindah-pindah ke beberapa tempat sampai akhirnya menetap di Malaka.

Guna mempertahankan kekuasaan, Parameswara menjalin hubungan dekat dengan Cina. Hal ini ia lakukan karena kerajaan Ayutthaya terus menerus mendesak agar mengakui kekuasaan mereka. Pada 1419, misalnya, ia dan keluarganya pergi ke Cina untuk meminta bantuan menyelamatkan Malaka yang ketika itu dalam suasana penuh per-

25. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 244.

26. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 241.

golakan.²⁷ Parameswara juga menikahi putri raja Pasai, dan kemudian masuk Islam pada usia 72 serta mengganti namanya menjadi Megat Iskandar Shah.²⁸ Sejak itu kerajaan Malaka dipegang oleh penguasa-penguasa Melayu yang telah masuk Islam. Meskipun tidak pernah lepas dari berbagai upaya perebutan kekuasaan, kerajaan ini mampu mengembangkan diri dan menjadi pelabuhan perdagangan yang cukup besar.

Pada saat kedatangan bangsa Portugis, Malaka telah menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Namun armada Portugis tidak langsung mengambil alih Malaka, melainkan meneruskan pelayaran ke Indonesia kawasan timur untuk mencari rempah-rempah. Pada 1 Agustus 1509 pasukan Portugis di bawah pimpinan Laksmadana Diogo Lopes de Sequeira mencoba memasuki Malaka. Kali ini ekspedisi mereka gagal, dan baru pada 1511 pasukan Portugis lain, yang dipimpin penakluk kerajaan Goa, Alfonso de Albuquerque, berhasil mengambil alih kerajaan Malaka.²⁹ Kejadian ini mengawali babak sejarah baru di mana orang-orang Eropa mulai menguasai wilayah Asia Tenggara.

Sepanjang abad enam belas Portugis praktis menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Mereka mendirikan dan menguasai pusat-pusat perdagangan yang tersebar mulai dari Malaka hingga wilayah Cina seperti Kwangtung dan Canton.³⁰ Pada masa ini juga datang bangsa-bangsa Eropa lain seperti Belanda, Spanyol dan Inggris. Mereka mulai berebut komoditi dan pelabuhan perdagangan strategis di wilayah ini. Sampai akhir abad 16 perebutan tersebut terus berlangsung dan melibatkan beberapa pertikaian militer,

27. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 245.

28. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 246.

29. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, halaman 246.

30. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 24.

sampai akhirnya masing-masing kekuatan mendapat bagian wilayah jajahan. Melalui VOC (*Vereeningde Oostindische Compagnie*), sebuah perusahaan gabungan nasional yang didirikan pada 1602, Belanda mulai memegang monopoli perdagangan di bagian wilayah Asia Tenggara yang nantinya disebut Indonesia.³¹ Pada perkembangannya wilayah-wilayah lain seperti Semenanjung Melayu, Filipina dan Timor Timur dikuasai oleh bangsa Inggris, Spanyol dan Portugis.

Pada saat Belanda datang di Indonesia pada 1596 suasana di Jawa telah banyak mengalami perubahan. Pusat kekuasaan tidak lagi berada di Jawa bagian timur seperti pada zaman Majapahit, dan juga bukan di daerah pedalaman, melainkan di pinggir-pinggir pantai sepanjang utara pulau Jawa mulai dari bagian tengah sampai barat. Orientasi kehidupan kerajaan yang ada juga sudah berubah dari kegiatan yang berkonsentrasi ke pertanian menuju perdagangan. Sebagian besar perubahan tersebut merupakan dampak dari berdirinya kerajaan Demak pada abad 15 yang sejak awal berlokasi di pantai dan berorientasi pada perdagangan.³² Pendiri kerajaan ini masih memiliki ikatan keturunan dengan Majapahit.

Dua pelabuhan utama di Jawa pada zaman ini adalah Banten dan Cirebon. Masing-masing penguasa tempat ini masih memiliki ikatan persaudaraan dengan petinggi kerajaan Demak. Sebagai pusat perdagangan, Banten tampaknya lebih besar dibandingkan Cirebon; lebih banyak pedagang mancanegara yang datang ke Banten dari pada Cirebon. Belanda telah menemukan komunitas Cina yang cukup

31. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 25.

32. J. Kathirithamby-Wells, "Banten: A West Indonesian Port and Polity During the Sixteenth and Seventeenth Centuries," dalam *The Southeast Asian Port and Polity* (eds.) J. Kathirithamby-Wells and John Villiers (Singapore: Singapore University Press, 1990), halaman 109.

besar di Banten sejak awal kedatangan mereka.³³ Orang-orang Cina mendiami daerah pusat perdagangan di kota dan hidup lebih makmur dibandingkan orang-orang pribumi pada umumnya. Banyak juga orang Cina yang tidak menetap; mereka datang ke Banten sekedar untuk berdagang dan kembali lagi ke Cina.

Menurut catatan Chao Ju-Kua yang ditulis pada akhir abad 12, daerah Sunda memang merupakan salah satu penghasil lada berkualitas tinggi. Tuban, Jawa Timur, juga menghasilkan lada, tetapi kualitasnya tidak sebaik yang dihasilkan Sunda. Hanya saja saat itu belum ada pelabuhan atau pusat perdagangan besar yang dibangun di wilayah Sunda, sehingga para pedagang lebih memilih pergi ke Tuban.³⁴

Meskipun Banten dibangun lebih kemudian, dalam perkembangannya pelabuhan ini mampu menyaingi keberadaan Sunda Kelapa. Hal ini terutama disebabkan oleh pusat kekuasaan yang berpindah ke Banten setelah Sunda Kelapa, yang sebelumnya dikuasai Pajajaran, direbut oleh Sunan Gunung Jati yang dibantu oleh panglimanya, Fatahillah.³⁵ Pada saat yang sama, Banten juga diuntungkan oleh lokasinya yang berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai timur Sumatera dan Semenanjung Melayu. Hadirnya Portugis di wilayah tersebut dan maraknya perdagangan rempah-rempah karena keberadaan bangsa Eropa juga turut memperbesar perdagangan di Banten.

Kebesaran Banten ternyata tidak dapat dipisahkan dari peran yang dimainkan oleh orang-orang Cina. Bagaimanapun, pedagang asal Cina merupakan bagian penting dari

33. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 393.

34. Kathirithamby-Well, "Banten," halaman 108.

35. Kathirithamby-Well, "Banten," halaman 109.

dunia perdagangan Asia Tenggara yang semakin ramai. Mereka sangat berkepentingan untuk mendapatkan barang-barang yang dihasilkan dari wilayah ini. Jika pada zaman Sriwijaya impor mereka terbatas pada hasil hutan, maka kali ini mereka juga membeli rempah-rempah seperti lada dan jahe. Sebaliknya, permintaan terhadap barang produksi Cina seperti sutera dan porselin juga semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, jumlah pedagang Cina yang datang semakin meningkat, dan begitu pula jumlah mereka yang kemudian menetap.

Peran yang dimainkan oleh orang Cina yang menetap di Banten cukup beragam. Sebagian ada yang menjadi pedagang perantara bagi penduduk pribumi dan saudagar dari luar daerah, dan sebagian lagi ada yang langsung memproduksi hasil pertanian yang di pasaran nilai permintaannya cukup tinggi. Posisi ini tampaknya yang membuat mereka dapat hidup dalam suasana berkecukupan. Meskipun demikian, keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan Banten. Terbukti, misalnya, banyak kalangan Cina yang kemudian direkrut oleh penguasa setempat untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan. Mereka dipekerjakan sebagai sekretaris, akuntan, penerjemah dan sebagainya.³⁶ Banyak juga orang-orang Cina Banten yang kemudian masuk Islam dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Bahkan, berdasarkan kedekatan ini, pada pertengahan abad 17, seorang Kapiten Cina bernama Caitson, yang beragama Islam dan berganti nama menjadi Abdul Gafur, diangkat menjadi Syahbandar Banten.³⁷

Kepiawaian orang-orang Cina dalam berdagang diakui secara luas tidak hanya oleh penguasa Banten, tetapi juga oleh bangsa Eropa yang datang ke tempat ini. Sir Thomas

36. Kathirithamby-Well, "Banten," halaman 113.

37. Kathirithamby-Well, "Banten," halaman 113.

Herbert,³⁸ misalnya, memberikan gambaran yang menarik tentang sifat-sifat mereka. Di satu sisi, menurutnya, orang-orang Cina sangat rajin bekerja, ulet dan luar biasa teliti dalam berdagang. Namun di sisi lain mereka sangat gemar berjudi, sampai-sampai harta benda mereka habis, istri dan anak dipertaruhkan. Kendati demikian, mereka mampu menebus kekalahan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sama seperti orang Yahudi, menurut Herbert, mereka bersedia melakukan sembarang kerja asal bisa mendapat untung.³⁹ Kesan yang sama juga muncul dalam sumber Inggris lain seperti yang dikutip Purchas bahwa di satu sisi orang Cina sangat kreatif dan ulet, namun di sisi lain mereka juga sangat rakus.⁴⁰

Kepiawaian dalam berdagang ini tampaknya yang mendorong Gubernur-Jenderal Jan Pieterszoon Coen menggunakan orang-orang Cina untuk memenuhi kepentingan VOC. Setelah Jakarta berdiri pada 1619 dan setelah Coen ditunjuk menjadi gubernur-jenderal, banyak orang-orang Cina di Banten yang dipaksa pindah ke Jakarta.⁴¹ Coen tampaknya berambisi untuk menjadikan Jakarta sebagai pelabuhan terbesar; ia tidak segan-segan menggunakan ancaman terhadap orang-orang Cina Banten agar mereka bersedia pindah ke tempat ini. Upaya Coen ini ternyata membuahkan hasil: orang Cina Banten pindah ke Jakarta dan, sebagai kota pelabuhan dagang, Jakarta terbukti sanggup mengalahkan Banten.

Di Jakarta orang-orang Cina memegang posisi yang sangat menentukan bagi tercapainya kepentingan Belanda. Di

38. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 394.

39. Dalam konteks sejarah Thailand, Cina disebut sebagai Yahudi di Timur. Lihat, David K. Wyatt, *Thailand: A Short History* (New Haven&London: Yale University Press, 1984), halaman 229 & 254.

40. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 394.

41. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 395.

samping berdagang eceran atau bertani, mereka juga bertindak sebagai perantara bagi Belanda dan penduduk setempat. Bagaimanapun, orang-orang Cina jauh lebih berpengalaman dibandingkan Belanda dalam berhubungan dengan pribumi. Mereka sudah sejak lama bergaul, berbicara bahasa setempat dan memahami kebudayaan masyarakat setempat. Sebagai pendatang baru yang belum berpengalaman, Belanda sangat membutuhkan jasa orang-orang Cina ini. Saat itu, VOC belum mampu melakukan transaksi perdagangan dengan penguasa atau penduduk pribumi secara langsung. Seluruh proses transaksi dilaksanakan oleh orang Cina yang bertindak atas nama Belanda.

Pola hubungan ini berlangsung hingga paruh pertama abad 18 sebelum Belanda merasa tersaingi oleh orang-orang Cina. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia, sepanjang abad 17 sampai pertengahan abad 18, banyak orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia. Kedatangan mereka di Indonesia juga untuk sebagian didorong oleh sikap penguasa Manchu di daratan Cina yang sangat keras.⁴² Kapal-kapal dagang Cina yang menggunakan perahu *jung* tidak hanya membawa barang-barang dagangan, melainkan juga membawa manusia dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, orang Cina di Jakarta pada 1619 hanya berjumlah 400 jiwa; angka ini naik menjadi 2.000 jiwa pada 1629, dan kenaikan yang konstan membuat jumlah mereka di kota ini menjadi 10.000 jiwa pada 1725.⁴³ Meskipun Belanda telah membuat peraturan keimigrasian yang ketat, yaitu dengan hanya memperbolehkan satu perahu *jung* membawa tidak lebih dari 100 orang, jumlah orang Cina di Batavia membengkak menjadi 80.000 jiwa pada 1733.⁴⁴ Kecenderungan yang sama juga terjadi di wilayah

42. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 411.

43. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 397.

44. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 404.

Indonesia yang lain, karena pada saat itu orang Cina juga telah menyebar hingga ke Ambon.

Gejala di atas tampaknya merisaukan pihak Belanda; apalagi kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi orang Cina menjadi semakin dominan. Misalnya, mereka berhasil menguasai komoditi gula yang saat itu permintaan pasarnya sangat tinggi. Mereka menyewa ladang dan mempekerjakan pribumi dalam skala yang sangat luas. Pada saat yang sama mereka juga menguasai penggilingan gula yang pada 1710 saja telah berjumlah 130 pabrik di sekitar Batavia.⁴⁵ Komoditi-komoditi lain, bahkan yang telah ditetapkan sebagai barang monopoli VOC, juga mulai jatuh ke tangan Cina. Jaringan dagang mereka sangat luas, baik melalui cara-cara yang legal maupun ilegal. Selain menjadi pedagang, ternyata sebagian pendatang Cina juga menjadi rentenir, penyelundup atau perompak. Hal ini, di samping merugikan kepentingan ekonomis Belanda, juga mengacaukan suasana keamanan berniaga di wilayah Batavia.

Belanda kemudian menerapkan langkah-langkah yang sangat keras terhadap orang Cina. Di antaranya adalah membatasi gelombang imigrasi dan memberikan pengawasan ketat terhadap kegiatan dagang orang Cina. Bagi pendatang baru yang hendak tinggal di Jakarta diharuskan memiliki izin khusus dari pihak Belanda. Bagi orang Cina yang terbukti tidak memiliki surat keterangan tersebut dipaksa untuk meninggalkan kota. Namun yang lebih keras adalah ketika Belanda mengharuskan orang Cina untuk dapat membuktikan diri bahwa kegiatan dagang mereka ditempuh dengan cara-cara yang bersih. Aturan ini dipandang sangat merugikan, karena lebih sering digunakan untuk memeras ketimbang menegakkan hukum. Apalagi sanksi bagi mereka yang dipandang telah melakukan kecurang-

45. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 397.

an berdagang sangat berat: dibuang ke Srilanka, pulau Banda atau Tanjung Harapan.⁴⁶

Tidak lama setelah rencana ini diberlakukan, timbul reaksi keras dari orang Cina, baik yang berada di Batavia maupun di wilayah lain. Para bandit Cina dari luar Batavia mulai menyerang pelabuhan, dan mendapat dukungan dari orang Cina yang tinggal di Batavia. Peristiwa ini terjadi pada 1740 di saat Valckenier menjadi gubernur-jenderal. Belanda tampaknya kurang sigap dalam menangani masalah tersebut; mereka menanggapi dengan cara reaksioner. Pada tahun yang sama, misalnya, muncul rencana untuk menangkap orang-orang Cina yang terbukti melawan Belanda. Ternyata usulan ini justru semakin memperkeras reaksi orang Cina; apalagi saat itu juga sempat beredar isu bahwa Belanda telah menyiksa beberapa orang Cina Batavia.

Dalam situasi yang semakin genting ini, Valckenier memutuskan untuk mengosongkan Batavia dari orang-orang Cina. Ia mengerahkan pasukan Belanda, dan juga penduduk setempat, untuk menghadapi orang Cina yang dipandang telah siap mengadakan perlawanan terbuka. Maka terjadilah peristiwa kekerasan massal, di mana 10.000 orang Cina menjadi korban. Sebagian orang Cina Batavia kemudian melarikan diri ke arah timur pulau Jawa. Selain menyelamatkan diri, mereka juga berusaha menyusun kekuatan untuk melancarkan aksi balas dendam. Pada saat yang sama, Belanda menawarkan amnesti bagi orang Cina yang berlaku untuk satu bulan.⁴⁷ Mereka yang menggunakannya kemudian ditempatkan dalam pemukiman-pemukiman yang dibangun di pinggir kota.

Peristiwa 1740 yang kemudian dikenal sebagai Kebe-
ringasan Batavia (*Batavian Fury*) cukup banyak mengun-

46. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 272.

47. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 273.

dang komentar. Ada yang mengatakan bahwa tragedi tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Belanda, karena sebagian besar yang menjadi korban adalah penduduk yang tidak berdosa. Namun pandangan lain lebih melihat bahwa Belanda tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sikap agresif orang Cina menunjukkan bahwa jika mereka berhasil mengambil alih kekuasaan di Batavia, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama terhadap orang Eropa sebagaimana yang dilakukan Belanda terhadap mereka.

Peristiwa 1740 tidak berhenti sampai beberapa tahun kemudian. Sebagian besar orang Cina yang berhasil meloloskan diri terus berusaha menyusun kekuatan di daerah Jawa Tengah. Mereka mulai menyerang orang Eropa yang tinggal di Rembang, Juana dan Semarang. Gerakan ini semakin mendapat angin ketika Pakubuwono II, raja Mataram, juga menyatakan pemberontakan terhadap Belanda. Pasukan Cina, yang sebagian telah masuk Islam, kemudian bergabung dengan tentara untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Namun pasukan Belanda terbukti lebih kuat, dan berhasil menumpas pemberontakan ini.⁴⁸

Selanjutnya, selama akhir abad delapan belas, orang Cina kembali ke posisi semula mereka. Mereka tetap berperan sebagai perantara, pedagang dan produsen. Sikap Belanda memang lebih keras; gerak orang Cina semakin dibatasi. Namun sikap ini tetap tidak mampu mengontrol orang Cina dalam menguasai jaringan ekonomi. Terbukti, pada akhir abad 18 orang-orang Cina mampu menguasai tanah-tanah perkebunan yang ada di Jawa. Kekuasaan mereka atas pribumi sangat besar, karena sistem sewa yang diterapkan mengakibatkan pribumi tidak memiliki kekuatan yang berarti. Menurut Furnivall,⁴⁹ yang disewakan saat itu

48. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 407.

49. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 408.

bukan tanah melainkan yurisdiksi, sehingga tanah akan mengikuti orang dari pada orang mengikuti tanah. Akibatnya, orang Cina tidak hanya menjadi penyewa tanah, melainkan juga penguasa masyarakat.

Praktik ini semakin melengkapi kekuasaan orang Cina ketika mereka juga menguasai jaringan perdagangan. Oleh karenanya, ketika VOC dinyatakan bangkrut pada 1798, ada anggapan bahwa, selain kesalahan manajemen dan korupsi, kehancuran perusahaan ini juga disebabkan oleh tindakan bisnis orang Cina. VOC terus menerus menderita kerugian akibat kekayaan Indonesia banyak yang disedot oleh kalangan Cina. Anggapan ini mungkin ada benarnya, karena pada akhir abad delapan belas orang Cina praktis menguasai roda ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa.

Pada periode ini, hubungan antara orang Cina dan pribumi semakin menjauh. Orang Cina yang datang ke Indonesia tidak lagi terbatas pada laki-laki, sehingga proses asimilasi mulai terhenti. Pada saat yang sama, Belanda juga membatasi gerak orang Cina dengan cara menerapkan aturan-aturan khusus yang memisahkan mereka dari penduduk pribumi. Akibatnya, komunikasi antarkeduanya tidak lagi intensif. Periode ini mulai mencatat keketegangan antarkedua komunitas seperti yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, pada 1760. Kecenderungan lain yang juga tampak dalam periode ini adalah kehadiran orang Cina untuk menjadi pekerja atau penambang sebagaimana yang terlihat di Kalimantan Barat dan Palembang.

Abad 19 sampai awal abad 20 merupakan masa kristalisasi segregasi rasial di Indonesia. Di satu sisi, meskipun secara politis lemah, bangkrutnya VOC semakin membuat orang Cina leluasa dalam menguasai kehidupan ekonomi. Sedangkan di sisi lain, Belanda, yang juga memiliki kepentingan ekonomi, berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan politik yang dapat menguntungkan kedudukan mereka.

Sebelum Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada 1811-1816 karena Negeri Belanda dikuasai rezim Napoleon I dari

Perancis, Gubernur-Jenderal Daendels pernah mengupayakan agar pasukan Belanda di Indonesia diperkuat. Ia memprakarsai pembangunan jalan antara Anyer sampai Panarukan untuk memperkuat pertahanan darat.⁵⁰ Ia juga menerapkan kebijakan menaikkan gaji pegawainya. Akibatnya, ia mengalami kesulitan untuk membayar anggaran belanja yang membumbung, sehingga ia harus menjual tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pangeran-pangeran setempat. Tentu saja kebijakan ini semakin memperkuat posisi ekonomis orang Cina, karena kebanyakan yang mampu membeli adalah mereka. Salah satu yang mencolok dalam hal ini adalah penjualan tanah di Probolinggo seharga dua setengah juta gulden kepada kapten Cina Han Ti Ko.⁵¹

Situasi ekonomi Indonesia pada saat Inggris mulai menjajah benar-benar timpang. Orang Cina menempati strata ekonomi makmur, sedangkan pribumi banyak yang menderita karena harus menggadaikan sawah mereka. Stamford Raffles, yang menjadi gubernur-jenderal saat itu memandang bahwa situasi buruk ini merupakan bukti dari kesewenang-wenangan Belanda dan kerakusan orang Cina. Bahkan terhadap keserakahan orang Cina Raffles sempat menjulukinya sebagai penyakit negeri ini (*pest of the country*).⁵² Kendati demikian, pemerintahan Raffles yang tidak berumur panjang tersebut tidak mampu mengubah keadaan. Dapat dikatakan bahwa kehadiran Inggris waktu itu tidak berpengaruh banyak bagi perbaikan nasib pribumi maupun hubungan antara orang Cina dan pribumi.

Setelah Belanda mendapatkan kekuasaannya kembali pada 1816, ketimpangan ekonomi semakin bercampur dengan persoalan politik. Pihak yang menderita kerugian tam-

50. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 407.

51. Hall, *A History of South East Asia*, halaman 409.

52. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 409.

paknya bukan hanya pribumi, tetapi juga orang Cina sendiri. Melalui kebijakan Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) yang digulirkan oleh Gubernur-Jenderal van den Bosch pada 1830, kedua komunitas itu sama-sama menderita kerugian. Sistem ini diterapkan karena Belanda berkepentingan untuk memperoleh keuntungan besar di pasaran internasional. Oleh karena itu para petani diharuskan menyediakan sebagian lahan mereka untuk ditanami produk-produk ekspor. Akibatnya, para petani tidak lagi leluasa menentukan tanaman yang hendak diproduksi, dan pada saat yang sama orang Cina juga kehilangan akses langsung terhadap tanah.

Meskipun demikian, posisi orang Cina tetap jauh lebih baik, karena sejak awal mereka telah banyak menguasai lahan-lahan petani. Oleh karenanya, meskipun pertanian langsung berada di bawah kontrol Belanda, petani pribumi tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka terhadap orang-orang Cina. Pada tingkat tertentu, kedudukan para penguasa lokal pun tetap berada pada strata bawah dibandingkan orang Cina. Sebagaimana para petani biasa, mereka juga tidak dapat melepaskan ketergantungan dari orang Cina. Ketidakberdayaan mereka di hadapan orang Cina dan Belanda pada gilirannya semakin membuat warga pribumi menderita.

Situasi tersebut semakin parah ketika pada akhir abad 19 Belanda memasuki Periode Liberal. Periode ini ditandai dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk memberi peluang bisnis yang besar terhadap perusahaan swasta, baik yang dikelola Belanda maupun Cina. Kalangan Cina segera memanfaatkan peluang ini dengan melebarkan sayap usaha mereka ke berbagai sektor perdagangan. Namun demikian, pada periode ini orang Cina masih lebih banyak bergantung pada sektor jasa perantara. Dalam praktiknya mereka sering berperan sebagai rentenir untuk mendapatkan komoditi dari petani dan menjaga kekuasaan mereka atas pribumi. Mereka juga memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar dari monopoli atas opium, rumah gadai, dan

tempat-tempat perjudian. Di pihak lain, dengan investasi besar, perusahaan Belanda dan Eropa lain lebih banyak mengkonsentrasikan diri dalam bisnis perkebunan dan pertambangan. Mereka merekrut orang-orang pribumi dan mendatangkan orang Cina untuk keperluan tenaga kerja.

Jarak antara pribumi dan orang Cina semakin lebar ketika pemerintah kolonial benar-benar menerapkan yurisdiksi yang bersifat rasial.⁵³ Sampai 1824 perkara-perkara sipil orang Cina sepenuhnya ditangani oleh Pengadilan Eropa (*Raden van Justitie*), sedangkan masalah kriminal ditangani oleh Pengadilan Pribumi (*Landraden*). Hanya di beberapa kota, seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, masalah kriminal orang Cina ditangani oleh Pengadilan Eropa. Setelah itu, pemerintah kolonial mengubah kebijakan dengan memasukkan orang Cina sepenuhnya dalam yurisdiksi pribumi. Anehnya, menurut Purcell, pihak yang merasa keberatan bukanlah orang Cina, melainkan para pengusaha Belanda, dengan alasan mereka mendapat kesulitan ketika hendak melakukan transaksi perdagangan. Maka pada 1855, pemerintah kolonial memasukkan kembali orang Cina ke dalam Pengadilan Eropa seperti semula. Dalam perkembangannya, keputusan ini memunculkan reaksi ketidakpuasan dari orang Cina, karena dalam perkara kriminal masih tetap disamakan dengan pribumi. Maka pada 1918 desakan orang Cina dikabulkan, dan mereka benar-benar menempati status hukum yang sama dengan orang Eropa.

Pemilahan hukum yang didasarkan pada pertimbangan rasial akhirnya turut menciptakan strata sosial di kalangan penduduk Indonesia. Golongan Eropa menempati tingkat paling atas, Cina dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) lainnya seperti Arab berada di tengah, dan pribumi berada pada posisi paling bawah. Pelapisan ini ternyata tidak hanya

53. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 435-436.

berlaku dalam masalah hukum, malainkan juga tercermin dalam kedudukan ekonomi maupun budaya. Seperti yang digambarkan oleh Jan OM Broek warga pribumi mewakili golongan paling bawah yang berbasis pertanian; Cina dan Arab menjadi kelas menengah pedagang; dan orang Eropa, meskipun jumlahnya sedikit, menduduki posisi paling atas.⁵⁴ Akses mereka pada pendidikan juga berbeda-beda, di mana tidak semua sekolah menerapkan sistem yang sama. Orang Eropa memiliki sekolah sendiri dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya; orang Cina juga memiliki sekolah sendiri yang sebagian juga memakai bahasa Belanda; dan pribumi juga disediakan sekolah sendiri yang tentu saja lebih rendah mutunya.

Meskipun orang Cina tampak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, secara politis mereka tetap saja lemah. Pada umumnya perlakuan terhadap orang Cina lebih banyak didorong oleh motif ekonomi, di mana Belanda merasa sangat berkepentingan terhadap tenaga dan keterampilan mereka. Sampai 1910 gerak orang Cina benar-benar sangat terbatas.⁵⁵ Mereka hanya diperbolehkan tinggal di tempat-tempat tertentu di dalam kota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya, tempat-tempat tersebut kemudian berubah menjadi arena perdagangan dan sekaligus menjadi tempat tinggal. Jika hendak pergi ke luar dari wilayah tersebut, mereka harus mendapatkan ijin khusus dari penguasa. Mereka yang memiliki kegiatan perdagangan dengan masyarakat di luar perkampungan diharuskan untuk memiliki kartu izin yang berlaku selama satu tahun.

Baru setelah 1910 pemerintah kolonial memberikan kelonggaran kepada orang Cina untuk bepergian. Mereka tidak lagi harus membawa kartu ijin jika hendak meninggalkan

54. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 431.

55. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 439-440.

wilayah perkampungan. Namun wilayah jelajah mereka masih tetap dibatasi, yaitu hanya pada jalan-jalan utama di Jawa. Praktik ini terus berlangsung hingga 1926 pada saat pemerintah mencabut aturan pembatasan dan membebaskan orang Cina untuk bertempat tinggal di atau bepergian ke tempat-tempat yang mereka ingini.⁵⁶

Setelah Periode Liberal berakhir pada awal abad dua puluh, Belanda menerapkan kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki nasib pribumi yang cenderung semakin parah dan, pada saat yang sama, membatasi jangkauan kegiatan ekonomi orang Cina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus monopoli orang Cina atas opium dan rumah gadai.⁵⁷ Tentu saja orang Cina dirugikan oleh keputusan ini, karena keduanya merupakan bisnis utama bagi mereka yang banyak mendatangkan untung. Pada saat yang sama pemerintah kolonial mendirikan bank yang secara khusus menyediakan kredit untuk pertanian. Selain itu pemerintah juga mulai menyediakan fasilitas pendidikan tinggi bagi pribumi.

Namun kebijakan ini tetap saja tidak mampu menggeser orang Cina dari posisi mereka semula. Kekayaan yang telah diperoleh selama itu ternyata cukup untuk mempertahankan peran dan keunggulan mereka dalam bidang ekonomi. Setelah meninggalkan sektor perantara, sedikit demi sedikit mereka mulai berinvestasi dalam bidang-bidang produksi dan manufaktur. Mereka juga mulai menyalahgunakan dan mengambil alih bidang-bidang produksi, seperti batik yang semula dipegang oleh pribumi. Kecenderungan ini menandai perubahan peran ekonomi orang Cina dari kegiatan ekonomi parasitik menuju konstruktif. Jika sebelumnya keuntungan didapat dari kegiatan mereka

56. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 439-440.

57. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, halaman 444-445.

sebagai perantara atau rentenir, maka saat ini mereka memperolehnya dengan cara memproduksi.

Bagaimanapun, sampai akhir masa penjajahan hubungan orang Cina dengan pribumi tetap berjarak. Meskipun telah diterapkan Politik Etis yang cukup menguntungkan pribumi, orang Cina tetap menjadi komunitas eksklusif. Selain telah lama terbiasa dalam kondisi ini, pemerintah kolonial juga tidak pernah berminat mencairkan hubungan antarkedua komunitas. Pada saat yang sama, dengan kekayaan yang dimiliki serta status hukum yang disandang, orang Cina justru lebih dekat dengan orang Eropa. Mereka dapat masuk sekolah Belanda, bergaul dengan orang Belanda, dan pada gilirannya mengidentifikasikan diri dengan Belanda. Maka ketika memasuki masa perjuangan kemerdekaan—dan bahkan sampai pada masa Indonesia merdeka—orang Cina mendapat banyak kesulitan dalam menentukan posisi diri mereka. Bukan tidak mungkin bahwa diskriminasi Belanda yang berlangsung begitu lama telah membuat orang Cina tidak begitu peduli terhadap urusan-urusan di luar ekonomi dalam kaitannya dengan posisi diri mereka di Indonesia merdeka.

Cina dan Kemerdekaan Indonesia

Melihat sikap orang Cina yang apolitis, berbagai anggapan yang bernada pejoratif mulai beredar di tengah masyarakat. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, beberapa kalangan Eropa menilai orang Cina sebagai sosok binatang ekonomi yang rakus. Mereka rajin bekerja, berbakat dalam berdagang, ulet, cerdik, tetapi rakus, licik dan hanya mementingkan harta. Sehubungan dengan posisi mereka di Asia Tenggara, ada sementara kalangan yang menggambarkan bahwa orang Cina bersikap tidak peduli kepada siapa yang mengendalikan “sapi-sapi di wilayah ini sejauh mereka dapat menyusunya.” Dengan kata lain, mereka tidak peduli siapa yang memerintah Asia Tenggara; yang penting mereka dapat memperoleh untung. Kesan ini akan tera-

sa lebih ekstrim lagi jika dikaitkan dengan anggapan lain bahwa 'sekali Cina tetap Cina.' Meskipun demikian, ada sementara pengamat yang melihat nasib orang Cina di sini sebagai sebuah ironi. Meskipun mereka kaya, mereka sering menghadapi kesulitan dalam menentukan posisi diri mereka di tengah komunitas-komunitas lain. Jika mereka bersikap loyal terhadap pemerintah, orang akan menganggap oportunis; namun jika mereka melawan sistem yang berlaku, mereka akan segera dituduh tidak loyal dan terlibat dalam tindakan subversi. Suasana ini tampaknya dapat menggambarkan posisi orang Cina memasuki abad dua puluh di Indonesia.

Memasuki abad dua puluh situasi masyarakat Cina di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Di samping adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kolonial terhadap komunitas Cina, orang Cina di negeri ini juga mulai menunjukkan kepedulian yang besar terhadap masalah politik. Gejala ini muncul berkaitan dengan perubahan politik di negeri Cina, yaitu mulai berkembangnya kesadaran nasional. Pengaruh dari Cina telah terasa sejak akhir abad sembilan belas, karena organisasi Cina pertama, *Tiong Hwa Hwe Koen* (THHK), telah berdiri sejak 1900.⁵⁸ Berdirinya organisasi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menyatukan orang Cina di Hindia Belanda dalam rangka mencapai cita-cita ideal bangsa Cina.

Semangat nasionalisme di kalangan orang Cina Indonesia cukup tinggi. Selain berfungsi sebagai wadah untuk berhimpun, THHK juga menyediakan berbagai program kebudayaan dan ekonomi yang dimaksudkan untuk mem-

58. Charles A. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," dalam *The Chinese In Indonesia: Five Essays* (ed.) J.A.C. Mackie (Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976) halaman 26.

perkuat posisi orang Cina. Mereka menyelenggarakan kursus-kursus bahasa Cina dan juga menyelenggarakan sekolah bagi anak-anak Cina di Indonesia. Aktivis organisasi ini juga mensponsori berdirinya Kamar Dagang Cina (*Siang Hwees*) bagi kepentingan ekonomi mereka dengan dunia luar. Hubungan mereka dengan negeri leluhur sangat erat. Beberapa kali misi diplomatik Cina mengunjungi Hindia Belanda dengan maksud menjalin kontak dengan anggota THHK. Apalagi saat itu undang-undang kewarganegaraan Cina mengakui mereka sebagai warga negara Cina.⁵⁹ Oleh karenanya, pemerintah kolonial sendiri mulai disibukkan oleh kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Cina ini.

Setelah kaum nasionalis Cina yang dipimpin oleh Sun Yat Sen berhasil menguasai panggung politik Cina, nasionalisme warga keturunan di Indonesia semakin menjadi militan. Hal ini di antaranya ditandai oleh keberhasilan THHK merekrut tokoh-tokoh bisnis ke dalam organisasi ini. Sementara itu pemuka-pemuka tradisional Cina yang lebih loyal kepada Belanda —dan lebih bersifat apolitik— mulai kehilangan pengaruh. Meskipun mereka masih menjadi pemimpin formal di kalangan masyarakat Cina, dalam kenyataan adalah tokoh-tokoh THHK yang sebenarnya lebih berpengaruh.

Kesetiaan terhadap negeri leluhur tampak dipicu oleh keyakinan bahwa bagaimanapun keberadaan mereka di Indonesia tetaplah sebagai orang asing. Oleh karenanya, semangat nasionalisme yang mulai berkobar di Cina muncul sebagai momentum bagi orang Cina Indonesia untuk mendefinisikan kembali identitas kultural-politik mereka yang selama ini tidak jelas. Semangat ini semakin menguat

59. Leo Suryadinata, *China and Asian States: Chinese Dimension* (Singapore: Singapore University Press, 1985) halaman 24.

karena bercampur dengan sikap anti kolonialisme dan imperialisme yang merebak di seluruh Asia.

Pihak pribumi tentu merasa tidak senang terhadap kecenderungan politik orang Cina. Selain tidak memiliki loyalitas terhadap Indonesia, mereka juga memperlemah posisi ekonomi kebanyakan penduduk. Banyak pengusaha pribumi yang semakin terjepit karena kalah bersaing dengan orang Cina yang memiliki modal besar. Sebagai respons terhadap gejala ini, misalnya, RM Tirto Adi Suryo dan H. Samanhudi berusaha menggalang kekuatan pengusaha pribumi melalui Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan utama gerakan ini adalah untuk meningkatkan usaha dagang pribumi, menjalin jaringan antarpengusaha pribumi dan memajukan Islam.

Anggota SDI pernah melancarkan boikot terhadap Cina dengan cara tidak membeli barang dagangan mereka. Pada waktu itu pengusaha Cina mulai menguasai barang-barang yang berkaitan dengan produksi batik seperti *mori* (kain putih), *malam* dan zat pewarna. Mereka memang tidak memproduksi langsung, melainkan bertindak sebagai penyalur (*leveransir*). Namun karena modal yang dimiliki besar, para *leveransir* dapat dengan mudah mempermainkan dan membuat pengrajin batik menjadi tergantung. Dihadapkan dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang berkobar, gerakan anti-Cina yang bermula di Solo sempat meluas, dan bahkan menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik.

Dominasi THHK di kalangan orang Cina Indonesia mulai melemah pada 1928 manakala salah seorang anggotanya mendirikan organisasi tandingan, *Cung Hwa Hwe* (CHH). Pendiri organisasi ini, H.H. Kan, merasa bahwa THHK tidak representatif karena kurang mengakomodasi kepentingan orang Cina di Hindia Belanda. Namun dalam konteks internasional, kemunculan organisasi tandingan ini sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan di Cina antara kaum nasionalis, Kuomintang, dan kaum komunis.

Akibatnya, banyak orang Cina Indonesia kesulitan menentukan sikap politik mereka, karena secara ideologis kaum komunis tidak akan dapat menampung aspirasi mereka yang cenderung kapitalistik.

Aspirasi politik CHH sangat berbeda dari THHK, karena yang pertama lebih menekankan ideologi integrasionis. Mereka tidak setuju atas sikap kaum nasionalis THHK yang lebih loyal kepada negara leluhur. Sebaliknya mereka secara terang-terangan menyatakan loyal kepada pemerintah Hindia Belanda.⁶⁰ Agenda utama yang mereka tekankan adalah upaya memperjuangkan kepentingan orang Cina di negeri ini agar memperoleh perlakuan yang baik dari penguasa.

Pada 1931 muncul organisasi tandingan lain yaitu Partai Tionghwa Indonesia (PTI). Baik CHH maupun PTI sama-sama memiliki kecenderungan integrasionis, di mana komunitas Cina dipandang sebagai satu kesatuan kepentingan politik yang terpisah dari komunitas lain. Organisasi politik ini didirikan sebagai protes terhadap sikap CHH yang tidak memberikan apresiasi terhadap perjuangan kaum nasionalis Indonesia yang berusaha memperoleh kemerdekaan. Selain itu, kalangan PTI juga merasa bahwa CHH hanya mengakomodasi kepentingan orang Cina kaya.

Benih-benih asimilasi mulai tumbuh dari organisasi ini, meskipun masih sangat terbatas. Misalnya, Tjoa Sik Ien, salah satu tokoh pendidikan PTI, menerapkan kebijakan yang memperkenankan pribumi masuk sekolah Cina.⁶¹ Kendati demikian, sikap ini belum menjadi kebijakan organisasi, karena kebanyakan tokohnya masih memandang bahwa orang Cina tidak mungkin bisa berasimilasi dengan pihak pribumi. Maka ketika Kwee Hing Tjiat, salah seorang edi-

60. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 33.

61. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 35.

tor *Sin Po*, yang pernah menjadi pengikut paham nasionalis Cina, mengemukakan ide tentang asimilasi, banyak kalangan PTI merasa keberatan.⁶² Mungkin karena alasan ini, PTI dan juga Partai Arab Indonesia (PAT), tidak dimasukkan sebagai anggota penuh dalam gabungan partai-partai politik bangsa Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaan.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, posisi politik orang Cina belum tampak jelas. Anggota CHH terbukti lebih loyal kepada Belanda, sementara PTI lebih mementingkan pencapaian aspirasi kelompok Cina. Kalaupun ada orang Cina yang masuk dalam jajaran kelompok nasionalis Indonesia, hal itu lebih merupakan keputusan dan partisipasi pribadi yang sama sekali tidak mewakili komunitas. Fenomena ini terus berlangsung sampai pendudukan Jepang, di mana orang Cina masih belum jelas posisinya. Ketika Jepang mendarat di Indonesia, proteksi Belanda terhadap orang Cina secara otomatis hilang. Pada saat itulah terjadi penjarahan dan perampokan terhadap orang Cina dalam skala besar yang dilakukan oleh pribumi. Pada tingkat tertentu, penguasa Jepang juga menaruh rasa curiga atas kesetiaan orang Cina. Maka, untuk mengatasi hal itu, Jepang secara langsung turun tangan dalam pemilihan ketua komunitas Cina sebagaimana halnya Belanda ketika memilih Kapiten Cina.⁶³

Memasuki masa kemerdekaan, orang Cina masih tetap belum menentukan pilihan politik mereka. Beberapa orang Cina yang kemudian terlibat dalam perjuangan mendirikan negara dan dalam proses penyelenggaraan pemerin-

62. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 36.

63. Kolonel Nakayama Yoshito, yang bertindak sebagai salah satu komandan pasukan Jepang di Batavia, pernah berpidato di hadapan masyarakat Cina setempat. Secara eksplisit ia kemukakan bahwa pada dasarnya tentara Jepang meragukan kesetiaan mereka. Hal ini, menurut Nakayama, disebabkan oleh kecenderungan orang Cina di Jawa yang lebih memihak rezim Chinking dan anti-Jepang. Lihat Shigeru Sato, *War, Nationalism and Peasants* (St. Leonards : Allen & Unwin, 1994), halaman 42.

tahan lebih banyak bertindak atas nama pribadi. Terhadap situasi yang demikian itu, kalangan pribumi merasa tidak puas. Apalagi sebelumnya terbukti bahwa pemimpin CHH jelas-jelas berpihak kepada Belanda. Ketidaksenangan pribumi itu kemudian terekspresikan dalam berbagai peristiwa, khususnya ketika Belanda hendak menegakkan kembali kekuasaan mereka di negeri ini. Salah satu peristiwa yang cukup dikenal adalah tragedi yang terjadi di Tangerang pada 1946. Sebanyak 600 orang Cina mati terbunuh dalam huru-hara yang berlangsung selama tiga hari; 1.500 rumah penduduk Cina dibakar, dan tidak kurang dari 25.000 orang Cina melarikan diri ke Jakarta. Pada akhir 1946 peristiwa serupa juga terjadi di Bagansiapiapi yang memakan korban 200 jiwa. Tahun berikutnya peristiwa yang sama terjadi di Palembang yang menelan korban 250 jiwa.⁶⁴

Ada komentar yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang Cina bersikap netral. Akan tetapi, mereka masuk dalam posisi terjepit ketika terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan antara pribumi dan Belanda. Mereka menjadi sasaran ketidaksenangan pribumi atas perilaku dan sikap mereka pada masa-masa sebelumnya. Sementara itu Belanda tidak bisa berbuat banyak, karena harus menghadapi perlawanan pribumi di semua tempat.

Khususnya setelah tragedi Tangerang, banyak orang Cina yang tinggal di kota kecil terdorong untuk pindah ke kota besar. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan cara bergabung dengan sesama orang Cina, karena merasa terancam oleh pribumi dan juga oleh pertempuran yang terjadi di sekitar mereka. Di tempat-tempat yang baru itu, orang Cina berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam konflik perjuangan kemerdekaan. Sebaliknya, melalui pe-

64. Garth Alexander, *Silent Invasion: the Chinese in Southeast Asia* (London : Macdonald, 1973), halaman 37.

rundingan dengan pihak Belanda, mereka mulai menyusun pasukan sendiri yang dinamakan *Pao An Tui* untuk membentengi diri.⁶⁵ Pasukan ini secara khusus menjaga dan mengamankan komunitas Cina dari gangguan dan akibat-akibat peperangan. Tentu saja keputusan tersebut semakin mendatangkan rasa tidak senang dari pihak pribumi.

Setelah perundingan Meja Bundar ditandatangani, posisi politik orang Cina menjadi semakin sulit. Di satu sisi, mereka harus menerima kenyataan bahwa penguasa negara yang baru adalah pribumi yang sejak berabad-abad berada dalam strata paling bawah. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa partisipasi mereka dalam menegakkan kemerdekaan sangatlah sedikit. Sementara itu, ketidaksenangan pribumi, khususnya kaum nasionalis dan golongan kanan, juga tidak dapat dibendung. Masalah tersebut menjadi semakin rumit manakala persaingan politik dan ekonomi antara dua komunitas ini sudah mengakar lama dalam sejarah.

Dalam pada itu, visi politik orang Cina masih tetap dikuasai oleh kaum integrasionis. Oleh karena berpegang pada anggapan bahwa orang Cina berbeda dari pribumi dalam segala hal, maka perasaan sebagai minoritas menjadi kuat. Rasa beda ini semakin mendalam ketika komunitas Cina memiliki sarana-sarana untuk terus memperkuat identitas kultural mereka. Mereka mendirikan sekolah Cina, kelompok kebudayaan Cina, dan juga media cetak berbahasa Cina. Salah satu wadah yang mengayomi kepentingan-kepentingan tersebut adalah Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dibentuk pada 1954.⁶⁶

65. Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983), halaman 26.

66. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indoensia," halaman 45.

Secara formal Baperki merupakan organisasi massa, tetapi pengaruh politiknya cukup kuat. Organisasi ini berhasil menarik simpati orang Cina, baik dari kalangan *keturunan* maupun *totok*. Aspirasi politik anggota Baperki cukup beragam, tetapi pemimpin besarnya, Siauw Giok Tjhan, memiliki kedekatan dengan kelompok komunis (PKI).⁶⁷ Agenda-agenda politik Baperki masih mirip dengan organisasi sosial dan politik Cina sebelumnya, yaitu mengupayakan kepentingan orang Cina agar tertampung dalam perpolitikan Indonesia. Siauw merupakan seorang figur yang tidak menyukai ide-ide asimilasi atau pembauran kultural antara Cina dan pribumi. Baginya masyarakat Indonesia adalah majemuk, dan orang Cina merupakan salah satu unit dari kemajemukan itu.

Sampai akhir 1950an belum ada perubahan yang berarti dalam peta politik orang Cina maupun dalam hubungan mereka dengan pribumi. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, di mana semangat anti-Cina terus menguat dan keinginan untuk memperkokoh posisi ekonomi pribumi juga menguat. Pada periode ini pemerintah Indonesia mulai menerapkan Politik Benteng yang bertujuan untuk melaksanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor dan sekaligus membatasi peran Cina dalam kehidupan ekonomi. Namun alokasi impor yang disediakan pemerintah bagi pengusaha pribumi yang hanya 10-40 persen telah mendatangkan protes dari orang Cina.

67. Tidak ada data yang menyatakan bahwa Siauw terlibat langsung dalam PKI. Namun kedekatannya dengan kalangan PKI dapat dilihat, misalnya, dari komentar Yap Thiam Hien, tokoh asimilasi dan mantan wakil Siauw di Baperki yang kemudian memisahkan diri, bahwa Siauw cenderung melihat masalah hubungan pri-nonpri berdasarkan kacamata komunis. Saat terjadi G 30 S/PKI, nama Siauw juga tercantum dalam daftar jajaran Dewan Revolusi, meskipun setelah kejadian berlalu ia menyanggah bahwa dirinya tidak mengerti mengapa Letkol Untung memasukkan namanya dalam daftar tersebut. Lihat, Charles A. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 55-62.

Pada 1956 Indonesia juga menerapkan Gerakan Assaat yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan orang Cina dalam perekonomian Indonesia.⁶⁸ Tuntutan lainnya adalah diadakannya garis pemisah antara bangsa Indonesia dan warga negara Cina serta perlindungan khusus bagi kepentingan pribumi. Gerakan ini tidak sepenuhnya berhasil; di antaranya disebabkan oleh praktik kolusi yang terjadi antara pengusaha Indonesia dan Cina sendiri. Namun pada 1959, keinginan untuk menegakkan ekonomi pribumi semakin didukung pemerintah ketika dikeluarkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10.⁶⁹ Kebijakan ini menetapkan larangan kegiatan perdagangan bagi pihak asing di daerah Swatantra I dan II serta Karesidenan. Dengan sendirinya banyak orang Cina, yang saat itu masih menganut warga negara ganda atau asing, harus pindah ke kota yang lebih besar dan meninggalkan jaringan dagang yang selama itu mereka kuasai.

Keputusan pemerintah ini sempat membuat hubungan politik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) memburuk. Kalangan pejabat tinggi RRC berulang kali memprotes sambil mengecam pemerintah Indonesia. Mereka juga menyebarkan propaganda terhadap pemerintah Indonesia melalui stasiun-stasiun radio yang mereka pancarkan ke luar Cina. Namun tampaknya mereka melihat bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh Presiden Soekarno; mereka juga menilai bahwa diskriminasi terhadap orang Cina lebih banyak dilancarkan oleh kalangan sayap kanan dan Angkatan Darat yang disebut sebagai unsur-unsur reaksioner dalam rezim Soekarno.⁷⁰

68. Mely G. Tan, "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia," *Prisma* (8 : Agustus 1976)

69. J.A.C. Mackie, "Anti Chinese Outbreaks in Indonesia," dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (ed.) J.A.C. Mackie (Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976) halaman 89.

70. J.A.C. Mackie, "Anti Chinese Outbreaks in Indonesia," halaman 91 & 110.

Penilaian RRC cukup beralasan, karena menteri perdagangan yang mengumumkan keputusan tersebut, Rachmat Moeljosemito, berasal dari unsur Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan pihak yang paling keras melaksanakan keputusan adalah Angkatan Darat.⁷¹ Seperti terlihat di Jawa Barat, orang Cina memang diharuskan dan dipaksa keluar dari kantung-kantung mereka di kota-kota kecil. Proses pelaksanaannya sendiri dipimpin langsung oleh Kolonel Kosasih. Dari sini terlihat bahwa keduanya tidak memiliki kesamaan visi politik dengan Soekarno yang senantiasa dekat serta melindungi kelompok kiri. Maka, meskipun pemerintah RRC sempat merepatriasi Cina Indonesia sebanyak 400 ribu orang, mereka akhirnya menghentikan protes-protes mereka sendiri.⁷²

Kecenderungan Soekarno untuk terus melindungi golongan komunis sedikit banyak telah memberi angin kepada Baperki. Meskipun secara formal organisasi ini tidak punya hubungan dengan PKI, pemimpinnya memiliki kecenderungan kuat terhadap pola pikir politik komunis. Dalam banyak kesempatan, misalnya, Siauw senantiasa merujuk sistem Cina dan Uni Sovyet sebagai model ideal bagi penanganan masalah minoritas. Ia juga sangat dekat dengan tokoh PKI Tan Ling Djie.⁷³ Pemimpin Baperki lain, Oei Tjoe Tat, yang bertindak sebagai wakil Siauw, jelas-jelas mengadakan kerjasama dengan pihak komunis. Untuk itu, dengan dukungan Soekarno dan kalangan komunis, visi politik Baperki yang memisahkan orang Cina dari pribumi tetap dapat bertahan.

Sebenarnya, sikap Siauw yang terus berupaya menyeret Baperki ke dalam kelompok komunis telah dikritik oleh

71. J.A.C. Mackie, "Anti Chinese Outbreaks in Indonesia," halaman 84.

72. David Mozingo, *Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1976), halaman 175.

73. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 47.

Yap Thiam Hien.⁷⁴ Akan tetapi, kedekatan Siau-w dengan kalangan Soekarno mampu melindungi Siau-w untuk terus memimpin Baperki dan menjalankan aspirasi politiknya. Bahkan ketika sekelompok tokoh Cina yang tergabung dalam golongan asimilasionis membuat manifesto pada 1960, posisi Siau-w tetap tidak tergoyahkan. Bagi kalangan asimilasionis seperti Auw-jong Peng Kun dan Injo Beng Goat, sikap politik Siau-w sama halnya dengan sikap loyal ber-syarat.⁷⁵ Dengan kata lain, karena golongan integrasionis selalu menekankan persamaan hak terhadap minoritas, mereka akan loyal terhadap negeri ini selama mereka merasa diperlakukan secara adil. Seharusnya, menurut golongan asimilasionis, orang Cina memberikan loyalitas mereka sepenuhnya kepada negara Indonesia dengan cara melebur-kan diri ke dalam masyarakat setempat.

Hubungan pribumi dengan orang Cina sepanjang lima tahun pertama 1960an sangat tidak stabil. Pemulangan orang Cina dalam jumlah besar pada tahun-tahun awal segera di-susul oleh bentrokan yang terjadi di banyak tempat. Ham-pir di seluruh kota di Jawa dan beberapa lagi di luar Jawa, pribumi meluapkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ekonomi dan sikap politik komunitas Cina. Seperti biasa, yang dijadikan sasaran adalah harta benda dan toko-toko yang dimiliki oleh orang Cina. Rangkaian kerusuhan ini semakin memuncak ketika PKI gagal melakukan kudeta yang telah memakan korban beberapa jenderal dari Angkat-an Darat. Masyarakat segera bereaksi untuk menumpahkan kemarahan terhadap sesuatu yang berbau Cina, karena se-belumnya memang terlihat tanda-tanda bahwa banyak pemimpin Baperki yang berkolaborasi dengan pihak PKI. Beberapa lama kemudian, pemerintah mengambil tindakan

74. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 47.

75. Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 55.

untuk menutup sekolah-sekolah Cina, Kamar Dagang Cina, koran-koran berbahasa Cina dan segala sesuatu yang menjurus pada eksklusivitas komunitas ini.

Pandangan Leo Suryadinata mungkin dapat dibenarkan bahwa pada dasarnya pengusaha Cina tidak memiliki kepentingan terhadap ideologi komunis.⁷⁶ Kedekatan mereka dengan PKI lebih disebabkan kepentingan pragmatis, karena PKI terus melindungi kepentingan mereka dibandingkan kelompok nasionalis maupun golongan kanan yang selalu bersikap keras. Kendati demikian, sikap apolitik orang Cina ini tetap tidak akan mampu meredakan ketidaksenangan pribumi terhadap mereka. Paling tidak, pihak pribumi melihat bahwa sejak kemerdekaan—bahkan mungkin sejak masa kolonial—kelompok Cina tidak cukup memberikan penghargaan terhadap nasib yang diderita pribumi. Sebaliknya, meskipun mungkin berada di luar kehendak mereka, orang Cina secara umum lebih banyak menikmati kekayaan yang dipandang milik pribumi.

Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama tahun-tahun awal 1960an lebih banyak menjadi pemicu atas masalah yang sebenarnya sudah lama terpendam. Hal ini semakin rumit ketika upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi pribumi sepanjang tahun 1950 tidak memperlihatkan hasil yang memadai. Maka yang terjadi adalah ungkapan ketidakpuasan dalam bentuk gerakan massa yang sulit dikendalikan. Misalnya, sepanjang 1963 terjadi amukan massa terhadap milik orang Cina di berbagai kota seperti Bandung, Sukabumi, Cirebon, Medan, Glodok, Surabaya dan sebagainya.⁷⁷ Setelah terjadi kudeta PKI amukan massa semakin meluas dan objeknya

76. Suryadinata, *China and Asean States*, halaman 21.

77. Mackie, "Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia," halaman 97-100.

bukan hanya pertokoan yang dimiliki Cina, tetapi juga bangunan-bangunan lain yang dimiliki oleh orang Cina. Konflik pribumi-Cina terus saja terjadi, meskipun rezim Sukarno telah jatuh. Pada 1967 sebanyak 300-400 orang Cina menjadi korban dari amukan suku Dayak di Kalimantan. Sumber lain mengatakan jumlah korban bahkan mencapai 4000-5000 jiwa. Masalahnya bermula dari pembunuhan terhadap orang Dayak oleh anggota gerakan komunis Paraku/PGRS yang dibantu oleh Cina. Selain memakan korban, peristiwa ini juga mengakibatkan ribuan orang Cina melarikan diri ke pedalaman atau ke wilayah lain.⁷⁸

Sampai masa Orde Baru posisi orang Cina tetap rentan. Mereka dengan mudah menjadi sasaran ketidakpuasan massa atas kondisi ketimpangan yang terjadi di sekeliling mereka. Bahkan konflik antara pribumi-Cina terus saja berlangsung sepanjang pemerintahan Orde Baru. Meskipun protesnya ditujukan kepada Jepang, misalnya, peristiwa Malari pada 1974 telah menjadikan pihak Cina sebagai sasaran pengrusakan. Tahun sebelumnya pengrusakan serupa juga terjadi di Bandung, karena dipicu peristiwa tertabraknya tukang becak oleh orang Cina. Pada dekade 1980an muncul lagi kejadian anti-Cina dalam skala besar yang dimulai dari Solo.⁷⁹ Sementara pada 1990an kejadian serupa muncul di beberapa tempat seperti Medan, Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok dan sebagainya. Ada kalanya kejadian-kejadian tersebut dipicu oleh ketegangan langsung antara orang Cina dengan pribumi. Namun ada kalanya juga persoalan utamanya sama sekali tidak bersinggungan dengan masalah Cina.

Meskipun demikian, posisi orang Cina pada masa Orde

78. Alexander, *Silent Invasion*, halaman 2.

79. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, bab terakhir "The New Order Accommodation," halaman 150-167.

Baru sangat berbeda dari posisi mereka pada zaman Orde Lama. Seperti yang dikemukakan Charles A. Coppel aktivitas politik mereka sama sekali mati.⁸⁰ Beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan politik lebih bertindak atas nama pribadi, dan tidak berhubungan dengan status kecinaan secara komunal. Terlihat, misalnya, tidak ada organisasi Cina yang secara khusus ditujukan untuk mencapai kepentingan politik komunitas ini. Salah satu organisasi yang menonjol pada periode ini, yaitu Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) yang didirikan pada 1977, merupakan perpaduan antara inisiatif beberapa tokoh Cina dan pemerintah.⁸¹ Tujuan utama organisasi ini adalah mendorong proses asimilasi orang Cina dengan pribumi. Di antara cara yang ditempuh adalah menjalin kerjasama, dialog, kawin antaretnik, ganti nama, atau konversi ke dalam Islam. Dengan demikian, aspirasi politik yang bersifat integrasionis praktis tersingkir.

Situasi ini sebenarnya juga merupakan dampak dari kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru. Sejak awal pemerintah telah mencanangkan stabilitas politik dalam rangka membangun ekonomi yang stagnan sejak tahun-tahun akhir pemerintah Orde Lama. Langkah yang ditempuh adalah mengurangi keterlibatan rakyat dalam dunia politik melalui fusi partai politik dan kebijakan massa mengambang. Akibatnya, ruang partisipasi politik bagi rakyat menyempit, termasuk juga orang Cina. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat mendorong munculnya persoalan SARA (Suku, Ras dan Agama). Oleh karenanya, dalam konteks Cina, pemerintah tidak segan-segan menutup semua kegiatan dan organisasi yang

80. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, halaman 167.

81. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, halaman 165.

bersifat eksklusif. Bagaimanapun, masih terdapat kesan bahwa pemerintah Orde Baru, dalam soal-soal politik, menganaktirikan orang Cina, karena sejak awal mereka tidak pernah melibatkan orang Cina dalam pemerintahan. Dibanding dengan orang Arab, tingkat keterwakilan orang Cina dalam eksekutif sangat jauh. Belum lagi, meskipun kebanyakan orang Cina sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka masih juga disebut warga keturunan (WNI Cina).⁸²

Agenda politik Orde Baru secara umum cukup berhasil, karena kebijakan tersebut dapat membuahkan kestabilan dan sekaligus memperkuat kebangsaan. Namun di bidang ekonomi pemerintah tampaknya masih dihadapkan pada persoalan besar. Kebijakan yang dijalankan masih belum dapat mengatasi adanya kesenjangan, khususnya antara pribumi dan Cina. Sejak awal Orde Baru, misalnya, telah muncul istilah *cukong* untuk menyebut pengaruh pengusaha Cina dalam bidang ekonomi maupun politik. Para *cukong* memang tidak memiliki posisi formal dalam pemerintahan, tetapi kedekatan hubungan mereka dengan pejabat tinggi dan militer membuat daya tawar mereka kuat.⁸³ Misalnya, mereka mampu mempengaruhi proses tender dan menentukan proyek, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sebagai contoh, Liem Sioe Liong, yang disinyalir dekat dengan penguasa, berhasil menguasai kerajaan bisnis dengan aset tiga setengah milyar dolar pada 1980.⁸⁴

Kaitan antara pengusaha Cina dan pejabat pribumi tampaknya sudah menjadi rahasia umum dalam praktik poli-

82. Patrick Guinness, "Local Society and Culture," dalam *Indonesia's New Order* (ed.) Hal Hill (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), halaman 287.

83. Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre, "Politics," dalam *Indonesia's New Order*, halaman 34.

84. Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre, "Politics," dalam *Indonesia's New Order*, halaman 34.

tik Indonesia. Sementara kebijakan ekonomi yang berusaha membentengi kepentingan pribumi belum berjalan seperti diharapkan. Bahkan pada tingkat tertentu pemerintah Orde Baru justru lebih mengakomodasi kesiapan orang Cina dalam kegiatan ekonomi untuk mempercepat pembangunan. Mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan bisnis atau mendanai dan menjalankan berbagai proyek strategis dengan nilai milyaran atau trilyunan rupiah. Mereka juga menjadi bagian penting dalam kegiatan impor-ekspor maupun kegiatan investasi yang melibatkan lembaga dana dan jaringan bisnis internasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga tidak membuat batasan-batasan ruang bisnis seperti yang terjadi pada 1959. Akibatnya, terlalu banyak pengusaha Cina yang menguasai industri hulu sampai hilir. Di samping itu, mereka juga menguasai jaringan bisnis eceran. Maka dapat dikatakan bahwa, meskipun proses asimilasi berlangsung cukup baik, jurang pemisah dalam ekonomi belum dapat mencairkan hubungan antara orang Cina dan pribumi. Orang Cina memang tidak lagi menunjukkan eksklusivitas budaya mereka. Kebanyakan generasi mudanya juga sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Namun posisi ekonomi serta perlakuan pemerintah terhadap komunitas ini tetap membuat orang Cina berjarak dari pribumi. Wajar kalau kemudian mereka sering dijadikan kambing hitam oleh pribumi dalam setiap peristiwa ketidakpuasan.

BAB III

RRC sebagai Adidaya Baru dan Cina Perantauan: ke Arah Pembentukan "Cina Raya"?

•••• Tidak peduli apakah kucing itu berwarna putih atau hitam. Yang penting adalah, kucing itu dapat menangkap tikus.

Deng Xiaoping

Menjadi kaya adalah mulia.

Deng Xiaoping

Konsep "Negeri di Tengah Dunia" (Zhongguo) sedikit demi sedikit telah ditinggalkan, dan yang muncul sekarang adalah konsep "Cina Raya" (Zhonghua).

A. Dahana

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah negara besar dengan luas wilayah 9.561.000 kilometer, sedikit lebih besar dari Amerika Serikat (AS). Setelah Uni Soviet mengalami disintegrasi, RRC berbatasan dengan 14 negara: Korea Utara, Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos dan Vietnam.

Jumlah penduduk RRC adalah yang terbesar di dunia. Pada Februari 1995, jumlahnya mencapai 1,2 milyar orang, dan angka itu diperkirakan akan mencapai 1,3 milyar lima tahun mendatang. Terlepas dari ketatnya program keluarga berencana yang dijalankan pemerintah negara itu, jumlah penduduk terus bertambah rata-rata 17 juta tiap tahunnya,

dengan jumlah angkatan kerja diperkirakan meningkat sekitar 14 juta setiap tahun.

Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk merupakan sumber sekaligus hambatan kemajuan bangsa Cina. Dalam sejarahnya yang sangat panjang, yang dapat dilacak hingga sedikitnya 1.500 tahun Sebelum Masehi (SM) dan tetap besar perannya dalam pembentukan jati diri mereka hingga dewasa ini, bangsa ini telah mengalami jatuh-bangun yang mengharukan sekaligus mengagumkan. Kini, di penghujung abad ke-20, bangsa ini tengah menggeliat menjadi adidaya baru. Ini tampak dari kemajuan sangat mengesankan yang dicapai RRC selama dua dekade terakhir, terutama dalam bidang ekonomi, setelah negara itu berubah haluan dari komunisme ke pasar bebas. Dalam suatu proses yang sangat kompleks tetapi memakan waktu yang tidak terlalu lama, geliat ini memunculkan ancaman "Cina Raya" (*Greater China*) yang menggelisahkan dan sekaligus menyedot perhatian seluruh dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh kebangkitan ekonomi RRC yang dibiayai dan dikelola dalam skala besar bukan oleh investor Barat atau lainnya, tetapi oleh "Jaringan Bambu" (*The Bamboo Network*) Cina perantauan. Kebangkitan RRC, hubungannya dengan "Jaringan Bambu" Cina perantauan dan implikasi internasionalnya dalam bentuk kemungkinan "Cina Raya" inilah yang akan dibahas dalam bab ini.

RRC: Dari Mao hingga Deng

Bangsa Cina adalah bangsa yang tingkat peradabannya diakui dunia sangat kaya dan tinggi, dan hingga kini masih jelas jejak-jejaknya. Tetapi, sejak sekitar masa wafatnya pemikir besar Konfusius (479 SM), bangsa ini telah menjadi pusat konflik dan pertikaian yang melibatkan banyak dinasti dan kekaisaran. Pada 221 SM, dinasti Qin berhasil menyatukan kembali bangsa Cina dan menerapkan aturan hukum dan administrasi yang keras. Bertentangan dengan yang diajarkan Konfusius, dinasti ini mengagungkan peperangan dan mengabaikan seni dan kesusastraan. Dinasti ini juga

menomorsatukan pertanian sebagai landasan utama kekuatan militer bangsa Cina. Pada 226 SM, dinasti Qin digantikan oleh dinasti Han yang berkuasa hingga tahun 221 M (selanjutnya, rujukan kepada tahun "Masehi" ini tidak akan digunakan lagi). Di bawah dinasti ini, ajaran-ajaran Konfusius mendapat tempat terhormat, bahkan dijadikan "agama" negara. Seni dan kesusastraan kembali digalakkan. Para kaisar dinasti Han juga mengubah sistem feodal dengan mengisi birokrasi negara dengan orang-orang yang terdidik.

Setelah bangsa ini pecah-belah akibat invasi bangsa Tartar, dinasti Tang berhasil menyatukannya kembali pada 618. Pada masa inilah diperkenalkan sistem ujian negara yang sangat ketat untuk memperoleh tenaga-tenaga terdidik yang akan mengisi birokrasi negara. Oleh para penulis sejarah, hal ini dipandang sebagai contoh sebuah sistem administrasi yang maju saat itu.¹ Tetapi, daratan Cina kembali mengalami invasi kekuatan luar pada 1280. Kali ini, kekuatan asing itu adalah bangsa Mongol yang memerintah dengan amat kejam dan menyebabkan banyak sekali orang Cina yang dibunuh dan lari ke wilayah-wilayah tetangganya.

Pemerintahan bangsa Mongol ini baru berhasil diakhiri dengan tampilnya dinasti Ming pada 1368. Di bawah dinasti ini, wilayah kekaisaran diperluas hingga mencakup Manchuria di utara dan Yunan di selatan. Selain itu, kekaisaran juga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi laut ke Asia Tenggara, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, dan

-
1. Untuk sejarah bangsa Cina, lihat antara lain: John L. Nevius, *The Chinese* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1995); David Bonavia, *Cina dan Masyarakatnya*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Dede Oetomo (Jakarta, Erlangga, 1980). Khusus mengenai sistem administrasi yang terutama ditulangkupungungi oleh kelas terdidik dan peran Konfusianisme di dalamnya, lihat antara lain studi sosiologis klasik oleh Max Weber, *The Religion of China: Confucianism and Taoism*, diterjemahkan dan disunting dari bahasa Jerman oleh Hans H. Gerth (New York: The Free Press, 1964); dan Raymond Dawson, *Kong Hu Cu: Penata Budaya Kerajaan Langit*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Y. Joko Suyono (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993).

Afrika Timur. Tetapi dinasti ini justru hancur karena pertikaian internal, dan digantikan oleh dinasti Qing.

Sejarah bangsa Cina moderen sedikitnya harus dilacak pada kekaisaran dinasti Qing ini, yang berkuasa hingga 1912.² Pada masa inilah berlangsung "Perang Candu" (*Opium War*), di mana mereka mengalami kekalahan besar dan mengakibatkan ditandatanganinya Perjanjian Nanjing (*Treaty of Nanjing*). Setelah itu, dinasti Qing mengalami kemunduran serius karena perpecahan internal. Lalu, tangan-tangan asing kembali menjarah Cina, di mana Rusia, Perancis dan Jepang menduduki bagian-bagian tertentu wilayahnya. Sistem monarki yang sudah lama menjadi ciri pemerintahan di Cina sendiri akhirnya dihapuskan pada 1911, menyusul berlangsungnya revolusi angkatan bersenjata di Wuhan.

Makin merosotnya kedaulatan bangsa Cina di mata kekuatan luar membuat banyak rakyat kecewa. Lalu, Dr. Sun Yat-sen, seorang dokter didikan Barat dan dapat dipandang sebagai "Bapak Cina Moderen," tampil menginspirasi tumbuhnya gagasan-gagasan revolusioner di kalangan kaum muda. Ia membentuk partai nasionalis dan mempertahankan upaya berkelanjutan untuk mengubah Cina secara radikal. Meskipun usahanya tidak sepenuhnya berhasil, pengaruhnya terus mengakar terutama di kalangan anak-anak muda Cina yang terdidik. Antara lain karena pengaruh itulah, pada 4 Mei 1919 berlangsung demonstrasi mahasiswa berskala besar di Beijing yang memprotes diserahkannya pelabuhan Qingdao di Shandong kepada Jepang. Demonstrasi ini lalu berkembang menjadi sentimen anti-Barat, khususnya Inggris. Sun Yat-sen lalu membuat aliansi yang erat dengan pemerintahan Uni Soviet, dan memperoleh ban-

2. Banyak literatur yang dapat dirujuk untuk melihat secara lebih detail sejarah Cina moderen. Paparan berikut kami sarikan dari John King Fairbank, *The Great Chinese Revolution 1800-1985* (New York: Harper & Row Publishers, 1986); dan Lucien Bianco, *Origins of the Chinese Revolution, 1915-1949*, diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Muriel Bell (Stanford, California: Stanford University Press, 1971).

tuan senjata dan keuangan dari negara adidaya itu. Akhirnya, barisan yang dibentuk Sun Yat-sen berhasil menduduki Guangzhou pada 1923.

Perubahan penting lain yang mengawali sejarah Cina moderen adalah pembentukan Partai Komunis Cina (PKC) pada 1921. Kedua partai yang ada saat itu, Kuomintang yang berhaluan nasionalis dan PKC, pada awalnya bekerjasama. Tetapi, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, pada 1935 PKC menyelenggarakan "Long March" untuk menjatuhkan pemerintahan Kuomintang. Perseteruan antara kedua partai ini sejenak terhenti dengan masuknya Jepang ke Cina pada Juli 1937, yang mengharuskan kedua kekuatan itu bekerja sama.

RRC berdiri pada 1 Oktober 1949, setelah PKC, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, berhasil mengalahkan kaum nasionalis yang mendapat dukungan AS dalam perang saudara yang terjadi menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sejak itu, para pemimpin komunis memainkan peran sangat penting dalam kehidupan politik dan ekonomi RRC hingga dewasa ini.

Pada mulanya, Uni Soviet memberi bantuan dana dan teknis kepada RRC, dan sekaligus menjadi model peran baginya. Tetapi kedua negara sosialis ini menjadi bersikap saling curiga satu sama lain sehubungan dengan Perang Korea. Mao juga mulai meragukan efektivitas model pembangunan di Uni Soviet yang sangat birokratis. Itulah sebabnya, pada 1958 ia memperkenalkan gagasan "Lompatan Jauh ke Depan" (*the Great Leap Forward*) untuk mengembangkan model pembangunan tersendiri dan membangun masyarakat sosialis sebelum Uni Soviet. Inti dari gagasan itu adalah membangkitkan semangat massa di bawah kepemimpinan para kader PKC baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini, ia memangkas besar-besaran kontrol yang semula dipegang oleh birokrasi.

Pada dekade 1950-an, setelah Stalin meninggal dan Uni Soviet dipimpin Khrushchev, hubungan kedua negara sosialis di atas makin renggang dan akhirnya putus sama sekali

karena alasan-alasan ideologis. Akibatnya, pada 1960, Uni Soviet juga menghentikan bantuan teknis dan keuangannya kepada RRC. Selain mengakibatkan penderitaan rakyat akibat stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, hal ini juga menimbulkan pertentangan internal di antara para pemimpin PKC. Dalam pertentangan internal ini, kelompok garis keras tampil sebagai kekuatan dominan. Kelompok reformis dalam PKC, yang disebut juga kelompok revisionis, disingkirkan. Pergolakan internal ini memuncak dalam apa yang disebut "Revolusi Kebudayaan" (*Cultural Revolution*) pada 1966-1967, di mana dua pemimpin kaum reformis yang menonjol, Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, tersingkir.

Tetapi, ketika Mao meninggal pada 1976, Deng kembali ke panggung politik. Dua tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Deng, Kongres PKC pada Desember 1978 mengambil keputusan untuk melakukan reformasi ekonomi besar-besaran di RRC. Para pemimpin RRC yang baru ini percaya bahwa bias Mao menentang teknologi dan perdagangan luar negeri telah menimbulkan penderitaan rakyat.³ Seperti halnya Mao, Deng pun percaya bahwa RRC harus

3. Ini tidak berarti bahwa Mao tidak mendapat penghargaan bangsa Cina sama sekali. Keberhasilannya memimpin PKC dalam perang saudara melawan Kuomintang dan keberhasilannya memimpin perang gerilya melawan Jepang sehingga memproklamasikan berdirinya RRC diakui sebagai jasanya yang terbesar. Mao dianggap telah memulihkan harga diri bangsa, sehingga tidak lagi dianggap sepi atau dihina oleh dunia internasional seperti sekitar setengah abad sebelumnya. Tetapi keberhasilan-keberhasilan ini tidak dapat dihapuskan oleh kegagalan-kegagalan selama periode kedua masa hidupnya. Kegagalannya terbesar adalah berupa kebijakannya "Lompatan Jauh ke Depan," yang dipandang hanya mengakibatkan kesengsaraan rakyat banyak, dan "Revolusi Kebudayaan," yang dipandang hanya memecah-belah kesatuan dan membahayakan nasib bangsa dan negara. Karena itulah, laporan hasil penilaian Kongres PKC ke-10 (1978), disebutkan bahwa "keberhasilan Mao adalah 60 persen, sedang kegagalannya adalah 40 persen." Lihat Lie Tek Tjeng, "Peranan Historis Deng Xiaoping," *Kompas*, 11-12 Maret 1997.

membangun sosialisme dengan caranya sendiri. Namun, berbeda dari Mao, Deng berkeyakinan bahwa adalah pembangunan ekonomi, dan bukan perjuangan kelas, yang harus menjadi tiket ke utopia pembentukan negara sosialis di RRC.⁴ Dalam konteks itulah Deng "menulis ulang" ideologi partai dengan menggantikan slogan "dua apa pun" (maksudnya apa pun yang dikatakan dan diperintahkan Mao), yang ditiupkan pengganti Mao, Hua Goufeng, dengan semboyan "mencari kebenaran dari fakta," serta menyerukan rakyat untuk kembali bekerja keras setiap hari dan meninggalkan kegilaan politik.⁵

Pragmatisme Deng di atas pun kemudian terkenal dengan ucapannya yang dikutip di awal bab ini, "Tidak peduli apakah kucing itu berwarna putih atau hitam. Yang penting adalah, kucing itu dapat menangkap tikus." Di pedesaan, Deng menyerukan kepada para petani untuk meninggalkan debat Marxisme yang berkepanjangan dan segera menggarap pertanian. Lebih jauh, dalam Kongres PKC ke-14 pada Oktober 1992, Deng menyatakan bahwa perekonomian berencana terpusat tidak bisa disamakan dengan sosialisme, karena dalam kapitalisme pun ada perencanaan. Sebaliknya, suatu ekonomi pasar tidak bisa disamakan dengan kapitalisme, karena sosialisme juga mempunyai pasar. Perencanaan dan pasar, bagi Deng, adalah ukuran dalam ekonomi. Sifat yang dikandung dalam kapitalisme dan sosialisme tidak bisa ditentukan oleh derajat mekanisme perencanaan atau mekanisme pasar. Cina akan bersungguh-sungguh melaksanakan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi atas dasar konsep Cina sendiri. Tugas uta-

4. Lihat Rene L. Pattiradjawane, "Cina dan Peninggalan-peninggalan Deng Xiaoping," *Kompas*, 21 Februari 1997.

5. Lihat juga I. Wibowo, "Dari Huntington sampai Deng Xiaoping: Sebuah Renungan pada Akhir Masa Deng," *Kompas*, 4-5 Maret 1997.

ma "sosialisme baru" ini adalah membangun kekuatan produktif, secara bertahap meningkatkan taraf hidup rakyat, dan tetap meningkatkan kekayaan material rakyat, sehingga tidak akan ada komunisme atau sosialisme dengan kemiskinan.⁶

Pandangan-pandangan Deng di atas tentu saja merupakan pengingkaran tegas terhadap prinsip pokok Marxisme. Dalam *Communist Manifesto*, "kitab suci" kaum Marxis, Karl Marx menyatakan bahwa jika ia harus meringkas filsafatnya dalam "satu kalimat," maka kalimat itu adalah "penghapusan hak milik pribadi." Apa yang dikatakan dan dilakukan Deng adalah persis kebalikannya. Dalam upayanya membangun "sosialisme dengan ciri khas Cina," ia malah mengembangkan prinsip yang kelihatan "aneh" dilihat dari sudut pandang Marxis, seperti juga dikutip di awal bab ini, yakni "Menjadi kaya adalah mulia."⁷

Reformasi ekonomi di RRC mau tidak mau juga membuat banyak orang haus akan reformasi politik. Dalam tubuh PKC sendiri, Sekretaris Jenderal Zhao Ziyang tampil sebagai jurubicaranya yang paling menonjol. Tuntutan akan reformasi politik ini memuncak pada peristiwa di lapangan Tiananmen (1989), di mana para mahasiswa dan kaum intelektual memimpin demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi politik yang lebih luas. Menghadapi tuntutan ini, Deng bersikap keras dengan memerintahkan agar aksi demonstrasi itu ditumpas. Akibatnya, Zhao tersingkir dari PKC dan banyak pemimpin mahasiswa dan intelektual dipenjarakan atau melarikan diri ke luar negeri.

6. Lihat Rene L. Pattiradjawane, "Buat Cina Menjadi Kaya Bukan Dosa," *Kompas*, 11 Oktober 1992.

7. Lihat antara lain, Maurice Meisner, *Mao's China and After: A History of the People's Republic* (New York: The Free Press, 1986), khususnya 'Epilog,' tentang Cina sepeninggalan Mao.

Dalam peristiwa yang disorot dunia internasional dan turut menjatuhkan citra RRC di mata dunia internasional itu, Deng bertindak seakan seperti Mao yang menghadang reformasinya beberapa dekade sebelumnya. Dunia Barat mengecamnya sebagai tokoh lama yang menghambat reformasi politik dan demokrasi Cina. Tetapi, Deng bukanlah demokrat, dan demokrasi baginya adalah konsep asing yang diimpor dari Barat. Yang lebih tepat, sebagaimana dikatakan Lie Tek Tjeng, Deng adalah seorang "otokrat yang tercerahkan" (*enlightened autocrat*).⁸

Dalam hal ini, tidak sebagaimana Mao dan para pengikutnya yang memimpin "Revolusi Kebudayaan" dan bertindak lebih sebagai "para demagog ideologi," Deng adalah seorang pemimpin sosialis yang pragmatis, yang percaya bahwa sebuah negara sosialis tidak akan bisa bertahan, apalagi berkembang menjadi negara adidaya, tanpa topangan ekonomi yang kuat. Karena itulah, setelah peristiwa Tiananmen, Deng tidak memerintahkan agar reformasi ekonomi dikendorkan, melainkan malah dipergiat.⁹

Seakan menyadari posisinya seperti disebutkan di atas, Deng suatu kali pernah menyatakan, "Ketika saya meninggal, mereka bahkan tidak akan menyebut saya seorang Marxis." Tetapi, di depan jenazah Deng, yang meninggal pada 19 Februari 1997 lalu, Jiang Zemin tetap menyebutnya sebagai "seorang Marxis besar." Pernyataan ini tentu lebih kuat aspek ritualnya daripada kenyataan sesungguhnya. Sementara itu, Jiang Zemin sendiri memandang apa yang dilakukan dan dikatakan Deng sebagai "warisan paling bernilai."¹⁰

8. Lihat Lie Tek Tjeng, "Peranan Historis Deng Xiaoping."

9. Lihat "Ready to Face the World?," survei mengenai Cina dalam *The Economist*, 8 Maret 1997, halaman 27.

10. Peristiwa ini mendapat liputan luas di media massa. Lihat antara lain, "The Life of the Party," *Far Eastern Economic Review*, 6 Maret 1997, halaman 5.

Reformasi Ekonomi: Sosialisme Plus Pasar Bebas

Bagi Deng Xiaoping, mekanisme pasar dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi kemajuan ekonomi RRC dan, karena itu, tidak bertentangan dengan ideologi sosialis. Pandangan Deng di atas secara formal diterima dalam Kongres PKC ke-14, Oktober 1992. Sementara itu, konsep untuk membangun sebuah ekonomi pasar yang sosialis dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar RRC dalam Kongres Rakyat Nasional (parlemen RRC) ke-8, Maret 1993. Demikianlah, dalam Undang-Undang dasar RRC yang terakhir, yang disahkan pada 1993, disebutkan bahwa RRC adalah negara sosialis di bawah kepemimpinan kelas buruh dan didasarkan kepada aliansi para buruh, petani dan intelektual. Oleh sebab itu, struktur politik RRC masih tetap merupakan pemerintahan satu partai (PKC). Fungsi partai dan pemerintah terkait erat. PKC mendelegasikan banyak pengelolaan masalah-masalah negara kepada sebuah mesin pemerintahan yang ditata secara terpisah tetapi tetap tunduk kepadanya, dan partai mengawasi semua aspek penyelenggaraan negara ini di semua tingkatan. Selain itu, PKC tidak saja melakukan kontrol sosial dan disiplin politik lewat cabang-cabangnya yang bertebaran hingga ke desa-desa, melainkan juga memegang kontrol atas angkatan bersenjata. Pada 1994, anggota PKC berjumlah sekitar 52 juta orang, atau sekitar 4,3 persen dari seluruh penduduk RRC. Keanggotaan dalam PKC dianggap akan sangat menguntungkan. Hal ini terutama karena penerimaan pegawai di badan-badan pemerintahan mensyaratkan keanggotaan itu.¹¹

11. Mengenai peran PKC dalam politik RRC, lihat antara lain James R. Townsend and Brantly Womack, *Politics in China* (Illinois & London: Scott, Foresman and Company, 1986). Untuk data terakhir mengenai jumlah anggota PKC dan perannya dalam politik RRC mutakhir, lihat Inayatul Islam and Anis Chowdhury, *Asia-Pacific Economies: A Survey* (London & New York: Routledge, 1997), halaman 267-268.

Meskipun demikian, di balik struktur formal ini, RRC juga mengalami transformasi struktural yang mendasar. Reformasi ekonomi di RRC berlangsung secara gradual. Para pemimpin RRC menyebut metode reformasinya sebagai "menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan yang terinjak kaki." Karena Deng dan rekan-rekannya sesama reformis tidak punya cetak biru reformasi ekonomi kecuali hasrat besar untuk menjadikan RRC suatu negara yang kaya dan kuat, sebagaimana dikatakan Perkins, "mereka siap mencoba apa saja yang dianggap bisa mengubah keadaan."¹² Karena itu, sebagian besar usaha reformasi ekonomi pada awalnya berlangsung dalam kerangka uji-coba. Jika berhasil baik, pemerintah melanjutkannya, dan sebaliknya. Tetapi, sejauh ini, hasil yang dicapai sangat mengesankan.

Gambaran paling mengesankan dari reformasi ekonomi RRC adalah pertumbuhan ekonominya. Sejak 1978, tingkat pertumbuhannya, yang per tahun rata-rata mencapai angka hampir 10 persen, menjadikan ekonomi negara ini yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dengan GNP per kapita kurang dari 400 dollar AS, kini RRC memang masih menempati posisi ke-23 di antara 40-43 negara termiskin di dunia, dan Bank Dunia memasukkannya sebagai negara berpendapatan rendah. Meskipun demikian, seperti ditunjukkan data IMF pada 1993, ketika GNP itu dikonversikan ke dalam nilai paritas daya beli (*purchasing power parity*), RRC berubah menjadi negara terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Jepang. Dan jika pertumbuhan ekonomi dua digit seperti yang selama ini berlangsung di negara itu masih terus dapat dipertahankan, maka "sangat boleh jadi, dalam tiga dekade mendatang, negara itu akan tampil di posisi terdepan."¹³

12. Dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 271.

13. S. Yusuf, "China's Macroeconomic Performance and Management during Transition," *Journal of Economic Perspectives*, 8/2 (Spring 1994), halaman 71, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 264.

Secara keseluruhan, hasil yang mengesankan dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 mengenai indikator RRC berikut ini.

Tabel 3.1.
Indikator RRC (Perbandingan 1978 dan 1995)

	1978	1995
Kapita per GDP dalam RMB	376	4.750
Ekspor	9,8 milyar \$AS	149 milyar \$ AS
Investasi asing	1,7 milyar \$AS	91,3 milyar \$ AS
Cadangan mata uang	0,8 milyar \$AS	73,6 milyar \$ AS
Produksi baja dalam ton	32 juta	96,21 juta
Produksi padi dalam ton	305 juta	466,1 juta
Produksi TV	521.100	55.530.000
Mobil per 1.000 penduduk	1,4	8,0
Persentase keluaran industri dari Perusahaan negara	77,6 persen	36,6 persen
Telepon per 1.000 penduduk	2	68,5

Sumber: *Asiaweek*, sebagaimana dikutip dalam *Kompas*, 3 Maret 1997.

Menurut William Overholt, penulis buku *The Rise of China*, pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di atas ditunjang oleh reformasi yang dilangsungkan dalam empat bidang: politik; ekonomi; administrasi; dan pasar keuangan.¹⁴ Reformasi politik dipandang penting karena keberhasilan ekonomi sangat tergantung kepada stabilitas dan dukungan politik yang luas. Dengan pertimbangan itu, sebagai tokoh reformasi yang piawai, Deng tidak melaksanakan reformasi ekonomi besar-besaran secara

14. Dikutip dalam artikel Thee Kian Wie, "Deng Xiaoping dan Pembaharuan Ekonomi di RRC," *Kompas*, 5 Maret 1997. Kecuali diberi rujukan lain, kerangka dasar uraian dalam beberapa paragraf berikut didasarkan kepada sumber ini.

serentak, melainkan secara bertahap.¹⁵ Reformasi ekonomi pertama-tama dilaksanakan di sektor pertanian, yang berhasil meningkatkan penghasilan para petani. Dengan demikian, Deng mendapat dukungan dari golongan masyarakat RRC yang terbesar, yakni 800 juta petani. Hal ini kemudian diperluas ke sektor-sektor lain, seperti industri manufaktur, yang berhasil mendorong perkembangan industri-industri kecil dan menengah dan kebangkitan wiraswasta kecil. Dengan reformasi ini, Deng berhasil meraih dukungan politik tambahan dari puluhan juta wiraswasta dan pekerja.¹⁶

Sementara itu, dalam hal reformasi ekonomi yang lebih khusus, Deng mengikuti jejak negara-negara industri baru di Asia Timur. Di sini, reformasinya memberikan prioritas kepada sektor-sektor ekonomi di mana pertumbuhan yang pesat dapat diharapkan tanpa intervensi pemerintah yang besar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengembalikan usaha-usaha tani (yang dulu dikolektivisasikan dalam bentuk komune rakyat) kepada para petani.¹⁷

15. Inilah yang membedakan reformasinya dari reformasi sejenis yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev dalam tahun-tahun terakhir Uni Soviet dan Boris Yeltsin pada masa pasca-Uni Soviet di Federasi Rusia, atau reformasi politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara Eropa Timur. Lihat juga Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 270.

16. Reformasi ekonomi tentu saja juga merugikan beberapa golongan tertentu dalam masyarakat. Tetapi, jumlah orang yang mendapat manfaat dari reformasi ekonomi ternyata jauh lebih besar dari yang merasa dirugikan.

17. Selain itu, secara umum, semua sistem kontrol yang ada sebelumnya dihapuskan. Yang paling menentukan adalah dihapuskannya sistem komune pada 1980. Dengan ini, para petani boleh meninggalkan desa mereka, bahkan boleh bepergian ke kota-kota. Sementara itu, di kota-kota, meskipun sistem unit belum dibubarkan, orang tidak lagi hidup di atas kupon-kupon dan kontrol dalam unit-unit pun sangat longgar. Lihat Wibowo, "Dari Huntington sampai Deng Xiaoping."

Langkah berikutnya adalah membuka RRC bagi penanaman modal asing (PMA), suatu kebijakan yang revolusioner bagi sebuah negara komunis. Berbagai insentif yang ditawarkan kepada para investor asing ternyata cukup menarik arus PMA yang besar, terutama di daerah-daerah pantai di bagian selatan RRC, seperti Guangdong, Fujian dan Shanghai. Proyek-proyek PMA ini berhasil meningkatkan produksi dan ekspor RRC dengan amat pesat dalam waktu yang relatif singkat tanpa pengeluaran besar dari pemerintah RRC.

Dalam bidang administrasi, reformasi ekonomi juga dilangsungkan secara bertahap. Dengan begitu, maka RRC berhasil mengatasi hiperinflasi, depresiasi yang tajam dari mata uangnya, dan merosotnya dukungan politik dari masyarakat luas. Dalam kerangka yang sama, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga yang memungkinkannya untuk mengendalikan inflasi, termasuk pembaruan sistem perbankan dan pengembangan pasar modal. Berkat lembaga-lembaga keuangan ini, RRC dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa tekanan inflasi yang terlampau besar.

Selain itu, pemerintah RRC juga mengembangkan pasar-pasar keuangan yang diperlukan untuk mengelola ekonomi pasar. Untuk mengendalikan tekanan inflasi akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka pemerintah RRC mendirikan pasar obligasi untuk menyerap kelebihan yang dapat mengakibatkan inflasi. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan bursa efek yang dapat menarik tabungan masyarakat untuk ditanam secara produktif di berbagai sektor.

Langkah-langkah strategis di atas telah menghasilkan serangkaian reformasi yang menjadi dasar bagi berkembangnya ekonomi pasar: harga ditetapkan oleh penawaran dan permintaan, gaji dikaitkan dengan kinerja masing-masing pekerja, dan perusahaan swasta bersaing di pasar dunia. Dan itulah yang menjadi mesin kemajuan ekonomi RRC sebagaimana tampak dalam tabel-tabel 3.2-5 di bawah ini.

Tabel 3.2
Beberapa Indikator Makroekonomi
(Perubahan Persentase Tahunan)

Indikator	1980	1984	1988	1992	1993
GNP Riil	7,9	14,7	11,3	13,0	13,4
Real gross industrial output	9,3	16,3	20,8	22,0	21,1
Real gross fixed investment	2,9	22,7	10,4	28,2	22,0
Harga eceran	6,0	2,8	18,6	5,3	13,0
Ekspor barang dagang	33,7	15,4	18,2	18,6	8,0
Impor barang dagang	24,8	27,6	27,4	26,2	29,0
Hutang Luar Negeri	t.t	t.t	t.t	69,3	72,5
DSR (%dari ekspor)	t.t	t.t	t.t	13,2	13,2
Neraca transaksi berjalan (% dari GNP)	0,3	0,8	-1,0	1,8	-2,5
Overall budgetary balance (% dari GNP))	-3,3	-1,5	-2,4	-2,5	-2,1

Sumber: State Statistical Bureau, *China Statistical Yearbook*, beberapa edisi, dan IMF, *International Financial Statistics*, beberapa edisi, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 269.

Tabel 3.3
Perbandingan Indikator Ekonomi (1993)

Indikator	Cina	India	AS	Jepang
GDP (milyar dollar AS)	544,6	227,4	6.378,0	4.223,0
GDP per kapita (milyar dollar AS)	459,5	256,0	24.700,0	33.850,0
Manufaktur % GDP (termasuk utilities)	51,7	26,9	18,3	27,9
Pertanian % GDP	21,2	32,3	2,3	2,2
Ekspor barang (milyar dollar AS)	75,7	24,1	456,8	351,3
Impor barang (milyar dollar AS)	86,3	25,1	589,2	209,8
Perdagangan Luar negeri % GDP	29,7	21,6	16,4	13,3

Sumber: Sumber-sumber Nasional dan Economist Intelligence Unit, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 269.

Tabel 3.4
Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap GDP RRC (%)

Sektor	1989	1990	1991	1992	1993
Pertanian	26,3	28,3	26,1	23,8	20,1
Industri	39,0	37,4	38,2	40,6	41,0
Konstruksi	4,8	4,8	5,0	5,8	6,6
Transportasi	3,4	4,5	4,4	4,0	3,6
Perdagangan	8,8	6,5	8,4	8,9	8,1

Sumber: State Statistical Bureau, *China Statistical Yearbook*, 1994, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 269.

Produktivitas yang berhasil dipacu oleh reformasi telah meningkatkan pendapatan dan standar hidup rakyat, dan tingkat kemiskinan di RRC menurun drastis. Pada 1987, persentase rakyat RRC yang masih hidup di bawah garis kemiskinan adalah satu berbanding empat. Sejak itu, proporsinya menurun menjadi satu berbanding 12, atau sekitar 100 juta dari jumlah total penduduk yang 1,2 milyar orang. Sementara itu, pendapatan para buruh telah meningkat dua hingga tiga kali lipat.¹⁸ Selain itu, sebagaimana ditunjukkan tabel 3.5 di bawah, kini lebih dari setengah produk keluaran industri RRC dihasilkan sektor-sektor non-negara, yang menjalankan bisnisnya berdasarkan insentif pasar dan bukan perencanaan pemerintah.

18. Lihat Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 268.

Tabel 3.5
Usaha-usaha Industri menurut Kepemilikan
pada Akhir 1993

	<i>Jumlah per seribuan</i>	<i>%dari total</i>
Jumlah Total	9911,6	100,0
Milik Negara	104,7	1,1
Koperasi	1803,6	18,2
Milik Pemerintahan Kota	209,8	2,1
Milik pemerintahan Desa	777,3	7,8
Milik Swasta	7971,2	80,4

Sumber: State Statistical Bureau, *China Statistical Yearbook*, 1994, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, *Asia-Pacific Economies*, halaman 269.

Sementara itu, dalam periode antara 1979 hingga 1995, lebih dari 133,2 milyar dollar AS investasi asing langsung masuk ke RRC.¹⁹ Yang lebih menarik, investasi asing langsung ini berkembang pada tingkat yang tak tertandingi beberapa tahun terakhir. Arus investasi asing langsung melonjak dari kurang dari 400 juta dollar AS pada 1992 menjadi lebih dari 33 milyar dollar AS pada 1994, suatu peningkatan yang amat mencengangkan: 80 kali lipat. Pada 1994, RRC berada di urutan kedua di dunia (setelah AS) dalam hal arus investasi asing langsung yang masuk. Prospek untuk menarik lebih banyak lagi investasi asing dalam jumlah besar masih sangat tinggi. Pada 1994, komitmen investasi asing baru di RRC berjumlah 81 milyar dollar AS.²⁰

Indikator lain kemajuan ekonomi RRC adalah perdagangan luar negerinya yang juga meningkat pesat. Menu-

19. Lihat "Ready to Face the World?," halaman 12.

20. International Monetary Fund, *World Economic Outlook* (Washington, D.C.: IMF, October 1994), halaman 52-53, sebagaimana dikutip dalam Murray Weidenbaum dan Samuel Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu: Bagaimana Pengusaha Cina Perantaraan Menciptakan Adidaya Ekonomi Baru di Asia*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusli (Jakarta: Prenhallindo, 1996), halaman 99.

rut data IMF, ekspor meningkat dari 25 miliar dollar AS pada 1984 menjadi 120 miliar dollar AS pada 1994, dengan tingkat pertumbuhan 17 persen setahun selama satu dekade tersebut. Sebagai perbandingan, angka pertumbuhan AS dan Jepang hanyalah 8 persen.²¹ Pertumbuhan menakjubkan dalam investasi dan perdagangan luar negeri ini telah menciptakan pasar modal yang berkembang pesat. Pada 1991, nilai saham-saham yang diperdagangkan di RRC hanya sebesar 820 juta dollar AS. Dua tahun kemudian, angka tersebut telah berlipat 50 kali menjadi 43 miliar dollar AS.²²

Pertumbuhan Militer dan Kebijakan Luar Negeri RRC

Selama Perang Dingin, RRC berhasil tampil dalam pentas politik dunia dan dihormati sebagai anggota "klub" nuklir. Namun demikian, dalam banyak hal lain, RRC masih dianggap sebagai negara Dunia Ketiga yang terbelakang dan bahkan, sebagaimana sudah disinggung di atas, salah satu negara termiskin di dunia. Secara militer, RRC kurang mampu memperluas kekuasaannya melampaui laut, dan angkatan bersenjata yang ketinggalan teknologi tidak mampu bertempur dalam peperangan darat moderen. Bahkan, pada puncak Perang Dingin, RRC tidak pernah menjadi ancaman militer yang serius bagi Barat dan negara-negara lainnya. Beberapa ahli strategi AS malah berbicara secara meremehkan mengenai "memainkan kartu Cina," yang mengisyaratkan bahwa RRC hanya sekadar pion dalam pertentangan besar antara AS dan Uni Soviet.²³

21. Dikutip dalam Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 100.

22. International Finance Corporation, *Emerging Stock Markets Factbook* (Washington, D.C.: IFC, 1994), halaman 18-19, sebagaimana dikutip dalam Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 101.

23. Lihat sumbangan artikel Steven I. Levin, "Sino-American Relations: Renormalization and Beyond," dan Chi Su, "Sino-Soviet Relations of the 1980s: From Confrontation to Conciliation," dalam Samuel S. Kim (ed.), *China and the World: New Directions in Chinese Foreign Relations* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1989).

Tetapi kini, dengan kekayaan barunya, RRC tidak saja tampil sebagai adidaya ekonomi yang diperhitungkan, melainkan juga sebagai adidaya militer. Pertumbuhan ekonomi telah memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (*People Liberation Army* [selanjutnya disebut TPR]) untuk memperoleh perlengkapan militer yang lebih canggih dan memperluas radius kekuasaannya meliputi Vietnam, India, Korea, Rusia bagian selatan, dan Jepang. Selain itu, dengan membuka diri untuk perdagangan dunia, RRC tampil sebagai salah satu suara utama dalam politik dunia lewat keanggotaannya di PBB.

Banyak analis keamanan dan politik internasional menyuarakan keprihatinan mereka terhadap usaha RRC dalam memperbarui kemampuan militernya. Yang mendasari keprihatinan mereka adalah ketidakpastian mendasar mengenai besarnya anggaran militer TPR.²⁴ Pada 2 Maret 1997 lalu, di depan Kongres Rakyat Nasional, Menteri Keuangan RRC Liu Zhongli menyatakan bahwa anggaran belanja pertahanan RRC untuk tahun anggaran 1997 meningkat 12,7 persen menjadi 80,57 milyar yuan atau sekitar 10 milyar dollar AS.²⁵ Namun demikian, anggaran ini biasanya diabaikan atau ditanggapi dengan kurang percaya oleh para pakar karena dianggap terlalu rendah. Selain soal standar konversi mata uang, anggaran pertahanan RRC tidak menyertakan pengeluaran untuk hal-hal yang penting dalam menentukan efektivitas militer. Antara lain, riset dan

24. Sekadar perbandingan, dalam survei khususnya mengenai Cina, majalah *The Economist* menyebutkan bahwa anggaran militer RRC untuk tahun 1995 adalah 32 milyar dollar AS, terbesar ketiga di dunia setelah AS (278 milyar dollar AS) dan Jepang (50 milyar dollar AS). Lihat, "Ready to Face the World?," halaman 6. Sementara itu, International Institute for Strategic Studies memberi angka lebih besar, yaitu 35 milyar dollar AS. Dikutip dalam *The Economist*, 8 Maret 1997, halaman 32.

25. Lihat *Kompas*, 3 Maret 1997.

pengembangan senjata dimasukkan ke dalam kategori sipil dari kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁶

Terlepas dari itu, jelas bahwa TPR telah mengeluarkan anggaran biaya militer yang boros selama dekade lalu, dengan memperoleh berbagai macam peralatan berteknologi tinggi dari negara-negara lain. Secara khusus, RRC telah melakukan bisnis besar untuk membeli perlengkapan militer dengan negara-negara bekas Uni Soviet yang kekurangan uang. Pembelian pesawat SU-27, MIG-31, tank T-72, dan helikopter Mi-17 merupakan contoh paling jelas dari hubungan bisnis ini. Tetapi, yang lebih penting dari itu, TPR juga sedang berusaha meningkatkan kemampuan tempurnya dengan mengupayakan perolehan teknologi yang lebih maju lagi, yang mencakup pertahanan udara, peperangan elektronik, pesawat transpor, dan sistem peringatan dini di udara. Dalam rangka itu, pada tahun-tahun terakhir ini telah berkembang program pertukaran militer antara RRC dan Rusia, di mana para ilmuwan Rusia mengunjungi RRC untuk menyediakan bantuan teknis dan para perwira RRC mengunjungi Rusia untuk mendapatkan latihan.²⁷

Perkembangan penting lain adalah modernisasi kekuatan nuklir RRC yang terus berlanjut. RRC sudah memiliki peluru kendali balistik jarak menengah dan antarbenua yang berbasis di darat dan kapal selam peluru kendali balistik dengan jarak tembak lebih dari 1.000 mil. Tetapi, karena perlengkapan militer ini masih tetap dianggap terbelakang,

26. Misalnya, Kementerian Industri Ringan bertanggungjawab atas pengembangan dan pembuatan sistem senjata konvensional. Demikian pula, Kementerian Sumber Daya Energi turut bertanggungjawab atas peningkatan kemampuan nuklir. Lihat Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 183.

27. Lihat Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 184.

TPR kini sedang agresif mengembangkan senjata nuklir abad ke-21 yang dapat diandalkan. Beberapa kalangan percaya, Rusia dan Ukraina mungkin turut membantu usaha modernisasi ini dengan mengekspor teknologi untuk digunakan dalam sistem peluru kendali bergerak. Dalam rangka itu semua, RRC terus menguji senjata nuklir berdaya besar mereka.

Secara keseluruhan, RRC diyakini memiliki sekitar 400 kepala nuklir. Jika dibuat peringkat berdasarkan kekuatan ledaknya, maka arsenal nuklirnya merupakan yang ketiga terbesar di dunia, setelah AS dan Rusia. Selain peluru kendali balistiknya, TPR memiliki kekuatan sekitar 200 pesawat pembom yang diharapkan mampu membawa bom nuklir.²⁸

Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah perkembangan di atas mengarah ke posisi RRC yang lebih ofensif secara militer? Para pengamat sebagian besar berpandangan bahwa jawabannya adalah tidak. Selain berfungsi sebagai sumber kebanggaan nasional, teknologi pertahanan yang maju dapat menjadi alat pencegah perang yang kuat. Hingga dewasa ini, RRC terus menganggap Rusia dan AS sebagai musuh strategis potensial. Sementara itu, dengan ke-14 negara tetangganya, Beijing sedikitnya terlibat dalam perselisihan mengenai perbatasan dengan Rusia, Korea Utara, Tajikistan, dan India. Selain itu, RRC juga terlibat dalam sengketa mengenai Laut Cina Selatan dengan Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang. Akhirnya, Beijing juga menyatakan klaimnya atas tiga wilayah yang hingga kini belum masuk ke dalam wilayah yurisdiksinya: Makau, dan Taiwan. Karena itu semua, seperti dikatakan Andrew Nathan dan Robert Ross,

28. Lihat Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 187.

"Kepentingan wilayah Cina tabrakan dengan kepentingan 24 pemerintahan lain."²⁹

Keinginan RRC untuk memiliki kekuatan militer yang dapat diandalkan juga dapat dimengerti mengingat sejarah panjang eksploitasi dan kekalahan mereka oleh para agresor asing. Sekadar untuk diingat, pada abad ini saja, RRC terlibat dalam konflik militer dengan tidak kurang dari tujuh negara: Rusia, India, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, Taiwan, dan AS. Jumlah TPR memang yang terbesar di dunia, berkekuatan 3 juta orang. Tetapi jumlah itu hanya setengah dari jumlah total personil angkatan bersenjata ketujuh negara tetangganya yang juga tengah meningkatkan kemampuan militer di Asia Pasifik —apalagi jika diingat bahwa pemerintah AS tetap mempertahankan kehadiran pasukannya yang besar di Samudera Pasifik.³⁰ Selain itu, Perang Teluk terakhir juga memberi pelajaran berharga kepada para pemimpin RRC bahwa keberhasilan dalam medan pertempuran moderen memerlukan unit-unit tempur dan pendukung berteknologi mutakhir.³¹

Dari penjelasan di atas tampak bahwa keseimbangan kekuatan militer di Asia Tenggara dan Asia Timur memang tengah bergeser. Kekuatan militer RRC memang meningkat, tetapi demikian juga kekuatan-kekuatan militer di negara-negara tetangganya. Kebijakan luar negeri RRC sesungguhnya lebih bersifat reaktif yang terutama ditujukan untuk mencapai tiga sasaran: memuluskan masuknya Hong Kong, Makau, dan Taiwan ke dalam yurisdiksi mereka; meng-

29. Dikutip dalam "Ready to Face the World?," halaman 8.

30. Lihat "Ready to Face the World?," halaman 7.

31. Lihat Jusuf Wanandi, "The Trend Toward Military Built-Up and Arms Proliferation in the Asia-Pacific Region," Center for Strategic and International Studies, Monograph No. 104, 1993, halaman 8-12.

amankan klaim-klaim wilayahnya; dan mengupayakan keseimbangan baru di wilayah ini dengan mencegah dominasi satu adidaya yang terlalu besar.

Hal ini menunjukkan tetap pentingnya faktor kekuatan militer dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Tetapi yang sungguh-sungguh menjadi ancaman baru terhadap dunia, juga Indonesia, dari perkembangan RRC adalah pertumbuhan ekonominya. Ancaman itu makin tampak besar jika diperhatikan hubungan antara RRC dan para pengusaha keturunan Cina di perantauan seperti akan dipaparkan berikut ini.

RRC dan Cina Perantauan: Ke Arah Penciptaan "Cina Raya"?

Sejak awal, langkah-langkah reformasi ekonomi RRC sangat tergantung kepada masyarakat Cina perantauan. Antara lain berkat bantuan merekalah Cina daratan mulai perlahan-lahan dapat memperbaiki birokrasi pemerintahannya yang terbelakang, meniadakan propaganda sosialis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan membentuk ekonomi pasar. Dalam hal ini, para investor dari Cina perantauan memberikan tiga unsur penting yang kurang

Tabel 3.6
Persentase Investasi Asing di Cina
1979-1995

Negara	Persentase dari Total
Hong Kong dan Makau	58,8
Taiwan	8,7
AS	8,1
Jepang	7,8
Inggris	1,6
Korea Selatan	1,3
Jerman	0,9
Perancis	0,8
Lain-lain	12,0

Sumber: "Ready to Face the World?," *The Economist*, 8 Maret 1997, halaman 12.

dimiliki oleh masyarakat RRC sendiri: kewirausahaan; investasi modal yang besar dan berisiko; dan manajemen bisnis.³²

Para pengusaha Cina di perantauan kini adalah investor terbesar di tanah leluhur mereka. Di antara kedua belah pihak, pemerintah atau rakyat RRC secara keseluruhan dan para pengusaha Cina di perantauan, belakangan ini berkembang hubungan yang saling menguntungkan: standar kehidupan di daratan Cina meningkat pesat dengan mengalirnya investasi asing dari kalangan Cina perantauan; dan investasi itu sendiri pada gilirannya memberikan laba yang besar bagi para investor ini. Itulah sebabnya, seperti ditunjukkan tabel 3.6 di atas, sejak reformasi ekonomi digalakkan di RRC, investasi asing yang dominan adalah investasi yang datang dari para pengusaha di Cina perantauan. Bahkan, dalam periode antara 1979 hingga 1993, investasi yang berasal dari Hong Kong dan Taiwan berjumlah lebih dari tiga kali gabungan seluruh negara.³³

Selain karena alasan umum di atas, ada beberapa alasan khusus lain yang menjadikan hubungan kedua belah pihak ini saling menguntungkan. *Pertama* adalah vitalitas dan kekuatan ekonomi para pengusaha Cina perantauan sendiri. Cina perantauan adalah kekaisaran 51 juta orang yang terjalin erat lewat sistem gilda-gilda, persaudaraan karena nama dan tempat lahir, kongsi-kongsi dan jaringan perdagangan yang secara individual maupun kolektif memberikan koneksi personal dan sokongan finansial. Mereka adalah, meminjam kata-kata Sterling Seagrave, "kekaisaran tanpa batas-batas negara, pemerintahan atau bendera ke-

32. Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 5 & 75.

33. Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 24.

bangsaan.”³⁴ Dibandingkan dengan jumlah total penduduk RRC, jumlah mereka hanyalah empat persennya. Tetapi kekayaan mereka jauh melampaui jumlah itu. GNP Cina perantauan yang hidup di Asia adalah 450 milyar dollar AS, hampir seperempat lebih besar dari GNP RRC.³⁵ Tabel 3.7 di bawah menunjukkan bahwa mereka menguasai sejumlah perusahaan multinasional terbesar di Asia, dan lewat perusahaan-perusahaan itulah mereka mendominasi kehidupan ekonomi di Asia, kecuali di Jepang dan Korea.

Tabel 3.7
Aktiva 500 Perusahaan Publik Asia Terbesar
yang Dikendalikan oleh Cina Perantauan (1994)

Lokasi	Jumlah Perusahaan (dalam milyar \$ AS)	Kapitalisasi Pasar (dalam milyar \$ AS)	Total Aktiva
Hong Kong	123	155	173
Taiwan	159	111	89
Malaysia	83	55	49
Singapura	52	42	92
Thailand	39	35	95
Indonesia	36	20	33
Filipina	8	6	8
Total	500	424	539

Sumber: Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 24.

Kedua, meskipun pemerintah RRC berusaha sekuat tenaga untuk memperlancar masuknya investasi asing, masih banyak hambatan yang mempersulit masuknya investasi itu. Dalam studi mereka yang mendapat sambutan luas, Weidenbaum dan Hughes misalnya menyatakan, hukum dan

34. Sterling Seagrave, *Lords of the Rim: The Invisible Empire of the Overseas Chinese* (London: Corgi Books, 1996), halaman 14.

35. Lihat Seagrave, *Lords of the Rim*, halaman 15.

peraturan sering tidak diumumkan oleh Beijing dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Mata uang tidak bebas diper-tukarkan, sehingga banyak perusahaan mendapat kesulitan untuk membawa pulang uang mereka. Kontrak yang telah ditandatangani tidak mengikat secara hukum, dan perlindungan hukum sangat terbatas. Pelanggaran hak cipta dan bentuk pembajakan intelektual lain berkembang luas. Dengan sedikit pengecualian yang diberitakan dengan baik dan terjadi sekali-kali, bentuk pencurian ekonomi ini jarang ditindak oleh pejabat pemerintah yang memandangnya dengan cara lain dan kadang-kadang memperoleh keuntungan dari pembajakan tersebut.³⁶

Karena faktor-faktor ketidakberesan ini, para investor asing menghadapi lingkungan dan kebudayaan bisnis yang benar-benar asing bagi mereka. Kurang atau tidak adanya kesamaan kebudayaan dasar antara mereka dan mitra mereka di RRC dapat membuat transaksi yang rutin sekalipun menjadi rumit. Praktik bisnis seperti *feng shui*, sesuatu yang mirip astrologi di kebudayaan-kebudayaan lain, mempe-ngaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis apa pun di RRC. *Guanxi*, penggunaan hubungan dan pengaruh pribadi dalam skala yang luas, yang menjadi inti praktik bisnis di kalangan orang-orang Cina, sama sekali asing bagi sebagian besar kalangan investor asing.³⁷ Selain itu, di kalang-

36. Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 14. Lihat juga Mohammad Shoelhi, "Mencermati Kebangkitan Ekonomi Cina," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia*, Jurnal Tahunan CIDES, No. 1 (1994), halaman 42-53; dan Rene L. Pattiradjawane, "Dari Korupsi sampai Transisi Kekuasaan," *Kompas*, 23 Februari 1997.

37. Uraian luas mengenai praktik-praktik seperti ini dapat dijumpai dalam Seagrave, *Lords of the Rim*. Lihat juga eksposisi terang-terangan oleh dua penulis keturunan Cina sendiri: Bo Yang, *The Ugly Chinaman and the Crisis of Chinese Culture*, diterjemahkan dan disunting dari bahasa Cina oleh Don J. Cohn dan Jing Qing (New South Wales: Allen & Unwin, 1992) dan Chin-Ning Chu, *Thick Face Black Heart: The Asian Path to Thriving, Winning & Succeeding* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997).

an pengusaha Cina, pemberian hadiah terbukti memperlancar proses negosiasi bisnis hingga tingkat yang mendekati penyuapan, sesuatu yang secara eksplisit merupakan pelanggaran hukum di banyak negara lain.³⁸

Dilihat dari latar belakang ini, para investor yang berasal dari Cina perantauan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan para pesaing mereka dari kalangan investor asing lainnya. Itu karena mereka punya pemahaman jauh lebih baik mengenai lingkungan dan kebudayaan bisnis yang berkembang di Cina daratan. Mereka tidak saja mampu berbicara dalam bahasa yang sama dengan rekan mereka di Cina daratan, melainkan juga memiliki latar belakang agama, kebudayaan, dan sejarah yang kurang lebih sama. Selain itu, mereka juga punya anggota keluarga atau teman-teman dengan *guanxi* yang memadai di tingkat kekuasaan untuk memperlancar roda bisnis mereka.³⁹

Itulah sebabnya, belakangan ini para pengamat dan pembuat kebijakan banyak yang berbicara mengenai ancaman "Cina Raya" sehubungan dengan makin eratnya hubungan antara RRC dan para pengusaha Cina perantauan. An-

38. Untuk memperlancar bisnis, diperlukan hubungan dekat dengan hierarki PKC baik di tingkat nasional maupun lokal. Kadang-kadang, para pejabat ini *de facto* menjadi mitra bisnis. Weidenbaum dan Hughes menulis, "Seorang putra atau putri pemimpin Beijing mungkin meminta 10 persen andil dalam suatu bisnis." Lihat Weidenbaum dan Hughes, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu*, halaman 15.

39. Itulah sebabnya, banyak pengamat yang menyatakan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia Timur, yang aktor-aktor utamanya adalah para pengusaha Cina perantauan, adalah jenis kapitalisme *Guanxi*. Lihat misalnya studi monumental oleh S. Gordon Redding, *The Spirit of Chinese Capitalism* (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1993), khususnya bab III, "The Psycho-Social Legacy of China," halaman 41-93. Lihat juga beberapa sumbangan artikel dalam S.R. Glegg and S.G. Redding (eds.), *Capitalism in Contrasting Cultures* (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1990) dan Gary Hamilton (ed.), *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Alexander Irwan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

caman ini makin tampak kentara dengan berlangsungnya pertemuan besar para konglomerat keturunan Cina sedunia di Hong Kong pada 22-24 November 1993. Pertemuan itu diselenggarakan di bawah nama "Konvensi Para Pedagang Cina se-Dunia" (*World Chinese Merchant's Convention*). Secara kronologis, pertemuan di Hong Kong ini adalah untuk yang kedua kalinya, menyusul pertemuan pertama pada Agustus 1991 di Singapura. Bedanya, pertemuan kedua ini jauh lebih semarak, terutama karena kehadiran nama-nama besar pengusaha Cina seperti Robert Kuok (Malaysia), Chatri Sophonpanich (Thailand), dan Li Ka Shing (Hong Kong).⁴⁰ Selain itu, pertemuan ini juga bersifat kontroversial karena kehadiran Lee Kuan Yew, kini Menteri Senior Singapura, yang bertindak sebagai pengambil inisiatif baik pertemuan Singapura maupun Hong Kong. Disebut kontroversial, karena Lee Kuan Yew selama ini dikenal sebagai negarawan keturunan Cina di kawasan ini yang selalu mendukung "nasionalisme Singapura." Lebih lagi, golongan etnis Cina di kawasan ini selama ini dikenal sebagai golongan yang berbeda dari orang-orang Cina yang tinggal di Cina daratan. Pidato pembukaan Lee, yang bertindak sebagai pembicara kunci, berjudul "Menggalang Jaringan untuk Mencapai Beberapa Tujuan."

Walaupun RRC tidak secara resmi bertindak sebagai penyelenggara atau tuan rumah konvensi di atas, pendapat umum mengatakan, negara yang sedang melebarkan sayap ekonominya itu berada di belakang peristiwa besar ini. Konvensinya diadakan di Gedung Kamar Dagang RRC di Hong Kong, sedang acara susulannya adalah peninjauan ke daerah-daerah ekonomi bebas di selatan RRC, terutama di

40. Menurut *Tempo*, 27 November 1993, dalam daftar peserta dari Indonesia, tertulis antara lain nama Tedy Djuhar, Halim Tanoto, Adil Nurimba, dan Hary Dharmawan.

wilayah Sungai Mutiara di Propinsi Guandong. Di situlah terletak beberapa wilayah pertumbuhan ekonomi seperti Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou (Kanton), dan Panyu. RRC adalah pihak yang paling diuntungkan dan ingin mengambil manfaat dari konvensi itu. Motivasi pertemuan itu sendiri tidak secara spesifik mengacu kepada perkembangan ekonomi RRC yang sedang mengalami *boom*, tetapi lebih umum, yakni "menggalang kerja sama antarpengusaha Cina di seluruh dunia." Walaupun demikian, banyak pengamat menyatakan bahwa konvensi di atas dimaksudkan untuk menarik modal dengan cara menyuntikkan solidaritas ras.⁴¹

Dalam pengertian ekonomi dan kultural inilah ancaman "Cina Raya" menjadi relevan dibicarakan. Berbondong-bondongnya para pengusaha Cina Perantauan menanamkan investasi mereka di RRC di atas harus lebih dipandang dari sudut logika ekonomi. Sifat utama seorang pengusaha adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemerintah RRC memang memberi banyak kemudahan untuk mengalirnya investasi itu. Bahwa mereka mempunyai kaitan kultural dengan RRC yang pada praktiknya memperlancar usaha mereka, hal itu harus lebih dipandang sebagai keunggulan komparatif mereka dibanding para pengusaha lain.

Dengan demikian, sebagaimana dikatakan A. Dahana dan dikutip di awal bab ini, "konsep 'Negeri di Tengah Dunia' (*Zhongguo*) sedikit demi sedikit telah ditinggalkan, dan yang muncul sekarang adalah konsep 'Cina Raya' (*Zhonghua*)."⁴² Konsep *Zhonghua* dengan basis pertumbuhan ekonomi itulah yang kini menyaingi konsep *Zhongguo* yang dasarnya lebih nasionalisme politik yang berorientasi kepada Cina.

41. Lihat A. Dahana, "Masalah Cina Perantauan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia*, Jurnal Tahunan CIDES, No. 1 (1994), halaman 59.

42. Lihat Dahana, "Masalah Cina Perantauan," halaman 65.

BAB IV

Pembauran Pri-Nonpri: Masalah yang belum Tuntas

•••• Saya pun melihat, modal orang-orang Tionghoa itu berkembang di sini dengan cepat.... Kita memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional kita. Jangan pula salah terka! Pemerintah kita mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkan dan mengatur. Mengapa mesti takut? Karena itulah, kalau ada yang menganggap hal itu sebagai dinasti ekonomi, sebenarnya itu untuk sementara saja. Pada waktu yang akan datang, pemerintah akan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga modal dan kekayaan mereka itu betul-betul turut serta dalam melaksanakan pembangunan kita, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Soeharto

Memang, jika pribumi ekonominya kuat, otomatis nonpri mau berbaur. Dan bagi pribumi yang ekonominya kuat dan merasa "tuan rumah di negeri sendiri," tidak ada masalah sama sekali. Tapi, selama mereka belum merasa menjadi "tuan di rumah sendiri," masalah yang dihadapi sulit dipecahkan.

Junus Jahja

Pada bab II yang lalu sudah dikemukakan secara panjang lebar sejarah masuknya orang-orang keturunan Cina di kepulauan Nusantara dan berbagai jenis hubungan yang berlangsung antara mereka dengan penduduk pribumi. Pada bab itu juga sudah disinggung secara garis besar berbagai perkembangan yang muncul sehubungan dengan keberadaan mereka di negara Indonesia hingga masa Orde Baru, bahkan dewasa ini. Bab ini, akan lebih memerinci masalah terakhir ini, lebih khusus lagi masalah yang dike-

nal dengan sebutan pembauran antara mereka dengan warganegara Indonesia keturunan asli atau penduduk pribumi. Berturut-turut akan dikemukakan gambaran umum mengenai keturunan Cina di Indonesia dewasa ini, berbagai pemikiran dan kebijakan di sekitar pembauran dan usaha-usaha yang sudah dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru untuk mencapai tujuannya, sejauh mana upaya-upaya ini sudah atau belum mendatangkan hasil yang optimal, dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

Dari paparan di bawah ini diharapkan akan tampak jelas bahwa, sebagaimana yang juga sudah diakui oleh banyak kalangan, upaya-upaya pembauran yang sejauh ini sudah dilaksanakan belum mendatangkan hasil yang optimal. Jika dikatakan demikian, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan itu sia-sia atau mubazir belaka. Malah sebaliknya, pengakuan akan belum tuntasnya masalah ini dimaksudkan untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan mengevaluasi di mana kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Hal ini penting dilakukan mengingat ancaman, atau tantangan, ekonomi "Cina Raya," yang juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi spektakuler yang dinikmati oleh beberapa pengusaha kelas besar (*tycoons*) keturunan Cina di Indonesia, sebagaimana dikemukakan bab III lalu, sudah menanti di depan mata. Untuk menghadapi tantangan ini, pembauran unsur-unsur pri dan nonpri adalah syarat mutlak.

Keturunan Cina di Indonesia Dewasa ini

Tidak ada data yang pasti dan mutakhir mengenai berapa jumlah keturunan Cina di Indonesia dewasa ini. Dalam tulisannya yang terakhir, yang dimaksudkan sebagai sumbangan untuk menyambut ulang tahun ke-70 tokoh pembauran keturunan Cina Junus Jahja pada 22 April 1997, Leo Suryadinata, pakar dari Universitas Nasional Singapura yang banyak meneliti dan menulis mengenai keturunan Cina

di Indonesia, menyatakan bahwa tiga persen dari penduduk Indonesia adalah orang-orang keturunan Cina. "Kalau jumlah penduduk Indonesia sekarang kira-kira 192 juta orang, maka jumlah etnis Tionghoa sekitar 5,76 juta orang," tulisnya.¹

Sementara itu, angka yang sedikit lebih besar diberikan oleh A. Dahana. Menurut ahli Cina dari Universitas Indonesia yang juga sering menulis mengenai masalah-masalah pembauran ini, keturunan Cina di Indonesia adalah 3,68 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dalam tulisannya yang terbit pada 1994, ia menyatakan bahwa jika jumlah penduduk Indonesia adalah 195.683.531 orang, maka—berdasarkan persentase di atas—sekitar 7.200.000 orang di antaranya adalah keturunan Cina.²

Kedua angka di atas tentunya sekarang secara teoretis sedikit bertambah, mengingat pada Februari 1997 lalu saja penduduk Indonesia sudah mencapai 200 juta orang. Namun demikian, terlepas dari hal itu, dapat dipastikan bahwa, jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, penduduk Indonesia yang keturunan Cina relatif rendah, baik dalam jumlah maupun persentasenya. Sebagaimana tampak dalam tabel 4.1. yang disusun A. Dahana, keturunan Cina di Indonesia jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan di tiga negara ASEAN lainnya, yakni Singapura, Malaysia dan Thailand.

-
1. Lihat Leo Suryadinata, "Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya," dalam Riyanto D. Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran* (Jakarta: PT. Bina Pariwisata, 1997), halaman 81. Penting diingat, tulisan ini tentunya sudah selesai ditulis sebelum tanggal ulang tahun Junus Jahja di atas.
 2. Lihat A. Dahana, "Masalah Cina Perantauan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia* (Jurnal Tahunan CIDES), No. 1 (1994), halaman 64.

Tabel 4.1.
Persentase Etnis Cina
di Asia Tenggara dan Amerika Utara

<i>Negara</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Jumlah Etnis Cina</i>	<i>Persentase</i>
Indonesia	195.683.531	7.200.000	3,68
Thailand	57.642.180	5.800.000	10,07
Malaysia	18.410.920	5.200.000	28,24
Singapura	2.792.092	2.000.000	71,63
Myanmar	43.642.618	1.500.000	3,43
Vietnam	68.964.018	800.000	1,16
Filipina	67.114.060	800.000	1,19
Amerika Serikat	254.521.000	1.800.000	0,07
Kanada	27.351.509	600.000	2,19

Sumber: A. Dahana, "Masalah Cina Perantauan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia* (Jurnal Tahunan CIDES), No. 1 (1994), halaman 64.

Bagaimanakah potret kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan orientasi politik mereka dewasa ini? Bertentangan dengan yang pada umumnya diyakini sebagian besar orang, keturunan Cina di Indonesia adalah sebuah kelompok minoritas yang heterogen, bukan homogen. Potret ini harus dicermati sebaik-baiknya, secara rasional dan dengan kepala dingin, karena —sebagaimana akan dikemukakan di bawah nanti— tersendat-sendatnya usaha-usaha pembauran antara lain disebabkan oleh diabaikannya realitas ini oleh sebagian besar masyarakat.

Dilihat dari asal-usul dan sejarah masuknya mereka ke Indonesia, keturunan Cina di Indonesia terbagi atas golongan "Cina peranakan" dan "Cina totok." Cina peranakan adalah keturunan Cina yang sudah lama, dalam hitungan beberapa generasi, tinggal dan mencari nafkah di Indonesia dan pada umumnya sudah terbaur dengan masyarakat Indonesia. Mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia

sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah, bertingkah laku seperti pada umumnya keturunan pribumi, dan orientasi budaya mereka sudah kepada kebudayaan Indonesia atau kebudayaan lokal tempat mereka berdomisili.

Sementara itu, Cina "totok" adalah para "pendatang baru," yang pada umumnya baru masuk ke Indonesia satu sampai dua generasi, khususnya pada masa menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah sebabnya mengapa mereka juga lazim disebut *singke*, yang secara harfiah berarti "tamu baru."³ Mereka pada umumnya masih menganut kebudayaan dan adat istiadat Cina, dan masih menggunakan bahasa tempat asal mereka di Cina untuk berkomunikasi di antara sesama mereka. Dengan terhentinya imigrasi dari Cina daratan, jumlah Cina totok sudah menurun dan keturunan totok pun sudah banyak yang mengalami peranakanisasi.

Dalam hal politik, masih ada di antara keturunan Cina di Indonesia yang berorientasi ke Beijing atau Taipei. Tetapi, menurut Leo Suryadinata, sebagian besar mereka sudah berorientasi ke Jakarta.⁴ Sejalan dengan itu, secara kewarganegaraan, masih ada di antara mereka yang berwarganegara RRC atau Taiwan, tetapi yang terbanyak adalah warga negara Indonesia (WNI). Menurut Adam Schwarz, dalam karyanya yang terbit pada 1994, 90 persen lebih di antara mereka adalah WNI.⁵ Sementara itu, dalam bukunya *Islam di Mata WNI* (tanpa tahun penerbitan), Junus Jahja menyatakan bahwa di antara 5 juta keturunan Cina di Indonesia, yang masih berstatus sebagai warganegara Taiwan atau RRC

3. Lihat Dahana, "Masalah Cina Perantauan," halaman 59.

4. Suryadinata, "Masalah Tionghoa di Indonesia," halaman 82.

5. Lihat Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Sydney: Allen & Unwin, 1994), halaman 129.

adalah sebanyak 300.000 orang.⁶

Sebagaimana sudah disinggung pada bab II, setelah meletusnya peristiwa G30S PKI dan pemerintah Orde Lama diganti dengan pemerintah Orde Baru, semua organisasi keturunan Cina yang bercorak sosial dan politik dilarang oleh pemerintah. Bagi WNI keturunan Cina yang ingin memainkan peran dalam bidang ini, hanya tersisa satu jalan, yakni menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi yang telah terbaur dan direstui bahkan didukung oleh pemerintah Orde Baru. Menurut Leo Suryadinata, selain Golkar (Golongan Karya), dua organisasi di mana keturunan Cina peranakan memainkan peran sosial dan politik mereka adalah CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) dan Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Yang pertama berdiri pada 1971, sedangkan yang kedua didirikan pada Desember 1977. Berbeda dari organisasi sejenis yang pernah ada di zaman Orde Lama, kedua organisasi ini bukanlah organisasi massa. CSIS adalah pusat studi yang dekat dengan pemerintah dan banyak tokohnya juga aktif dalam Golkar dan di pemerintahan, sedang Bakom-PKB berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Tokoh-tokoh CSIS yang nonpri termasuk Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, dan J. Panglaykim; sedangkan tokoh-tokoh Bakom-PKB yang nonpri termasuk K. Sindhunata, Junus Jahja, dan Lo SH Ginting.⁷

Dari segi orientasi keagamaan, sebagian besar keturunan Cina di Indonesia kini menganut agama Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme atau campuran ketiganya. Meskipun demikian, tidak ada data mutakhir yang dapat menunjuk-

6. Lihat Junus Jahja, *Islam di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, tt.), halaman 3.

7. Lihat Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Wilandari Supardan (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), halaman 211-212.

kan angka-angka para pengikut agama-agama itu secara agak pasti.⁸ Selain itu, banyak pula di antara mereka yang sudah memeluk agama Kristen dan Katolik. Menurut catatan Junus Jahja, "Sejak akhir Perang Dunia Kedua di Indonesia sudah satu hingga dua juta WNI [keturunan Cina] yang dinasranikan, termasuk elitnya yang menjadi Katolik."⁹ Gejala keagamaan lain yang menonjol adalah berbondong-bondongnya kalangan muda keturunan Cina di Indonesia yang beralih ke NSI (*Niciren Syosyu Indonesia*), sebuah sekte agama Budha dari Jepang di bawah kepemimpinan Senosoenoto.¹⁰ Belakangan ini, jumlah mereka yang memeluk agama Islam juga makin bertambah. Menurut catatan Junus Jahja, kini setengah hingga satu persen dari WNI keturunan Cina di Indonesia, atau maksimal sekitar 50.000 orang, sudah memeluk agama Islam.¹¹

Dalam bidang kehidupan agama ini pulalah beberapa organisasi sosial-keagamaan dapat ditemukan di kalangan keturunan Cina. Dalam hal ini, contoh yang dapat dike-

8. Keterangan umum ini diambil dari Jahja, *Islam di Mata WNI*, halaman 4 dan Suryadinata, "Masalah Tionghoa di Indonesia," halaman 81. Meskipun demikian, dalam tulisannya yang lain, Suryadinata menyatakan bahwa minat keturunan Cina terhadap Konfusianisme semakin lama semakin merosot secara drastis. Lihat Leo Suryadinata, "Kong Hu Cuisme dan Agama Kong Hu Cu di Indonesia: Sebuah Kajian Awal," dalam *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Seri Dian III Tahun II (Yogyakarta: Interfidei, 1995), halaman 201-202.

9. Jahja, *Islam di Mata WNI*, halaman 4.

10. Menurut keterangan yang didapat Junus Jahja dari NSI, sekitar 20 tahun terakhir ini sudah ada satu juta WNI yang masuk ke organisasi itu. Selain itu, menurut perkiraan majalah yang diterbitkan NSI, yakni *Prajna Pundarika* (September 1983), pada 1987 mereka akan mempunyai 32 juta anggota. Lihat Suryadinata, "Kong Hu Cuisme dan Agama Kong Hu Cu di Indonesia," halaman 202, catatan kaki No. 101.

11. Jahja, *Islam di Mata WNI*, halaman 4. Angka yang sama juga diberikan oleh Leo Suryadinata, yakni 25.000 hingga 50.000 orang. Lihat kolomnya, "Chinese Seek Allah to Find a Place in the Sun," *Far Eastern Economic Review*, 28 Agustus 1986, halaman 37.

mukakan adalah Perbudhi (Perkumpulan Buddhis Indonesia) dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia). Kedua organisasi ini sudah lama ada, karena —sebagaimana sudah disebutkan di atas— Budha dan Konghucu adalah dua agama yang memang biasa dianut oleh keturunan Cina.

Beberapa perkumpulan gereja juga mempunyai anggota keturunan Cina yang besar jumlahnya, dan beberapa di antara mereka dapat disebut sebagai tokoh nasional. Almarhum Yap Thiam Hien, misalnya, yang hingga akhir hayatnya dikenal luas sebagai pengacara dan pejuang hak-hak asasi manusia, merupakan salah seorang tokoh peranakan yang juga aktif dalam berbagai kegiatan agama Kristen Protestan. Ia adalah seorang aktivis Perkumpulan Kristen Tionghoa (*Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee*) di Jawa Barat, dan pada 1950 menjadi salah seorang pendiri Yayasan Pendidikan Gereja Indonesia dan aktif di organisasi itu hingga 1957.¹² Selain itu, dalam catatan Daniel S. Lev, selain menjadi anggota Komisi Yuris Internasional (*International Commission of Jurists*), Yap juga menjadi anggota Dewan Gereja se-Dunia (*World Council of Churches*).¹³

Sementara itu, di kalangan gereja Katolik, salah seorang keturunan Cina yang tercatat aktif bergiat adalah P.K. Ojong, yang belakangan dikenal luas sebagai wartawan dan pendiri harian *Kompas*. Sebagaimana dicatat Frans M. Parera, aktivitas Ojong dalam kegiatan keagamaan ini sudah dimulai sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika para pastor yang melayani umat di Paroki Mangga Besar ditawan penjajah, Ojong adalah salah seorang pemuka umat dari

12. Lihat Leo Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien* (Jakarta: LP3ES, 1990), halaman 188.

13. Lihat Daniel S. Lev, "Yap Thiam Hien: Utopisme dan Skeptisisme," dalam T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (eds.), *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), halaman 29. Lihat juga Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional*, halaman 186-209.

kalangan awam yang mengambil alih tugas pelayanan di paroki. Ia aktif memimpin ibadah di gereja, berkhotbah, dan memimpin koor untuk menyemarakkan suasana ibadah. Kegiatan ini masih terus dilanjutkannya setelah kemerdekaan. Ia, misalnya, pernah duduk sebagai anggota DPP Partai Katolik di bawah pimpinan Frans Seda sebagai ketua partai dan I.J. Kasimo sebagai Ketua Kehormatan partai.¹⁴

Akhirnya, organisasi keagamaan yang menampung banyak kegiatan keislaman keturunan Cina di Indonesia adalah PITI, yang singkatan awalnya adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Setelah G30S PKI meletus, organisasi yang semula bersifat eksklusif bagi kaum Muslim keturunan Cina ini berubah menjadi organisasi keagamaan yang multi etnis. Sejalan dengan itu, pada 1972, namanya pun berubah menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, yang disingkat menjadi PITI juga. Dua di antara tokohnya yang menonjol adalah Haji Abdul Karim Oei,¹⁵ salah seorang pemimpin Muhammadiyah asal Sumatera, dan Yap A. Siong, seorang anggota Persatuan Islam Tionghoa sebelum Perang Dunia Kedua. Belakangan, tokoh generasi baru organisasi ini yang menonjol adalah Junus Jahja (alias Lauwchuantho).¹⁶ Pada 1981, bersama kawan-kawannya, ia mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiah dengan tujuan menyebarkan agama Islam di kalangan keturunan Cina. Sasaran dakwah organisasi ini bukan saja kalangan awam, melainkan juga kalangan intelektual dan atasan. Memang, sebagaimana akan diemukakan lebih jauh lagi di bawah, organisasi ini mencer-

14. Lihat biografinya dalam tulisan Frans M. Parera, "P.K. Ojong: Intelektual yang Menganut Sosialisme Fabian," yang disisipkan dalam Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional*, halaman 137-172.

15. Untuk biografi singkatnya, juga hubungannya dengan PITI, lihat Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional*, halaman 173-185.

16. Untuk biografinya, lihat Bagian III buku Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja*, halaman 189-212.

minkan keyakinan para pendukungnya, khususnya Junus Jahja, bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mempercepat proses pembauran adalah dengan jalan Islamisasi. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, yakni WNI keturunan pribumi, beragama Islam. Dengan demikian, jika keturunan Cina di atas memeluk agama Islam, maka secara otomatis mereka berarti sudah berbaur dengan penduduk pribumi.

Dilihat dari segi pendapatan ekonomi, banyak di antara keturunan Cina di Indonesia yang kaya, bahkan sangat kaya, dibandingkan dengan pada umumnya tingkat pendapatan ekonomi penduduk keturunan pribumi. Namun demikian, sebenarnya lebih banyak lagi di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Atau, setidaknya, sebagai "minoritas perkotaan," mereka pada umumnya tergolong ke dalam kelas menengah di Indonesia.

Sayangnya, lagi-lagi tidak ada data yang dapat menunjukkan sedikit-banyak persentase keturunan Cina yang termasuk ke dalam kategori kaya (atau sangat kaya), menengah atau miskin secara ekonomi. Meskipun demikian, dalam bidang usaha, seperti yang ditulis Leo Suryadinata, "yang paling sukses adalah mereka yang masih belum terbaur, karena mereka masih memiliki etos imigran dan wira-swasta, berbahasa Tionghoa, dan mampu menggunakan jaringan perdagangan etnis yang umumnya di tangan orang Tionghoa."¹⁷ Para pengusaha seperti Liem Sioe Liong, Mochtar Riady, Eka Tjipta Wijaya, Prajogo Pangestu, The Nin King, Soehargo Gondokusumo, Teguh Sutantyo, dan Tan Siong Kie adalah para pengusaha keturunan Cina yang termasuk ke dalam kategori Cina totok. Sebagian besar di antara mereka, tulis Adam Schwarz, "memperoleh pendidikan dalam bahasa Cina dan masih merasa lebih nyaman berbicara

17. Suryadinata, "Masalah Tionghoa," halaman 82. Lihat juga David C.L. Ch'ng, *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Stephen Suleeman (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), terutama halaman 28-31.

dalam bahasa Cina daripada dalam bahasa Indonesia."¹⁸

Keberhasilan mereka dalam dunia usaha, yang antara lain sangat didukung oleh jaringan mereka dengan kalangan pengusaha Cina Perantauan lainnya seperti digambarkan dalam bab III di atas, inilah yang terutama menyebabkan mengapa beberapa di antara pengusaha keturunan Cina di Indonesia bukan saja menjadi orang-orang terkaya di Indonesia, melainkan juga di ASEAN. Tabel 4.2. di bawah menunjukkan bahwa di antara 17 orang Indonesia yang masuk ke dalam daftar 75 orang terkaya di ASEAN pada tahun 1993, 12 di antaranya adalah para pengusaha Indonesia keturunan Cina. Bukan itu saja, tetapi bahkan juga dua di antaranya, yakni Soedono Salim¹⁹ dan Eka Tjipta Widjaya, menduduki posisi pertama dan keempat.²⁰

Tabel 4.2.
75 Pengusaha Terkaya ASEAN (1993)

<i>Asal Negara</i>	<i>Jumlah Pengusaha</i>	<i>Pengusaha Keturunan Cina</i>
Brunei	1	1
Indonesia	17	12
Filipina	11	6
Malaysia	19	17
Singapura	12	12
Thailand	15	12
<i>Jumlah</i>	75	60

Sumber: *Warta Ekonomi*, 28 Februari 1994, sebagaimana dikutip dalam Alexander Irwan, "Business Networks and the Regional Economy of East and South-east Asia in the Late Twentieth Century," Disertasi doktor pada State University of New York at Binghamton, 1995, halaman 108.

18. Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 109.

19. Untuk sedikit gambaran mengenai biografi dan kekayaannya, lihat Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 109-115.

20. Daftar lengkap ke-105 orang terkaya ASEAN pada 1996, juga ranking dan asal-usul etnisnya, disajikan dalam Apendiks I buku ini.

Selain itu, indikator lain dari kuatnya posisi ekonomi beberapa pengusaha keturunan Cina di Indonesia adalah kepemilikan atau kontrol mereka atas beberapa perusahaan besar atau konglomerasi di negeri ini. Mereka memiliki atau mengontrol sejumlah 163 (atau 81,5 persen) di antara 200 perusahaan atau konglomerasi terbesar yang ada di Indonesia. Itu bukan saja berarti bahwa para pengusaha pribumi hanya memiliki atau mengontrol 37 perusahaan besar sisanya (atau 18,5 persennya), melainkan juga bahwa perusahaan-perusahaan terakhir ini pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan yang disebut pertama.

Oleh karena itulah, Data Consult, sebuah lembaga konsultasi bisnis, dalam laporannya pada tahun 1989 menyatakan bahwa, "jika dibandingkan dengan berbagai kemajuan yang dicapai oleh para pengusaha nonpribumi, maka kesuksesan para pengusaha pribumi tidak ada apa-apanya."²¹ Tabel 4.2 di bawah menunjukkan bahwa, pada 1989, 11 dari konglomerasi terbesar di Indonesia, dalam kategori keenam dan ketujuh, dimiliki atau dikontrol oleh para pengusaha keturunan Cina.

Pada pertengahan 1990-an, gambaran di atas mungkin agak sedikit berubah dengan tumbuhnya secara cepat dua konglomerasi baru di bawah kontrol dua pengusaha pribumi, yakni Bambang Trihatmodjo (Bimantara) dan Hutomo Mandala Putra (Humpus). Majalah *Warta Ekonomi* memasukkan kedua nama pengusaha pribumi itu dalam daftar 75 orang terkaya ASEAN pada 1993, masing-masing di urutan 59 dan 56. Meskipun demikian, tetap saja sangat nyata bahwa dominasi para pengusaha keturunan Cina di Indonesia sangat kokoh.

21. Dikutip dalam Alexander Irwan, "Business Networks and the Regional Economy of East and Southeast Asia in the Late Twentieth Century," Disertasi doktor pada State University of New York at Binghamton, 1995, halaman 109.

Tabel 4.2.
Kepemilikan atau Kontrol atas
200 Konglomerasi di Indonesia (1989)

Kategori	Turnover dalam Milyar rupiah	Ranking konglomerasi		Konglomerasi yang dimiliki atau dikontrol oleh pribumi	
		No.	%	No.	%
1.	40 - 150	119	(59,5)	22	(11,0)
2.	151 - 300	34	(17,0)	10	(5,0)
3.	301 - 500	20	(10,0)	2	(1,0)
4.	501 - 1.000	16	(8,5)	3	(1,5)
5.	1.001 - 2.000	9	(4,0)	0	
6.	Lebih dari 2.000	2	(1,0)	0	
Total		200	(100,0)	37	(18,5)

Sumber: Data Consult, sebagaimana diolah dan dimuat dalam Alexander Irawan, "Business Networks and the Regional Economy of East and Southeast Asia in the Late Twentieth Century," Disertasi doktor pada State University of New York at Binghamton, 1995, halaman 110.

Laporan terakhir majalah *Warta Ekonomi* mengenai 105 orang terkaya ASEAN pada 1996, yang terbit pada 31 Maret 1997, memperlihatkan potret yang tidak jauh berbeda dari potret yang sudah disajikan di atas. Dari 105 orang yang disebutkan, 27 orang di antaranya adalah warganegara Indonesia. Lainnya adalah warganegara Malaysia (19 orang), Thailand (22 orang), Filipina (16 orang), Singapura (10 orang), dan Brunei (1 orang). Dari 27 orang yang berwarganegara Indonesia di atas, enam di antaranya masuk ke dalam 20 besar terkaya, dan seluruhnya adalah para pengusaha keturunan Cina. Mereka adalah: Soedono Salim (peringkat 2); Eka Tjipta Widjaya (peringkat 5); Keluarga Wonowidjoyo (peringkat 10); Keluarga Sampoerna (peringkat 12); Keluarga Hartono (peringkat 16); dan Prajogo Pangestu (peringkat 18).²²

22. Lihat *Warta Ekonomi*, 31 Maret 1997. Daftar lengkap ke-200 orang Cina terkaya Indonesia disajikan dalam Apendiks II.

Upaya-upaya ke Arah Pembauran

Pada masa Orde Lama, di kalangan keturunan Cina secara umum berkembang dua arus pemikiran utama yang saling bertentangan mengenai pembauran pri-nonpri.²³ Arus pemikiran pertama adalah paham “integrasi” yang intinya mencita-citakan agar keturunan Cina di Indonesia diakui sebagai salah satu suku bangsa, sebagaimana suku Jawa, Sunda, Minangkabau, dan lainnya. Paham ini dianut dan diperjuangkan oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), yang didirikan pada 1954 dan bergiat sebagai organisasi massa.

Oleh beberapa kalangan, paham ini dikritik karena beberapa kelemahan mendasar. Pertama, keturunan Cina di Indonesia bukanlah suatu golongan yang homogen dengan beberapa kesamaan adat istiadat seperti halnya suku-suku bangsa yang membentuk “orang Indonesia.” Mereka terpecah-pecah berdasarkan propinsi, kota, bahkan desa kelahirannya. Jadi ada keturunan Cina di Indonesia yang orang Hakka, Fukien, Kanton, dan lain-lain. Kedua, letak geografis kediaman mereka tersebar di seluruh Indonesia, sehingga sangat sukar untuk memandang mereka sebagai salah satu suku bangsa. Ketiga, mereka juga tidak homogen dilihat dari segi kebudayaan. Dalam hal ini, seperti sudah disinggung di atas, mereka secara garis besar terbagi atas keturunan Cina peranakan dan totok. Kedua golongan ini berbeda dalam hal sejauh mana masing-masing golongan masih memegang erat adat istiadat Cina dan masih menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Sementara itu, arus pemikiran yang kedua adalah pa-

23. Lihat tulisan Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” dalam J.A.C. Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books [Asia], 1976), halaman 19-75. Lihat juga Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983).

ham “asimilasi,” yang pada dasarnya menganjurkan agar keturunan Cina di Indonesia membaur dan mencairkan diri dengan masyarakat lokal. Paham ini dikembangkan dan diperjuangkan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), dan sekarang dilanjutkan oleh Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Paham ini diejawantahkan dalam “Piagam Asimilasi,”²⁴ yang dicetuskan dalam Seminar Kesadaran Nasional yang berlangsung pada 13-15 Januari 1961. Piagam ini antara lain mengatakan bahwa masuk dan diterimanya seorang keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus sedemikian rupa sehingga akhirnya golongannya dan ciri-ciri kecinaannya yang khas hilang sama sekali. Demikianlah, menurut paham asimilasi ini, orang-orang keturunan Cina yang tinggal di Jawa, misalnya, harus meleburkan diri menjadi orang Jawa. Demikian juga dengan orang-orang keturunan Cina yang tinggal di tengah suku-suku lain di Indonesia. Ringkasnya, mereka harus melebur ke masyarakat lokal.

Oleh karena pertaliannya yang sangat erat dengan gerakan komunis di Indonesia beberapa tahun menjelang G30S PKI, Baperki turut hancur dengan ditumpasnya PKI. Banyak tokoh-tokohnya yang ditangkap atau lari ke luar negeri. Bersamaan dengan itu, paham integrasi pun tenggelam. Sejalan dengan itu, sejak bangkitnya pemerintah Orde Baru, paham asimilasi mendapat kesempatan luas dan dukungan kuat pemerintah untuk melebarkan sayapnya. Antara lain berdasarkan atas saran-saran dari LPKB dan Bakom PKB, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang dimaksudkan untuk menata sedemikian rupa agar proses pembauran masyarakat keturunan Cina dengan masyarakat

24. Tentang “Piagam Asimilasi,” lihat catatan Junus Jahja, salah seorang yang ikut menandatangani, dalam Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja*, halaman 351-361.

keturunan pribumi berjalan dengan lancar.²⁵

Di awal Orde Baru, persisnya pada 5 Juli 1966, MPRS mengesahkan Resolusi No. III/Res/MPRS/1966 tentang pembinaan kesatuan bangsa. Resolusi ini menyatakan larangan terhadap perangkapan kewarganegaraan dan perlunya mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warganegara keturunan asing di Indonesia. Hal ini hendak dilakukan dengan menghapuskan secara tuntas segala hambatan yang mungkin dapat mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara WNI keturunan asing dan masyarakat pribumi.

Untuk mencapai tujuan di atas, salah satu peraturan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai pergantian nama. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menganjurkan agar keturunan etnis Cina bersedia mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Melalui peraturan itu, pemerintah juga memutuskan agar prosedur penggantian nama itu dipermudah. Pemerintah mengeluarkan anjuran itu dengan maksud agar nama-nama Cina, yang tentu saja mengacu kepada identitas Cina dan menjadi halangan psikologis terhadap proses pembauran, dapat dihilangkan.²⁶

Selanjutnya, pada 6 Desember 1967, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina. Dalam instruksi itu an-

25. Keterangan lebih jauh mengenai produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru seperti disebutkan di bawah ini disajikan dalam Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, bab 5, 6, dan 7; Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, halaman 150-167; dan Jahja (ed.), *Nonpri di Mata Pribumi*, di bawah bab "Kebijaksanaan Orde Baru," halaman 39-41.

26. Paparan lebih jauh mengenai peraturan ini dan bagaimana reaksi kalangan keturunan Cina terhadapnya, lihat Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, halaman 110-112.

tara lain dikemukakan, tanpa mengurangi kebebasan semua WNI untuk melaksanakan ritus keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, tata cara ibadat keturunan Cina harus dilakukan secara intern dan dalam batas-batas keluarga keturunan etnis Cina saja. Hal ini dilakukan pemerintah dengan maksud mengurangi jarak antara keturunan etnis Cina dengan masyarakat pribumi. Dengan adanya Instruksi Presiden ini, maka upacara arak-arakan menggotong *toapekong*, perayaan *Imlek* (tahun baru Cina), pertunjukan *barongsay*, dan pertunjukan sejenis lainnya yang menunjukkan kebudayaan dan adat istiadat Cina, harus dilakukan secara tertutup dan terbatas di lingkungan keturunan Cina saja.

Kemudian, pada 10 April 1967, keluar Keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Disebutkan bahwa kedudukan mereka, hak dan kewajiban mereka, di depan hukum sama dengan bangsa Indonesia lainnya. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pembinaan mereka dijalankan melalui proses asimilasi, terutama untuk mencegah terjadinya eksklusivisme berdasarkan perbedaan-perbedaan rasial.

Sementara itu, sejalan dengan keinginan besar untuk mencapai tujuan di atas, masalah pembauran selalu dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN 1978 disebutkan, "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa." Dalam susunan redaksi yang sama, GBHN 1983 dan 1988 secara tandas menegaskan, "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan ketahanan nasional."

Selain melalui usaha-usaha di atas, tujuan pembauran juga diupayakan dengan cara-cara yang oleh A. Dahana

disebut tidak biasa atau "inkonvensional."²⁷ Yang dimaksudkan dengan cara ini adalah apa yang dirintis oleh Junus Jahja dan kawan-kawannya lewat Yayasan Ukhuwah Islamiyah seperti sudah sempat disinggung di atas. Sudah lama Junus Jahja dikenal sebagai tokoh pembauran. Pada 1952, dalam usianya yang ke-25 dan masih menjadi mahasiswa di negeri Belanda, ia memprakarsai pembubaran perkumpulan etnis Cina *Chung Hua Hui*. Hal itu disebabkan karena ia memandang bahwa perhimpunan berdasarkan etnis atau ras tidak sesuai bagi para anggotanya yang sudah beralih menjadi WNI. Ia lalu menganjurkan agar mereka masuk menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang pembentukannya turut ia prakarsai. Sekembalinya di Tanah Air pada 1959, dengan alasan yang sama ia aktif menentang keberadaan Baperki.

Salah satu dimensi baru dalam upaya-upaya pembauran Junus Jahja terjadi pada 1979, ketika ia berpindah agama dari Protestan ke Islam. Di kalangan para penganjur asimilasi, ia menjadi orang pertama yang berpandangan bahwa masuk Islam adalah cara terbaik untuk mempercepat proses pembauran. Sebagai alasannya, ia kerap mengemukakan pepatah yang berbunyi: "*When you are in Rome, do as the Romans do!*"²⁸ Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, ia berkeyakinan bahwa masalah pembaruan pri dan nonpri akan dengan sendirinya terselesaikan jika kelompok WNI keturunan Cina masuk Islam.

Untuk memperjuangkan pandangannya itu, ia aktif di berbagai kegiatan Islam: dakwah, penerbitan, kerja sama ekonomi dan sebagainya. Ia antara lain giat mengajak kalangan keturunan Cina untuk masuk Islam dan melakukan kawin campur. Ia mendapat banyak dukungan para pe-

27. Dahana, "Masalah Cina Perantauan," halaman 64.

28. Lihat antara lain dalam Jahja, *Islam di Mata WNI*, halaman iii; dan Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja*, halaman 452.

mimpin Muslim.²⁹ Almarhum Buya Hamka, misalnya, menyatakan, "Islam tidak membedakan asal-usul, ras maupun keturunan seseorang. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam diterima oleh rakyat dengan baik sehingga terbaaur dengan sendirinya secara tuntas."³⁰

"Masalah Cina": Belum Tuntasnya Pembauran

Di atas tadi sudah dikemukakan secara cukup rinci berbagai pemikiran dan kebijakan, baik yang dikemukakan kalangan pemerintah maupun kalangan "swasta," untuk mempercepat pembauran antara WNI yang asli keturunan pribumi dan yang keturunan Cina. Karena berbagai pemikiran dan kebijakan itu, juga usaha-usaha perealisasiannya, banyak pengamat yang menyatakan bahwa proses pembauran sudah berlangsung cukup baik.

Penilaian di atas juga didukung oleh beberapa studi mendalam yang pernah dilakukan mengenai masalah ini. Salah satunya adalah studi Stuart W. Grief, seorang pakar dari Amerika Serikat, yang melakukan wawancara mendalam terhadap 25 orang responden dari berbagai lapisan masyarakat keturunan etnis Cina di Indonesia. Salah satu temuan penting studi itu adalah bahwa sikap-sikap kecinnaan telah banyak yang hilang. Semua responden yang diwawancarainya menyatakan bahwa ia adalah orang Indonesia dari berbagai daerah. Sebagai dukungan terhadap sikap itu, mereka juga menyatakan bahwa mereka bersedia untuk meninggalkan kebudayaan Cina yang diwariskan nenek-moyang mereka, sebagai "harga" atau pengorbanan

29. Lihat Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, halaman 212.

30. Hamka, "Pernyataan Majelis Ulama Indonesia," dalam Jahja (ed.), *Nonpri di Mata Pribumi*, halaman 121.

yang harus mereka bayar untuk diterima sepenuhnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Sementara itu, penggantian nama dan berbagai peraturan serta perundangan yang menjamin persamaan hak dan kewajiban semua warganegara Indonesia, termasuk yang keturunan asing, dipandang Grief telah memacu proses pembauran. Bahkan Grief berani mengemukakan pendapat bahwa, tidak berapa lama lagi, kita akan sulit membedakan antara yang pri dan yang nonpri, kecuali yang bersangkutan mengakui identitasnya sendiri.³¹

Perkembangan menggembirakan di atas, lanjut Grief, sedikitnya sudah bisa dirasakan sejak 1985. Upaya-upaya pembaruan bisa dikatakan maju pesat terutama di kubu peranakan yang paling tua di Jawa. Secara cukup detail, Grief memaparkan demikian:

Sekarang tidak banyak orang di bawah usia 40 yang bisa membaca atau menulis huruf Cina, dan di Jawa terutama, bahasa Cina dalam percakapan di rumah sudah lenyap dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Pada umumnya, terutama di kota-kota, orang-orang Cina telah berbaur ke dalam masyarakat Indonesia modern ketimbang menjadi salah satu suku bangsa. Bahkan seorang pengamat biasa pun akan dapat melihat, bahwa kerukunan yang sejati di hampir semua lapisan antara pribumi dengan nonpribumi telah tercapai di atas dasar yang baik dan kuat. Meskipun angka-angka statistik, yang selalu membuat frustrasi para periset, tidak ada untuk membuktikannya, tampaknya jumlah perkawinan antara totok dan peranakan makin meningkat. Perkawinan antara pribumi dengan peranakan pun menunjukkan kecenderungan yang sama. Fenomena terakhir ini tidak diragukan lagi dimudahkan oleh langkah revolusioner sebagian besar golongan muda Cina untuk meninggalkan ajaran Kong Hu Cu (sebuah filsafat yang tidak didukung dan disahkan Orde Baru yang berorientasi pada agama) dan agama Budha (salah satu dari lima agama yang disahkan oleh pemerintah), dan masuk Kristen atau Katolik Roma.³²

31. Lihat Stuart W. Grief, *"WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh A. Dahana (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), halaman 122-133.

32. Grief, *"WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, halaman 23-24.

Jika kita sekilas saja menengok berbagai bidang kehidupan sosial-kemasyarakatan di tanah air kita, memang tidaklah sulit bagi kita untuk menemukan tokoh-tokoh yang kita banggakan, bahkan yang mengharumkan nama bangsa, yang berasal dari keturunan Cina.

Dalam hal ini, fakta yang pasti tak terbantahkan adalah apa yang sudah dicapai para atlet bulutangkis kita di dunia internasional. Seperti diketahui mungkin oleh semua rakyat Indonesia, banyak di antara para atlet itu yang berasal dari keturunan Cina. Yang paling menonjol di antara mereka, tidak diragukan lagi, adalah Sang Maestro Rudy Hartono, yang menjuarai turnamen All England sebanyak sembilan kali berturut-turut —sebuah rekor yang hingga kini belum terpecahkan. Selain itu, juga dapat dicatat beberapa nama lainnya: Kwik Kian Gie dan Jusuf Wanandi (politisi di PDI dan Golkar); Teguh Karya dan Nano Riantiarno (Kesenian Teater); Abdul Hadi W.M. (Penyair); Mely G. Tan, Thee Kian Wie, Lie Tek Tjeng, Arief Budiman, Ariel Heryanto, Mari Pangestu (ilmuwan); almarhum Yap Thiam Hien (advokat dan pejuang hak-hak asasi manusia); dan seterusnya.

Terlepas dari perkembangan yang menggembirakan seperti disebutkan di atas, harus pula diakui dengan tujuan akhir pembauran pribumi dan non-pribumi masih belum tercapai. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan pembauran total itu masih jauh dari tuntas. Dengan kata lain, menjelang millenium ketiga yang beberapa tahun lagi akan datang, bangsa Indonesia masih saja dihantui oleh apa yang oleh para pakar disebut sebagai "Masalah Cina."

Oleh beberapa pemimpin pribumi, masalah ini sudah seringkali dikemukakan. Sekadar menyebut satu contoh yang bagus, karena cakupannya yang dapat disebut menyeluruh, dalam sebuah makalah yang ditulis pada 1991, Siswono Judo Husodo secara tegas mengemukakan pandangan dan penilaiannya mengenai belum selesainya persoalan

pembauran di atas. Siswono, yang ketika itu adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, mencatat sembilan "dosa" WNI keturunan Cina yang telah ikut mempersulit upaya-upaya pembauran. Mengutip dan mengembangkan apa yang pernah disebutkan oleh Siswono, kesembilan "dosa" itu mencakup persoalan-persoalan:

1. Masih banyak di antara WNI keturunan Cina yang tinggal secara eksklusif di wilayah mereka sendiri. Kenyataan ini pada gilirannya —meskipun mungkin tidak dimaksudkan begitu— telah menciptakan kantong-kantong yang terpisah dari penduduk Indonesia yang lain.
2. Dalam hal merekrut tenaga kerja, masih sering ditemui bahwa sejumlah perusahaan yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha keturunan Cina cenderung untuk lebih memprioritaskan calon pekerja dari keturunan Cina daripada calon-calon keturunan pribumi.
3. Dalam soal pemberian gaji, sejumlah perusahaan yang dijalankan oleh para pengusaha Cina masih bersikap diskriminatif. Hal ini dalam pengertian bahwa mereka cenderung untuk memberi gaji yang lebih besar kepada para pekerja keturunan Cina dibandingkan pekerja-pekerja pribumi.
4. Dalam hal hubungan usaha (bisnis) dan sikap terhadap mitra kerja atau klien, masih sering ditemui adanya beberapa pihak yang dengan sengaja atau tidak cenderung membedakan antara keturunan Cina dan keturunan pribumi.
5. Dalam bertetangga, sebagian warga keturunan Cina masih mempunyai kecenderungan untuk tidak menunjukkan solidaritas dan kebersamaan sosial dengan warga pribumi.
6. Sebagian dari mereka masih belum bersedia untuk mengembangkan rasa identitas nasional secara utuh. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sebenarnya rasa identitas nasional sebagian dari mereka masih sangat lemah. Untuk itu, masih sering ditemui adanya persep-

si bahwa sebagian dari mereka cenderung untuk memperlakukan Indonesia tidak lebih dari sekadar tempat untuk menetap dan mencari penghidupan (keuntungan).

7. Di antara mereka masih ada yang menggunakan bahasa ibu (Cina) dalam percakapan sehari-hari. Demikian pula, masih ada di antara mereka yang memegang erat adat-istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Dalam konteks itu, sangat disayangkan bahwa sebagian dari mereka kurang atau tidak mengenal adat-istiadat Indonesia. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa di antara mereka ada yang tidak mau berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.
8. Masih ada di antara mereka yang memandang status kewarganegaraan Indonesia tidak lebih dari sekadar untuk keperluan legalitas.
9. Masih ada di antara mereka yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan kelompok-kelompok (etnis atau ras) lain dalam masyarakat Indonesia.³³

Bagaimana “daftar dosa,” yang disampaikan oleh figur seperti Siswono, di atas harus dibaca?

Mely G. Tan, ilmuwan (sosiolog) keturunan Cina yang bekerja di LIPI, mengajukan tiga hal yang harus diperhatikan dalam memahami “daftar dosa” di atas. Pertama, “daftar dosa” itu dikemukakan oleh seseorang yang mempunyai *stature* tertentu dalam konfigurasi elite politik nasional. Seperti telah disebutkan, Siswono pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat. Kini, Siswono adalah Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan. Meskipun

33. Dikutip dari artikel Mely G. Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues and Implications,” dalam Leo Suryadinata (ed.), *Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension* (Singapore: Times Academic Press, 1995), halaman 16-17.

pernyataan tersebut mungkin tidak dikemukakan dalam kapasitasnya sebagai pejabat, akan tetapi karena *stature* yang dimilikinya, pernyataan tersebut tentu memiliki kadar atau makna politis. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa Siswono memang mempunyai perhatian besar dalam masalah pembauran ini.³⁴

Kedua, "daftar dosa" yang disebutkan di atas juga sudah sering dikemukakan kalangan lain dalam membaca langkah-langkah WNI keturunan Cina di Indonesia, khususnya yang menyangkut kegiatan mereka di bidang dunia usaha dan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya komunitas pribumi mempunyai pandangan yang relatif baku atau konstan terhadap warga keturunan Cina. Dengan kata lain, tidak banyak yang berubah dalam pandangan sebagian besar masyarakat pribumi terhadap warga keturunan Cina —khususnya yang berkaitan dengan perilaku ekonomi dan sosial-budaya mereka.

Ketiga, akan tetapi penting untuk dicatat bahwa "daftar dosa" itu tidak dikemukakan dalam semangat yang memukul-rata. Artinya, tidak ada nuansa generalisasi di dalam pengungkapan "daftar dosa" tersebut. Penggunaan kata "sebagian" atau "sementara" menunjukkan dengan tegas bahwa tidak *seluruh* warga keturunan Cina bertingkah laku tunggal atau homogin. Hal itu berarti ada segmen-segmen komunitas warga keturunan Cina, baik dalam kapasitas mereka sebagai aktor ekonomi atau sebagai warga negara biasa, yang tidak terlibat dalam struktur "dosa" di atas. Dengan begitu, maka Siswono terbebaskan dari kecenderungan untuk memberikan penilaian secara stereotipikal terhadap warga negara Indonesia keturunan Cina.³⁵ Seperti akan menjadi lebih jelas lagi nanti, hal ini sangat penting,

34. Dalam hal ini, antara lain, Siswono pernah menulis buku *Warga Baru*.

35. Lihat Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia," halaman 17.

karena salah satu akar persoalan yang menghambat upaya-upaya pembauran adalah seringnya pemberian *judgment* yang bersifat stereotipikal kepada masing-masing kelompok.

Namun demikian, ketidakpuasan terhadap hasil-hasil pembauran yang selama ini sudah dijalankan juga dirasakan oleh sebagian WNI keturunan Cina. Hanya saja, kemungkinan besar karena posisi mereka sebagai kelompok minoritas, perasaan tidak puas tersebut sering kali tidak dinyatakan secara terbuka.

Dalam wawancara yang dilakukan Grief seperti sudah disebutkan di atas, misalnya, masih muncul banyak keluhan tentang perilaku tidak adil terhadap WNI keturunan Cina. Dengan kata lain, beberapa sumber yang diwawancarai Grief merasakan bahwa, dalam menjalankan berbagai kebijakan yang sudah digariskan pemerintah, terjadi banyak inkonsistensi di lapangan. Beberapa di antara mereka misalnya mengatakan, pemberian nomor khusus dan penandaan tertentu atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka merupakan perlakuan yang diskriminatif atas dasar ras.

Dalam hal ini, tambah Grief, yang paling mencolok adalah masalah kewarganegaraan bagi para keturunan Cina yang masih merupakan warga negara asing (WNA). "Pembatalan Perjanjian Dwikewarganegaraan dengan RRC pada bulan April 1969," tulis Grief, "telah menyebabkan anak-anak orang Cina WNA yang dulu memilih kewarganegaraan Cina tak dapat melepaskan status mereka sebagai warga negara Cina sesudah mereka dewasa. Padahal mereka dilahirkan di Indonesia."³⁶ Mengenai inkonsistensi kebijakan di lapangan, Grief menulis:

Alih-alih kata-kata indah yang ada dalam peraturan, proses naturalisasi berjalan dengan sangat lambat dan mahal. Hal itu

36. Grief, "WNI": *Problematic Orang Indonesia Asal Cina*, halaman 29.

menyebabkan terjadinya banyak kasus korupsi yang hanya menguntungkan golongan Cina kaya tapi merugikan orang-orang Cina tak kaya atau malahan miskin, yang selama ini luput dari perhatian. Pada 1979 proses naturalisasi mulai dijalankan dengan cepat. Walaupun menyinggung perasaan banyak Cina yang sudah lama menjadi WNI, semua orang Cina diharuskan mengisi kuosioner yang dibuat untuk menghilangkan segala kasus kewarganegaraan yang tidak jelas. Menjelang tahun 1980, banyaknya Cina WNA sekitar satu juta orang, dan prosedur untuk naturalisasi disederhanakan tapi tetap saja mahal dan berada di luar kemampaun banyak orang Cina untuk membayarnya.³⁷

Selain itu, sebagian dari responden yang diwawancarai Grief, misalnya, menyatakan ketidakpuasannya terhadap serangkaian pembatasan atas golongan etnis Cina untuk memasuki universitas-universitas negeri. Grief menyebutkan bahwa, meskipun dalam teori WNI keturunan Cina mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya, tapi pada kenyataannya mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam konteks penerimaan mahasiswa di universitas-universitas negeri. "Kebanyakan universitas negeri membatasi jumlah penerimaan mahasiswa Cina sampai 10 persen saja. Malahan di daerah-daerah yang kuat pengaruh Islamnya, dibatasi hanya sampai 5 persen," tulisnya. Kecenderungan ini telah menyebabkan timbulnya universitas-universitas swasta, yang biasanya berafiliasi dengan gereja dan keuangannya dipikul oleh keluarga-keluarga Cina yang sebetulnya tidak semuanya mampu. Akibatnya, tambah Grief, banyak sekali keluarga Cina yang menderita.³⁸

Sementara itu, beberapa kalangan WNI keturunan Cina juga beranggapan bahwa kasus hubungan pri-nonpri dan

37. Grief, "WNI": *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, halaman 29. Lihat juga sumbangan tulisan Christianto Wibisono, "Masalah 'non-pribumi' di Indonesia," dalam Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja*, halaman 65-80. Terakhir, kritik seperti ini juga dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, Wakil Gubernur Lemharas. Lihat laporannya dalam *Kompas*, 25 Juli 1996.

38. Grief, "WNI": *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, halaman 30-31.

posisi nonpri di negeri ini, keadaan sekarang sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan dengan zaman Orde Lama. Malah, beberapa pihak menyatakan, keadaannya bahkan lebih buruk. Kritik terakhir ini merujuk kepada kenyataan bahwa pada masa Orde Lama dulu ada beberapa menteri yang keturunan Cina, sedangkan sekarang tidak ada. Para menteri keturunan Cina itu misalnya adalah Oei Tjoe Tat, Tan Kiem Liong, dan David Cheng pada Kabinet Dwikora, dan Ong Eng Djie pada Kabinet Ali Sastroamidjojo.³⁹

Selain itu, sebagaimana direkam pengamat yang juga keturunan Cina, A. Dahana, beberapa kalangan WNI keturunan Cina merasakan bahwa pengelompokan pri-nonpri ini makin terasa dengan golongan keturunan Cina lebih terkonsentrasi di bidang bisnis dan keturunan pribumi di bidang birokrasi.⁴⁰ Ringkasnya, sebagaimana dikatakan oleh Adam Schwarz, “[m]eskipun para keturunan Cina memperoleh iklim ekonomi yang lebih kondusif dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, tetapi secara politik dan kultural mereka secara umum masih merupakan orang asing (*outsiders*).”⁴¹

Perkembangan yang tampak belakangan ini tidak banyak berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak dapat diragukan lagi, perkembangan yang paling tidak menggembarakan berlangsung pada bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena kelompok minoritas keturunan Cina, yang jumlahnya hanya 4-5 persen dari seluruh penduduk Indonesia itu, menguasai 70 hingga 80 persen modal yang beredar di Indonesia. Rasio yang sangat tidak proporsional antara jumlah penduduk komunitas keturunan Cina dan jumlah mo-

39. Lihat misalnya artikel Christianto Wibisono, “Terobosan Menteri Nonpri,” *Panji Masyarakat*, 19 Mei 1997.

40. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 64.

41. Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 106.

dal yang mereka kuasai inilah yang mendorong banyak pihak untuk melihat fenomena penguasaan kapital warga keturunan Cina di Indonesia sebagai “ketidak-seimbangan paling tinggi di Asia Tenggara.”⁴²

Sayangnya, perkembangan sepanjang kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini tampaknya justru makin memperkeruh persoalan di atas. Salah satu faktor yang ikut berperan dalam hal ini adalah media massa, baik cetak maupun elektronik. Meskipun tidak dimaksudkan demikian, mereka sering dihadapkan pada situasi yang sulit dan dilematis. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit —antara tugas pemberitaan sebagai fungsi utama media massa dan kemungkinan dampak yang bakal timbul dari hal-hal yang mereka beritakan, yang dalam banyak kasus tidak disadari atau diketahui sebelumnya.

Harus diakui, wacana dan kegiatan ekonomi para konglomerat, yang sebagian besar dari mereka berasal dari warga keturunan Cina, mempunyai nilai jual jurnalistik yang sangat tinggi. Lebih-lebih jika hal itu diletakkan dalam konteks kenyataan empirik bahwa warga keturunan Cina menguasai, seperti telah disinggung di atas, kurang lebih 70 hingga 80 persen modal yang beredar di tanah air. Dalam perspektif jurnalistik, realitas seperti itu merupakan sesuatu yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Tidak terlalu berlebihan kalau Mely G. Tan menulis, “[j]ika seseorang memperhatikan jejeran majalah yang dijual di pinggir-pinggir jalan dan di toko-toko buku di Jakarta, [maka ia akan menemukan bahwa] tidak ada satu bulan pun, bahkan tidak ada satu minggu pun, yang terlewatkan tanpa beberapa pengusaha besar keturunan etnis Cina (atau

42. Lihat artikel John McBeth and Margot Cohen, “Tinderbox,” dalam *Far Eastern Economic Review*, 9 Januari 1997, halaman 15. Penilaian itu mereka rumuskan sebagai “the highest imbalance in Southeast Asia.”

yang dalam bahasa media di Indonesia disebut 'konglomerat') menghiasi sampul depan majalah-majalah ekonomi/bisnis."⁴³ Tanpa disadari, apalagi dimaksudkan, pemberitaan-pemberitaan seperti ini—yang terjuktaposisikan dengan situasi umum ekonomi komunitas pribumi—telah ikut memperparah kecurigaan dan kecemburuan yang sudah ada.

Fenomena pemberitaan media di atas sudah mulai tampak sejak pertengahan dekade 1980-an. Puncaknya mulai terasa pada akhir dekade tersebut dan berlanjut hingga dewasa ini. Demikianlah, misalnya, *Eksekutif*, sebuah majalah bulanan eksklusif dan mahal harganya, yang terutama memang dimaksudkan untuk memotret dunia kalangan eksekutif dan diperuntukkan bagi kelompok pembaca yang sama, dalam sampul depannya edisi Mei 1989, memuat gambar besar Eka Tjipta Widjaja, bos Sinar Mas Group. Majalah lainnya, *Warta Ekonomi*, dalam sampul depan edisinya Oktober 1989, memasang gambar lima pengusaha muda pria dan wanita, dengan kutipan berbunyi "Generasi Kedua." Dari kelima pengusaha muda itu, tiga di antaranya adalah pengusaha muda keturunan Cina: James Ryadi (anak Mochtar Ryadi), Anthony Salim (anak Liem Sioe Liong), dan Indra Widjaja (anak Eka Tjipta Wijaja). Dua sisanya adalah pengusaha perempuan keturunan pribumi, yaitu Shanti Soedarpo (anak Soedarpo) dan Yanti Sukamdani (anak Sukamdani). Lalu, pada edisi Oktober 1989, majalah *Swasembada* menulis laporan utama mengenai kecenderungan bisnis 1990-an. Sampul depannya memasang enam gambar pe-

43. Lihat Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia," halaman 14. Seperti tampak dalam contoh-contoh yang diberikan Mely G. Tan sendiri, yang sebagian-nya juga akan dikemukakan di bawah, ekspose ini terbukti tidak hanya dilakukan oleh majalah ekonomi/bisnis saja seperti yang dikemukakannya dalam kutipan di atas, melainkan juga oleh majalah-majalah umum seperti *Tempo* atau *Editor*.

ngusaha, yang tiga di antaranya adalah pengusaha keturunan Cina: Ciputra (Jaya), Teddy P. Rachmat (Astra), dan Sofyan Wanandi (Gemala). Tiga sisanya adalah Antony Bruggmans (Unilever), Yamin Taher (National Gobel), dan Dicky Iskandar Di Nata (Bank Duta).

Beberapa contoh dari majalah-majalah yang beredar sejak 1990 hingga 1993, seperti yang pernah diteliti oleh Mely G. Tan, memperlihatkan gambaran yang sama mengenai kuatnya daya tarik berita dari kelompok pengusaha besar yang kemudian dikenal luas dengan sebutan "konglomerat" itu.⁴⁴ Misalnya, pada tahun 1990, Liem Sioe Liong sedikitnya muncul dua kali sebagai tokoh untuk sampul depan (*Tempo*, Maret 1990, dan *Editor*, 14 April 1990). Pada tahun yang sama, majalah *Infobank* (edisi bulan Mei 1990) memasang gambar empat konglomerat besar keturunan Cina dalam sampul depannya: Mochtar Ryadi, Edward Soerjadjaja, Eka Tjipta Widjaja, dan Mu'min Ali. Pada 1991, Liem Sioe Liong lagi-lagi muncul dalam sampul depan majalah *Editor* edisi Agustus.

Kemudian, masih dalam nafas yang sama, 1992 diwarnai oleh tampilnya dua wajah baru pengusaha besar keturunan Cina yang segera mencuat dalam pemberitaan media massa nasional dan internasional karena sepak terjang keduanya dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah Prayogo Pangestu (bos Barito Pasifik Timber, yang nama aslinya Phang Djun Phen). Ia berturut-turut tampil dalam sampul depan *Editor* (25 April), *Prospek* (15 Agustus), dan *Tempo* (12 Desember). Ia bahkan sempat tampil dalam sampul depan majalah berbahasa Inggris yang terbit di Hong Kong, *Far Eastern Economic Review* (12 Maret), dengan judul laporan utama "Penguasa Hutan" (*Lord of the Forest*). Wajah baru lainnya adalah Tryono Gondokusumo, yang tampil dalam sam-

44. Lihat Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia," halaman 14-15.

pul depan salah satu edisi *Warta Ekonomi* dengan judul laporan "Taipan Baru." Gambaran sejenis juga dapat ditemukan dalam berbagai edisi majalah-majalah berita lainnya, seperti *Forum Keadilan* dan *Indonesian Business Weekly* (salah satu dari dua mingguan bisnis berbahasa Inggris yang terbit di Jakarta).

Peliputan media massa sepanjang tahun 1993, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, juga masih ditandai oleh dominannya muka-muka pengusaha keturunan Cina di sampul depan majalah. Tetapi ada dimensi baru dalam hal ini. William Soerjadaja menjadi "berita hangat" sepanjang beberapa bulan sejak pertengahan 1992 hingga 1993. Kali ini bukan karena kesuksesan bisnisnya, melainkan karena kebangkrutan Bank Summa, sebuah bank swasta yang dipimpin oleh anaknya yang tertua, Edward Soerjadaja. Menghadapi kemelut ini, tanggungjawab sepenuhnya tampak diambil alih oleh William, sedang Edward menghilang dari arena. Dalam kulit muka majalah berita mingguan *Tempo* saja, William tampil tiga kali, yakni pada edisi 28 November 1992, 26 Desember 1992, dan 22 Mei 1993.

Bahwa beberapa pengusaha keturunan Cina itu kaya raya, hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi, sebagaimana dikatakan Schwarz, yang benar-benar baru adalah kenyataan bahwa kekayaan dan sosok pribadi mereka, yang pada mulanya dan menurut tradisinya tampil *low profile* itu, kini dipertontonkan di depan publik.⁴⁵ Hal itu tidak bisa dielakkan. Dengan menjual saham mereka di bursa efek, misalnya, para pengusaha itu harus memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai perusahaan mereka kepada publik. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya. Ringkasnya, sementara memang benar jika dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan keturunan Cina sudah

45. Lihat Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 99.

lama kaya raya, tetapi kini kekayaan mereka dipertontonkan kepada siapa saja.

Pemberitaan-pemberitaan media massa di atas mau tidak mau turut mempertegas jurang pemisah atau apa yang di atas disebut sebagai ketidakseimbangan ekonomi. Pada akhirnya, hal itu ikut pula memancing rasa kecemburuan sosial-ekonomi komunitas pribumi terhadap warga keturunan Cina. Seperti dapat dilihat pada bab II yang lalu, kecemburuan seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru — sejarahnya dapat ditelusuri hingga ke masa pertama kali mereka datang ke bumi Nusantara. Tetapi kini, dengan keterlibatan media massa, kekayaan dan sepak terjang para pengusaha keturunan Cina itu begitu mencolok, dan kecemburuan yang menyertainya juga begitu besar, seperti api dalam sekam yang setiap saat mudah terbakar. Pemberitaan-pemberitaan itu memperkuat opini publik untuk menentang mereka, dan hal itu bisa terjadi setiap saat.

Kecemburuan di atas, dan kecurigaan yang menyertainya mengenai tipisnya rasa nasionalisme para pengusaha keturunan Cina itu, makin bertambah kental sehubungan dengan meningkatnya hubungan dagang antara mereka dengan kalangan pengusaha Cina di luar negeri, baik di wilayah Cina perantauan maupun Cina daratan. Seperti sudah dipaparkan pada bab III yang lalu, hubungan ini makin lama makin erat, membentuk jaringan yang kokoh sesama mereka. Di Indonesia sendiri, hal ini makin dimungkinkan karena, pada 1990 pemerintah memutuskan untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRC setelah 23 tahun terputus.

Contoh terbaik dari kecurigaan dan kecemburuan di atas sejauh ini mungkin adalah kontroversi yang berlangsung menyusul didatangkannya 700 orang buruh dari RRC oleh Sinar Mas Group, perusahaan swasta milik Eka Tjipta Wijdjaja. Kisahnya bermula pada Agustus 1992, ketika perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper, salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group, membeli mesin dari RRC. Ke-700 orang buruh itu didatangkan untuk membangun pabrik

yang menggunakan mesin bersangkutan.

Ketika rencana ini diberitakan media massa, protes bermunculan dari berbagai asosiasi buruh, kalangan parlemen, pejabat negara, dan lainnya. Sinar Mas Group didesak untuk memulangkan buruh-buruh RRC di atas, meskipun perusahaan ini sudah memperoleh izin dari beberapa kementerian di Indonesia. Oleh Ginanjar Kartasasmita, perusahaan itu diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan dibukanya kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRC. "Saya tidak mau melihat hal seperti ini terjadi lagi nanti," katanya. Sementara itu, dalam salah satu tajuknya, harian berbahasa Inggris *Indonesian Observer* menulis, "Melihat situasi di atas, adalah fakta tak terbantahkan bahwa kini telah berlangsung erosi nasionalisme dan patriotisme di Indonesia."⁴⁶

Contoh kontroversi hangat lainnya adalah penilaian-penilaian, baik yang terbuka maupun terpendam, yang muncul setelah berlangsungnya Konvensi Para Pengusaha Cina se-Dunia II di Hong Kong pada 22-24 November 1993. Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, majalah berita mingguan *Tempo* menurunkan laporan utama tentang kiprah ekonomi konglomerat keturunan Cina di Cina daratan. Laporan itu dikemas dengan judul "Mari Kembali ke Cina." Laporan yang sebanding dibuat oleh *Warta Ekonomi*. Dalam konteks yang agak luas dan bersifat global, majalah yang khusus mengulas soal-soal ekonomi itu melaporkan jaringan usaha konglomerat Cina sedunia. Dengan judul yang agak besar, "Jaringan Bisnis Taipan se-Dunia," laporan itu tentu mendatangkan respon-respon tertentu di kalangan masyarakat luas, khususnya komunitas pribumi.⁴⁷

46. Lihat Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 130-131.

47. Lihat Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia," halaman 20-21.

Di tengah masih maraknya kesan atau persepsi banyak pihak bahwa sebagian warga keturunan Cina kurang memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan teguh, konvensi pengusaha Cina di atas bukan hanya menimbulkan kontroversi tetapi juga mengundang banyak pertanyaan. Dalam konteks sejarah Nusantara, hal itu semakin meneguhkan kecurigaan-kecurigaan yang selama ini masih berkembang. Peristiwa seperti itu layak dan patut untuk dipublikasikan. Akan tetapi, seperti telah disinggung, tak dapat dipungkiri bahwa hal itu menebalkan rasa kecurigaan yang masih ada pada sementara komunitas pribumi atau pihak-pihak lainnya.

Di kalangan keturunan Cina sendiri, peristiwa di atas mendapat reaksi yang beragam. Bos Gemala Group, Sofyan Wanandi, kepada *Tempo* menyatakan, "Menanam modal di RRC sebenarnya bukan soal. Sepanjang hanya menyangkut bisnis dan perluasan pasar, tidak apa-apa. Tapi, kalau mengumpulkan keturunan Cina untuk membangun negeri leluhur, itu apa-apa." Ia juga menambahkan, "harus diingat, kita ini dibesarkan di Indonesia. Jadi basis kita ini di sini, bukan di RRC."

Pendapat ini didukung Kwik Kian Gie. Menurutnya, hal itu merugikan usaha untuk mengintegrasikan para keturunan Cina ke dalam masyarakat lokal. Karena itu, ia menyuarakan kritik terhadap Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, yang memprakarsai konvensi tersebut. Menurutnya, langkah Lee untuk menggalang persatuan di antara para pengusaha Cina perantauan itu adalah tindakan yang menginjak-nginjak kaum minoritas Melayu di negerinya sendiri dan menjadikan mereka sebagai warganegara kelas dua.⁴⁸

48. Untuk pendapat Sofyan Wanandi dan Kwik Kian Gie, lihat *Tempo*, 20 November 1993.

Reaksi yang kurang-lebih sama juga dikemukakan oleh Junus Jahja. Ia melihat pertemuan di atas sebagai hal yang tidak menguntungkan untuk usaha-usaha pembauran yang sedang terus diupayakan baik oleh pemerintah maupun kalangan minoritas keturunan Cina sendiri. Dalam surat terbukanya di harian *Kompas*, ia menyatakan bahwa kumpulan-kumpulan bersama atas dasar solidaritas etnis yang eksklusif di atas itu sangat merugikan usaha persatuan bangsa yang sedang dibina.⁴⁹

Pandangan agak lain dikemukakan oleh Alexander Irwan, ilmuwan muda keturunan Cina yang ketika kontroversi ini mencuat sedang menyelesaikan disertasi doktoranya mengenai jaringan bisnis dan ekonomi regional di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam artikelnya di harian *Kompas*, ia menilai peristiwa konvensi di atas sebagai persoalan ekonomi semata. Menurutnya, pendapat Sofyan Wanandi dan Kwik Kian Gie di atas adalah produk konstelasi ekonomi dan politik di Indonesia. Ini dalam pengertian bahwa yang sedemikian itu merupakan pendapat yang dilandasi oleh kemungkinan meningkatnya sentimen anti-Cina dan karenanya mengabaikan realitas munculnya kombinasi ekonomi RRC dengan ekonomi kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Selanjutnya ia menyatakan, motivasi para konglomerat etnis Cina yang berkumpul di atas bukanlah untuk membangun tanah leluhur, melainkan untuk meluaskan usaha dan mencari untung di luar negeri. Karena itu, ia menyarankan agar perkembangan di atas tidak dimusuhi atau dicurigai, melainkan ditarik manfaatnya sebanyak mungkin untuk kepentingan nasional.⁵⁰

49. Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat dalam Wahono (ed.), *70 Tahun Junus Jahja*, halaman 266-281.

50. Lihat Alexander Irwan, "Bukan Masalah Nasionalisme," *Kompas*, 29 November 1993.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh A. Dahana. Ia menyebutkan empat faktor yang membuat tuduhan di atas, yakni bahwa pertemuan di atas dimaksudkan untuk membangun negeri leluhur, tidak relevan. Pertama, para pengusaha Indonesia yang menanamkan modal di RRC tidak hanya yang berasal dari keturunan Cina, melainkan juga dari kalangan pengusaha pribumi seperti Aburizal Bakrie. Kedua, dana yang digunakan sebagai investasi di RRC konon berasal dari pinjaman bank-bank di luar negeri yang bunganya berada di bawah 5 persen, jauh di bawah suku bunga di Indonesia. Dengan kata lain, investasi tersebut tidak menyedot dana yang ada di dalam negeri. Ketiga, tokoh-tokoh bisnis Cina di kawasan ini hendaknya tidak dianggap sebagai orang Cina, melainkan para pengusaha dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, atau lainnya. Sifat seorang pengusaha adalah mencari keuntungan tanpa ingin melibatkan diri dengan masalah-masalah politik, ras, kebudayaan, dan faktor-faktor primordial lainnya. Keempat, mereka berbondong-bondong menanamkan investasi ke Cina karena berbagai kemudahan yang disediakan oleh pemerintah RRC dalam soal pajak, kepemilikan alat-alat produksi dan tanah, pengambilan keuntungan, dan lain sebagainya.⁵¹

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah konvensi di atas didorong oleh motif untuk membangun negeri leluhur atau semata-mata untuk mencari untung, dampak eksposenya oleh media massa terhadap usaha-usaha pembauran di Indonesia sama saja. Peristiwa di atas hanya menambah kecurigaan dan kecemburuan terhadap para pengusaha keturunan Cina yang selalu dipandang dengan sikap-sikap stereotipikal: bahwa kesadaran nasionalisme mereka tipis, bahwa mereka maunya hanya mencari untung dan “num-

51. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 58.

pang” kewarganegaraan di Indonesia; bahwa masih terus berorientasi ke negeri leluhur, dan sebutan-sebutan negatif lainnya. Sikap-sikap stereotipikal itu cenderung memandang para keturunan Cina di Indonesia sebagai sebuah kelompok minoritas yang homogen. Tidak peduli apakah seorang keturunan Cina itu kaya atau miskin, punya rasa nasionalisme tinggi atau rendah, penilaian stereotipikal itu tetap menempel kepada mereka.

Ketika persoalan di atas masih hangat dibicarakan dan diperdebatkan di kalangan publik tanah air, pada 1 Februari 1994, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus pembobolan Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) oleh Edi Tanzil, seorang pengusaha keturunan Cina. Apa yang dilakukan oleh Edi Tanzil itu melibatkan jumlah dana yang sangat besar, Rp. 1,3 trilyun. Pembobolan itu dimungkinkan, antara lain, karena adanya *kongkalikong* atau kolusi antara pengusaha Cina ini dengan beberapa oknum petinggi bank. Kasus ini menjadi contoh mutakhir dari apa yang pada bab II di atas disebut sebagai “fenomena cukong” dalam kehidupan ekonomi di Indonesia.⁵² Kasus ini tentu saja memperkeruh perasaan anti-Cina yang sudah lama tertanam di kalangan masyarakat pribumi. Hal itu bertambah parah lagi ketika belakangan diketahui bahwa, setelah diadili dan dipenjarakan, Edi Tanzil berhasil menyogok beberapa sipir penjara untuk dapat melarikan diri. Sampai sekarang, ia tidak diketahui di mana berada.

Kasus-kasus di atas jelas mempersulit upaya-upaya untuk menuntaskan pembauran —tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial-budaya dan politik. Kasus-kasus di atas tidak hanya berdimensi ekonomi. Lebih dalam dari itu, kasus-kasus tersebut, dalam pandangan ba-

52. Lihat detailnya dalam Nasyith Majidi, *Megaskandal: Drama Pembobolan dan Kolusi Bapindo* (Bandung: Mizan, 1994).

nyak pihak, mengekspresikan karakteristik (sebagian) komunitas Cina. Lebih parah lagi, karena kasus-kasus di atas lebih kental warna ekonominya, fenomena-fenomena seperti itu potensial untuk berperan sebagai kendala dalam proses pembauran. Bahkan, menyadari arti penting dimensi ekonomi dalam kehidupan manusia, kasus-kasus tersebut justru berfungsi destruktif dalam seluruh proses pembauran. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bab-bab terdahulu, meruncingnya hubungan warga keturunan Cina dengan masyarakat pribumi dalam banyak hal lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan (kesenjangan, kecemburuan sosial) yang bersifat ekonomis. Wilayah persoalan ini, meskipun bukan satu-satunya, mudah menyulut emosi massa untuk kemudian menyebabkan bentrokan-bentrokan fisik. Jika hal demikian yang terjadi, maka mudah ditebak bahwa, adalah warga keturunan Cina yang biasanya menjadi sasaran kemarahan.

Kecenderungan seperti inilah yang dapat disaksikan dalam sejumlah kerusuhan rasial yang melibatkan warga keturunan Cina. Contoh paling akhir yang dapat disebut adalah kasus kerusuhan di Tasikmalaya pada akhir 1996 lalu. Kerusuhan yang dipicu oleh arogansi oknum polisi terhadap beberapa pengajar sebuah lembaga pendidikan tradisional keagamaan itu melebar—baik dalam hal isu maupun lokasinya, sehingga menimbulkan korban (jiwa dan material) yang sangat besar. Dalam konteks studi ini, makna paling signifikan dari melebarnya kasus Tasikmalaya ini adalah, seperti dilaporkan banyak media massa, munculnya sikap dan perilaku anti-Cina.

Tentu saja banyak faktor yang harus dicari untuk menjelaskan terjadinya kerusuhan di atas. Dugaan bahwa terdapat pihak ketiga yang “memancing di air keruh” juga tidak boleh disepelekan. Bahkan, indikasi ke arah itu sangatlah kuat. Tetapi, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah, pihak ketiga itu akan sulit “bermain” kalau memang tidak ada rumput kering yang siap-sedia untuk di-

bakar. Rumput kering itu, sebagaimana dikatakan banyak pihak, tidak diragukan lagi, adalah kesenjangan ekonomi.

Jika kita menengok berbagai insiden kerusuhan anti-Cina yang sudah berlangsung selama Orde Baru, seperti juga sudah disebut pada bab II lalu, kita bisa menemukan berbagai preseden dari apa yang disebutkan di atas. Ketika mengomentari berbagai insiden anti-Cina yang terjadi pada 1980 di Ujung Pandang, Semarang dan Solo, Grief menulis: "Bahkan barangkali insiden-insiden itu bukan merupakan gejala anti-Cina, tapi lebih merupakan letupan periodis 'si miskin' melawan 'si kaya.' Orang Cina tentu saja lambang 'si kaya' itu."⁵³

Butir pemikiran di atas hanya menegaskan pandangan yang sudah lama dikemukakan, bahwa kunci pembaruan adalah kuatnya posisi ekonomi masyarakat pribumi. Pandangan itu tampak benar dalam pemikiran salah seorang tokoh pembauran yang berasal dari keturunan Cina —Junus Jahja. "Memang," katanya, seperti telah dikutip di awal bab ini, "jika pribumi ekonominya kuat, otomatis nonpri mau berbaur. Dan bagi pribumi yang ekonominya kuat dan merasa 'tuan rumah di negeri sendiri,' tidak ada masalah sama sekali. Tapi, selama mereka belum merasa menjadi 'tuan di rumah sendiri,' masalah yang dihadapi sulit dipecahkan."

Sebab-sebab Belum Tuntasnya Pembauran

Kini ada pertanyaan mengapa upaya-upaya pembauran belum juga mendatangkan hasil yang optimal? Sudah banyak pakar yang mencoba memberi pandangan mengenai sebab-sebab alotnya proses pembauran ini. Berikut dipaparkan pandangan-pandangan yang menonjol.

Penyebab atau faktor yang *pertama*, yang sering kali dikemukakan para pakar, adalah faktor historis, khusus-

53. Grief, "WNI": *Problematisasi Orang Indonesia Asal Cina*, halaman 26.

nya politik pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda mengkategorikan penduduk Hindia Belanda (kini Indonesia) ke dalam tiga kelompok golongan: pertama, orang-orang Eropa sebagai golongan yang kedudukannya paling tinggi; kedua, apa yang disebut golongan Timur asing (*Vreemde Oosterlingen*), yang terdiri dari orang-orang Cina, India, dan Arab, yang menduduki posisi sosial kedua tertinggi; dan ketiga, golongan pribumi yang menduduki posisi sosial terbawah.⁵⁴

Ketiga golongan ini hidup secara terpisah dalam kantong-kantong dan lingkungannya masing-masing. Jarang sekali terjadi interaksi di antara mereka. Bahkan, sistem hukum yang dikenakan kepada mereka juga berbeda. Ketika kemerdekaan berhasil direbut bangsa Indonesia, golongan kedua di atas, karena selamanya hidup dalam kantong lingkungan mereka sendiri, tidak dengan sendirinya diterima di lingkungan baru, setelah hak-hak dan kedudukan istimewa yang mereka dapatkan selama masa penjajahan lenyap dengan hengkangnya pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Ketika terjadi perubahan sosial besar-besaran akibat berdirinya negara Indonesia, berlangsung reaksi yang berbeda di kalangan golongan kedua di atas. Karena jumlah mereka relatif kecil, orang-orang keturunan India, Arab, dan minoritas lainnya tidak mengalami guncangan yang berarti. Tetapi, bagi orang-orang keturunan Cina, hal itu merupakan perubahan sosial yang besar yang akibat-akibat psikologisnya masih tetap terasa sampai satu generasi berikutnya. Hal ini juga turut dirasakan oleh kalangan Cina peranakan, yang sebenarnya sudah tinggal di Indonesia sela-

54. Lihat, misalnya, Coppel, "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," halaman 22-38.

ma lebih dari satu generasi. Bagaimanapun, akibat status dan perlakuan yang istimewa terhadap mereka oleh pemerintah Hindia Belanda, mereka tidak serta merta diterima dengan mudah oleh kalangan pribumi.

Faktor *kedua* juga masih bersifat historis, tetapi hal ini lebih berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi. Yakni, seperti juga sudah disinggung pada bab II di atas, pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak awal telah memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang keturunan Cina. Misalnya, mereka diberi hak untuk memonopoli penjualan candu, perantara jual beli antara pemerintah kolonial dengan penduduk pribumi, bahkan mereka diberi hak untuk memungut pajak. Ringkasnya, karena peran-peran itu, orang-orang keturunan Cina selalu didefinisikan sebagai identik dengan penguasa atau sedikitnya alat penguasa untuk menindas rakyat. Karena itu, walaupun tidak sedikit keturunan Cina yang berjuang untuk mendukung nasionalisme Indonesia, ingatan di atas masih terus membekas di benak rakyat banyak setelah penjajah Belanda henggang.⁵⁵

Faktor *ketiga* kurang-lebih sejalan dengan faktor kedua di atas, hanya saja peristiwanya berlangsung pada masa Orde Baru. Demikianlah, beberapa pengamat menyebutkan bahwa keturunan Cina diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Orde Baru sebagaimana yang mereka terima dari pemerintah kolonial Belanda. Argumentasi mereka berbunyi demikian: ketika Orde Baru mulai naik ke tampuk kekuasaan pada 1967, untuk menyelamatkan dan mengembangkan perekonomian nasional saat itu yang ambruk ke titik nadir pada ujung kekuasaan Orde Lama, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memberikan peluang kepada mereka untuk ikut serta. Tumbuhnya kekuatan

55. Lihat, misalnya, pandangan-pandangan James Rush sebagaimana dikutip dalam Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 102-103.

ekonomi golongan etnis Cina, lanjut argumentasi ini, terutama disebabkan oleh berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah Orde Baru kepada mereka dan tumbuhnya model hubungan ekonomi-politik cukong di zaman Orde Baru sebagaimana sudah dipaparkan pada bab II di atas.⁵⁶ Sebagai akibatnya, seperti sudah disinggung di atas, terjadilah kesenjangan ekonomi yang begitu hebat antara golongan pribumi dan nonpribumi. Pada saatnya, kesenjangan ini menimbulkan kecemburuan sosial yang seringkali memicu kecurigaan dan bahkan kebencian golongan pribumi terhadap mereka. Sikap pada umumnya golongan minoritas, yakni selalu mengaitkan diri dan mencari perlindungan kepada kekuasaan, telah menjadikan mereka sasaran bagi tindak kekerasan dan kebencian rakyat pada umumnya. Setiap bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah seringkali dilampiaskan terhadap golongan Cina. Kenyataan bahwa tidak selamanya orang Cina itu kaya atau pedagang, sering tidak relevan di depan sekelompok orang yang sedang di-amuk amarah.

Faktor *keempat* adalah faktor kultural, yang tampaknya lebih relevan jika diletakkan dalam konteks adat istiadat yang masih dipertahankan sejumlah keturunan Cina totok. Kebudayaan Cina adalah salah satu kebudayaan yang usianya tertua di dunia. Salah satu kebanggaan orang-orang Cina adalah tumbuh berkembang di satu tempat, menyebar dan memberikan pengaruh kebudayaan Cina di tempat itu. Karena faktor tradisional ini, orang-orang Cina yang memiliki kecenderungan chauvinistik sering memandang rendah kebudayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa lain.

56. Untuk pandangan ini, lihat misalnya tulisan J.A.C. Mackie, "Changing Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia," dalam Ruth McVey (ed.), *Southeast Asian Capitalists* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1992). Lihat juga, Richard Robison, *The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986).

Fenomena kesenjangan ekonomi dapat juga dilihat dari penjelasan kultural ini. Harus diakui bahwa pada umumnya keturunan Cina sangat baik dalam mengelola bisnis. Tetapi ada faktor yang lebih dalam sifatnya dibanding hanya hal itu. Sebagaimana dikatakan Schwarz, "Secara kultural, orang-orang Cina sudah lama bersentuhan dengan cara bermain kapitalisme. Bisnis dan perdagangan sudah lama diterima oleh orang-orang Cina. Sedang bagi keturunan pribumi, gagasan ini masih relatif baru."⁵⁷ Selain itu, orang-orang Cina secara tradisional memberi prioritas tinggi kepada bidang pendidikan dan, secara umum, tampaknya tidak salah jika dikatakan bahwa tingkat pendidikan keturunan Cina lebih baik daripada rekan-rekannya keturunan pribumi. Kemungkinan besar karena rentannya posisi politik mereka, maka orang-orang Cina cenderung menabung sebanyak mungkin kekayaan, tidak mempercayai orang-orang di luar mereka, dan sangat tergantung kepada kepercayaan pribadi dan hubungan-hubungan kekeluargaan di antara sesama mereka. Semuanya ini sangat mendukung tumbuhnya bisnis yang dikelola oleh keluarga, baik dalam pengertian sempit maupun luas.⁵⁸

Penjelasan lain, dapat disebut sebagai faktor *kelima*, dikemukakan oleh Leo Suryadinata. Ia membandingkan konsep kebangsaan di Indonesia dengan di Thailand dan Filipina, dan dampaknya terhadap proses asimilasi keturunan Cina di ketiga negara itu. Menurutnya, konsep kebangsaan

57. Lihat Schwarz, *A Nation in Waiting*, halaman 107.

58. Fenomena mutakhir kecenderungan tradisional ini, yang memperkuat hubungan mereka baik dengan kalangan para pengusaha Cina perantauan maupun negara RRC, sudah dibahas pada bab III. Mengenai akar-akar kultural tradisional dari praktik-praktik bisnis seperti ini, lihat karya Sterling Seagrave, *Lords of the Rim: The Invisible Empire of the Overseas Chinese* (London: Corgi Books, 1996), dan S. Gordon Redding, *The Spirit of Chinese Capitalism* (Berlin & New York: de Gruyter, 1993).

di Thailand dan Filipina mengikuti pola kultural, dan karenanya agak lebih mudah bagi golongan minoritas keturunan Cina untuk masuk ke dalam dan berintegrasi dengan lingkungan mayoritas. Di Indonesia, kasusnya agak lain, karena konsep kebangsaannya didasarkan kepada ras. Dengan demikian, sangat sukar bagi minoritas keturunan Cina untuk dapat diasimilasikan dengan arus besar kelompok mayoritas. Berhadapan dengan konsep kebangsaan seperti ini, tambahannya, apabila keadaan berlarut-larut terus, maka keturunan Cina yang sebenarnya sudah siap untuk berintegrasi ke dalam masyarakat lokal justru akan kembali mempererat jaringannya dengan kelompok *Huaqiao* (Cina perantauan).⁵⁹

Faktor lainnya, yakni yang *keenam*, adalah posisi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di negeri ini. Ketika membandingkan Thailand dengan Indonesia dalam hubungan keduanya dengan keberhasilan integrasi atau asimilasi keturunan Cina ke dalam masyarakat umum, J.A.C. Mackie menyatakan bahwa "Islam tampaknya menjadi hambatan bagi akulturasi atau asimilasi [keturunan Cina di Indonesia], sementara Budhisme [di Thailand] sangat mudah menarik perhatian mereka."⁶⁰

Hal ini segera mengingatkan kita kepada upaya-upaya yang sudah dilakukan Junus Jahja dan kawan-kawannya di PITI dan Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Junus Jahja sendiri mengakui bahwa program Islamisasinya kurang berhasil.⁶¹ Hal ini terutama diakibatkan oleh dua sebab pokok. Pertama, masih bertahannya citra buruk mengenai Islam di mata

59. Lihat Dahana, "Masalah Cina Perantauan," halaman 61-62. Lihat juga Wang Gungwu, "Are Indonesian Chinese Unique?: Some Observations," dalam Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia*, halaman 199-210.

60. Lihat Mackie, "Changing Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia," halaman 166.

61. Lihat Jahja, *Islam di Mata WNI*, halaman 4.

para keturunan Cina. Di sini, Islam dipandang identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Hal ini merupakan warisan penjajahan Belanda yang hingga kini belum habis terkikis. Kedua, ajaran-ajaran Islam dipandang terlalu keras sehingga sulit diadaptasikan dengan nilai-nilai kecinaan yang tradisional. Misalnya, ajaran Islam mengenai keesaan Allah dan keharusan meninggalkan praktik penyekutuan-Nya (disebut *syirk*, yang merupakan dosa besar) dipandang sangat sulit diadaptasikan dengan kebiasaan orang-orang Cina untuk menghormati, bahkan hingga tingkat tertentu menyembah, arwah leluhur.

Dari paparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, sangat jelas bahwa keturunan Cina di Indonesia dewasa ini bukanlah kelompok minoritas yang homogen dilihat dari sudut kultural, politis dan ekonomis. Kedua, pemerintah Orde Baru telah mengambil kebijakan yang bersifat asimilasionis, bukan integrasionis, terhadap para WNI keturunan Cina di Indonesia. Ketiga, sementara usaha keras ke arah pembauran sudah diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat, melibatkan baik tokoh pribumi maupun non-pribumi, harus diakui bahwa proses pembauran belum berhasil sepenuhnya dicapai. Hal ini dirasakan baik oleh WNI keturunan pribumi maupun keturunan Cina sendiri. Prestasi paling buruk dalam proses pembauran ini justru terjadi pada bidang yang sangat vital, yakni ekonomi, yang pada saat-saat tertentu turut memancing munculnya berbagai kerusuhan yang merugikan semua pihak. Keempat, belum tuntasnya pembauran ini disebabkan oleh banyak faktor: historis, kultural, politis, dan ekonomis.

BAB V

Mentalitet Cina dan Pribumi: Sebuah Perbandingan

Setelah merefleksikan hubungan historis antara Cina dan Nusantara, potensi konflik yang mungkin timbul dari ide Cina Raya, serta keberhasilan Cina perantauan di Indonesia, tampak semakin jelas bahwa persoalan komunitas Cina—dengan semua kecenderungan yang ada di dalamnya—tidak dapat disepelekan. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut, tidak hanya kerusuhan sosial yang akan muncul, tetapi integrasi nasional juga dipertaruhkan. Kendati demikian, penanganan masalah tersebut harus didasarkan pada pandangan menyeluruh tentang situasi umum masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi atau kelambanan asimilasi sama sekali tidak hanya menjadi tanggungjawab etnis keturunan, melainkan juga merupakan tugas yang harus dipikul bersama masyarakat Indonesia lainnya.

Jika bab sebelumnya menggambarkan prestasi Cina perantauan di Indonesia, maka bab berikut akan mengevaluasi secara ringkas gambaran kultural orang Cina yang dipandang berjasa menciptakan prestasi di tanah rantau. Sebagai perbandingan, bab ini juga akan melihat kembali sistem nilai (mentalitet)—khususnya budaya kerja dan ekonomi— masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar

telaah tersebut, bagian akhir bab ini secara khusus akan menyoroti beberapa model pemecahan masalah Cina perantaraan yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Sebelum membahas hubungan antara sistem nilai budaya dan etos kerja, perlu dipahami lebih dahulu beberapa konsep berikut. Koentjaraningrat memakai istilah 'mentalitet' untuk menggambarkan 'sistem nilai' dan 'sikap mental'.¹ Istilah 'sistem nilai' biasanya dipakai untuk menyatakan tingkat paling abstrak dari adat. "Suatu sistem nilai-budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup."² Sementara 'sikap mental' atau *attitude* merupakan "disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya."³ Istilah 'sistem nilai-budaya' merupakan istilah yang dipakai oleh ilmuwan sosial, sedangkan 'sikap mental' secara luas digunakan oleh psikolog. Kedua istilah ini saling melengkapi, meskipun berbeda dalam satuan yang diterangkan. Melalui istilah 'mentalitet' Koentjaraningrat menggabungkan keduanya sebagai "keseluruhan dari isi serta kemampuan akal pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal menanggapi lingkungannya."⁴

Selanjutnya, dengan mengikuti Clyde dan Florence Kluckhohn, Koentjaraningrat menjabarkan satuan-satuan isi mentalitet yang berupa (a) hakekat hidup manusia; (b) hakekat karya manusia; (c) kedudukan manusia; (d) hubungan manusia dengan alam; dan (e) hubungan sesama

-
1. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974), halaman 33.
 2. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, halaman 32.
 3. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, halaman 33.
 4. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, halaman 33.

manusia. Persepsi yang dikembangkan masyarakat mengenai masalah-masalah ini kemudian membentuk satuan mentalitet. Pada gilirannya, mentalitet tertentu dari warga sebuah masyarakat akan membentuk perilaku sosial, termasuk etos kerja dalam bidang ekonomi.

Mentalitet Komunitas Cina

Deskripsi tentang Cina perantauan di Indonesia dalam bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa prestasi yang berhasil mereka ukir sangat mengagumkan. Mereka mampu bertahan dalam lingkungan yang seringkali bersikap tidak ramah. Sejak kedatangan bangsa Barat di wilayah ini berabad-abad yang lalu, hak-hak sipil mereka praktis tidak menentu. Mereka ditempatkan di antara kepentingan-kepentingan yang membuat posisi mereka terjepit.

Jika secara antropologis masyarakat Indonesia saat itu dibagi menjadi dua, penjajah dan terjajah (pribumi), maka akan tampak bahwa komunitas Cina berada di luar klasifikasi ini. Secara hirarkhis komunitas Cina memang berada di tengah, dengan bangsa Eropa di atas dan pribumi di bawah. Orang Cina menempati posisi yang disebut *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing). Namun hak dan kewajiban yang diperoleh komunitas Cina tidak selamanya mencerminkan struktur hirarkhis tersebut. Sebaliknya penetapan hak dan kewajiban terhadap komunitas Cina justru didasarkan pada sistem kategorisasi yang tidak tegas.

Sebagai contoh, dalam urusan perdata komunitas Cina masuk yurisdiksi bangsa Eropa, tetapi dalam perkara kriminal mereka masuk yurisdiksi pribumi. Berdasarkan sistem hirarkhis, seharusnya kelompok *Vreemde Oosterlingen* diberikan yurisdiksi tersendiri yang berbeda dari orang Eropa maupun pribumi. Namun alasan ekonomi dan politik tampak lebih banyak mendominasi pertimbangan-pertimbangan hukum. Kepentingan transaksi dagang dengan komunitas Cina mendorong penjajah memasukkan kelompok ini ke dalam aturan main yang mereka miliki; dan demi me-

ngontrol aktivitas kelompok ini penjajah menyamakan kedudukan mereka dalam urusan kriminal dengan pribumi. Melalui cara tersebut pemerintah kolonial di satu sisi dapat terus mengambil manfaat dari komunitas Cina dan di sisi lain mudah mengendalikan semua jenis kegiatan mereka.

Sekilas penjajah memanjakan komunitas Cina dengan cara memberi konsesi dan monopoli atas komoditi atau kegiatan ekonomi tertentu seperti opium dan pegadaian. Kelompok Cina sendiri memang banyak mananggung untung dari kebijakan tersebut. Namun pada saat yang berbarengan penjajah memperlakukan orang Cina lebih keras dibandingkan sikap mereka terhadap pribumi. Kelompok pribumi, misalnya, yang menempati strata paling bawah, memiliki kebebasan untuk pergi dan tinggal di semua tempat, tetapi komunitas Cina diharuskan tinggal di Pecinan dan wajib minta izin jika hendak bepergian. Oleh karenanya, identifikasi komunitas Cina menjadi sulit ditentukan. Jenis keterjajahan yang mereka alami tidak sama dengan pribumi dan jenis kekuasaan yang mereka miliki juga tidak sama dengan bangsa Eropa. Mereka hidup makmur hampir seperti orang Eropa, tetapi tidak menikmati kekuasaan politik bahkan pada tingkat yang dimiliki pribumi sekalipun.

Memasuki Indonesia merdeka posisi komunitas Cina tidak serta-merta berubah. Sampai batas tertentu, mereka tetap menempati kategori sosial yang tidak jelas. Perubahan yang paling nyata terjadi pada kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan Belanda, melainkan pribumi. Artinya, pribumi yang tadinya menjadi subordinat dari sistem politik yang ada berubah menjadi pengendali, sementara komunitas Cina tetap berada pada posisi subordinat seperti sediakala. Ditambah dengan semangat anti-kolonialisme yang tumbuh di benak pribumi, posisi keturunan Cina semakin tidak menentu.

Kebanyakan pribumi menganggap komunitas Cina lebih berpihak kepada Belanda. Anggapan mereka tidak selama-

nya salah, karena beberapa organisasi keturunan Cina jelas-jelas menyatakan kesetiaan terhadap Belanda. Lebih dari itu, pribumi juga merasa tidak puas dengan fenomena menguatnya nasionalisme Cina di kalangan warga keturunan di Indonesia. Keturunan Cina tampak lebih setia terhadap negeri nenek moyang dibandingkan dengan negeri yang mereka diami. Rasa anti-Cina semakin merebak di kalangan pribumi ketika jurang ekonomi antarkedua komunitas tersebut sangat dalam, dan tidak sempat terjalin komunikasi yang baik selama berabad-abad. Akibatnya, di awal kemerdekaan banyak orang Cina yang harus menjadi korban dari ketidakpuasan massa.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya keras untuk mengatasi kemelut hubungan antara keturunan Cina dan pribumi. Sejauh ini, upaya tersebut belum dapat memberikan hasil maksimal sebagaimana yang telah dicapai Thailand. Pemerintah Orde Lama pernah membuat kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi jarak ekonomi antara warga keturunan dan pribumi melalui "Politik Benteng." Hasil dari langkah-langkah tersebut sangat tidak memuaskan, karena pihak pribumi tidak siap dan lebih banyak menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi. Sementara itu, pemerintah Orde Baru yang bersikap pragmatis dalam bidang ekonomi secara tidak sengaja justru semakin memperlebar jarak ekonomi antarkedua komunitas ini. Keberhasilannya lebih terletak pada upaya meleburkan budaya keturunan Cina ke dalam sistem budaya Indonesia.

Secara formal kedudukan keturunan Cina di masa Orde Lama lebih marjinal dibandingkan kedudukan mereka di zaman Orde Baru. Pemerintah Orde Lama dengan tegas memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kelompok Cina sebagaimana yang tercermin dalam PP. No. 10, di mana aktivitas ekonomi komunitas Cina dibatasi sampai kotamandya dan kabupaten. Di zaman Orde Baru 'diskriminasi' seperti ini tidak muncul, namun secara informal sikap membedakan terhadap komunitas Cina masih juga terasa.

Di satu sisi, Orde Baru memberi peluang ekonomis yang demikian besar terhadap komunitas Cina, sehingga tercipta banyak konglomerat, tetapi tidak banyak memberikan ruang politik bagi mereka. Meskipun secara hukum kedudukan mereka sama seperti bangsa Indonesia lainnya, dalam kenyataan mereka tetap dibedakan. Misalnya, mereka disebut Warga Negara Indonesia Keturunan Cina (WNI Cina)⁵ yang konotasinya asing, dan agama Kong Hu Chu, yang menjadi panutan banyak kalangan keturunan Cina, tidak diakui secara resmi.

Dalam posisi yang serba gamang ini komunitas Cina tetap bertahan. Hal ini merupakan fenomena yang menakutkan, karena keunggulan yang mereka miliki, khususnya dalam bidang ekonomi, sering membuat posisi mereka rentan terhadap berbagai jenis persoalan sosial. Seperti yang terjadi di masa lalu dan juga sekarang, komunitas Cina sering menjadi kambing hitam atas ketidakpuasan massa terhadap kondisi ekonomi, politik maupun agama. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki posisi yang seimbang dalam bidang kehidupan yang lain. Secara kultural mereka masih berjarak dari pribumi, dan pemerintah sendiri juga belum berhasil menempatkan mereka dalam 'keindonesiaan' yang utuh. Kendati demikian, komunitas Cina terlihat mampu mencari jalan keluar atas tantangan-tantangan yang muncul dari zaman ke zaman. Bahkan, seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya, mereka berhasil mencetak prestasi yang sangat mengagumkan. Dua fenomena yang sangat kontras ini pada akhirnya memunculkan gambaran tentang orang Cina yang juga tidak kalah kontras. Sebagian gambaran benar-benar berpijak pada realitas—atau sedikit-

5. Patrick Guinness, "Local Society and Culture," dalam *Indonesia's New Order* (ed. Hal Hill) (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), halaman 287.

nya dapat dilacak dan dijelaskan secara logis— dan sebagian lagi menjadi mitos yang dihasilkan dari kesan-kesan mendalam yang bersifat ekstrim.⁶

Secara simplistik kesan terhadap orang Cina dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, nada yang positif menganggap Cina perantauan sebagai manusia unggul. Mereka mewarisi nilai-nilai esensial dari ajaran-ajaran hidup tentang kebaikan. Orang Cina digambarkan sebagai sosok pribadi yang sangat rajin, ulet, menyenangkan tantangan, sederhana, rendah hati, ramah, tabah, teliti, berpandangan ke depan dan segenap atribut lain yang menjelaskan keberhasilan mereka.

Ekstrim lain yang merupakan kebalikan dari gambaran di atas menyebutkan bahwa pada dasarnya orang Cina tidak dapat dipercaya, licik, rakus, materialistik, apolitik, dan tidak peduli terhadap kepentingan sosial. Khusus dalam hubungannya dengan loyalitas, orang Cina juga mengidap gambaran negatif-pejoratif. Mereka tidak memiliki idealisme, cenderung mengikuti siapa pun asal dapat memberikan kelimpahan materi. Dalam konteks Asia Tenggara, misalnya, mereka tidak peduli siapa yang menggembalakan sapi-sapi di wilayah ini; yang penting mereka dapat memperoleh susunnya. Pendek kata, orang Cina adalah *homo economicus* yang dapat melakukan apa saja, dengan resiko apa pun, dan terhadap siapa pun, dalam rangka memperoleh keuntungan materi. Mereka mengabdikan seluruh kehidupan untuk mencari uang, kalau perlu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anggapan seperti ini juga tidak selamanya keliru. Sejarah mencatat bahwa orang Cina sering terlibat penyelun-

6. Lihat Saafroedin Bahar, "Mitos Keunggulan Bisnis Etnik Cina: Masalah Kultur, Manajemen atau Politik?" dalam *Etika Bisnis Cina* (Jakarta: PCP Universitas Nasional dan Gramedia, 1996), halaman 103 - 118.

dupan, perompakan dan praktek ekonomi lain yang bertentangan dengan nilai atau karakter ideal yang disebutkan di atas.⁷ Akan tetapi, kekeliruan mendasar lebih terletak pada kecenderungan sebagian kalangan yang melihat karakter tersebut —baik yang positif maupun negatif— secara esensial. Seakan-akan sifat-sifat tersebut ada dalam diri orang Cina secara inheren dan permanen. Jika sisi positif yang ditonjolkan maka orang Cina muncul sebagai manusia unggul; dan jika sifat negatif yang ditekankan maka sosok orang Cina mengejawantah dalam bentuk binatang ekonomi. Dalam konteks inilah cara penggambaran terhadap orang Cina berubah menjadi proses mistifikasi yang sulit dibenarkan maupun disalahkan. Kesan yang tertanam dalam benak masyarakat mendalam, tetapi sulit dicari pembenaran maupun rasionalisasinya. Oleh karenanya diperlukan pendekatan lain yang lebih dapat menjelaskan keberhasilan komunitas Cina. Salah satunya adalah dengan mengaitkan keberhasilan tersebut dengan faktor-faktor lain yang diperkirakan bersinggungan, seperti sistem nilai budaya dan mentalitet.

Beberapa pengamat berusaha menyodorkan berbagai pendekatan dalam rangka memahami keberhasilan Cina perantauan. Meskipun tidak bersifat mutlak, masing-masing pendekatan dapat dipakai sebagai alat analisis yang dapat mengantarkan pemahaman mengenai kesuksesan Cina perantauan. Menurut Mely G. Tan, pendekatan yang lazim digunakan adalah teori orang migran, status minoritas, dan sistem nilai.⁸ Mely sendiri menawarkan pendekat-

7. Kegiatan yang bersifat ilegal juga sering diorganisasi melalui serikat-serikat rahasia. Tradisi serikat rahasia di kalangan orang Cina sudah berjalan ratusan tahun. Lihat Wilfred Blythe, *The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973), halaman 16.

8. Lihat Mely G. Tan, "Usaha Ekonomi Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis," dalam *Etika Bisnis Cina*, halaman 52.

an lain yang kurang banyak disentuh, yaitu tanggapan negara dan masyarakat. Sementara itu, pendekatan lain yang lebih luas cakupannya juga ditawarkan oleh Gordon Redding, di mana ia memadukan antara pendekatan sistem nilai dan organisasi. Oleh karena pendekatan Redding ini telah dijabarkan dalam bab sebelumnya (Bab IV), maka berikut hanya akan dipaparkan secara ringkas tentang jenis pendekatan lain, khususnya yang bertalian dengan persoalan mentalitet.

Teori migran (perantau) dan minoritas sama-sama menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan oleh *setting* sosial tertentu. Dalam hal ini *setting* sosial yang dijadikan pijakan adalah status orang Cina sebagai komunitas perantau dan minoritas. Kedua status ini dipandang membawa akibat psikologis tersendiri, dan menjadi dasar perbedaan karakter Cina perantauan dari orang Cina yang hidup di negeri asal. Pada umumnya komunitas migran dan minoritas menderita kompleks psikologis yang mendorong mereka merasa tidak aman, tidak pasti dan terancam. Perasaan tersebut muncul dari kenyataan bahwa komunitas migran dan minoritas seringkali harus bergantung pada kekuatan komunitas asli maupun golongan mayoritas. Di Indonesia, misalnya, komunitas migran dan minoritas—Cina, Arab atau India—sangat tinggi ketergantungannya terhadap penguasa. Akibat lanjut dari perasaan tersebut adalah munculnya dorongan untuk mendapatkan sedikit kepastian akan nasib hidup mereka.

Cara untuk mendapatkan kepastian cukup beragam. Salah satunya adalah membentengi diri dengan sikap loyal terhadap kelompok atau figur yang lebih kuat. Cara ini sangat umum berlaku hingga zaman sekarang, di mana kaum migran justru lebih suka menjauhkan diri dari politik untuk mendapatkan perlindungan politik. Kalangan minoritas juga tidak jarang menerapkan cara serupa dalam rangka menyalurkan kepentingan sekaligus mendapat perlindungan. Meskipun demikian, loyalitas hanyalah salah satu cara

untuk memperoleh kepastian; kekuatan dan jangkauannya tidak terlalu panjang. Misalnya, loyalitas komunitas Cina terhadap Belanda justru menjadi bumerang ketika Indonesia merdeka; loyalitas Baperki terhadap Soekarno (Nasakom) juga membawa akibat fatal ketika rezim Orde Lama runtuh. Oleh karena itu, selain loyalitas, kaum migran dan minoritas perlu mengembangkan cara lain dalam rangka mencari kepastian. Di antaranya adalah menjalankan etika kerja yang kuat dan memasuki bidang-bidang kompetisi yang relatif terbuka seperti ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Cina perantauan pada umumnya menunjukkan kecenderungan ini. Sama seperti Yahudi perantauan, mereka tidak banyak mendapatkan kepastian hidup dari ruang politik dan sosial yang tersedia. Negara di mana mereka tinggal cenderung memperlakukan mereka secara diskriminatif, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, mereka mengarahkan segenap upaya pada bidang-bidang yang lebih terbuka. Kasus Asia Tenggara menunjukkan bahwa komunitas Cina akhirnya mencetak prestasi gemilang dalam bidang ekonomi. Mayoritas orang kaya dan perusahaan besar di wilayah ini berasal dari dan dimiliki oleh Cina perantauan. Sebagai perbandingan, Yahudi perantauan di Amerika dan Eropa juga mencetak prestasi serupa. Bahkan mereka tercatat sebagai ilmuwan-ilmuwan yang menonjol.

Ternyata, teori migran dan minoritas masih mengundang pertanyaan. Tidak semua perantau dan kaum minoritas menunjukkan gejala yang sama. Banyak di antara mereka yang justru menjadi lebur atau terpinggirkan oleh kelompok mayoritas. Terhadap pertanyaan ini beberapa pengamat menjawabnya melalui analisis sistem nilai. *Setting* sosial bukanlah variabel tunggal dalam menentukan semangat mempertahankan hidup; lebih dari itu, perangkat nilai juga berperan besar dalam mendorong dan menyediakan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Oleh karenanya, sistem nilai yang dianut oleh Cina perantauan harus diperhitungkan sebagai salah satu varia-

bel pokok dalam memahami keberhasilan mereka. Di antara sistem nilai tersebut adalah agama Budha, Taoisme dan Konfusianisme (Kong Hu Chu).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran tersebut banyak mempengaruhi sikap hidup orang Cina.⁹ Ketiganya menyediakan konsep tentang pandangan dunia, nilai sosial dan moralitas. Agama Budha menandakan bahwa manusia harus membebaskan diri dari *mara* atau akar kejahatan. Untuk itu mereka harus melakukan tindakan yang benar, berkehendak yang benar, mencari pengetahuan yang benar dan berpikir yang benar. Semua ini terwujud dalam sikap baik hati (*Tzu*), belas kasihan (*P'ie*), tidak menyukai kekerasan, murah hati dan mawas diri.¹⁰

Sementara itu, Taoisme mengajarkan bahwa "hukum alam merupakan sumber kebajikan, asas penata di balik semua yang ada. Ia merupakan irama dan kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya." *Tao* adalah kebajikan dan *Teh* adalah alam. *Tao Teh* (hukum alam) menjadi pilar utama bangunan Taoisme. Pendasaran ini kemudian melahirkan pilar kedua, yaitu *Tzu Yan* yang berarti manusia harus hidup wajar, selaras dengan alam lingkungan bekerja. Pilar ketiga Taoisme, *Wu Wei*, menekankan bahwa manusia tidak diperkenankan mengubah segala yang telah diatur alam.¹¹

Konfusianisme, yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Cina, menyediakan pedoman serta aturan tentang kehidupan individu dan masyarakat. Di antara nilai-nilai yang menonjol adalah falsafah *Jen* (manusia), *Chun-Tzu* (kemanusiaan yang benar), *Li* (kesopanan), *Te* (kekuat-

9. P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), halaman 19.

10. P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa*, halaman 20.

11. P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa*, halaman 21.

an), dan *Wen* (perdamaian).¹² *Jen* adalah kebajikan dari segala kebajikan, "intisari dari kesempurnaan adikodrati." Manusia diwajibkan untuk mempertahankan keutuhan *jen* dalam dirinya, kalau perlu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. *Chun-Tzu*, yang berarti hubungan ideal antara manusia dengan sesamanya, merupakan pengejawantahan dari *jen*. Ia muncul sebagai ekspresi kesadaran kemanusiaan yang paling dalam yang pada gilirannya akan mempengaruhi keadaan keluarga, bangsa dan dunia. *Li*, yang berarti kesopanan, menggariskan tentang harmoni hubungan antarindividu dengan sesamanya, keluarganya, dan negara. Di dalam falsafah ini juga terkandung ajaran *Chun Yung* yang berarti jalan tengah yang tetap. Falsafah ini mengajarkan tentang kebersahajaan, keserasian dan keseimbangan. *Te* dan *Wen* merupakan falsafah perang dan perdamaian. Dalam falsafah ini ditegaskan bahwa kemenangan hakiki adalah kemenangan yang diperoleh bukan melalui perang, melainkan melalui pelaksanaan moralitas yang terpuji. Sementara *Wen* merupakan seni perdamaian yang menjunjung tinggi upaya membuat manusia beradab, melalui pendidikan, seni, musik dan sebagainya.

Rangkaian falsafah tersebut menjadi landasan hidup orang Cina, termasuk kalangan perantau. Benturan antara sistem nilai dan persoalan yang dihadapi oleh Cina perantauan kemudian melahirkan suatu etos dan pandangan hidup yang mampu mendorong mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan diri. Manifestasi dalam tingkat yang lebih nyata adalah sikap kerja keras, hemat, rajin, teliti, kreatif, pragmatis, sederhana dan selalu memandang ke depan.

Komunitas Cina mempunyai orientasi nilai budaya yang mementingkan karya. Hidup diterima sebagai kebaikan, dan

12. P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa*, halaman 22 - 29.

manusia bertanggungjawab untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalamnya. Berkarya bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup; lebih dari itu, kerja adalah untuk meningkatkan kualitas menuju jenjang yang lebih tinggi.¹³ Walaupun manifestasinya tidak selalu dalam bentuk aktivitas dagang, dan bisa berwujud keinginan meraih kedudukan, kerangka utamanya tetap peningkatan kualitas. Oleh karenanya, prestasi nyata yang dimiliki seseorang tetap menjadi patokan dari hasil atau imbalan yang diperoleh. Dengan kata lain, segala sesuatu —uang, kedudukan, pengaruh— harus diperoleh melalui kerja dan karya. Jika sebuah cita-cita telah terlaksana, seseorang tidak diperkenankan berhenti. Ia harus tetap berkarya agar dapat mencapai suatu kualitas hidup yang lebih baik.

Sistem nilai budaya Cina juga melahirkan sebuah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi keselarasan hubungan manusia dan alam. Pola hubungan ini tidak bersifat pasif, melainkan dinamis. Keserasian tidak berarti bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada alam, karena kehidupan sendiri tidak pernah sempurna. Manusia harus bekerja keras dalam rangka mencapai hubungan serasi dengan alam dan lingkungannya.

Makna kerja yang dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari totalitas kehidupan mengandaikan bahwa masyarakat Cina pada umumnya berorientasi ke masa depan. Kerja tidak hanya untuk mencapai sesuatu secara terbatas, tetapi lebih ditujukan untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Patokan keberhasilan tidak terbatas pada prestasi yang telah digenggam pada masa kini,

13. Khususnya dalam bidang ekonomi orang Cina memiliki orientasi yang sama. Lihat Puline Ratna Hendrati, *Perbedaan Orientasi Nilai Budaya antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Cina* (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1975), halaman 12 - 13.

tetapi sebisa mungkin dengan perolehan tersebut dapat dicapai prestasi lain yang lebih tinggi.

Sejalan dengan pentingnya prestasi kerja, orientasi nilai budaya Cina cenderung menempatkan individu dalam posisi sentral. Rasionalisasinya, prestasi kerja tidak mungkin dicapai tanpa ada kebebasan dan penghargaan terhadap individu. Seseorang dengan sendirinya akan mengalami kesulitan mengembangkan diri atau menyalurkan bakatnya tanpa didukung oleh ruang sosial yang terbuka. Hal ini kebalikan dari masyarakat komunal yang menempatkan individu hanya sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat. Kompetisi pribadi tidak begitu tampak, karena individu diharuskan menjalani peran-peran tertentu yang telah digariskan.

Kendati demikian, menurut Mely G. Tan, paduan antar-berbagai variabel dalam masyarakat Cina tidak cukup menjelaskan keberhasilan mereka dewasa ini. Perlu juga dipertimbangkan bentuk-bentuk respons dari negara dan masyarakat di mana komunitas Cina perantauan berada. Ia mengajukan tesis bahwa etnis Tionghoa hanya dapat berperan aktif dalam bidang ekonomi jika peluang untuk melakukan kegiatan tersebut tersedia. Sebagai contoh, menurutnya, etnis Tionghoa tidak mendominasi aktivitas ekonomi Minangkabau, Aceh dan Batak, karena penduduk setempat tidak kalah aktif dari etnis Tionghoa.¹⁴ Dengan kata lain, keberhasilan Cina perantauan sebagian besar juga dimungkinkan oleh kebijakan yang ditempuh pemerintah dan kecenderungan budaya ekonomi masyarakat setempat. Maka, dalam rangka mencari solusi yang menyeluruh atas persoalan keturunan Cina, perlu digambarkan budaya ekonomi masyarakat Indonesia secara umum. Langkah ini diharapkan mampu menguak keterpisahan, ketimpangan

14. Mely G. Tan, "Usaha Ekonomi Etnis Tionghoa di Indonesia" halaman 53.

atau jarak yang memisahkan keturunan Cina dan masyarakat Indonesia lain di bidang ekonomi, budaya, maupun politik.

Mentalitet Pribumi

Masalah pokok hubungan pribumi dan keturunan Cina terletak pada kenyataan adanya jurang kemampuan ekonomi yang sangat dalam. Pribumi, mayoritas besar penduduk Indonesia, hanya menguasai sedikit modal dan jaringan kegiatan ekonomi, sementara etnis Cina mengendalikan hampir seluruh sektor ekonomi negara. Fakta tentang ketimpangan ini sama sekali tidak menafikan adanya etnis Cina miskin, yang jumlahnya cukup besar, serta kenyataan lain bahwa ada pribumi yang kaya. Namun jika dihitung dalam skala nasional akan tampak bahwa ketimpangan tersebut memang sangat nyata. Etnis keturunan Cina diperkirakan menguasai lebih dari 75 % perekonomian domestik, sementara sisanya berada di tangan pribumi serta minoritas lain seperti Arab, India dan Eropa.¹⁵

Seperti telah dijelaskan di atas, prestasi ekonomi yang diraih keturunan Cina memiliki kaitan yang tidak sederhana dengan masalah lain, khususnya sistem nilai yang membentuk mentalitet kerja. Oleh sebab itu, dalam rangka memahami ketertinggalan pribumi perlu juga disertakan analisis tentang mentalitet kerja dan sistem nilai yang melatarinya. Upaya ini tidak mudah mengingat masyarakat Indonesia sangat beragam. Hampir setiap suku memiliki sistem nilai dan kecenderungan etos kerja ekonomi yang berbeda. Untuk itu diperlukan suatu model pendekatan yang mampu mengatasi keragaman tersebut, serta menjelaskan kecenderungan umum yang tampak dalam masyarakat.

15. Gordon S. Redding, *The Spirit of Chinese Capitalism* (Berlin & New York: de Gruyter, 1993).

Dalam hal ini pendekatan sosiologis-antropologis yang menekankan perbedaan budaya kota-desa atau industri-petani dapat dipakai sebagai alat analisis.

Sejak pemerintahan Orde Baru jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan terus meningkat seiring dengan menurunnya jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan. Pada 1971 tercatat hanya 17,3 % penduduk yang tinggal di perkotaan. Namun pada 1980 angka tersebut naik menjadi 22,4 % dan pada 1990 terus naik menjadi 30,9 %. Angka ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di pedesaan turun dari 82,7 % pada 1971 menjadi 69,1 % pada 1990.¹⁶ Meskipun pergeseran ini sangat signifikan, penduduk pedesaan masih tetap mendominasi angka demografis negeri ini. Dengan kata lain, sebagian besar anggota masyarakat yang berasal dari suku apa pun adalah orang desa.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, profesi petani masih mendominasi urutan teratas. Pada 1971 petani merupakan profesi dari 64,2 % penduduk, kemudian turun menjadi 55,9 % pada 1980 dan turun lagi menjadi 49,3 % pada 1990. Sebaliknya, sektor industri terus naik dari periode ke periode dengan persentase sebesar 6,5 %, 9,1 % dan 11,4 % berturut-turut pada 1971, 1980 dan 1990. Kecenderungan yang sama juga terjadi dalam sektor perdagangan yang terus naik dari 10,3 % pada 1971, 13,0 % pada 1980, dan 14,7 % pada 1990.¹⁷ Profesi lain seperti jasa juga terus menunjukkan gejala kenaikan. Kendati demikian, kecenderungan ini belum dapat meminimalisasi sektor pertanian sampai tingkat yang rendah, atau menempatkan industri, perdagangan dan jasa pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karenanya, sampai kini

16. Data Biro Statistik yang dikutip dari *Orde Baru dalam Angka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1992), halaman 4.

17. *Orde Baru dalam Angka*, halaman 122.

masyarakat Indonesia masih termasuk dalam kategori budaya petani-pedesaan. Budaya jenis ini memiliki pengaruh tersendiri terhadap pembentukan etos kerja anggotanya.

Pandangan hidup petani pada umumnya menekankan pentingnya keserasian antara manusia dan gerak alam lingkungan. Kehidupan diterima secara pasif tanpa banyak memberikan penilaian baik dan buruk. Bila mereka terpengaruh oleh ajaran yang menilai buruk kehidupan, sikap yang muncul dapat lebih pasif lagi.¹⁸ Kendati demikian, ketergantungan petani terhadap alam tetap membuat mereka tidak bisa bergerak leluasa meski telah terpengaruh ajaran yang bersikap positif terhadap kehidupan. Semua kegiatan sehari-hari petani lebih banyak ditentukan oleh alam. Mereka tidak dapat menanam tanaman tertentu di luar ketentuan musim. Mereka tidak dapat membangun rumah di setiap tempat yang diinginkan. Mereka juga tidak dapat mengharap hasil kehidupan di luar anugerah alam. Semua ini karena mereka tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk menjinakkan alam.

Akibat langsung dari pola pandangan ini adalah keniscayaan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi telah ditentukan oleh garis nasib. Manusia lahir bukan karena kehendaknya, dan harus menjalani hidup menurut aturan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam ketetapan nasib adalah status sosial seseorang dan kemampuan lain yang dimilikinya. Manusia menjadi raja karena ketentuan nasib, begitu pula jika menjadi orang pintar ataupun bodoh.

Posisi manusia dalam bangunan dasar nilai-budaya petani tergolong lemah, sementara kekuatan lain yang berada di luar manusia dipandang lebih memiliki otoritas serta kekuasaan dalam menentukan hidup. Manusia hanyalah bagian dari sebuah sistem besar yang berjalan menurut hu-

18. Koentjaraningrat, *Budaya Mentalitet dan Pembangunan*, halaman 35.

kum atau ketentuan yang telah digariskan sejak semula. Tidak banyak ruang yang tersedia bagi manusia untuk bergerak dan mengubah tatanan tersebut. Mereka yang memaksakan diri keluar dari ketentuan nasib sama halnya dengan menempuh jalan sia-sia; sikap seperti ini akan mengacaukan tatanan kosmis yang dapat membawa akibat buruk bagi setiap anggota masyarakat. Akibatnya, dalam menghadapi garis ketentuan sikap yang paling ditekankan adalah menerima dan menjalaninya sesuai dengan ketentuan tersebut. Cara ini dipandang akan menghasilkan suatu kondisi kehidupan yang harmonis dan selaras.

Otoritas alam yang begitu besar seringkali mendorong individu untuk tunduk padanya, dan pada tingkat tertentu juga melahirkan praktik keberagamaan yang secara khusus mengindikasikan ketundukan tersebut. Misalnya, boleh jadi masyarakat petani mengakui kekuasaan Tuhan, tetapi dalam praktik sehari-hari kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak. Banyak pihak-pihak lain yang dipandang memiliki kekuasaan, seperti arwah nenek moyang, jin, dan makhluk halus lain. Mereka dipercaya berpengaruh terhadap kehidupan manusia, dan oleh karenanya perlu mendapatkan perlakuan khusus. Seluruh isi alam semesta juga tidak jarang diyakini memiliki kekuatan, dan oleh karenanya perlu dijaga sebaik mungkin.

Budaya petani pada umumnya menganggap kerja sebagai bagian kecil dari totalitas hidup. Kerja tidak menempati prioritas utama atau, dengan kata lain, hidup bukanlah untuk kerja, tetapi kerja untuk hidup. Maka jangkauan makna kerja menjadi sangat terbatas, yaitu sekedar memenuhi makan dan kebutuhan praktis lainnya. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, makna kerja dengan sendirinya sirna. Kerja tidak diarahkan untuk menciptakan prestasi; lebih dari itu kerja tidak dipandang sebagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup. Oleh karenanya, kompetisi antarpribadi dalam budaya petani sangat rendah, begitu pula penghargaan atas prestasi yang

dicapai oleh individu.

Karya bukanlah patokan penting dalam menilai individu. Hal itu baru bermakna ketika dihubungkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang berprestasi tinggi tidak akan ada artinya jika hal tersebut hanya berguna bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka yang tidak berprestasi akan lebih dihargai jika yang bersangkutan menunjukkan kebersamaan atau kegotongroyongan. Dengan kata lain, budaya petani cenderung mengukur nilai individu dari keterlibatan mereka dalam masyarakat ketimbang prestasi yang diraih. Cara pandang ini secara langsung mempersempit ruang individu dalam berkreasi atau berinisiatif mengadakan pembaruan dan inovasi. Jangkauan waktu menjadi sangat pendek, di mana aktivitas keseharian hanya diorientasikan pada masa kini. Tidak ada visi yang dapat menjangkau masa depan jangka panjang. Ditambah dengan kuatnya tradisi serta adat, aktivitas petani menjadi rangkaian kegiatan rutin yang terus berjalan dari waktu ke waktu dalam lingkaran yang sama. Transformasi sosial menjadi lamban; bukan hanya karena inisiatif baru jarang muncul, tetapi juga karena tingkat resistensi budaya petani terhadap sesuatu yang berbeda sangat tinggi. Petani tidak terbiasa menghadapi perubahan karena irama hidup mereka telah menyatu menjadi bagian dari gerak alam dan lingkungan. Kalaupun dipaksa berubah, mereka akan menghadapinya dengan kesiapan yang serba terbatas, dan akan merasa bahwa terlalu banyak yang harus dipertaruhkan bagi sebuah perubahan.

Stereotipe pandangan dunia petani ini bersifat umum, mengatasi perbedaan-perbedaan suku maupun wilayah. Meskipun, misalnya, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, orientasi nilai budaya sebagian besar warganya masuk dalam kategori ini. Begitu juga, walaupun secara geografis masyarakat Indonesia terpilah dalam satuan wilayah yang berbeda, budaya petani tetap mengakar kuat pada masing-masing komunitas. Meskipun demikian, se-

cara tradisional masih terdapat bentuk orientasi nilai budaya lain yang cukup berpengaruh pada masyarakat; di antaranya adalah priyayi dan santri.

Tipologi budaya priyayi merepresentasikan pandangan hidup yang umumnya dipegang oleh kalangan aristokrat (elit) tradisional. Menurut temuan Clifford Geertz, orientasi kehidupan priyayi lebih menekankan pada aspek mistik. Pandangan dunianya didasarkan pada asumsi bahwa hakekat hidup adalah untuk merealisasikan kesatuan yang selaras antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Untuk mencapai tujuan tersebut manusia harus menghaluskan budi pekerti dan menjalani tindakan tertentu —bertapa, semedi, merenung— yang dipandang dapat menunjang terwujudnya kebersatuan tersebut.

Pada dasarnya sistem nilai priyayi sangat menekankan asketisme, tetapi arahnya bukan dunia nyata melainkan kehidupan batin. Berbeda dari asketisme duniawi yang kemudian melahirkan semangat kerja dan akumulasi modal, asketisme batin justru cenderung tidak melahirkan etos kerja yang menghasilkan prestasi duniawi. Doktrin Calvinisme, misalnya, sangat menekankan asketisme; namun pengaruhnya muncul dalam bentuk keterpanggilan umatnya untuk berkarya dan berkreasi. Dilandasi sikap asketik maka hasil karya tersebut terakumulasi dalam bentuk modal yang terus membesar. Dalam konteks ini doktrin asketisme berhasil menciptakan tindakan sosial yang mengarah pada semangat kerja tinggi dan penghargaan terhadap prestasi individu. Sebaliknya, asketisme priyayi justru memandang rendah tindakan dan hasil kerja yang berbentuk material. Kualitas hidup lebih ditentukan oleh kehalusan perasaan, kekayaan batin, penghayatan spiritual dan bukan sebaliknya.

Secara umum budaya priyayi melihat eksistensi kehidupan secara hirarkhis: kasar - halus. Sesuatu masuk kategori kasar jika mendekati penampakan material, dan sebaliknya dianggap halus ketika memiliki kualitas abstrak. Kekayaan dalam wujud harta adalah kasar, sementara kekayaan batin

adalah halus. Filsafat ini tidak hanya berlaku dalam pere-nungan, tetapi juga mengejawantah dalam tindakan sosial. Kebanyakan priyayi, misalnya, merasa enggan menjadi pedagang karena aktivitas ini dipandang kasar. Mereka cenderung untuk menjadi pegawai, pejabat atau birokrat. Profes-i tersebut dianggap lebih halus, karena tidak langsung berhubungan dengan kerja fisik dan masalah material.

Pendasaran mistik pada akhirnya menempatkan aktivi-tas priyayi dalam suatu kehidupan yang berorientasi pada masa lalu. Manifestasinya muncul dalam bentuk kesenang-an yang berlebihan terhadap benda-benda pusaka, aktivi-tas kebatinan, atau kepercayaan terhadap mitologi yang dikembangkan di masa lampau. Pola ini sangat berbeda dari petani yang lebih pragmatik dan pendek jangkauannya.

Bagi priyayi masa lampu tidak hanya berarti rangkaian kejadian yang telah berlalu, melainkan juga sumber inspirasi dan legitimasi. Mereka yang mampu memahami kejadian masa lampau akan dengan sendirinya diakui sebagai manu-sia berkualitas. Ditambah lagi dengan kehidupan mistik dan sikap asketiknya, kualitas tersebut akan bertambah tinggi. Orang yang telah mencapai tarap ini biasanya muncul se-bagai panutan yang memiliki pengaruh besar terhadap ko-munitasnya. Oleh karena itu hubungan sosial priyayi tidak bersifat egaliter, melainkan hirarkhis dan personal. Bawah-an harus tunduk sepenuhnya dengan atasan; begitu juga atasan harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bawahan. Maka, sebagaimana yang tercermin dalam bahasa, etika sosial priyayi senantiasa mengandaikan kehadiran tatanan hirarkhis.

Orientasi nilai budaya yang berbeda dikembangkan oleh komunitas santri. Secara umum mereka tergolong orang kota, khususnya jika dibandingkan dengan golongan pe-tani. Hubungan sosial antaranggota komunitas santri lebih egaliter dan orientasi hidup mereka tidak selalu diarahkan pada kehidupan setelah mati. Apresiasi terhadap individu cukup tinggi dan hasil karya merupakan salah satu patok-

an keberhasilan seseorang. Secara ekonomis mereka tergolong lapisan menengah dengan profesi utamanya sebagai pedagang.

Namun demikian, orientasi nilai budaya santri baru berkembang pada paruh pertama abad dua puluh. Pengaruhnya masih terbatas; apalagi suasana setelah kemerdekaan tidak banyak mendukung penyemaian budaya tersebut. Pada saat yang sama, meskipun memiliki semangat kewirausahaan tinggi, komunitas santri belum berpengalaman dalam menjalankan aktivitas ekonomi moderen. Mereka masih menerapkan manajemen lama yang berbasis keluarga dan bakat alamiah.¹⁹ Akibatnya, banyak usaha santri yang bangkrut setelah melewati generasi kedua. Fenomena ini semakin diperburuk lagi oleh kenyataan bahwa komunitas santri belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai sosial yang bersifat rasional. Hubungan bapak-anak atau atasan-bawahan yang berpola patron-klien, misalnya, belum sepenuhnya diganti dengan egalitarianisme yang didasarkan pada prestasi.²⁰ Maka secara keseluruhan budaya santri belum mampu menandingi budaya petani maupun priyayi.

Pada titik ini terlihat bahwa budaya petani masih merupakan unsur utama dalam bangunan kebudayaan bangsa Indonesia. Sesuai dengan jumlah komunitas yang dimiliki, nilai budaya priyayi dan santri hanya menempati posisi pinggiran. Memang benar banyak kalangan priyayi yang berkuasa, khususnya pada dekade awal kemerdekaan, dan begitu juga saat itu banyak santri yang kaya. Namun tidak

19. Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: Chicago University Press, 1963), halaman 75.

20. Studi tentang budaya ekonomi komunitas santri juga dapat dilihat dari kasus Madura. Lihat, Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman* (Jakarta: Gramedia, 1989).

berarti bahwa posisi keduanya telah berhasil mentransformasikan budaya petani menjadi budaya modern. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa di satu sisi transformasi budaya petani membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, dan di sisi lain budaya priyayi maupun santri tidak selalu berorientasi ke depan sebagaimana budaya modern. Atas dasar pertimbangan ini maka perlu diidentifikasi lebih lanjut tingkat kesesuaian antara tiga sistem nilai budaya pribumi di atas dengan persyarakatan terciptanya etos kerja serta kemajuan.

J. Timbergen mengemukakan enam syarat bagi masyarakat yang berkeinginan untuk maju.²¹ Syarat-syarat itu adalah:

1. Menaruh perhatian besar dan menilai tinggi benda materi;
2. Menilai tinggi teknologi;
3. Berorientasi ke masa depan;
4. Berani mengambil resiko;
5. Memiliki jiwa usaha (kewiraswastaan); dan
6. Mampu bekerjasama dengan sesamanya secara disiplin dan bertanggungjawab.

Bila rumusan Timbergen ini dipakai sebagai patokan, maka secara umum mentalitet pribumi belum mampu mendorong ke arah kemajuan. Tampaknya masih dibutuhkan usaha keras dalam bentuk reorientasi dan revitalisasi nilai-nilai agar sistem nilai yang ada mampu mengarahkan masyarakat mencapai kemajuan.

Budaya petani tidak bersikap jelas dalam memberikan penilaian terhadap benda material. Mereka membutuhkan-nya dalam konteks yang sangat praktis dan fungsional. Ben-

21. Lihat Setyo Soedradjat, "Sikap Mental dan Pembangunan" dalam *Buletin Yaperna: Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan*, No. 11, tahun III (Jakarta: 1976), halaman 96.

da sepenuhnya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, sementara kebutuhan dasar petani tidak berkembang pesat. Oleh karenanya, petani cenderung tidak memberikan makna lebih pada benda, dan akumulasi kekayaan dalam masyarakat petani juga tidak banyak terjadi. Sementara budaya priyayi hampir tidak memberikan nilai positif terhadap benda. Sebaliknya, kegiatan hidup yang diorientasikan pada benda justru dipandang rendah, kasar, dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Hanya budaya santri yang memberikan penilaian jelas terhadap benda. Seperti yang tercatat dalam sejarah Nusantara, kalangan santri pada umumnya berprofesi sebagai pedagang yang menempati wilayah-wilayah pinggir pantai. Berbeda dari kalangan priyayi, komunitas santri tampak tidak mendikotomikan masalah spiritual (agama) dengan benda. Bahkan pada tingkat tertentu, sebagaimana tampak dalam kasus Muhammadiyah, keberhasilan dalam melakukan kegiatan ekonomis merupakan bagian dari ajaran agama.

Namun demikian, dihadapkan pada teknologi, semua sistem nilai belum memberikan apresiasi yang tinggi. Masyarakat petani belum banyak mengadopsi teknologi moderen dalam meningkatkan produktivitas; komunitas priyayi lebih bersikap negatif lagi, di mana pekerjaan teknologi cenderung dipandang rendah; dan santri sedikit banyak juga belum apresiatif terhadap teknologi. Mereka masih mendasarkan kegiatan mereka pada alat dan kemampuan yang belum banyak bersentuhan dengan dunia moderen. Walaupun demikian, keterbukaan yang dimiliki oleh budaya santri sangat potensial untuk menerima inovasi-inovasi teknologi baru.

Masalah lain yang juga penting adalah bahwa belum semua sistem nilai berorientasi ke masa depan. Budaya petani jelas-jelas memiliki jangkauan waktu yang pendek dan praktis. Keinginan untuk menciptakan masa depan yang baik banyak terhambat oleh gambaran ketentuan alam sekitar yang begitu kuat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

Sementara budaya priyayi justru mengarahkan anggotanya ke masa lalu. Sama halnya dengan harta benda, masa kini dan masa depan cenderung dihindari. Keduanya sebisa mungkin diatur atau disesuaikan dengan tatanan-tatanan spiritual yang dipandang hakiki, abadi, dan tidak berubah. Sementara budaya santri sendiri juga belum sanggup mengarahkan anggotanya untuk memiliki visi jauh ke depan. Mereka masih berkuat dengan kepentingan kekinian, dan kurang mampu memproyeksikan diri di masa depan. Sikap ini tercermin dalam usaha mereka yang tidak begitu berkembang, karena kurang sensitif dalam memetakan kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang.

Meskipun demikian, budaya santri jauh lebih mendorong anggotanya untuk berani mengambil resiko ketimbang sistem nilai budaya yang lain. Asumsi ini dapat dilihat melalui profesi santri yang kebanyakan adalah pedagang, sedangkan yang lain petani dan pamong praja. Seorang pedagang mau tidak mau harus mampu berhitung dan menanggung akibat dari perhitungan yang dibuat. Ia akan selalu dihadapkan pada keharusan untuk mendapat laba, dan tanpa keberanian mengambil resiko, kemungkinan tersebut tidak akan pernah terwujud. Hal ini berbeda dari dunia petani yang serba mapan, di mana keuntungan dapat diperhitungkan melalui irama gerak alam. Begitu juga dengan priyayi yang senantiasa hidup dalam rutinitas birokrasi; mereka sangat jarang menghadapi situasi yang mengharuskan seseorang untuk mengambil resiko.

Maka atas dasar kecenderungan ini hanya budaya santri yang paling berpeluang membekali anggotanya dengan sikap kewirausahaan. Profesi pedagang tidak memungkinkan seseorang untuk terlalu bergantung pada pihak lain di luar dirinya. Hanya kejelian dan kepintaran pribadi dalam melihat kecenderungan pasar yang akan mengantarkan sukses seseorang. Jika pedagang tidak memenuhi tuntutan ini maka dengan sendirinya ia akan berhenti sebagai pedagang.

Dengan kata lain, tanpa adanya kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan mengendalikan pasar, seorang pedagang dipastikan bangkrut. Situasi yang serba tidak menentu ini tidak dihadapi oleh petani maupun pamong praja, karena alam dan negara telah menjamin kemapanan hidup mereka. Petani mempunyai masa panen dan priyayi juga memiliki masa gajian. Untuk mendapatkan semua itu tidak dibutuhkan usaha keras; mereka pasti akan mendapatkan jaminan tersebut, meskipun hanya dengan mengikuti aturan standar yang berlaku. Akibatnya, kepercayaan diri dan inisiatif baru sulit berkembang, karena rutinitas kegiatan telah membuat petani dan priyayi hidup dalam kondisi mapan dan pada saat yang sama sulit ditransformasikan.

Syarat untuk maju yang terakhir adalah kerjasama dengan didasari disiplin dan tanggungjawab. Dapat dikatakan bahwa semua sub-sistem nilai belum mampu memenuhi, kecuali keharusan untuk kerjasama. Sedangkan sikap disiplin dan tanggungjawab tampak belum menjadi bagian dari kebiasaan hidup semua komunitas. Kemauan untuk bekerjasama merupakan ciri penting budaya pribumi, khususnya petani. Istilah gotong royong merupakan bukti bahwa kerjasama bukan kebiasaan asing bagi komunitas petani. Bahkan pada tingkat tertentu gotong royong menjadi berlebihan, karena muatan kebersamaan lebih diutamakan dari manfaat yang dihasilkan. Kendati demikian, kecenderungan ini tidak bisa dilepaskan sama sekali dari pola masyarakat komunal yang sangat menekankan kepentingan bersama dibandingkan pribadi.

Dibanding budaya petani, tradisi bekerjasama dalam budaya priyayi dan santri justru tidak begitu kuat. Orientasi mistik yang kental dalam budaya priyayi mendorong anggotanya untuk lebih mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, kegiatan mistik lebih banyak dilakukan secara pribadi ketimbang massal. Sementara budaya santri—yang lebih menekankan kebebasan individu—juga tidak begitu mendorong kerjasama. Namun lebih dari itu, semua sub-

budaya ini belum mampu menunjukkan suatu sikap disiplin dan tanggungjawab. Orientasi waktu dan kerja masih terbatas pada keharusan praktis memenuhi hidup dalam rentang waktu yang pendek. Akibatnya, disiplin dan tanggungjawab belum menjadi keharusan yang wajib diterapkan dalam semua aktivitas sehari-hari. Masih terlalu banyak peluang —baik berupa pemakluman atau toleransi— yang dengan sengaja digunakan untuk membenarkan sikap yang tidak disiplin dan bertanggungjawab. Selain itu, masyarakat pribumi pada umumnya juga belum terbiasa berpikir sistemik dengan mengaitkan kejadian masa lalu, kini dan mendatang, maupun menyusun hubungan logis antara persoalan pribadi, keluarga dan sosial. Jika hal ini dipenuhi, mereka dengan sendirinya akan menganggap disiplin dan tanggungjawab sebagai persoalan yang sangat penting. Tanpa adanya kesadaran ruang dan waktu ini mereka tidak akan mampu memahami hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan diemban.

Pergeseran dan Perbaikan

Deskripsi mentalitet pribumi di atas merupakan upaya penggambaran kecenderungan umum yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai pengecualian tetap saja ada, seperti bagian tertentu dari suatu etnis yang tidak masuk dalam kategori petani, priyayi maupun santri. Misalnya kelompok perantau dari Minangkabau, Batak, Aceh atau juga kaum urban lainnya. Mereka telah mengalami transformasi sosial menuju masyarakat moderen yang membuat mentalitet mereka tidak lagi berakar pada konsepsi tradisional. Orientasi nilai yang mereka pegang semakin menyerupai masyarakat modern yang hidup di berbagai wilayah. Kalangan inilah yang diharapkan dapat memberikan imbas pada komunitas pribumi lain yang sampai saat ini belum sempat mengalami transformasi.

Pada dasarnya program pembangunan yang telah berjalan lebih dari dua puluh lima tahun telah mengubah wa-

jah tradisional pribumi Indonesia sampai tingkat yang cukup signifikan. Meskipun belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, beberapa indikator menunjukkan bahwa perjalanan menuju masyarakat modern sedang dalam proses. Laju pertumbuhan sektor industri, misalnya, ternyata jauh melampaui perkembangan sektor pertanian. Sejak 1969 sektor industri rata-rata meningkat 12 % tiap tahunnya, sementara sektor pertanian hanya meningkat 5,6 %.²² Kenyataan ini dengan sendirinya mengubah struktur ekonomi Indonesia dari basis pertanian menuju non-pertanian. Data statistik distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa peran pertanian terus menerus turun secara konstan; sementara sektor lain seperti industri, pertambangan, perdagangan dan jasa mengalami peningkatan relatif tinggi. Pada 1969 sumbangan pertanian atas PDB sebesar 49,3 % kemudian turun menjadi 26,4 % pada 1983 dan turun lagi menjadi 19,3 % pada 1991. Sedang pertambangan naik dari 4,7 % menjadi 19,4 % dan turun lagi menjadi 12,4 % pada periode yang sama. Kenaikan konstan terjadi pada sektor industri dari 9,2 % menjadi 12,5 % dan naik lagi menjadi 21,8 % juga pada periode yang sama.²³ Sementara sektor perdagangan dan jasa tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa lambat laun budaya petani akan digantikan oleh budaya industri yang merupakan ciri pokok masyarakat modern.

Indikator tersebut semakin diperkuat oleh fenomena kehidupan masyarakat pribumi yang terus mengalami pergeseran. Melalui pendidikan dan perbaikan mutu hidup rata-rata masyarakat sudah tidak lagi bersikap pasif dalam menilai kehidupan. Pada tingkat generasi tua kecenderungan pasif seperti yang terlihat dalam orientasi budaya petani

22. *Orde Baru dalam Angka*, halaman 8 - 9.

23. *Orde Baru dalam Angka*, halaman 10.

masih terjadi. Kendati demikian, mereka tidak serta merta menularkannya kepada generasi yang lebih muda. Sebagaimana yang terlihat dalam data statistik, kesadaran mereka untuk menyekolahkan anak semakin tinggi. Pada 1971 hanya 61,7 % dari anak laki-laki berusia antara 7-12 tahun yang masih sekolah; namun pada 1980 angka ini naik menjadi 83,9 % dan pada 1990 naik lagi menjadi 91,4 %. Sedangkan kenaikan persentasi anak perempuan pada periode yang sama adalah 57,9 %, 83,2 % dan 91,7 %. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada kelompok anak usia sekolah lanjutan, 13-18 tahun.²⁴

Kebanyakan masyarakat juga mulai berorientasi kualitas dibandingkan kuantitas dalam memiliki anak atau membangun keluarga. Konsep yang dipakai bukan lagi *extended family* (keluarga batih), melainkan *nuclear family* (keluarga inti). Pada 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,32 % dan terus turun menjadi rata-rata 1,97 % per tahun sampai dengan 1990. Pada saat yang sama angka mortalitas bayi turun dari 142 orang dari setiap 1000 kelahiran pada 1971 menjadi 71 dari 1000 kelahiran pada 1985. Berbarengan dengan perbaikan hidup ini angka harapan hidup tercatat terus naik dari 53 tahun pada 1971 menjadi 57 pada 1980 dan 62 pada 1990.²⁵ Semua ini mengandaikan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang menilai kehidupan sebagai sesuatu yang baik. Mereka tidak lagi cenderung pasif, meskipun tidak juga berarti bahwa mereka tidak menemui kesulitan dalam menyiasati hidup.

Indikator ekonomi di atas juga menunjukkan bahwa pribumi tidak lagi sepenuhnya terbelenggu oleh alam sekitarnya. Sedikit demi sedikit mereka mulai terpanggil untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam sekeliling. Sebagai-

24. *Orde Baru dalam Angka*, halaman 149 - 150.

25. *Orde Baru dalam Angka*, halaman 3 - 5.

an mereka ada yang mulai meninggalkan desa atau profesi petani dan masuk wilayah kota untuk bekerja pada sektor industri. Ada juga di antara mereka yang meninggalkan desa menuju kota untuk menggeluti sektor perdagangan dan jasa. Di sisi lain, berkat teknologi dan demi memperoleh hasil pertanian yang lebih baik, petani tidak lagi sepenuhnya mengandalkan alam; mereka mulai menerapkan berbagai cara untuk memanipulasi alam. Oleh karenanya individu tidak lagi sekedar menjadi bagian dari alam, tetapi mulai mengatasi dan menguasainya.

Cara pandang terhadap beberapa persoalan mendasar lain juga turut berubah seiring dengan pergeseran-pergeseran yang telah disebut di atas. Penilaian masyarakat terhadap benda material semakin tinggi dan kreativitas individu semakin mendapatkan tempat. Mereka mulai terbiasa mengukur keberhasilan individu dari jumlah harta yang dimiliki; jabatan tidak lagi menjadi patokan penting, kecuali jika memiliki implikasi perolehan benda material. Profesi pegawai negeri yang pernah diagungkan kalangan priyayi tidak lagi menjadi cita-cita kebanyakan pelajar. Mereka lebih memilih profesi yang jelas-jelas mendatangkan kemakmuran hidup ketimbang gengsi sosial yang juga sedang mengalami reorientasi.

Dalam situasi seperti ini individu semakin dipacu untuk memperebutkan kesempatan yang tersedia. Masing-masing harus mampu meyakinkan 'pasar' bahwa dirinya memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Prestasi kerja, dan bukan hanya loyalitas, kemudian dipakai sebagai patokan utama dalam seleksi mobilitas vertikal. Hanya mereka yang menguasai keterampilan dan pengetahuan moderen yang dapat memperoleh kesempatan. Sementara mereka yang lebih mengandalkan pola hubungan tradisional dan pribadi semakin sulit meningkatkan kualitas hidup. Gejala ini menunjukkan semakin banyak anggota masyarakat pribumi yang berpikir rasional, di mana kreativitas individu dijunjung tinggi. Individu memiliki kebebasan besar dalam

berinisiatif dan mengembangkan ide-ide baru tanpa harus terlalu mempertimbangkan nilai-nilai kebersamaan yang terlalu mengikat. Hubungan antargenarasi juga semakin egaliter dan tidak lagi didasarkan pada sistem pelapisan ketat. Seperti yang ditemukan Niels Mulder, misalnya, anak-anak di Jawa Tengah semakin cenderung menggunakan bahasa *ngoko* dan bukan *kromo* terhadap orang tua mereka.²⁶

Imbas perubahan sosial-ekonomi tampak bernilai positif bagi pengembangan hubungan pri-nonpri. Perubahan tersebut bahkan telah mempertemukan dua komunitas yang dulunya terpisahkan oleh jarak budaya yang begitu mendalam. Misalnya, pertumbuhan kelas menengah kota, kaum profesional dan pengusaha di kalangan pribumi semakin memperluas akses hubungan dengan komunitas Cina yang lebih dulu berada dalam sub-budaya tersebut. Pada tingkat tertentu, kalangan ini —baik keturunan Cina maupun pribumi— tidak lagi mengalami hambatan budaya dan orientasi kerja dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan tidak jarang terjalin kerjasama yang baik antara anggota dua komunitas tersebut dalam kegiatan bisnis, sosial, politik, ilmiah dan sebagainya.

Namun demikian, pergeseran yang terjadi dalam masyarakat pribumi masih menghadapi beberapa kendala. *Pertama*, perubahan tersebut masih terbatas pada masyarakat kota dan kalangan terdidik. Jumlah mereka terbatas, sehingga belum dapat diharapkan untuk mempengaruhi anggota komunitas lain yang jumlahnya sangat besar. *Kedua*, peluang komunikasi antara komunitas Cina dan pribumi juga terbatas hanya pada beberapa kalangan. Hampir sama dengan perubahan di kalangan pribumi, proses komunika-

26. Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996) halaman 88.

si antardua komunitas lebih banyak berlangsung pada lapisan terpelajar dan menengah ke atas. Pada tingkat lebih bawah proses komunikasi tersebut berjalan lamban. Hubungan mereka terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti jual-beli, di mana komunitas Cina bertindak sebagai pedagang dan pribumi pembeli. Intensitas hubungan mereka masih rendah, belum menyentuh bidang yang lebih luas seperti budaya, agama, politik dan seterusnya. *Ketiga*, meskipun tidak menjadi perhatian utama buku ini, dampak perubahan yang disebutkan di atas tidak selalu bersifat positif; banyak kasus yang menunjukkan bahwa perubahan atau kemajuan yang selama ini dicapai juga memunculkan dampak negatif terhadap masyarakat. Di antaranya adalah tingkat kriminalitas yang tinggi di daerah perkotaan akibat pengangguran yang meningkat; goyahnya lembaga keluarga oleh sistem nilai modern yang bersifat permisif; menurunnya semangat kekeluargaan akibat kompetisi yang tinggi; dan maraknya materialisme yang disertai dengan penurunan bidang spiritual. Persoalan ini tidak hanya melanda komunitas pribumi, tetapi juga komunitas Cina. Oleh karenanya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mentransformasikan mentalitet bangsa Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antara pribumi dan keturunan Cina.

Bagaimanapun transformasi mentalitet petani menuju mentalitet moderen tetap dibutuhkan; prosesnya bahkan perlu lebih dipercepat. Dalam hal ini pemerintah, sebagai lembaga yang paling berpengaruh, sebisa mungkin memegang kendali utama. Penyemaian nilai-nilai yang berorientasi pada penghargaan benda material dapat dilakukan melalui jaringan lembaga maupun fasilitas lain yang tersedia seperti media massa, elektronik dan sekolahan. Sebisa mungkin bangsa Indonesia, khususnya pribumi, dibiasakan untuk berpandangan baik terhadap kehidupan dunia dan memberikan penilaian tinggi pada benda. Sosialisasi nilai ini tidak harus dipertentangkan dengan nilai-nilai spiritual

maupun agama. Keduanya sedapat mungkin berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Terhadap mereka yang berprestasi dalam bidang ekonomi perlu diberikan penghargaan tinggi, karena dalam konteks pembangunan, kedudukan pengusaha tidak lebih rendah dari guru, pejabat maupun tentara. Arti kepahlawanan dan kejuangan sudah saatnya diperluas, sehingga yang disebut pahlawan tidak hanya mereka yang berlatarbelakang tentara atau pejabat. Pengusaha adalah juga pejuang bangsa, yang memberi dampak luas bagi peningkatan kualitas kehidupan ekonomi. Tanpa peran mereka pertumbuhan dan pembangunan bidang ekonomi tidak akan berhasil seperti sekarang. Maka jika pejuang kemerdekaan berhak mendapatkan Bintang Jasa, para pengusaha yang telah menyumbangkan keahlian mereka terhadap masyarakat juga berhak mendapatkan penghargaan serupa. Lebih dari itu, jika meninggal, mereka juga berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Cara ini tampak efektif untuk membiasakan masyarakat berpikir positif tentang dunia usaha. Menjadi kaya bukanlah kesalahan; tetapi justru kemuliaan. Harta benda bukanlah simbol kerakusan, tetapi pertanda keberhasilan. Untuk itu perlu lebih disosialisasikan nilai-nilai lain yang mendukung prestasi tersebut. Kebiasaan sebagian masyarakat untuk menerabas aturan harus segera diakhiri. Sebaliknya perlu dipromosikan etika kerja yang mendorong tumbuhnya kesadaran bekerja keras dan berprestasi. Seleksi dan proses pengajaran di sekolah-sekolah harus sejak dini menerapkan aturan tersebut. Hanya murid yang berprestasi dan bekerja keras yang dapat direkomendasikan naik kelas dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara mereka yang kurang berprestasi, meskipun mampu membayar lebih, sebaiknya diarahkan belajar di sekolah kejuruan. Sistem ini bertujuan mempertegas aturan rasional yang sudah seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat moderen.

Aturan sosial hendaknya juga didasarkan pada pola yang sama. Sistem penghargaan tidak lagi harus didasarkan pada ikatan emosional atau pertimbangan kekerabatan, tetapi pada prestasi yang tercipta. Seorang direktur, misalnya, harus benar-benar memiliki kemampuan menejerial; kedudukan lain juga harus dipegang oleh orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan pembedangan. Nepotisme dan sistem koneksi sudah saatnya ditinggalkan, sebab hanya akan membuat masyarakat apatis dan tidak mempercayai arti kerja keras maupun prestasi. Maka hukum harus benar-benar ditegakkan tanpa mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu. Diharapkan cara ini dapat membuat masyarakat percaya pada sistem dan selalu beranjak dari aturan-aturan yang ada. Dengan kata lain, gagal-tidaknya seseorang dalam berusaha sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan pribadi; bukan oleh sistem atau kekuasaan.

Penyemaian nilai-nilai tersebut akan lebih efektif jika pemerintah memberikan contoh konkrit kepada masyarakat. Sesuai dengan semangat zaman, pemerintah tidak lagi bisa bersikap semata-mata sebagai penguasa. Mereka harus bisa memposisikan diri sebagai pelayan dan pembantu masyarakat, sebab setiap profesi dalam dunia modern pada dasarnya ditujukan untuk memberikan jasa kepada pihak lain. Mereka juga harus tanggap terhadap perubahan sosial, dan sanggup mengambil tindakan-tindakan antisipatif. Secara internal, pemerintah juga perlu menerapkan aturan birokrasi moderen, di mana prestasi kerja merupakan patokan utama bagi kedudukan seseorang. Sistem rekrutmen dan promosi dalam jajaran birokrasi sebisa mungkin bertolak dari aturan yang lebih rasional. Hanya mereka yang berprestasi, misalnya, yang dapat diterima sebagai pegawai negeri, dan hanya mereka pula yang pantas memegang jabatan. Dengan cara ini diharapkan birokrasi pemerintah dapat berperan lebih dinamis dalam mengantisipasi setiap tuntutan dan perubahan sosial.

Kendati demikian, transformasi mentalitet pribumi ke arah modernisasi bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempercepat proses penyelesaian masalah keturunan Cina. Upaya tersebut hanya dapat memperpendek jarak sosial-budaya-ekonomi yang saat ini terjadi. Asumsinya, keberhasilan pribumi akan dapat mengimbangi kekuatan keturunan Cina. Namun, mengingat ketimpangan antarkedua komunitas sangat mencolok, proses menuju keseimbangan cenderung memakan waktu lama; itu pun kalau tidak diinterupsi oleh kejadian tertentu yang dapat menghambat proses tersebut. Oleh karenanya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah startegis yang juga ditujukan kepada komunitas Cina.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, komunitas Cina memiliki keunggulan tertentu dibandingkan pribumi. Untuk itu mereka harus rela berbagi keterampilan, pengetahuan dan semangat dengan pihak pribumi. Hal ini bukan berarti bahwa mereka harus menyerahkan kekayaan atau usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun; atau harus membatasi usaha sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Lama. Akan tetapi, prinsip terpentingnya adalah bahwa mereka harus membuka diri menciptakan peluang yang lebih besar untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan pribumi dalam berbagai bidang. Semua jenis eksklusivitas yang sering tampak pada masyarakat Cina harus segera diakhiri. Pecinan, misalnya, yang merupakan bentuk eksklusivisme sosial, sudah sepantasnya dihilangkan; begitu pula jaringan dagang atau usaha yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan etnis.

Guna memberi kesempatan berbaur, sudah sepantasnya komunitas Cina diberi ruang untuk berkiprah secara lebih luas di luar ekonomi. Bila memang memenuhi kualifikasi, keturunan Cina juga berhak menjadi menteri, jenderal, profesor maupun duta besar. Mereka juga perlu meninggalkan kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok sosial tersendiri, dan mulai berbaur dengan masyarakat lain se-

cara lebih intensif. Kehadiran mereka di tengah masyarakat sebisa mungkin tidak hanya bersifat fisik; diupayakan keterlibatan tersebut juga menyentuh persoalan keseharian yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini diharapkan dapat terjadi proses akulturasi budaya yang berjalan cepat.

Dalam rangka menjabarkan strategi di atas pemerintah perlu mengambil sikap transparan, tegas, dan adil. Maksudnya, kebijakan apa pun yang akan diterapkan harus bersifat terbuka dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Jika masih bisa ditempuh cara musyawarah, pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan. Pelaksanaan kebijakan juga harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Siapa pun, termasuk kalangan pemerintah sendiri, yang melanggar ketentuan harus diberi sanksi yang jelas, dan mereka yang mentaati peraturan harus pula diberi penghargaan yang setimpal.

Prinsip keadilan tidak selalu mengandaikan kesamarataan hak dan kewajiban terhadap semua orang. Dalam konteks tertentu, keadilan juga bisa muncul dalam bentuk perbedaan hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kondisi objektif seringkali dapat dipakai sebagai pijakan bagi penegakan keadilan. Komunitas Cina yang begitu dominan menguasai ekonomi jelas tidak sama dengan pribumi yang sangat tertinggal. Oleh karenanya, meskipun bisa terkesan tidak adil, perlu dibuat aturan yang dapat memperpendek jarak tersebut. Masalahnya bukan terletak pada perbedaan aturan, tetapi lebih pada alasan yang membuat suatu aturan berbeda-beda penerapannya. Maka dari itu faktor transparansi dan ketegasan menjadi penting dalam rangka menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ibaratnya, komunitas Cina mungkin lebih rela menyerahkan sebagian kekuasaan ekonomi mereka, ketimbang mempertahankannya dengan resiko tidak memiliki kekuatan sosial dan politik sama sekali.

Akselerasi pemecahan masalah komunitas Cina di Indonesia akan lebih berhasil jika pemerintah mengembangkan sebuah strategi kebudayaan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Rumusan keindonesiaan masih lebih banyak diinspirasi oleh nilai-nilai perjuangan yang berasal dari zaman penjajahan dan perjuangan. Konsep kepahlawanan atau loyalitas, misalnya, terkesan eksklusif untuk konteks masa kini. Tidak semua kalangan berpeluang ditahbiskan menjadi pahlawan, dan tidak semua bentuk pengabdian dipandang sebagai loyalitas. Untuk itu diperlukan strategi kebudayaan yang dapat menangkap semangat perubahan zaman dan sekaligus mampu memproyeksikan kemungkinan yang bakal terjadi.

BAB VI

Masyarakat Cina dalam Konteks Ketahanan Nasional: Catatan Penutup

Bab-bab terdahulu telah berusaha untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan komunitas Cina di Indonesia dalam hubungannya dengan masalah ketahanan nasional. Secara agak panjang, telah dijelaskan struktur sejarah keberadaan masyarakat Cina di wilayah Nusantara. Demikian pula, sudah banyak disinggung ikatan tradisional yang terciptakan, baik melalui jaringan sosial-budaya, ekonomi maupun politik, antara mereka dengan komunitas ataupun pemerintahan Cina daratan. Di sana-sini sempat pula dilukiskan secara sepintas tentang hubungan antarwarga Cina perantuan, baik dalam konteks Asia Tenggara maupun kawasan-kawasan lainnya, di mana komunitas Cina hadir secara signifikan — meskipun mereka tetap merupakan kelompok minoritas.

Yang belum diungkapkan secara agak khusus adalah kaitan antara komunitas Cina di Indonesia dengan masalah pembangunan ketahanan nasional. Bagaimana posisi warga keturunan dalam upaya mewujudkan bentuk ketahanan nasional yang handal, serta peran apa yang dapat mereka

sumbangkan dalam hal tersebut? Kenyataan bahwa komunitas Cina masih mempunyai persoalan tersendiri dalam hubungannya dengan masyarakat pribumi, merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional yang dicita-citakan. Hal ini jelas, karena dalam kerangka hubungan antara dua komunitas tadi, yang hingga taraf-teraf tertentu belum menunjukkan formatnya yang ideal, seringkali terselip faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam konstruk ketahanan nusantara yang ideal.

Secara stereotipikal, meskipun sebenarnya hal ini harus dihindari, dapat dikatakan bahwa struktur hubungan antara kedua komunitas Cina dan masyarakat pribumi selalu melibatkan persoalan-persoalan sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Aspek-aspek ini merupakan elemen-elemen dasar dalam penciptaan konstruk ketahanan nasional yang tangguh. Diketahui secara luas, dalam aspek-aspek inilah pergesekan-pergesekan struktur hubungan antara pribumi dan masyarakat keturunan Cina sering terjadi.

Dari sisi ekonomi, misalnya, seperti nampak dengan jelas dalam seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Cina menguasai sebagian besar dari jumlah modal yang beredar di dalam negeri. Meskipun angka yang digunakan untuk menunjukkan kenyataan ini bervariasi, perkiraan-perkiraan yang ada menyebutkan angka di sekitar 70 hingga 80 persen. Demikian pula, berbagai laporan menunjukkan bahwa dari sekitar 200 konglomerat yang ada di Indonesia, sebagian besar adalah warga keturunan.¹ Ini semua menunjukkan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh warga keturunan.

Aspek ekonomis yang sedemikian itu jelas sangat berpengaruh dalam menciptakan struktur ketahanan nasional

1. Lihat, misalnya, laporan yang disiapkan oleh *Warta Ekonomi*, No. 27/VIII/25 Nopember 1996.

yang tangguh. Bagaikan dua sisi keping uang yang sama, aspek ekonomis ini dapat memainkan peranan yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian bahwa warga keturunan menguasai ekonomi secara tidak proporsional dapat menimbulkan sikap tidak senang pada diri masyarakat luas. Sebaliknya, jika potensi itu dapat ditransformasikan sebagai variabel penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum — melalui kemitraan dan langkah-langkah serupa lainnya — maka hal itu akan memantapkan apa yang disebut sebagai integrasi atau persatuan nasional. Ramifikasi dan dampak dari aspek ekonomis yang sedemikian itu jelas mempunyai andil besar, bahkan ikut mempengaruhi serta menentukan bentuk dan kualitas ketahanan nasional yang ingin diwujudkan.

Sebagai catatan penutup, bab ini berusaha untuk membicarakan aspek-aspek penting yang berhubungan dengan persoalan warga keturunan Cina. Dalam pembahasannya, aspek-aspek penting itu akan dikaitkan dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam membangun sosok ketahanan nasional yang handal.

Sekilas tentang Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dinamik suatu bangsa. Di dalamnya terselip struktur kekuatan dan ketangguhan. Secara implisit maupun eksplisit, pernyataan seperti ini mengandaikan adanya kemampuan untuk menggerakkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara serta upaya mewujudkan cita-cita nasional.

Dengan pengertian dasar seperti itu, bangsa Indonesia telah memasuki tahapan-tahapan keberhasilan tertentu, khususnya dalam hal mengatasi tantangan, ancaman, dan

gangguan. Keberhasilan dalam menciptakan stabilitas politik, mempertahankan keutuhan wilayah, keutuhan ideologi, dan melaksanakan pembangunan merupakan indikasi kuat akan hal ini —kemampuan untuk menciptakan struktur ketahanan nasional tertentu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kenyataan ini semakin jelas jika diletakkan dalam kerangka pengalaman masa lalu, di mana Indonesia pernah mengalami persoalan regionalisme (pemberontakan daerah), pergesekan-pergesekan politik, serta persoalan integrasi atau pembauran yang tampaknya masih belum selesai.

Untuk sampai pada tahapan keberhasilan seperti ini, sejumlah faktor perlu mendapat sorotan seperlunya. Pertama-tama yang penting untuk disebut adalah restrukturisasi politik — dengan segala implikasinya — yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dengan langkah seperti itu, stabilitas politik dapat diciptakan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, khususnya dalam upaya membangun sebuah kehidupan sosial-politik yang tertib. Demikian pula halnya dengan posisi ideologi nasional yang semakin mantap. Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh seluruh kekuatan politik dan sosial-kemasyarakatan yang ada, merupakan tahapan sejarah penting dalam kehidupan politik bangsa. Dengan itu, masyarakat Indonesia telah menyelesaikan satu tugas penting, tak lagi harus bersitegang dalam soal ideologi negara. Pada gilirannya, kenyataan demikian juga merupakan faktor-faktor pendorong (*push factors*) bagi terciptanya suatu struktur lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, khususnya di bidang ekonomi.²

2. Argumen klasik tentang hal ini dibenarkan oleh Samuel P. Huntington dalam, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).

Keberhasilan dalam menciptakan stabilitas politik ini berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti diakui banyak pihak, pembangunan ekonomi yang berlangsung hampir tiga dasawarsa ini telah menghasilkan capaian-capaian yang menggembirakan. Kalau pada akhir pemerintahan Orde Lama pendapatan per kapita penduduk adalah US \$ 80 (1966), maka tiga puluh tahun kemudian angka itu telah berkembang menjadi US \$ 1,120 (1996). Selama masa itu, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 7,2% pada awal 1970-an hingga awal 1980-an; 5,8% pada pertengahan 1980-an hingga akhir 1980-an; dan 7,7% pada pertengahan 1990-an. Demikian pula, indikator-indikator ekonomi lainnya (e.g. nilai produk domestik bruto; jumlah uang yang beredar untuk kegiatan ekspor dan impor) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan.

Harus diakui bahwa keberhasilan relatif ini tidak semata-mata disebabkan oleh terciptanya struktur lingkungan yang stabil. Kombinasi antara tersedianya sumberdaya alam (*natural resources*) dan pilihan kebijakan yang tepat juga ikut menentukan tingkat keberhasilan seperti yang dapat disaksikan dewasa ini.

Dari sudut sosial, tak kalah pentingnya adalah tersedianya sumberdaya manusia yang cukup dan terampil. Dalam hal ini, pendidikan merupakan faktor penting yang mempercepat proses mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Itu semua ikut mendukung terciptanya konfigurasi ketahanan nasional yang relatif kuat.

Dengan alur pikiran seperti itu, maka sebenarnya apa yang disebut ketahanan nasional mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dikemukakan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan merupakan unsur-unsur inheren yang harus ada dalam konfigurasi ketahanan nasional.

Aspek Ideologi

Ketahanan nasional dalam konteks ideologi berkaitan dengan kemantapan posisi ideologi negara di mata masyarakat. Dalam hal ini, ideologi dapat dipahami sebagai perangkat nilai atau prinsip yang memberikan arahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah *guiding principles* yang mendasari dan memberikan arah serta tujuan dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks lain, ideologi juga dapat dipandang sebagai suatu sistem nilai yang tersusun secara sistematis.

Dengan pandangan dasar seperti itu, ideologi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dijadikan pegangan oleh suatu bangsa. Nilai-nilai itu berkaitan dengan cara-cara yang baik, yang secara moral dianggap benar dan adil, yang mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan ke-duniaan suatu bangsa.³

Aspek Politik

Politik merupakan aspek penting dalam konfigurasi ketahanan nasional. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemikiran adalah terciptanya suatu ketertiban dan partisipasi politik yang memperkuat proses integrasi dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan keinginan seperti itu tidaklah mudah, dan masing-masing negara mempunyai pengalaman "arahan sejarah" (*course of history*) yang berbeda. Akan tetapi, secara natural, pada dasarnya mereka dihadapkan pada hal yang sama, khususnya yang berkaitan dengan prasyarat-prasyarat dasar pem-

3. Untuk uraian lebih lanjut, lihat Alfian, "Ideologi, Idealisme, dan Integrasi Nasional," *Prisma*, Tahun V, Nomor 8, Agustus, 1976.

bentukan negara yang mampu mengatur kehidupan rakyatnya.

Dalam hubungannya dengan ini, antara lain mereka dihadapkan pada kenyataan sejarah betapa sulitnya—secara politik—membangun negara yang kuat. Ini dalam artian terciptanya sebuah negara yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi dan mengarahkan kepentingan-kepentingan warga-negaranya yang bukan hanya berbeda, tetapi mungkin justru saling bertabrakan.⁴ Karena itulah sebagian *political developmentalist* mengajukan proposisi tentang perlunya ketertiban dan otoritas politik ditegakkan terlebih dahulu sebelum negara dapat mengatur (*direct*) dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah partisipasi politik masyarakat.⁵

Pengalaman pembangunan politik selama dua dasawarsa setelah Indonesia merdeka telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Orde Baru untuk mengintegrasikan strategi dan kebijakan tentang perlunya pemerintahan yang kuat dan menciptakan struktur lingkungan yang kondusif bagi pembangunan di satu pihak serta keharusan untuk mengakomodasikan keinginan dan partisipasi politik masyarakat di pihak lain. Bahwa di sana-sini masih terlihat adanya ketakseimbangan peran, hal itu merupakan sesuatu yang hendaknya dibenahi secara terus menerus tanpa harus mengganggu capaian-capaian yang telah dihasilkan—seperti stabilitas politik dan sebagainya.

4. Untuk uraian lebih lanjut tentang hal ini, lihat Peter B. Evans, Dietrich Rueschmeyer and Theda Skocpol (ed.), *Bringing the State Back In* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

5. Lihat, Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*.

Aspek Ekonomi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa titik tekan ketahanan nasional dilihat dari sudut ekonomi adalah tersedianya "kue nasional" yang cukup besar untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam mewujudkan keinginan seperti ini, banyak strategi pendekatan yang dapat dilakukan. Pemerintah Orde Baru, belajar dari pengalaman masa lampau, dengan sadar mengambil kebijakan untuk memperbesar "kue nasional" untuk kemudian didistribusikan.

Seperti telah disinggung, selama tiga dasawarsa ini keberhasilan relatif dalam hal ini telah dapat diwujudkan. Meskipun masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori strata bawah secara ekonomis, jumlah itu semakin berkurang —bahkan secara tajam. Di atas itu, satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum naik. Begitu pula daya beli mereka. Di mana-mana, secara ekonomis masyarakat tengah mentransformasikan dari tingkat pra-sejahtera ke posisi sejahtera dan sebagainya.

Ini semua menunjukkan relatif kuatnya posisi ekonomi Indonesia. Kenyataan ini jelas memberi warna tertentu dalam konfigurasi ketahanan nasional secara umum.

Harus diakui bahwa tidak semuanya berjalan seperti yang dicita-citakan bersama. Satu hal yang mencolok dan menjadi pembicaraan umum sehari-hari adalah masih adanya pola penguasaan ekonomi yang tidak proporsional oleh aktor-aktor ekonomi. Diberitakan, bahwa pelaku-pelaku ekonomi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak menguasai kurang lebih 70% dari perekonomian Indonesia. Meskipun secara umum kondisi perekonomian Indonesia kuat, kenyataan ini akan menimbulkan dampak tersendiri yang dapat mempengaruhi struktur ketahanan nasional bangsa.

Aspek Sosial-Budaya

Aspek lain yang menjadi bagian integral dari konfigurasi ketahanan nasional adalah aspek sosial-budaya. Dalam hal ini, paling tidak ada empat faktor utama yang ikut mempengaruhi: tradisi; pendidikan; kepemimpinan nasional; dan tujuan nasional.

Tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia ikut membentuk nilai-nilai sosial-budaya yang dimilikinya. Karena kemajemukan masyarakat Nusantara, tampak dengan jelas bahwa tradisi utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan gabungan (*amalgam*) dari tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang beragam. Hanya karena adanya ikatan kepentingan bersama sebagai suatu bangsa, maka tradisi-tradisi yang beragam itu, baik secara disengaja atau tidak, telah membentuk *mainstream* tersendiri. Tradisi-tradisi yang beragam inilah yang memperkaya konstruk sosial-budaya Nusantara.

Konfigurasi sosial-budaya juga dipengaruhi dan dibentuk oleh pendidikan. Sejak Indonesia merdeka, dunia pendidikan nasional telah mengalami proses transformasi yang sangat berarti. Satu hal yang sangat mencolok dalam bidang ini adalah bahwa dengan kemerdekaan dunia pendidikan relatif telah menjadi sesuatu yang bersifat egaliter. Berbeda dengan dunia pendidikan pada masa penjajahan, di mana akses ke pendidikan sangat ditentukan oleh status sosial, sejak masa kemerdekaan "prasyarat" seperti itu dengan sendirinya terhapuskan. Kini dapat disaksikan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Meskipun demikian, masih juga terlihat adanya segmen-segmen masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena faktor tidak tersedianya sarana finansial.

Kenyataan ini telah ikut memperkaya nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. Konstruk dari nilai-nilai sosial-

budaya tadi juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Karena itu, dengan sendirinya nilai-nilai lama yang dirasa kurang sesuai (tradisional) akan terpinggirkan. Dari waktu ke waktu nilai-nilai sosial-budaya dapat berubah (moderen), tergantung pada tingkat pendidikan dan perkembangan zaman yang dilalui dan dialami oleh masyarakat Nusantara.

Kepemimpinan nasional merupakan aspek lain yang ikut menentukan nilai-nilai sosial-budaya. Kepemimpinan nasional Orde Baru telah menunjukkan sesuatu yang bersifat mengayomi seluruh warga serta penduduk asing yang tinggal di wilayah hukum Indonesia. Dalam kerangka ini, konstruk ketahanan nasional juga secara *inherent* juga harus melindungi keamanan dan ketentraman semuanya.

Akhirnya, aspek sosia-budaya ini juga sangat dipengaruhi oleh tujuan nasional yang dirumuskan bersama. Seperti diketahui, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kepastian akan cita-cita nasional inilah yang akan ikut menggerakkan arah tindakan (*course of action*) masyarakat dalam memberikan warna terhadap nilai-nilai sosial-budaya yang mereka anut dan kembangkan.

Aspek Hankam

Ketahanan nasional juga menyangkut aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Sebagai sebuah negara yang berdaulat, aspek ini penting untuk diperhatikan. Aspek ini tidak saja berkaitan dengan ancaman yang mungkin datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Integrasi atau persatuan nasional akan sangat membantu terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Adanya persepsi tentang segmen-segmen masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya terintegrasikan dengan komunitas Indonesia hanya akan menimbulkan rasa waswas terhadap kelangsungan konstruk ketahanan nasional.

Masyarakat Cina dan Ketahanan Nasional

Bagaimana komunitas keturunan Cina terintegrasi dalam konstruk ketahanan nasional seperti dijelaskan di atas?

Dari uraian yang telah diberikan dalam bab-bab yang terdahulu, dapat dikemukakan bahwa ada potensi dan sumbangan konstruktif yang dapat diberikan oleh warga keturunan dalam memantapkan konfigurasi ketahanan nasional. Akan tetapi, harus pula dikatakan bahwa di dalamnya juga terkandung kendala-kendala yang tidak mudah untuk dinetralisasikan. Jika tidak segera diselesaikan atau paling tidak dikelola dengan baik, tidak mustahil kendala-kendala ini — baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik — dapat mengganggu ketahanan nasional yang diinginkan.

Sama seperti orang Indonesia lainnya, warga keturunan Cina merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Keberhasilan kelompok masyarakat ini dalam dunia usaha merupakan potensi tersendiri dalam membangun ketahanan nasional yang handal. Akan tetapi, tidak dapat dikesampingkan bahwa arah sejarah (*course of history*) telah ikut membentuk komunitas ini seperti yang dipersepsikan oleh kalangan pribumi, yang tidak semuanya menyenangkan (*favorable*) dalam pandangan kelompok yang disebut terakhir ini.

Aspek-aspek dari arahan sejarah komunitas Cina terlalu banyak untuk dijelaskan ulang — seperti yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu. Meskipun demikian terdapat sejumlah aspek yang sangat mencolok yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam konteks pembangunan ketahanan nasional yang lebih integratif.

Aspek penguasaan ekonomi merupakan hal yang sangat menonjol dari komunitas ini. Fenomena bahwa kelompok yang kira-kira berjumlah 4 atau 5 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia ini menguasai 70 sampai 80 persen (angka yang relatif *generous*) dari perekonomian nasional merupakan sesuatu yang selalu mendatangkan kontrover-

si. Melalui langkah-langkah tertentu, baik yang bersifat ekonomi, politik, maupun budaya, kalangan ini mampu untuk membangun kerajaan ekonomi tersendiri.

Secara umum harus diakui bahwa potensi seperti itu merupakan aset nasional —sesuatu yang sangat relevan dalam konsep ketahanan nasional. Akan tetapi fenomena seperti ini tidak dapat dilihat dalam situasi yang vakum —seolah-olah lingkungan di sekitarnya sepi dari dinamika sejarah sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, justru karena lingkungan di mana mereka berada kental akan warna sosial, ekonomi maupun politik, yang sedikit-banyaknya terkait dengan komunitas keturunan ini, maka penilaian tentang penguasaan ekonomi yang sangat luar biasa itu tak dapat dipisahkan dari struktur yang melingkupinya.

Dalam hal ini, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kenyataan tersebut telah menimbulkan perasaan tidak suka dari masyarakat pribumi terhadap warga keturunan Cina. Kenyataan ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Ia telah terbangun lama, merujuk pada masa kolonialisme Belanda. Pada masa inilah, "bakat" ekonomi dan usaha komunitas Cina terbangun. Dengan berperan sebagai kelompok perantara (*middle-men*), mereka memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Dengan variasi yang berbeda, posisi seperti itu berlanjut dan berkembang hingga kini. Bahkan telah terjadi transformasi besar-besaran yang, menurut Ruth McVey, telah mengubah posisi (sebagian) warga keturunan dari "pariah" menjadi "paragon."

Hal ini bukan berarti bahwa di kalangan pribumi tidak ada "paragon-paragon" ekonomi. Sejak masa Orde Lama, pengusaha-pengusaha besar pribumi telah muncul. Demikian pula, pada masa Orde Baru jumlah itu berlipat ganda. Akan tetapi, dari 200 konglomerat yang ada, sebagian besar berasal dari warga keturunan.

Rasa ketidak-senangan yang sedikit-banyaknya dibangun karena dominasi ekonomi warga keturunan ini diperburuk dengan persepsi masyarakat terhadap langkah-lang-

kah politik tertentu warga keturunan. Tidak diketahui secara pasti bagaimana hal itu muncul, masyarakat banyak membangun persepsi bahwa warga keturunan, secara politik dan ekonomi, cenderung membangun loyalitas ganda yang berat sebelah. Masih tebal keragu-raguan mereka tentang loyalitas (sebagian besar) warga keturunan Cina terhadap Indonesia. Meskipun hal ini sulit untuk dibuktikan, akan tetapi wacana persepsi dan penilaian seperti itu berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Cina daratan —untuk waktu yang cukup lama— pernah menimbulkan persoalan tersendiri dalam struktur ketahanan dan keamanan (khususnya) ideologi nasional.

Dari sudut pandang sosial-budaya, warga keturunan juga menampilkan problema tersendiri. Ini terutama berkaitan dengan persoalan integrasi yang belum tuntas. Tidak semua warga keturunan mempunyai persoalan integrasi. Akan tetapi, pandangan umum cenderung untuk mengatakan bahwa keinginan untuk melakukan integrasi total belum sepenuhnya berkembang secara merata di kalangan warga keturunan.

Faktor-faktor inilah yang menimbulkan persoalan, baik yang masih terpendam maupun yang pernah mencuat ke permukaan dalam bentuk kerusuhan. Dalam hal ini, pemerintah telah menggariskan langkah-langkah kebijakan tertentu (e.g. konsep SARA). Akan tetapi, yang terkesan di permukaan adalah bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih rumit daripada preskripsi kebijakan yang dijalankan.

Dalam kerangka seperti ini, “faktor warga keturunan” potensial untuk menjadi kendala bagi pembangunan ketahanan nasional yang handal. Pandahal, gagasan tentang ketahanan nasional secara inherent mencakup seluruh kekuatan warganegara. Akan tetapi, realitas di atas, khususnya yang menyangkut persepsi atau penilaian sebagian masyarakat pribumi terhadap warga keturunan, tak dapat begitu saja dinafikan.

Melihat situasi dilematis seperti itu, adalah menarik untuk mempertimbangkan gagasan yang pernah dilontarkan oleh Aburizal Bakrie, salah seorang pelaku bisnis pribumi. Dalam hal ini, ia mengusulkan tiga langkah konkrit:

Pertama, sikap-sikap stereotipikal baik terhadap keturunan Cina maupun pribumi harus dihindarkan. Misalnya dengan menyebutkan bahwa keturunan Cina itu pasti kaya-kaya, tekun bekerja, dan seterusnya; sementara pribumi itu malas dan miskin-miskin. Sikap ini terbukti hanya memperumit masalah yang pada dirinya sendiri sudah rumit. Yang justru harus dibangun adalah usaha-usaha untuk saling mengenal satu sama lain, terutama di antara elite kedua golongan.

Kedua, kebijakan asimilasionis yang diambil oleh pemerintah Orde Baru harus didukung dan, yang lebih penting lagi, dilaksanakan secara konsisten dalam segala bidang. Perlakuan yang diskriminatif terhadap keturunan Cina oleh oknum-oknum pemerintah harus dihilangkan sepenuhnya. Bahkan, dalam rangka itu, kalau perlu dibuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka agar bisa berperan penuh khususnya di bidang pemerintahan (sipil dan ABRI) dan di bidang politik (MPR/DPR). Langkah ini perlu dilakukan untuk memotong lingkaran setan yang mempersulit usaha-usaha pembauran.

Ketiga, masih dalam kerangka kebijakan asimilasionis di atas, sementara rasa nasionalisme dan solidaritas sosial dan ekonomi para pengusaha keturunan Cina harus terus ditumbuhkan dengan berbagai cara, keunggulan mereka dalam bidang usaha dan ekonomi harus diakui dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, sasaran segera yang harus diusahakan adalah tumbuhnya kelas pengusaha pribumi yang kuat, sehingga kesenjangan dan kecemburuan yang sudah banyak disebutkan di atas dapat diatasi. Tumbuhnya kelas menengah pribumi yang kuat tidak akan memancing konflik etnis di Indonesia, karena kemungkinan besar kedua belah pihak akan bahu-membahu untuk menjaga kestabilan politik demi kepentingan bersama.

Sarana yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran di atas adalah dengan menciptakan *joint ventures* antara para pengusaha pribumi dan para pengusaha keturunan Cina, atau mengimbau kelompok pengusaha yang terakhir untuk membantu saudara-saudara sebangsanya yang ekonominya masih lemah supaya kedua-duanya dapat hidup makmur dan berdampingan secara damai.⁶

6. Aburizal Bakrie, "Pembauran Pri-nonpri Di Tanah Air," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pembangunan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Intermasa, 1997), halaman 104-105.

Dengan itu jelas, bahwa kombinasi antara apa yang hendaknya dilakukan masyarakat luas dan intervensi negara dalam menyelesaikan persoalan ini menjadi sesuatu yang sangat krusial sifatnya. Tanpa langkah-langkah konkrit dan *deliberate* persoalan warga keturunan dalam kerangka integrasi bangsa dan ketahanan nasional akan tetap tidak terselesaikan. Sebaliknya, jika dibiarkan terus hal itu akan tetap merupakan faktor yang berfungsi sebagai kendala bagi terwujudnya ketahanan nasional yang dicita-citakan bersama.

Apendiks 1

Peringkat 105 orang terkaya ASEAN 1996

Peringkat		Nama	Perusahaan	Negara	Estimasi Kekayaan (US\$ Miliar)
96	95				
1	3	Tan Yu	Tan's Asia Trust & Investment Corp	Filipina	3,6 - 7,0
2	2	Soedono Salim	Inti Salim	Indonesia	3,6 - 7,0
3	9	Robert Kuok	Kuok Bros	Malaysia	3,6 - 7,0
4	13	Kwek Leng Beng	City Development	Singapura	3,6 - 7,0
5	6	Eka Tjipta Widjaja	Sinar Mas	Indonesia	3,6 - 7,0
6	1	Dhanin Chearavanont	Charoen Pokphand	Thailand	3,6 - 7,0
7	12	Tiong Hiew King	Rimbunan Hijau	Malaysia	3,6 - 7,0
8	7	Queck Leng Chan	Hong Leong Group	Malaysia	3,6 - 7,0
9	8	Chatri Shophonpanich	Bangkok Bank	Thailand	3,6 - 7,0
10	15	Keluarga Wonowidjoyo	Gudang Garam	Indonesia	3,6 - 7,0
11	5	Lim Goh Tong	Genting Bhd	Malaysia	3,6 - 7,0
12	85	Keluarga Sampoerna	Sampoerna	Indonesia	3,6 - 7,0
13	4	Keluarga Ayala	Ayala Corporation	Filipina	3,6 - 7,0
14	43	George S.K Ty	Metropolitan Bank	Filipina	3,6 - 7,0
15	-	Yaw Teck Seng	Samling Corp	Malaysia	3,6 - 7,0
16	31	Keluarga Hartono	Djarum	Indonesia	2,1 - 3,5
17	16	Banthom Lansam	Lansam Corporation	Thailand	2,1 - 3,5
18	11	Prajogo Pangestu	Barito	Indonesia	2,1 - 3,5
19	-	Andrew Gotianum	Filinvest Dev	Filipina	2,1 - 3,5

20	17	Lucio Tan.	Corporation Fortune Tobacco	Filipina	2,1 - 3,5
21	20	Thaksin Shinawatra	Shinawatra	Thailand	2,1 - 3,5
22	23	Lee Seng Wee	Overseas-Chinese Bank	Singapura	2,1 - 3,5
23	-	Charoen Sirivadhana- nabhakdi	Surathip	Thailand	2,1 - 3,5
24	14	Keluarga Lopez	Benpress Holding	Filipina	2,1 - 3,5
25	18	Mongkul Kanjanapas	Hwa Kay Thai	Thailand	2,1 - 3,5
26	10	Chaijudh Karnasuta	Italian-Thai Development Corp. (ITD).	Thailand	2,1 - 3,5
27	19	Kho Teck Puat	Goodword Park	Malaysia	2,1 - 3,5
28	21	Tan Sri Azman Hashim	Arab-Malayan Merchant Bank	Malaysia	2,1 - 3,5
29	22	Andreas Soriano III	Soriano Corporation & San Miguel	Filipina	2,1 - 3,5
30	24	Henry Sy alias Si Tsi Xing	Shoe Mart Group	Filipina	2,1 - 3,5
31	29	John L. Gokongwei	JG Summit Holding	Filipina	2,1 - 3,5
32	55	Manuel Villar	Camela & Palmera	Filipina	2,1 - 3,5
33	25	Eduardo Conjuanco	San Miguel Corp.	Filipina	2,1 - 3,5
34	77	Teh Hong Piouw	Public Bank	Malaysia	2,1 - 3,5
35	42	Piya Bhirombhakdi	Boon Rawd Brewery	Thailand	2,1 - 3,5
36	-	Boonchai Bencharongkul	United Communication Industry	Thailand	2,1 - 3,5
37	-	Prachai Leophairatana	Thai Petrochemical Industry (TPI)	Thailand	2,1 - 3,5
38	45	Ananda Khrisnan	Tanjong Plc.	Malaysia	2,1 - 3,5
39	28	Chuan Ratanarak	Bank of Ayudhya	Thailand	2,1 - 3,5
40	26	Wee Cho Yaw	United Overseas Bank	Singapura	2,1 - 3,5
41	30	Mochtar Riady	Lippo.	Indonesia	2,1 - 3,5
42	44	Francis Yeoh	Yeoh Tiong Lay (YTL) Corporation	Malaysia	2,1 - 3,5

43	32	Keluarga Loh Boon Siew	Kah Motor	Malaysia	2,1 - 3,5
44	27	Tan Eng Soon	Tan Chong Motor Hold	Malaysia	2,1 - 3,5
45	33	Suhargo Gondokusumo	Dharmala	Indonesia	1,1 - 2,0
46	34	Mohammad (Bob) Hasan	Kalimanis	Indonesia	1,1 - 2,0
47	35	Tan Siong Kie	Rodamas	Indonesia	1,1 - 2,0
48	36	Ong Beng Seng	Hotel Properties	Singapura	1,1 - 2,0
49	46	Tajudin Ramli	Technology Resources Industries Bhd. (TRI)	Malaysia	1,1 - 2,0
50	37	Lim Thian Kiat	Multi-Purpose Holdings	Malaysia	1,1 - 2,0
51	38	Tan Chin Nam	Tan & Tan Develop- ments Sdn.Bhd.	Malaysia	1,1 - 2,0
52	39	Rafael Ortigas Jr.	Ortigas Co.	Filipina	1,1 - 2,0
53	40	Raj Kumar	Royal Brothers	Singapura	1,1 - 2,0
54	41	Jorge L. Araneta	Araneta	Filipina	1,1 - 2,0
55	91	Kaharudin Ongko	Ongko Group	Indonesia	1,1 - 2,0
56	93	Sjamsul Nursalim	Gajah Tunggal	Indonesia	1,1 - 2,0
57	47	Daim Zainuddin	Taman Malawi	Malaysia	1,1 - 2,0
58	100	Yahaya Ahmad	Div. Resources Bhd. & Gadek	Malaysia	1,1 - 2,0
59	48	Halim Zaad	Renong Bhd.	Malaysia	1,1 - 2,0
60	94	Kartar Singh Thakral	Thakral Corporation	Thailand	1,1 - 2,0
61	56	Boonsonge Asavabhokin	Nippondenso	Thailand	1,1 - 2,0
62	49	Lee Meng Tee	Allied Corporation	Singapura	0,6 - 1,0
63	50	Khoo Kay Peng	Malaysia United Industries	Malaysia	0,6 - 1,0
64	51	Vincent Tan	Berjaya Group	Malaysia	0,6 - 1,0
65	53	Jan Darmadi	Jan Darmadi Group	Indonesia	0,6 - 1,0
66	52	Ciputra	Ciputra Development	Indonesia	0,6 - 1,0
67	57	Ang Keong Lan	Joo Seng Co.	Singapura	0,6 - 1,0

68	63	Sudwikatmono	Dwi Golden Graha	Indonesia	0,6 - 1,0
69	59	Kiarti Srfuengfueng	The Asahi Glass	Thailand	0,6 - 1,0
70	60	Che Cho Keng	Khong Guan Group	Singapura	0,6 - 1,0
71	61	The Ning King	Argo Manunggal	Indonesia	0,6 - 1,0
72	62	Boonsit Chokewattana	International	Thailand	0,6 - 1,0
73	70	Hutomo Mandala Putra	Humpuss	Indonesia	0,6 - 1,0
74	73	Bambang Trihatmodjo	Bimantara	Indonesia	0,6 - 1,0
75	65	Djuhar Sutanto	Indocement	Indonesia	0,6 - 1,0
76	76	Keluarga Bakrie	Bakrie	Indonesia	0,6 - 1,0
77	54	Alfonso Yuchengco	Yuchengco	Filipina	0,6 - 1,0
78	64	Seem Kee Boon	Keppel Corporation	Singapura	0,6 - 1,0
79	66	Ng Kee Wei	Amalgamated Industrial Steel Bhd	Malaysia	0,6 - 1,0
80	67	Thavorn Phornprapa	Siam Motor	Thailand	0,6 - 1,0
81	69	Ang Toan Chen	Park Away Holding	Malaysia	0,6 - 1,0
82	68	Ibrahim Risjad	Risjadson	Indonesia	0,6 - 1,0
83	71	William Hong	Lion Group	Malaysia	0,6 - 1,0
84	72	Jen Cheng Boonsong	Boonsong Co.	Thailand	0,6 - 1,0
85	74	Sriefeungfung Teh Liang Teik	Malayan Fluor Mill Bhd	Malaysia	0,6 - 1,0
86	75	Kitti Dummer Charwanich	Soon Hua Seng	Thailand	0,6 - 1,0
87	78	Tunku Naquiyuddin	Antah Holding.	Malaysia	0,6 - 1,0
88	80	Siti Hardiyanti Rukmana	Citra Lamtoro Gung	Indonesia	0,6 - 1,0
89	-	Tan Sri Dato' Dr Loy Hean Heong	Malaysia Borneo Finance	Malaysia	0,6 - 1,0
90	81	Prapa Viryaprapaikit	Sahaviriya Group	Thailand	<= 0,5
91	82	Prachit Yosundara	Siam Commercial Bank	Thailand	<= 0,5
92	83	Wen Tien Kuang	Selangor Properties Bhd.	Malaysia	<= 0,5

Apendiks I

93	84	Hu Tse Kwang	Sembawang	Malaysia	<= 0,5
94	86	Keluarga Suvit Wang Lee	Nakornthon Bank	Thailand	<= 0,5
95	87	Lee Ching Chuan	Royal Properties	Singapura	<= 0,5
96	89	Samsudin Abu Hassan	Landmark Granite	Malaysia	<= 0,5
97	90	Marimutu Sinivasan	Texmaco	Indonesia	<= 0,5
98	79	Deefin L. Lazaro	Banquet Corp	Filipina	<= 0,5
99	92	Eduardo J. Abotis	Aboltiz Co.	Filipina	<= 0,5
100	98	Usman Admadjaya	Bank Danamon	Indonesia	<= 0,5
101	95	Julius Tahija	Tahija Group	Indonesia	<= 0,5
102	96	Somsak	Siam Steel Pipe	Thailand	<= 0,5
103	97	Soedarpo Sastrosatomo	NVPD Soedarpo	Indonesia	<= 0,5
104	99	Keluarga Djaja Ramli	Bank Bali	Indonesia	<= 0,5
105	88	Ong Keem Kee	Hotel Brunei	Brunei	<= 0,5

Sumber: LSPEU Indonesia dirangkum dari *Warta Ekonomi*,
No. 45/Thn VIII/31 Maret 1997

Apendiks 2

200 Cina Terkaya Indonesia

P.	Nama	Induk usaha	Jum. Per-usahaan	Aset pribadi US\$ juta	Bidang usaha
1	Soedono Salim Liem Sioe Liong	Salim	630	3,300	Semen, bank, asuransi, tepung terigu, otomotif, makanan/minuman, media, minyak goreng, dll.
2	Eka Tjipta Widjaya Oei Ek Tjhong	Sinar Mas	300	2,000	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
3	Prajogo Pangestu Phang 'Phung' Djun Phin	Barito Pacific	90	1,600	Kayu, kimia, bank, kertas, dll.
4	Tan Siong Kie	Roda Mas	60	1,500	Kimia, bank, deterjen, properti, dll.
5	William Suryadjaya Tjia Kian Liong	Surya Raya	200	900	Agribisnis, kimia, produk olahan, dll.
6	Mochtar Ryadi Lie Mo Tie	Lippo	200	700	Bank, asuransi, properti, elektronik, dll.

7	The Nin King	Argo Manunggal	55	600	Tekstil, kimia, bank, pengolahan karet
8	Rachman Halim Tjoa To Hing	Gudang Garam	20	600	Industri rokok kretek, permen karet, hotel, bank
9	Michael B. Hartono Oei Hwie Siang	Djarum	25	600	Industri rokok kretek dan elektronik
10	Robert B. Hartono Oei Hwie Thjong	Djarum	20	600	Industri rokok kretek dan elektronik
11	Dasuki Angkosubroto Go Soei Kie	Gunung Sewu	40	500	Properti, bank, perkebunan, perdagangan, dll.
12	Soehargo Gondokoesumo Go Ka Him	Dharmala	130	500	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
13	Kaharudin Ongko Ong Ka Huat	Ongko	50	450	Bank, perdagangan, properti, kayu, dll.
14	Mohamad 'Bob' Hasan The Kian Seng	Nusamba/ Kalimantan	90	400	Kayu, bank, tambang, minyak, kayu, dll.
15	Ir. Ciputra Tjie Tjien Hoan	Ciputra	17	400	Properti, bank, hotel, dll.
16	Sjamsul Nursalim Lim Tek Siong	Gajah Tunggal	160	400	Ban, tekstil, perkebunan, bank, asuransi, dll.
17	Henry Onggo Ong Hen Sin	Ratu Sayang	15	360	Properti, bank, perdagangan, hotel, dll.
18	Hadi Budiman Ang Kok Ha	Imora	30	360	Otomotif, furniture, ac, real estat, tekstil, dll.
19	Anthony Salim Liem Hong Sien	Salim	600	330	Semen, bank, asuransi, tepung terigu, otomotif, makanan/minuman,

					media, minyak goreng, dll.
20	Susilo Wonowidjoyo Tjoa To Bing	Gudang Garam	22	320	Industri rokok kretek, permen karet hotel, bank
21	Djuhar Sutanto Liem Oen Kian	Salim	600	310	Semen, otomotif, bank, asuransi, tepung terigu, dll.
22	Putera Sampoerna Liem Tien Pao	Sampoerna	17	300	Industri rokok kretek
23	Sigit S. Wonowidjoyo Tjoa To An	Gudang Garam	22	270	Industri rokok kretek, permen karet hotel, bank
24	Soekanto Tanoto Liem 'He Swei Hang	Raja Garuda Mas	60	260	Kertas, properti, kimia, pengolahan minyak, dll.
25	Djaya Ramli Lie Ton Tjiang	Bank Bali	25	255	Perbankan dan jasa keuangan lainnya
26	Jan Darmadi Fuk Jo Han	Jan Darmadi	70	250	Properti, pipa, plastik, tekstil, hotel, dll.
27	Sumarto Wonowidjoyo Tjoa To Sen	Gudang Garam	22	250	Industri rokok kretek, permen karet hotel, bank
28	Murdaya Widyawimarta Poo Djie Thiong	CCM/Berca	50	250	Perdagangan, distributor peralatan berat, sepatu, dll.
29	Andre Halim Liem Sien Tjong	Salim	600	250	Semen, otomotif, bank, asuransi, tepung terigu, dll.
30	Karman Widjaya Ta 'The' Min Kong	Argo Manunggal	70	245	Industri tekstil terpadu, garmen, bank, real estat, dll
31	Soedarmo Salim Lim Sioe Kiong	Salim	600	240	Semen, otomotif, bank, asuransi, tepung terigu, dll.

32	Susanta Lyman Satya Lie An Djan	Djaya Raya	34	245	Perkapalan, keramik telekomunikasi, tambang, dll.
33	Ir. Benyamin A. Suriadjaya Tjia Kian Hong	Astra	130	230	Otomotif, elektronik, bank, perdagangan, mesin, dll.
34	Ferry Teguh Santosa Kam Song Tjhiang	Ometraco	26	230	Perdagangan, properti, industri pakan ternak, mesin, dll.
35	Eka Tjandranegara Tjan Kok Koei	Mulia	20	230	Keramik, properti, bank
36	Albert Halim Liem Sien Peng	Salim	600	225	Semen, otomotif, bank, asuransi, tepung terigu,
37	Juni Setiawati Wonowidjoyo Tjoa Kit Hwa	Gudang Garam	22	210	Industri rokok kretek, permen karet, hotel, bank
38	Teguh Ganda Widjaya Oey Tjie Goan	Sinar Mas	200	180	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
39	Mu'min Ali Gunawan Lie Mo Ming	Panin	43	180	Properti, bank, asuransi, kimia, tanker, dll.
40	Gunadi Gunawan Lie Mo Kwang	Panin	40	175	Perbankan, asuransi, perkapalan, tekstil, properti, dll.
41	Atang Latief Tjia Kian Hong	Atang Latief	15	170	Properti, restoran, bank, otomotif, distributor, dll.
42	T. Permadi Rachmat Oey Giok Eng	Astra	340	170	Otomotif, elektronik, perkebunan, jasa keuangan, dll.
43	Joko Soegiarto Tjandra Tjan Kok Hui	Mulia	20	160	Keramik, properti, bank, pergelasan, dll.

44	Tegoeh Soetantyo Tan Kiong Liep	Mantrust	36	150	Perdagangan, pengalengan makanan/ minuman, dll.
45	Sukmawati Widjaya Oei Siu Hoa	Sinar Mas	200	150	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
46	Indra Widjaya Oei Peng Lian	Sinar Mas	200	150	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
47	Frankie Oesman Widjaya Oei Jong Nian	Sinar Mas	200	150	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
48	Soehendro E. Notowidjoyo Liem Sioe Kiong	Argo Manunggal	70	140	Industri tekstil terpadu, garmen, kimia, real estat, dll.
49	Agus Nursalim Lim Djoe Koeang	Kedaung	20	140	Industri gelas, keramik, agroindustri, dll.
50	Usman Admadjaya Njauw Jauw Woe	Bank Danamon	10	140	Perbankan dan jasa keuangan lainnya
51	Alim Husin Liem Kim Moey	Maspion	30	135	Industri peralatan rumah tangga, elektronik, plastik
52	Itjih Samsul Nursalim Go Giak Lian	Gajah Tunggal	60	135	Ban, tekstil, perkebunan, bank, asuransi, dll.
53	Suhadi Tan Hok Lin	Alas Kusuma	30	135	Industri kayu terpadu
54	Djafar Widjaya Oei Piak Lian	Sinar Mas	200	130	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
55	Adil A. Nurimba Lim Eng Hoai	Gesuri	20	127	Perkapalan (tanker), pelayaran, perdagangan, dll.
56	Burhan Uray	Djajanti	60	125	Industri perkayuan

	Bong Sun Ong				terpadu
57	Adijanto Tan Lim Hian	Bumi Raya Utama	15	125	Industri kayu terpadu
58	Soenaryo Priosoetanto Tan Lim Tai	Bumi Raya Utama	15	125	Industri kayu terpadu
59	Sukanta Tanudjaja Tan Tay Kang	Sinar Sahabat	20	122	Industri tekstil dan garmen
60	Sofjan Wanandi Lim Bian Koen	Gemala	40	120	Perdagangan, kimia, kargo, distributor, farmasi, keuangan, dll.
61	Johnny Widjaya Oey Kwie Gian	TIRA	30	120	Perdagangan, distri- butor, properti, pengo- lahan makanan dll.
62	Siti Hartati Tjakra Chow Lie Ing	CCM/Berca	50	120	Perdagangan, distributor peralatan berat, kontraktor, dll.
63	Kartini Muljadi SH	Tempo	15	120	Industri farmasi, perdagangan
64	Franciscus Bing Aryanto Khow Lip Bing	Kalbe Farma	62	120	Industri farmasi, perdagangan, properti, bank, dll.
65	Tidjan Ananto Tjoe Nam Kian	Panin	43	118	Properti, bank, asuransi, kimia, tanker, dll.
66	Eugene Trimistro Tjioe Mo Tjiang	Mugi	25	115	Industri farmasi
67	Robby Sumampouw	Batara Indra	23	105	Kawasan industri, perdagangan, hiburan, makanan kaleng, dll.
68	Gaitini Ong Gee Ti Nio	Batik Keris	27	110	Industri tekstil, garmen, sepatu, ritel, properti, dll.
69	Herlina Tjandinegara	Barito Pacific	90	105	Kayu, kimia, bank,

	Tio Min Liang				kertas, dll.
70	Lie Ang Sioe Nio	Argo Manunggal	170	100	Industri tekstil real estat, terpadu, garmen, bank, dll.
71	James Tjahaja Riady Lie Pai	Lippo	200	100	Bank, asuransi, properti, elektronik, dll.
72	Samadikun Hartono Ho Sioe Koen	Modern	30	95	Industri elektronik, fotografi, bank, properti, dll.
73	Eddy Dharma	Jan Darmadi	70	95	Properti, pipa, plastik, tekstil, hotel, dll.
74	Milie Pirieh	Sinar Mas	200	95	Minyak goreng, properti, bank, kimia, kertas, dll.
75	Polar Yanto Tanoto He Kang Lai	Raja Garuda Mas	60	95	Kertas, properti, kimia, pengolahan minyak, dll.
76	Fredy Gozali Kho Bun Fok	Ometraco	26	90	Perdagangan, properti, industri pakan ternak, mesin, dll.
77	Tedy Djuhar Liem Heng Tjioe	Salim	600	90	Semen, bank, tepung terigu, otomotif, properti, pengolahan makanan, dll.
78	Tjandra Kusuma Tjan Bun Hwa	Mulia	20	90	Keramik, properti, bank, pergelasan, dll
79	Osbert Lyman Lie Djwang Oe	Satya Djaya Raya	34	90	Perkapalan, keramik, telekomunikasi, perkebunan, dll.
80	Budi Brasali Lie Toan Hong	Brasali	10	90	Properti
81	Boenjamin Setiawan Khow Lip Boen	Kalbe Farma	62	90	Industri farmasi, perdagangan,

82	Hari Darmawan	Matahari	10	90	properti, bank, dll.
83	Hendro S Gondokoesoemo	Dharmala	130	85	Ritel
84	Tan Pei Ling	Roda Mas	60	83	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
85	Pek Teng Beng	Tamara	45	80	Kimia, bank, deterjen, properti, perdagangan, dll.
86	Henry Pribadi Liem Oen Hwo	Napan	35	80	Bank, asuransi, properti, perdagangan, dll.
87	Handoko Tjokrosaputro Kwee Han Tjong	Batik Keris	25	80	Kimia, ritel, media elektronik, dll.
88	Johanes Kotjo	Zeta	30	75	Industri tekstil, garmen, sepatu, ritel, properti, dll.
89	Ng Adjansah Masrin Ng Kee Chun	Lautan Luas	15	75	Konstruksi, keuangan, properti, minyak dan gas, tekstil, dll.
90	Linda Sihaja Sia Fong Lin	Modern	30	75	Industri kimia
91	Johrny Kesuma	Amcol	20	75	Industri elektronik, fotografi, bank, properti, dll.
92	Karta Widjaya Nio Khoy Tat	Lakop	15	75	Industri elektronik, properti, telekomunikasi, dll.
93	Hindarto H. Tantular	Bank Central Dagang	23	75	Industri tekstil terpadu
94	R. Hiskak Secakusuma Kwa Bian Hwie	Metropolitan	30	75	Perbankan
					Properti

95	Dick Gelael	Gelael	10	75	Ritel, restoran, manufaktur
96	Judith Soeryadjaya Tjia May Ian	Surya Raya	200	75	Agribisnis
97	Philip S. Widjaya Nio Sauw Kie	Lakop	15	72	Industri tekstil terpadu
98	Hamid Djojonegoro Chu Kok Hay	ABC	22	70	Batu baterai, minuman, elektronik
99	Honggo Wendratmo Ong Hong Tjing	Usaha Mulia	15	70	Perbankan
100	Djoni Djuhar Liem Heng Sien	Salim	600	70	Semen, bank, tepung terigu, otomotif, properti, dll.
101	Hendra Rahardja Tan Tjoe Hing	Harapan	16	70	Distributor otomotif, bank, restoran, motor, real estat, dll.
102	Johnny Onggo Lim Tjun Lim	Ratu Sayang	15	65	Properti, bank, perdagangan, hotel, dll.
103	Toto Hermijanto The Tjim Kim	Shinta Indah	10	65	Tekstil terpadu dan garmen
104	Gustimengo Gouw Hong Hoe	Gajah Tunggal	60	65	Ban, tekstil, perkebunan, bank, asuransi
105	Carlo hen Tabulujan Tan Tjin Hin	Tabulajan	15	65	Properti, pakan ternak, baterai, cat, asuransi, perdagangan, dll.
106	Erwin Surya Rahardjo Lim Sin Kwang	Setia Sapta	12	64	Perdagangan, plastik, aluminium, kabel, tambang, dll.
107	Handoko Winata Oey Tjan Tong	Intan	25	63	Kimia, sabun, properti, tapioka, perdagangan, dll.
108	Muljadi Kusumo Tjin Liang	Panin	43	63	Properti, bank, asuransi, kimia,

					tanker, dll.
109	Hutomo Widjoyo Oei Boen Hong	Dharmala	130	62	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
110	Andy Mulya Oey Kwie Soen	TIRA	30	61	Perdagangan, distributor, pengolahan makanan, garmen, dll.
111	Husodo Angkosubroto Go Ang Tiong Hauw	Gunung Sewu	40	60	Properti, bank, perkebunan, perdagangan, dll.
112	Lili Soemantri Li Ka Shing	Continental	10	60	Furnitur, elektronik, karbon, pakan ternak, tekstil, dll.
113	Widarto	Sungai Budi	25	60	Kimia, sabun, properti, tapioka, perdagangan, dll.
114	Sumito	ABC	22	60	Batu baterai, minuman, elektronik, dll.
115	Hartanto Hidjaja Ong Siong Eng	Hadtex	23	60	Tekstil terpadu, properti, distributor, dll.
116	Willem B. Wanandi Lim Bian Tiat	Gemala	40	60	Perdagangan, kimia, distributor, farmasi, keuangan, dll.
117	Darmawan Tedja	Jangkar (Pakuwon) Jati	27	60	Properti, perdggan, makanan olahan, importir, dll.
118	Alexander Tedja	Jangkar (Pakuwon) Jati	27	60	Properti, perdagangan, distributor, makanan olahan
119	Lesmana Basuki Lao Bie Soe	Sejahtera Bank Umum	10	60	Perbankan, asuransi, real estat, furnitur, batu, dll.

120	Husain Djojonegoro Chu Kok Seng	ABC	22	60	Batu baterai, minuman, makanan, elektronik, dll.
121	Bambang Setijo Tio Liong Kioe	Sari Warna Asli	20	60	Tekstil, bank, kimia, ban, tas, perdagangan, elektronik, dll.
122	Jusuf Wanandi Lim Bian Kie	Gemala	40	60	Perdagangan, kimia, kargo, distributor, farmasi, keuangan, dll.
123	Franciscus Welirang	Salim	600	60	Semen, tepung terigu, otomotif, peng. makanan
124	Khow Lip Swan	Kalbe Farma	62	60	Industri farmasi, perdagangan, properti, bank, dll.
125	Hartadi Angkosubroto Go Ang Tiong Hiap	Gunung Sewu	40	60	Properti, bank, perkebunan, perdagangan, dll.
126	Winiaty Suherlan Thio Wie Djoen	Trisulatex	10	55	Industri tekstil terpadu
127	Tay Juhana Tay Jui Chuan	Pulau Sambu	7	55	Perikanan, agroindustri
128	Slamet S. Gondokoesoemo Go Twan Ping	Dharmala	130	55	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
129	Awong Hidjaja Ong Koe Oen	Hadtex	23	55	Tekstil terpadu, properti, distributor, dll.
130	Hendro Sumampow	Batara Indra	23	55	Kaw. industri, perdagangan, hiburan, makanan kaleng
131	Tunggul Prajitno Halim Liem Kho Tjhung	Hadtex	23	55	Tekstil terpadu, properti, distributor, dll.

132	Sujanto Gondokoesoemo Go Twan Hian	Dharmala	130	54	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
133	Djamaludin Lie Chai Kie	Gunung Gahapi	10	53	Industri baja, agroindustri, real estat, dll.
134	Andilukito Himawan Lim Boon Hong	Gajah Tunggal	160	52	Ban, tekstil, perkebunan, bank, asuransi, dll.
135	Henry Liem Liem Sin Tjay	Napan	35	50	Kimia, ritel, media elektronik, dll.
136	Agus Sutanto Tan Siong Ing	Kayu Lapis	20	51	Industri kayu terpadu, galangan kapal, real estat
137	Luntungan Honoris Ho Sioe Liun	Modern	30	50	Industri elektronik, fotografi, bank, properti, dll.
138	Sungkono Honoris Liem Kho Min	Modern	30	50	Industri elektronik, fotografi, bank, properti, dll.
139	Mintardjo Halim Liem Kho Min	Sandratex	10	50	Industri tekstil terpadu
140	Siwie Honoris Ho Sioe Gui	Modern	30	50	Industri elektronik, fotografi, bank, properti, dll.
141	Gunawan Tjandra Tjan Kok Kwan	Mulia	20	50	Keramik, properti, bank, pergelasan, dll
142	Andrew Taufan Riady Lie Lie Zen	Lippo	200	50	Bank, asuransi, properti, elektronik, dll
143	Handiman Tjokro Kwee Han Liem	Batik Keris	25	50	Industri tekstil, garmen, sepatu, ritel, properti, dll
144	Aris Sumarta Tan Tiong Hoat	Kedaung	20	50	Industri gelas, keramik, agroindustri, dll.

145	Wilson Pribadi Liem Oen Djoe	Napan	35	50	Kimia, ritel, media elektronik, dll.
146	Johanes Lembong Liem Peng	Abdiputera	20	50	Kayu, garmen, perdagangan, telekomunikasi, bank, dll.
147	Andry Pribadi Liem Liek Min	Napan	35	50	Kimia, ritel, media elektronik, dll.
148	Iskandar Sukohardjo Ko Kim Thjan	Kedaung	20	50	Industri gelas, keramik, agroindustri, dll.
149	The Nien Kong	Argo Manunggal	170	47	Ind. tekstil terpadu, garmen, kimia, bank, real estat
150	Santoso Amidjoyo Jo Hui Tek	Aneka Raksa	10	47	Baja, besi, distributor, tambang, dll.
151	Tatang Hermawan	Fujitex	15	47	Bank, tekstil, real estat, garmen, distributor kimia
152	Ang Kang Hoo	Imora	30	48	Otomotif, properti, perakitan ac, tekstil, perdagangan
153	Santoso Winata	Sungai Budi	25	45	Kimia, sabun, properti, tapioka, perdagangan, dll.
154	Wim Kalona Lim Tjae Ho	Wigo	10	47	Industri farmasi, perdagangan, distributor, dll.
155	Harjo Sutanto Tan Siey Mao	Wings	10	47	Industri farmasi, perdagangan, distributor, dll.
156	Willy Brata Tan Gi Tjin	Tristate	15	46	Bank, garmen, real estat, tas, karet, elektronik, sepeda, dll.

157	Pudjiono Djojonegoro Chu Kok Fu	ABC	22	45	Batu baterai, minuman, makanan elektronik, dll.
158	Dwijanto Gondokoesoemo Go Twan Ling	Dharmala	130	45	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
159	Trijono Gondokoesoemo Go Twan Seng	Dharmala	130	45	Properti, bank/ asuransi, perdagangan, dll.
160	Wison Kohar Kwok Joeek Paun	Panggung	16	45	Elektronik, ritel, tekstil, opp film, distributor, dll.
161	Achmad Suriawinata Lo Foeng Foen	Pacific Paint	13	45	Industri cat, real estat, kimia, pengolahan makan- an, dll.
162	Frans Limas Liem Tjwan Hoo	Kalbe Farma	62	45	Industri farmasi, perdagangan, properti, bank, dll.
163	Joseph Gondobiantoro Ghow Bun Tjoen	Panggung	16	45	Elektronik, ritel, tekstil, opp film, distributor, dll.
164	Kindarto Kohar Kwok King Hwa	Panggung	16	45	Elektronik, ritel, tekstil, opp film, distributor, dll.
165	Bintoro Tanjung Tan Ming Wong	Gudang Garam	22	45	Industri rokok kretek, permen karet hotel, bank, dll.
166	Tatang Hermawan Oey Khe Tung	Fujitex	15	45	Bank, tekstil, real estat, garmen, distributor kimia, dll
167	Lekong Koharwaranto Kwok Kwan Hwa	Panggung	16	45	Elektronik, ritel, tekstil, opp film, distributor, dll.
168	Hendro Luhur	ABC	25	45	Batu baterai, minuman, makanan, elektronik, dll.

169	Atmadja Tjipto Biantoro Tjioe Lee Gan	Dwi Satrya Utama	16	44	Asuransi, properti, korek api, plastik, deterjen, dll.
170	Lisjanto Tjiptobiantoro Tjioe Lee Sian	Dwi Satrya Utama	16	44	Asuransi, properti, korek api, plastik, deterjen, dll.
171	Gunawan	Jaya Pari Steel	8	41	Perdagangan, pembuatan baja, pipa, konstruksi, dll
172	Johanes Ferdinan Katuari	Wings	20	40	Industri deterjen
173	Kamarudin Lie King Tjoei	Gunung Gahapi	10	40	Industri baja, agroindustri, real estat, dll.
174	Jason Surjana Tan Beng Siong	Wira Mustika Indah	13	40	Industri gelas, perdagangan, dll.
175	Stephen Tjondro Riady Lie Lie Tjhong	Lippo	200	40	Bank, asuransi, properti, elektronik, dll.
176	Jakob Oetama	Gramedia	35	40	Penerbitan, percetakan, surat kabar, radio, asuransi
177	Hasan Opek	Tamara	45	40	Bank, asuransi, properti, perdagangan, dll.
178	Adisaputra Januardy Jauw Thung Ho	Yasonta	15	40	Elektronik, tekstil, kimia, bank, kertas, aluminium, dll.
179	Swandono Adijanto Tan Hong Swan	Bumi Raya Utama	15	40	Industri kayu terpadu
180	Junus Jen Suherman Jong Houw Hoat	Famatex	12	36	Industri tekstil terpadu
181	Alim Markus Lim Wen Kwang	Maspion	30	37	Industri peralatan plastik rumah tangga, elektronik

Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

182	Frankie Nurimba Lim Seng Han	Gesuri	20	35	Perkapalan (tanker), pelayaran, perdagangan, dll.
183	Antonius Suhendi Liem Seng Soo	Nurimba Gesuri	20	35	Perkapalan (tanker), pelayaran, perdagangan, dll.
184	Boedi Sampoerna	Sampoerna	17	35	Industri rokok kretek
185	Elizabeth Gelael	Gelael	10	35	Ritel, restoran, manufaktur
186	Jusuf Jen Suherman Jong Hew Ming	Famatex	12	35	Industri tekstil terpadu
187	Winoto Adijanto Tan Hong Hwie	Bumi Raya Utama	15	35	Industri kayu terpadu
188	Pintarso Adijanto Tan Hong Pheng	Bumi Raya Utama	15	35	Industri kayu terpadu
189	Soejono Varianata	Djajanti	10	35	Industri kayu terpadu
190	Ipung Kurnia	Hero	12	35	Ritel, minuman, tisu, dan produk olahan lainnya
191	Rudy Ramli	Bank Bali	25	35	Perbankab dan jasa keuangan lainnya
192	Kiswardani Ginarsih Kwa Gien Nio	Sandratex	8	35	Industri tekstil terpadu, garmen, sepatu
193	Irwan Gozali Kho Boen Jong	Gajah Tunggal	160	35	Ban, tekstil, perkebunan, bank, asuransi
194	Dharmadi Budiman Ang Toen Liang	Imora	25	35	Otomotif, properti, perakitan ac, tekstil, perdagangan, dll.
195	James Sujono Januardy Jauw Thung Nung	Yasonta	15	35	Elektronik, tekstil, kimia, bank, kertas, aluminium, dll.

196	Kiky Suherlan/ Tan Sin Hwa	Trisulatex	9	35	Industri tekstil terpadu dan garmen
197	Susanto Yuwono Yu Thoeng Ting	Sri Yuwono	12	34	Industri tekstil terpadu
198	Heru Pramono/ Ong Swie Pian	Caputra	10	34	Industri perkayuan, pariwisata, kontraktor, dll.
199	Njono Soetjipto Njo liong Wang	Pakerin	7	33	Industri karton, kertas, bank, perdagangan
200	Sutjipto Nagaria Liong See Tjen	Sumarecon	15	33	Properti, kontraktor, real estat, dll.

Sumber: LSPEU Indonesia dirangkum dari *Info Bisnis*,
edisi 41/TahunII/10 Desember 1996.

Bibliografi

- Alexander, Garth, *Silent Invasion: the Chinese in Southeast Asia* (London: Macdonald, 1973), halaman 37.
- Alfian, "Ideologi, Idealisme, dan Integrasi Nasional," *Prisma*, Tahun V, Nomor 8, Agustus (1976).
- Ali, Moh., *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara* (Jakarta : Barata 1963).
- Bahar, Saafroedin, "Mitos Keunggulan Bisnis Etnik Cina: Masalah Kultur, Menejemen atau Politik?" dalam *Etika Bisnis Cina* (Jakarta: PCP Universitas Nasional dan Gramedia, 1996).
- Berg, CC, *De Geschiedenis van Pril Majapahit, I Het Mysterie van de Vier Dochters van Kertanegara, Indonesie, IV* (1950), Amsterdam.
- Bianco, Lucien, *Origins of the Chinese Revolution, 1915-1949*, diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Muriel Bell (Stanford, California: Stanford University Press, 1971).
- Biro Pusat Statistik (BPS), *Orde Baru Dalam Angka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1992).
- Blythe, Wilfred, *The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

- Bo Yang, *The Ugly Chinaman and the Crisis of Chinese Culture*, diterjemahkan dan disunting dari bahasa Cina oleh Don J. Cohn dan Jing Qing (New South Wales: Allen & Unwin, 1992).
- Bonavia, David, *Cina dan Masyarakatnya*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Dede Oetomo (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Cady, John F., *South East Asia: Its Historical Development* (New York: McGraw Hill, 1964).
- Chi Su, "Sino-Soviet Relations of the 1980s: From Confrontation to Conciliation," dalam Samuel S. Kim (ed.), *China and the World: New Directions in Chinese Foreign Relations* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1989).
- Chin-Ning Chu, *Thick Face Black Heart: The Asian Path to Thriving, Winning & Succeeding* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997).
- Ching, David C.L., *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Stephen Suleeman (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- Coedes, G., *The Indianized States of Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1968).
- Coppel, Charles A., *Indonesian Chinese in Crisis* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983).
- , "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia," dalam J.A.C. Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books [Asia], 1976).
- Dahana, A., "Masalah Cina Perantauan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia*, Jurnal Tahunan CIDES, No. 1 (1994).

- Dawson, Raymond, *Kong Hu Cu: Penata Budaya Kerajaan Langit*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Y. Joko Suyono (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993).
- Evans, Peter B., Rueschmeiyyer, Dietrich and Skocpol, Theda (ed.), *Bringing the State Back In* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
- Fairbank, John King, *The Great Chinese Revolution 1800-1985* (New York: Harper & Row Publishers, 1986).
- Fitzgerald, C.P., *China: A Short Cultural History* (New York, Washington: Frederick A. Praeger Publishers, 1961).
- Geertz, Clifford, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: Chicago University Press, 1963).
- Glegg, S. R. and Redding, S.G. (eds.), *Capitalism in Contrasting Cultures* (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1990).
- Grief, Stuart W., "WNI": *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh A. Dahana (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Guinness, Patrick, "Local Society and Culture," dalam *Indonesia's New Order*, Hal Hill (ed.) (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).
- Hal, Kenneth R., *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of hawaii Press, 1985).
- Hall, G.E., *A History of South East Asia* (London: Mcmillan & Co. Ltd., 1958).
- Hamilton, Gary (ed.), *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Alexander Irwan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

- Hamka, "Pernyataan Majelis Ulama Indonesia," dalam Jahja (ed.) dalam *Nonpri di Mata Pribumi*.
- Hariyono, P., *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).
- Hendrati, Puline Ratna, *Perbedaan Orientasi Nilai Budaya antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Cina* (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1975).
- Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).
- International Finance Corporation, *Emerging Stock Markets Fackbook* (Washington, D.C.: IFC, 1994)
- International Monetary Fund, *World Economic Outlook* (Washington, D.C.: IMF, October 1994).
- Irwan, Alexander, "Business Networks and the Regional Economy of East and Southeast Asia in the Late Twentieth Century," Disertasi doktor pada State University of New York at Binghamton, 1995, halaman 109.
- Islam, Inayatul and Chowdhury, Anis, *Asia-Pacific Economies: A Survey* (London & New York: Routledge, 1997).
- Jahja, Junus (ed.), *Nonpri di Mata Pribumi* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, t.t.), halaman 347
- , *Islam di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, tt.).
- Jonge, Huub de, *Madura dalam Empat Zaman* (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1959).
- Kathirithamby-Wells, J., "Banten: A West Indonesian Port and

- Polity During the Sixteenth and Seventeenth Centuries," dalam *The Southeast Asian Port and Polity* (eds.) J. Kathirithamby-Wells and John Villiers (Singapore: Singapore University Press, 1990).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974).
- Lev, Daniel S., "Yap Thiam Hien: Utopisme dan Skeptisisme," dalam T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (eds.), *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990).
- Levin, Steven I., "Sino-American Relations: Renormalization and Beyond," dalam Samuel S. Kim (ed.), *China and the World: New Directions in Chinese Foreign Relations* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1989).
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Lie Tek Tjeng, "Unsur-unsur Kebudayaan dan Ras dalam Perasaan Anti-Jepang di Asia Tenggara," *Berita Antropologi* VII (20: Maret 1975).
- Lindblom, Charless, *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems* (New York: Basic Books, Inc, 1977).
- Mackie J.A.C., (ed.), *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Hong Kong, Singapore, Kula Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976).
- , "Changing Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia," dalam Ruth McVey (ed.), *Southeast Asian Capitalists* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1992).
- Mackie, J.A.C. dan MacIntyre, Andrew, "Politics," dalam *Indonesia's New Order*, Hal Hill (ed.) (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).

- Majidi, Nasyith, *Megaskandal: Drama Pembobolan dan Kolusi Bapindo* (Bandung: Mizan, 1994).
- McBeth, John and Cohen, Margot, "Tinderbox," dalam *Far Eastern Economic Review*, 9 Januari 1997.
- Meisner, Maurice, *Mao's China and After: A History of the People's Republic* (New York: The Free Press, 1986).
- Mortimer, Rex, "The Place of Communism" dalam *Studies in Indonesian History* (Carlton: Pitman Publishing Pty Ltd., 1976).
- Mozingo, David, *Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1976).
- Mulder, Niels, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
- Nevius, John L., *The Chinese* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1995).
- Parera, Frans M., "P.K. Ojong: Intelektual yang Menganut Sosialisme Fabian," yang disisipkan dalam Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional*.
- Pattiradjawane, Rene L., "Cina dan Peninggalan-peninggalan Deng Xiaoping," *Kompas*, 21 Februari 1997.
- , "Buat Cina Menjadi Kaya Bukan Dosa," *Kompas*, 11 Oktober 1992.
- , "Dari Korupsi sampai Transisi Kekuasaan," *Kompas*, 23 Februari 1997.
- Prawdin, Michael, *The Mongol Empire: Its Rise and Legacy* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1953).
- Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980).

- Rachman, Abdul, *Beberapa Perkembangan di Asia Selatan: Analisa Masalah-masalah Internasional* (Jakarta: CSIS, 1974).
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pembangunan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Intermasa, 1997).
- Redding, S. Gordon, *The Spirit of Chinese Capitalism* (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1993)
- Ricklefs, M. C., *A History of Modern Indonesia* (London: The Macmillan Press Ltd., 1981).
- Robison, Richard, *The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986).
- Sargent, Clyde B., "The Chinese Mind: A Probing and Exploration," *Naval War College Review* (January, 1972).
- Sato, Shigeru, *War, Nationalism and Peasants* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1994).
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Sydney: Allen & Unwin, 1994).
- Seagrave, Sterling, *Lords of the Rim: The Invisible Empire of the Overseas Chinese* (London: Corgi Books, 1996).
- Shoelhi, Mohammad, "Mencermati Kebangkitan Ekonomi Cina," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Profil Indonesia*, Jurnal Tahunan CIDES, No. 1 (1994).
- Soedradjat, Setyo, "Sikap Mental dan Pembangunan" dalam *Buletin Yaperna: Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan*, No. 11, tahun III (Jakarta: 1976).
- Soeharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989).
- Suryadinata, Leo, "Indonesia Policies Towards the Chinese Mi-

nority under the New Regime," *Asian Survey* XII (8: Agustus 19976).

———, *China and Asian States: Chinese Dimension* (Singapore: Singapore University Press, 1985).

———, *Dilema Minoritas Tionghoa*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Wilandari Supardan (Jakarta: Grafiti Pers, 1986).

———, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien* (Jakarta: LP3ES, 1990).

———, "Kong Hu Cuisme dan Agama Kong Hu Cu di Indonesia: Sebuah Kajian Awal," dalam *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Seri Dian III Tahun II (Yogyakarta: Interfidei, 1995).

Tan, Mely G., "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia," *Prisma* (8: Agustus 1976).

———, "The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues and Implications," dalam Leo Suryadinata (ed.), *Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension* (Singapore: Times Academic Press, 1995).

———, "Usaha Ekonomi Etnis Cina di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis" dalam *Etika Bisnis Cina* (Jakarta: PCP Universitas Nasional dan Gramedia, 1996).

Tap-Tap MPR 1993, P4, UUD '45 (Jakarta: Bina Mulia, tt.), Bab II Pembangunan Nasional.

Thee Kian Wie, "Deng Xiaoping dan Pembaharuan Ekonomi di RRC," *Kompas*, 5 Maret 1997.

Townsend, James R. and Womack, Brantly, *Politics in China* (Illinois & London: Scott, Foresman and Company, 1986).

Wahono, Riyanto D. (ed.), *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat*

- Kunci Pembauran* (Jakarta: PT. Bina Pariwisata, 1997).
- Wanandi, Jusuf, "The Trend Toward Military Built-Up and Arms Proliferation in the Asia-Pacific Region," (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, Monograph No. 104, 1993).
- Weber, Max, *The Religion of China: Confucianism and Taoism*, diterjemahkan dan disunting dari bahasa Jerman oleh Hans H. Gerth (New York: The Free Press, 1964)
- Weidenbaum, Murray dan Hughes, Samuel, *Jaringan Pengusaha Tirai Bambu: Bagaimana Pengusaha Cina Perantauan Menciptakan Adidaya Ekonomi Baru di Asia*, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusli (Jakarta: Prenhallindo, 1996).
- Wibisono, Christianto, "Terobosan Menteri Nonpri," *Panji Masyarakat*, 19 Mei 1997.
- Wibowo, I., "Dari Huntington sampai Deng Xiaoping: Sebuah Renungan pada Akhir Masa Deng," *Kompas*, 4-5 Maret 1997.
- Wolters, O.W., *The Fall of Srivijaya in Malay History* (London: Lund Humphries, 1970).
- Wyatt, David K., *Thailand: A Short History* (New Haven & London: Yale University Press, 1984).
- Yusuf, S., "China's Macroeconomic Performance and Management during Transition," *Journal of Economic Perspectives*, 8/2 (Spring 1994).

.....

Indeks

A

Aceh 183
Afghanistan 81
Afrika 14
Afrika Timur 47, 84
Albuquerque, Alfonso de 49
Ali, Mu'min 140
Ali-Baba 23
All Engiand 131
Ambon 55
Amerika 166; AS 102 Amerika Latin 14; Amerika Serikat 81, 129; Amerika Utara 7
Angkatan Darat 73, 74, 75
Annam 31, 43
Anyer 59
Arab 2, 31, 32, 36, 48, 61, 79, 150, 165
ASEAN 121, 122, 123
Asia 7; Asia Pasifik 102; Asia Selatan 14; Asia Tenggara 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 138, 166, 195; Asia Timur 102, 145
Asian Development Bank (ADB) 12

Astra 140

Ayutthaya 48

B

Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BPKI) 71
Bakom-PKB 78, 116, 125
Bakrie, Aburizal 146
Bali 43
Bambang Trihatmodjo 122
Banda 56
Bandung 76
Bank Duta 140
Banten 50
Baperki 71, 72, 74, 75, 124
Bapindo 147
Batak 183
Batavia 55, 56
Beijing 101, 105, 115
Belanda 22, 34, 49, 55, 57, 150, 152, 166
Bhayaraja 44
Bhutan 81
Bimantara 122
Bosch, van den 60

- Broek, Jan OM 62
 Brugmans, Antony 140
 Brunei 101, 121, 123
 Buddha 32, 37, 117, 118, 167
 Buddhisme 19, 154
 Budiman, Arief 131
 Buka, Arik 41
- C**
 Caitson 52
 Calvinisme 176
 Canton 37, 49
 Champa 42, 43
 Chao Ju-Kua 51
 Cheng, David 137
 Cheng Ho 46
 Chenla 35
 Chia Chi 32
 Chinese follow the trade 33
 Chun Yung 168
 Chun-Tzu 167, 168
 Chung Hua Hui (CHH) 67, 68, 69, 70, 128
 Cina 1, 2, 7, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 49, 50, 52, 55, 65, 70, 82, 103, 104, 113, 150, 154, 157, 159, 165, 166, 171, 187, 195; daratan 2, 20, 26, 107, 195; peranakan 114; Perantauan 1, 27, 109, 121, 195; Raya 82, 107, 112, 157; totok 114, 120, 152; Mongol 43, 45, 46; anti-Cina 72, 77, 145, 149
 Ciputra 140
 Cirebon 50, 76
 Coen, Jan Pieterszoon 53
 Communist Manifesto 88
 Coppel, Charles A. 78
 CSIS 116
 Cultuur Stelsel 60
- D**
 Daendels 59
 Data Consult 122
 Demak 50
 Deng Xiaoping 86, 87, 90
 Dewan Gereja se-Dunia 118
 Dharmamayan 43
 Dharmawangsa 39
 Di Nata, Dicky Iskandar 140
 Dolon Nor 41
 Dunia Ketiga 13, 15, 98
 Dunia Pertama 15
 Dwikora 137
- E**
 Eropa 33, 34, 49, 52, 57, 159, 160, 166; Barat 7, 40; Timur 40
- F**
 Fa Hien 31
 Fatahillah 51
 Filipina 50, 101, 121, 123
 Fukien 30
 Funan 35
 Furnivall, J.S. 57
- G**
 G 30 S/PKI 8, 116, 119, 125
 G-7 16
 GBHN 127
 Geertz, Clifford 176
 Gemala 140
 Gerakan Assaat 73
 Glodok 76
 Goa 49
 Golkar 10, 116, 131
 Gondokusumo, Soehargo 120
 Greater China 82
 Grief, Stuart W. 129
 Guangdong 94, 109

- Guangzhou 109
Guanxi 106, 107
Gurun Gobi 40
- H**
H. Samanhudi 67
H.H. Kan 67
Hadi W.M. , Abdul 131
Hamka, Buya 129
Han 83
Han Ti Ko 59
Hartono, Rudy 131
Hartono 123
Herbert, Sir Thomas 52
Heryanto, Ariel 131
Ho Chi Min City 35
Hong Kong 102, 108
Huaqiao 154
Humpus 122
- I**
I Ching 31, 32, 37, 38
Imlek 127
Indah Kiat Pulp & Paper 142
India 31, 36, 37, 39, 81, 99, 101, 102, 150, 165
Indocina 31, 35
Indonesia 14, 16, 17, 34, 101, 120, 121, 122, 123, 146, 153
Inggris 34, 49, 50
Injo Beng Goat 75
International Monetary Fund (IMF) 12, 97
Irwan, Alexander 145
Islam 119, 120, 128, 154
Islam, Inayatul 47, 48, 49,
- J**
Jahja, Junus 113, 116, 117, 119, 128, 149
Jakarta 61, 70, 115
Jambi 48
Jawa 34, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 75, 124; Barat 74, 118; Timur 44, 51
Jayakatwang 44, 45
Jen 167, 168
Jenggala 43
Jepang 84, 85, 99, 101, 102, 117, 118; masuknya Jepang ke Cina 85
Jiang Zemin 89
Jikomusu 44
Johor 48
Judohusodo, Siswono 131
- K**
Kalimantan Barat 34, 58
Kamar Dagang Cina 66, 76
Kamboja 35, 43
Kampar 48
Kanton 109
Kartasasmita, Ginanjar 143
Karya, Teguh 131
Katolik 10, 117
Kazakhstan 81
Kediri 40, 43, 44
Kelantan 48
Kertanegara 43
Khan, Jenghis 40, 41
Khan, Kubilai 41, 42, 43, 45
Khan Agung 45
Khrushchev 85
Kluckhohn, Florence 158
Koentjaraningrat 158
Komisi Yuris Internasional 118
komunis 20, 67, 125
Kong Hu Chu 19, 82, 83, 118, 162, 167
Konvensi Para Pedagang Cina

- se-Dunia 108
Korea 30, 99; Selatan 14, 101, 102;
Korea Utara 81, 101
Kosasih 74
Kristen 10, 117
Kuok, Robert 108
Kuomintang 21, 30, 67, 85
Kwangsi 30
Kwangtung 30, 31, 49
Kwee Hing Tjiat 68
Kwik Kian Gie 131, 144
- L**
Landraden 61
Laos 81
Lauwchuantho 119
Lee Kuan Yew 108
Li 167, 168
Li Ka Shing 108
liberte, egalite, fraternite 16
Lie Tek Tjeng 89, 131
Liem Sioe Liong 79, 120, 139, 140
Lindblom, Charles 24
Liu Shaoqi 86
Lo SH Ginting 116
LPKB 125
- M**
Mada, Gajah 45
Madura 44
Majapahit 35, 40, 45, 47, 48
Makau 101, 102
Malaka 48, 49
Malari 77
Malaysia 101, 108, 121, 123, 146
Manchu 54
Manchuria 83
Manila 34
Mao Zedong 30, 85, 86, 89
Martaban 43
- Marx, Karl 88
Marxis 89; Marxisme 88
Matakin 118
Mataram 57
Medan 76, 77
Meja Bundar 71
Mekong 31
Melayu 38, 49
Meng Ki 43
Minangkabau 124, 183
Mitreka Satata 43, 44
Moeljosemito, Rachmat 74
Mon 31
Mongol 30, 40, 41, 81, 83
MPRS 126
Muhammadiyah 119
Musi 35
Myanmar 81
- N**
Nahdlatul Ulama (NU) 10, 74
Nalanda 37, 38
Napoleon I 58
Nasakom 166
Nathan, Andrew 101
National Gobel 140
Nepal 81
NSI 117
- O**
Oc-Eo 35
Oei, Haji Abdul Karim 119
Oei Tjoe Tat 74, 137
Ojong, P.K. 75, 118
Ong Eng Die 137
Overholt, William 92
- P**
P'ie 167
Pahang 43, 48

- Pakistan 81
 Pakubuwono II 57
 Palembang 46, 48, 58
 Panarukan 59
 Pancasila 7, 11, 21
 Pangestu, Mari 131
 Pangestu, Prajogo 120, 123
 Panjalu 43
 Panyu 109
 Pao An Tui 71
 Paraku 77
 Parameswara 48, 49
 Parera, Frans M. 118
 Parmusi 10
 Paroki Mangga Besar 118
 Partai Arab Indonesia 69
 Partai Demokrasi Indonesia 10
 Partai Katolik 119
 Partai Komunis Indonesia (PKI)
 8, 21, 72, 74, 75, 76
 Partai Persatuan Pembangunan
 (PPP) 10
 Partai Tionghwa Indonesia (PTI)
 68, 69
 Pasai 49
 PAT 69
 PBB 99
 PDB 184
 PDI 10, 131
 Pembina Iman Tauhid Islam
 (PITI) 119
 Pemerintahan Parlementer 6
 Pengadilan Eropa 61
 Pengadilan Pribumi 61
 Perancis 59, 84
 Perang Candu 84
 Perang Dingin 98
 Perang Dunia Kedua 85, 119
 Perang Korea 85
 Perang Teluk 102
 Perbudhi 118
 Perguruan Tinggi Nalanda 37
 Periode Liberal 63
 Periode Liberal 60
 Perjanjian Nanjing 84
 Perkumpulan Kristen Tionghoa
 118
 Persatuan Islam Tionghoa 119
 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)
 128
 Perti 10
 PGRS 77
 Piagam Asimilasi 125
 PKC 85, 86, 87, 88, 90
 PNI 10
 Pnom Penh 35
 Politik Benteng 72, 161
 Politik Etis 63, 64
 Polo, Marco 45
 Portugis 34, 49, 50, 51
 possu 32, 37
 PPB 12
 Pragmatisme Deng 87
 Presidentil 6
 Probolinggo 59
 Protestan 128
 PSII 10
 Putra, Hutomo Mandala 122

Q
 Qin 82, 83
 Qing 84

R
 Rachmat, Teddy P. 140
Raden van Justitie 61
 Raffles, Stamford 59
 Rangkah, Mahesa 44
 Redding, Gordon 165
 Rengasdengklok 77

- Revolusi Kebudayaan 86, 89
Riantiarno, Nano 131
Ross, Robert 101
RRC 26, 73, 74, 81, 82, 86, 89, 90,
91, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 109, 115, 142,
143, 146; berdiri pada 85
Rusia 81, 84, 99, 101, 102
Ryadi, James 139
Ryady, Mochtar 120, 139, 140
- S**
Sailendra 38
Salim, Anthony 139
Salim, Soedono 121, 123
Sambas 58
Sampoerna 123
Samudera Pasifik 102
Sanjaya, Wangsa 38
Sansekerta 37
SARA 78
Sarekat Dagang Islam (SDI) 67
Sastroamidjojo, Ali 137
Schwarz, Adam 115, 120
Seda, Frans 119
Selat Malaka 35
Semarang 61, 149
Semenanjung Melayu 43, 48, 50,
51
Senosoenoto 117
Sequeira, Diego Lopes de 49
Shah, Megat Iskandar 49
Shenzhen 109
Siak 48
Siam 43, 48
Siang Hwees 66
Siauwi Giok Tjhan 72, 74, 75
Sin Po 69
Sinar Mas Group 139, 142, 143
Sindhunata, K. 116
Singapura 14, 108, 121, 123, 146
Singosari 40, 43
Situbondo 77
Soedarpo, Shanti 139
Soekarno 73, 74, 75, 166
Soerjadaja, Edward 140, 141
Soerjadaja, William 141
Solo 77, 149
Spanyol 34, 49, 50
Srilanka 56
Sriwijaya 32, 33, 35, 36, 37, 39, 46,
52
Stalin 85
Sukabumi 76
Sukamdani, Yanti 139
Sukarno 77
Sumatera 43, 48
Sun Yat-sen 84
Sunan Gunung Jati 51
Sunda 43, 51, 124
Sunda Kelapa 51
Sung 32
Sungai Brantas 45
Sungai Mutiara 109
Surabaya 61, 76
Suryadinata, Leo 76, 113, 115, 153
Suryo, RM Tirto Adi 67
Sutantyo, Teguh 120
Swatantra I 73
- T**
Taher, Yamin 140
Taipei 115
Taiwan 14, 101, 102, 115
Tajikistan 81, 101
Tan, Mely G. 131, 164
Tan Kiem Liong 137
Tan Ling Djie 74
Tan Siong Kie 120
Tanam Paksa 60

- Tanjung Harapan 56
Tanzil, Edi 147
Tao 167
Taoisme 19, 167
Tartar 83
Tasikmalaya 77, 148
Te 167
Teh 167
Teluk Persia 47
Teluk Siam 31
Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) 99, 100, 101, 102
Thailand 45, 108, 121, 123, 146, 153, 154
The Nin King 120
Thee Kian Wie 131
Tiananmen 88, 89
Timbergen, J. 179
Timor Timur 50
Timur Asing 21, 61, 150, 159
Timur Tengah 31, 40
Tiong Hwa Hwe Koen (THHK) 65, 66, 67, 68
Tionghoa 113, 120
Tjoa Sik Ien 68
Tongkin 42
Trengganu Selatan 48
Tuban 44, 51
Tumasik 48
Tzu 167
Tzu Yan 167
- U
Ujung Pandang 149
Ukraina 101
Uni Soviet 74, 81, 85, 86
Unilever 140
UUD 1945 7
- V
Valckenier 56
Vereeningde Oostindiesche Compagnie (VOC) 50, 53, 54, 55, 58
Vietnam 31, 32, 45, 81, 99, 101, 102
Vreemde Oosterlingen 61, 150, 159
- W
Wanandi, Jusuf 131
Wanandi, Sofyan 140
Wen 168
Widjaja, Eka Tjipta 120, 121, 123, 139, 140, 142
Widjaja, Indra 139
Wijaya, Raden 44, 45
WNI Cina 79
Wonowidjoyo 123
World Bank 12
Wu Wei 167
Wuhan 84
Wuruk, Hayam 45, 46
- Y
Yahudi 166
Yao Shi 41
Yap A. Siong 119
Yap Thiam Hien 75, 118, 131
Yayasan Pendidikan Gereja Indonesia 118
Yayasan Ukhuwah Islamiah 119
Yunan 83
Yung Lo 47
- Z
Zhao Ziyang 88
Zhongguo 109
Zhuhai 109

2.

2.

Riwayat Hidup Penulis

Dr. H. Tarmizi Taher, yang sejak 1993 menjabat Menteri Agama Republik Indonesia, lahir di Padang, 7 Oktober 1936. Sebelum menduduki posisi tertinggi di Departemen Agama, ia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Departemen yang sama mulai 1987 - 1993. Saat itu ia pensiun dari karir militernya di Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Madya.

Lulus dari Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Surabaya pada 1964, Tarmizi memulai karirnya di Angkatan Laut sebagai perwira kesehatan. Namun, karena latar belakangnya dari keluarga yang kuat beragama, dan memiliki pengetahuan luas dalam psikologi, pada 1979 Tarmizi dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Bimbingan Mental Angkatan Laut (Kadisbintal-AL). Hanya dalam waktu satu tahun, Tarmizi kembali mendapat promosi dan dipercaya menjadi Wakil Kepala Pusat Bimbingan Mental Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Wakapusbintal-ABRI).

Sepanjang karirnya di Angkatan Laut, Tarmizi memperoleh kesempatan mengikuti berbagai program latihan lanjutan. Pada 1972, misalnya, ia menjadi peserta Job Training yang diadakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di San Diego, California. Pada 1975 ia juga berkesempatan mengikuti Program Studi Kedokteran bagi Perwira Senior yang diadakan oleh lembaga yang sama di Washington

D.C. Tahun berikutnya ia mengikuti Sekolah Staf Komando (Sesko) yang diadakan oleh Angkatan Laut RI. Pada 1991 ia kembali ke Pittsburgh, Amerika Serikat, untuk mengikuti Kursus Manajemen Strategis (Strategic Management Course).

Di samping meniti karir militer dan sipil, Tarmizi sejak lama aktif dalam organisasi non-pemerintah. Ia juga dikenal sebagai aktivis pada waktu masih mahasiswa. Pada 1962 ia menduduki kursi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga. Satu tahun kemudian ia terpilih menjadi Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas tersebut. Jabatan ketua Dema merupakan posisi puncak organisasi intra kemahasiswaan. Setamat dari Universitas Airlangga, Tarmizi kemudian aktif dalam kegiatan dakwah di berbagai kalangan dan tempat. Pengalamannya ini kemudian mengantarnya dipercaya memegang jabatan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) pada 1972, dan menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1985. Tarmizi juga pernah menduduki kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama dua periode (1978 & 1982) mewakili fraksi ABRI, di samping, sebagai seorang dokter, ia dipercaya memegang jabatan Wakil Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (PPTI) pada 1975.

Sampai saat ini Tarmizi aktif menjadi instruktur dan dosen dalam berbagai program latihan. Di samping menjadi nara sumber dalam kegiatan diskusi dan seminar, sejak 1984 ia menjadi instruktur tingkat nasional program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ia adalah juga dosen di Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Sesko-ABRI) serta Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

Karya-karya tulis Tarmizi, baik berupa artikel maupun esai, dimuat di beberapa media massa nasional. Sejak awal karirnya, ia termasuk figur yang aktif menuangkan gagasan-gagasannya melalui tulisan. Di antara beberapa

buku karyanya adalah *Demokrasi Pancasila* (1975); *T.B. among Armed Forces Dependents* (1978); *Masalah Cina dalam Kewaspadaan Nasional* (1980); dan *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (1997) yang, selain terbit dalam edisi bahasa Inggris, juga diterbitkan dalam edisi bahasa Arab.

Atas dasar pengabdian dan jasanya kepada negara, Tarmizi Taher dianugerahi Bintang Mahaputera Adhipradana oleh pemerintah Indonesia pada Agustus 1996.

